Danantara Indonesia

PLN Suku Cadang

BUILD A **STRONG FOUNDATION**

MEMBANGUN **PONDASI** YANG KOKOH



2025

Laporan Terintegrasi
Integrated Report

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

Daftar Isi
Content

Daftar Isi Content	1
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4

01 Kilas Kinerja 2025
2025 Performance Overview

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	8
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	10
Ikhtisar Saham Stock Highlights	10
Ikhtisar Obligasi dan Efek Lainnya Bonds and/or Other Securities Listing Highlights	11
Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau Pembatalan Pencatatan Saham (Delisting) Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Stock Listing Deletion (Delisting)	11
Aksi Korporasi Corporate Action	11
Peristiwa Penting Tahun 2025 Key Events in 2025	12
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	20

02 Laporan Manajemen
Management Report

Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners	24
Laporan Direksi Report of the Board of Directors	34
Tanggung Jawab Atas Laporan Terintegrasi 2025 Statement Letter of Responsibility for Integrated Report 2025	47

03 Profil Perusahaan
Company Profile

Identitas Perusahaan Corporate Identify	50
Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	52
Makna dan Logo Perusahaan Corporate Logo and Meaning	54
Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Core Value	55
Maksud dan Tujuan Perusahaan Corporate Purpose and Objectives	59
Produk dan Layanan Products and Services	61
Wilayah Operasional Operational Area	64
Struktur Organisasi Organization Structure	66
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	70
Profil Direksi Board of Directors Profile	73
Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Changes to the Composition of the Board of Commissionersand Board of Directors	78
Informasi Pemegang Saham Shareholders Information	80
Kronologi Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia Chronology of Stock Listing on the Indonesia Stock Exchange	82
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing	82
Struktur Grup Perseroan Structure of Company Group	83
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	84
Lembaga dan Profesional Penunjang Perusahaan Institutions and Professionals Supporting the Company	84
Informasi Jumlah Karyawan Information on the Number of Employees	85
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development	87
Informasi Pada Website Perusahaan Information on the Company Website	89

04 Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Review

Sumber Daya Manusia Human Resources	94
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Human Resource Management Strategy	95
Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Resource Development	97
Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen Recruitment Policy and Implementation	98
Manajemen dan Penilaian Kinerja Performance Management and Appraisal	100
Implementasi Budaya Perusahaan Corporate Culture Implementation	101
Pengembangan Karir Career Development	104
Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan Employee Remuneration and Welfare	104
Pengembangan Kompetensi Competency Development	106
Teknologi Informasi Information Technology	113
Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance	114
Arsitektur Teknologi Informasi Information Technology Architecture	115
Strategi Teknologi Informasi Perusahaan Corporate Information Technology Strategy	116
Realisasi Program Kerja Sistem Teknologi Informasi Tahun 2025 Information Technology System Performance Achievements in 2025	118
Arah Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2026 Directions for Information Technology Development in 2026	119

05 Analisis dan Pembahasan manajemen
Management Discussion and Analysis

Tinjauan Perekonomian Makroekonomi Macroeconomic Overview	122
Tinjauan Industri Industry Overview	124
Strategi Utama Perusahaan Tahun 2025 Company's Main Strategy in 2025	125
Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar Marketing Aspects and Market Share	129
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Overview of Operations Per Business Segment	130
Tinjauan Keuangan Financial Overview	131
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang Debt Repayment Capacity and Receivables Collectibility	145
Struktur Permodalan Capital Structure	147
Prospek Usaha dan Strategi 2025 Business Outlook and Strategy for 2025	152
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts After the Auditor's Reporting Date	155
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Foreign Exchange Rate Risk	156
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen Policies, Announcements, and Payments of Dividends	156
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan Policy on Performance-Based Long-Term Compensation for Management and/or Employees	157
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering	157
Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Material Information Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates	158
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Changes in Laws and Regulations That Significantly Affect the Company	162
Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	163
Penilaian Kinerja Korporat Corporate Performance Assessment	164

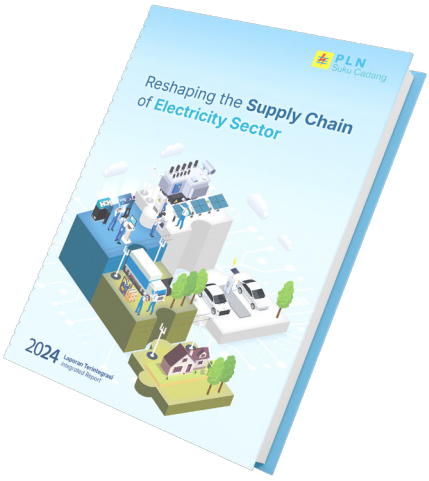
06 Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance	170
Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Basis for the Implementation of Corporate Governance	171
Roadmap Penerapan GCG GCG Implementation Roadmap	173
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism	177
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance	178
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (GMS)	182
Dewan Komisaris Board of Commissioners	189
Direksi Board of Directors	202
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	216
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi Affiliation Relationship of the Board of Commissioners and Directors	218
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Policy and Procedure of the Board of Commissioners' Remuneration	219
Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees Under the Board of Commissioners	220
Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi Executive in Charge of the Nomination and Remuneration Function	227
Organ Pendukung Direksi Supporting Organ of the Board of Directors	229
Satuan Pengawas Intern Internal Audit Unit	233
Auditor Eksternal External Auditor	239
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	242
Manajemen Risiko Risk Management	246
Kode Etik Code of Ethics	257
Budaya Perusahaan Corporate Culture	260
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	261
PLNSC Bersih PLNSC Clean	265
Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control	266
Perkara Penting & Sanksi Administrasi Significant Cases & Administrative Sanctions	268
Akses Informasi Perusahaan Company Information Access	269
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	271
Praktik Bad Corporate Governance Bad Corporate Governance Practices	273

07 Laporan Keberlanjutan
Sustainability Report

Strategi dan Nilai Keberlanjutan Sustainability Strategy and Values	276
Landasan Pelaksanaan Basis for Implementation	278
Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Support for the Sustainable Development Goals (SDGs)	279
Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan Sustainability Culture Development Activities	280
Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement	280
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Lingkungan Corporate Social Responsibility Environmental Aspects	284
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Ketenagakerjaan Corporate Social Responsibility Occupational Aspects	287
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Community Aspects	290
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Pelanggan Corporate Social Responsibility Customer Aspects	294

Kesinambungan Tema
Theme Continuity



2024

Reshaping the Supply Chain of Electricity Sector

Pada tahun 2024, Perseroan menetapkan tema Reshaping the Supply Chain of Electricity Sector sebagai arah strategis PT PLN Suku Cadang dalam memperkuat peran Perseroan di sektor ketenagalistrikan nasional. Hal ini diperkuat dengan memiliki berbagai strategi dalam meningkatkan pendapatan melalui implementasi manajemen inventory (Stockiest), peningkatan kolaborasi ekosistem bisnis untuk meningkatkan penetrasi pasar di luar pembangkit dan industri sejenis. PT PLN Suku Cadang juga terus berupaya meningkatkan partnership dengan mitra bisnis untuk mengembangkan penetrasi pasar di luar pembangkit.

Rangkaian inisiatif strategi ini lainnya juga diimplementasikan melalui program pengembangan pasar ke segmen Pembangkit Eksisiting, Energi Baru Terbarukan dan Pelanggan Non Pembangkit, Integrasi dan sinergi data teknis suku cadang pembangkit dan Pengembangan Warehousing Management System. Selain itu, PT PLN Suku Cadang senantiasa memfokuskan pelanggan bisnisnya bukan hanya dari PLN Group namun juga di luar PLN Group.

Dengan berbagai strategi telah dijalankan agar Perseroan mampu menghasilkan peningkatan kinerja operasional dan kesehatan keuangan yang signifikan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi transformasi berkelanjutan. Dalam menguatkan transformasi berkelanjutan ini, Perseroan berupaya meningkatkan peluang pasar baru bagi pembangkit Listrik berbasis ramah lingkungan yang merupakan komitmen Perseroan dalam mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Melalui berbekal capaian tersebut, PT PLN Suku Cadang berkomitmen untuk menghadirkan solusi rantai pasok yang lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif melalui sinergi data teknis bersama para pemangku kepentingan utama. Hal ini pula didorong eksistensi peran PT PLN Suku Cadang sebagai penyedia solusi supply chain yang dapat membentuk ekosistem keberlanjutan dan tatanan baru dalam solusi manajemen pengadaan dan rantai pasok di industri ketenagalistrikan di Indonesia.

In 2024, the Company established the theme “Reshaping the Supply Chain of Electricity Sector “ as PT PLN Suku Cadang’s strategic direction to strengthen the Company’s role in the national electricity sector. This is reinforced by implementing various strategies to increase revenue through inventory management (Stockiest) and enhancing collaboration within the business ecosystem to expand market penetration beyond power plants and similar industries. PT PLN Suku Cadang continues to strive to strengthen partnerships with its business partners to expand market penetration beyond power plants.

This series of strategic initiatives is also implemented through market development programs for Existing Power Plants, New and Renewable Energy, and Non-Power Plant Customer segments, as well as the Integration and Synergy of Technical Data for Power Plant Spare Parts and the Development of a Warehousing Management System. Moreover, PT PLN Suku Cadang continues to focus on its business customers, not only those within the PLN Group but also those outside the PLN Group.

Various strategies have been implemented to enable the Company to deliver significant improvements in operational performance and financial health, while also building a solid foundation for sustainable transformation. In strengthening this sustainable transformation, the Company seeks to increase new market opportunities for environmentally friendly power plants, which is the Company’s commitment to achieving the Net Zero Emission target by 2060.

Armed with these achievements, PT PLN Suku Cadang is committed to delivering more integrated, efficient, and adaptive supply chain solutions through technical data synergy with key stakeholders. This is also driven by the existence of PT PLN Suku Cadang’s role as a supply chain solutions provider that can shape a new sustainable ecosystem and order in procurement and supply chain management solutions within the Indonesian electricity industry.



2025

Build a Strong Foundation

Selama tahun 2025, PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (“PLN Suku Cadang” atau “Perseroan”) terus berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan suku cadang guna mendukung operasional dan pemeliharaan infrastrutkur ketenagalistrikan yang handal dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut serta memastikan pertumbuhan dan perkembangan PLN Suku Cadang secara berkelanjutan, Perseroan telah menyusun strategi pengembangan untuk tahun 2025 antara lain melalui optimalisasi rantai pasok dengan memperkuat kemitraan dengan produsen lokal dan internasional, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi suku cadang di berbagai wilayah, implementasi teknologi manajemen inventaris yang canggih serta memastikan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak dan meminimalkan waktu henti.

Untuk memastikan pertumbuhan secara berkelanjutan, pada tahun 2025, Perseroan juga terus membangun fondasi yang kokoh dengan menetapkan arah pengembangan perusahaan sesuai mandat dan aspirasi Pemegang Saham. Berdasarkan arahan Pemegang Saham, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat pemenuhan prinsip sustainability baik dalam aspek keuangan maupun operasional seiring pengembangan model bisnis berbasis Risiko dan penguatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Melalui implementasi strategi selama tahun 2025, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh dan berkembang secara signifikan yang tidak hanya didorong oleh bisnis pengadaan suku cadang pembangkit listrik namun terus berinovasi dalam mengembangkan model bisnis baru. Komitmen tersebut diharapkan tidak hanya menjamin keandalan operasional tetapi juga mendukung keberlanjutan dan efisiensi biaya secara jangka panjang.

Throughout 2025, PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (“PLN Suku Cadang” or the “Company”) remained committed to enhance the availability and reliability of spare parts to support the reliable and efficient operation and maintenance of electricity infrastructure. To achieve this objective and ensure the Company’s sustainable growth and development, the Company established its development strategies for 2025, including optimizing the supply chain by strengthening partnerships with local and international manufacturers, enhancing spare parts storage and distribution capacity across various regions, implementing advanced inventory management technology, and ensuring a rapid response to urgent requirements while minimizing downtime.

To ensure sustainable growth, the Company also continued to build strong foundation in 2025 by establishing its corporate development direction in line with the mandate and aspirations of the Shareholders. Based on the Shareholders’ direction, the Company remained committed to strengthening the implementation of sustainability principles in both financial and operational aspects, alongside the development of a risk-based business model and the enhancement of human capital capabilities.

Through the implementation of these strategies throughout 2025, the Company sought to achieve sustained and significant growth driven not only by its power plant spare parts procurement business but also by continuous innovation in developing new business models. This commitment is expected not only to ensure operational reliability but also to support long-term sustainability and cost efficiency.



Kilas Kinerja 2025

2025 Performance Overview

01

Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlights

Tabel Ikhtisar Keuangan
Table of Financial Highlights [POJK C.3]

(dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah)

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position					
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	**1.181.949**	637.642	614.246	352.485	188.405
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	**314.580**	233.578	164.001	85.955	104.825
Jumlah Aset Total Assets	**1.496.529**	871.220	778.247	438.440	293.230
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	**1.027.976**	536.361	510.120	197.902	84.794
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	**1.487**	1.218	637	2.313	914
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.029.463**	537.579	510.757	200.215	85.708
Jumlah Ekuitas Total Equity	**467.066**	333.641	267.490	238.225	207.522
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**1.496.529**	871.220	778.247	438.440	293.230
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Revenue	**1.977.357**	1.687.699	887.976	506.510	261.839
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	**(1.699.030)**	(1.495.516)	(780.200)	(426.409)	(211.905)
Laba Bruto Gross Profit	**278.327**	192.183	107.776	80.101	49.934
Beban Usaha Operating Expenses	**(56.665)**	(53.838)	(46.798)	(35.535)	(30.447)
Laba Usaha Operating Income	**221.662**	138.345	60.978	44.566	19.487
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	**177.785**	101.288	52.863	41.331	16.881
Beban Pajak Tax Expense	**(44.369)**	(35.193)	(23.599)	(10.640)	(5.217)
Laba Tahun Berjalan Profit For The Year	**133.416**	66.095	29.264	30.691	11.664
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	**133.425**	66.151	29.265	30.703	11.664

Keterangan Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Keuangan Financial Ratio					
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Return on Assets (ROA) (%)	**8,92**	7,59	3,76	7,00	3,98
Return on Equity (ROE) (%)	**28,57**	19,81	10,94	12,88	5,62
Gross Profit Margin (%)	**14,08**	11,39	12,14	15,81	19,07
Operating Profit Margin (%)	**11,21**	8,20	6,87	8,80	7,44
Net Profit Margin (%)	**6,75**	3,92	3,30	6,06	4,45
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Cash Ratio (%)	**0,10**	0,18	0,35	0,59	1,17
Current Ratio (%)	**1,15**	1,19	1,20	1,78	2,22
Quick Ratio (%)	**1,05**	0,88	2,68	3,90	1,71
Working Capital Ratio (%)	**1,15**	1,63	1,20	1,78	2,22
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Debt to Asset Ratio (%)	**0,69**	0,62	0,66	0,46	0,29
Debt to Equity Ratio (%)	**2,20**	1,61	1,91	0,84	0,41
Rasio Operasional Operational Ratio					
Inventory Turnover Ratio (in days)	**29**	40,51	81,48	14,42	15,77
Average Collection Period (in days)	**151,69**	48,93	83,08	127,59	47,18
Efficiency Ratio (%)	**85,92**	88,61	87,86	84,19	80,93
Laporan Arus Kas Cash Flows Report					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	**(153.937)**	31.994	(35.691)	21.622	72.033
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	**9.524**	(18.256)	-	-	190
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	**158.166**	111.425	96.555	(2.662)	(3.412)
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net (Decrease)/Increase in Cash and Cash Equivalents	**13.753**	(97.687)	60.864	18.960	68.413
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	**80.925**	178.615	117.747	98.826	30.411
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**94.678**	80.925	178.615	117.747	98.826

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan
Sustainability Performance Highlights

Tabel Ikhtisar Kinerja Operasional
Table of Operational Performance Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Aspek Lingkungan Hidup Environmental Aspects [POJK B.2]				
Pemakaian Listrik Electricity Usage	KWh	**148.768**	156.898	136.680
Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Terselesaikan Number and Content of Environmental Complaints Received and Resolved	Kasus Case	**-**	-	-

Tabel Aspek Sosial
Table of Social Aspects

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	2023
Aspek Sosial Social Aspects [POJK B.3]				
Total Kecelakaan Kerja Fatal Total Fatal Workplace Accidents	Kasus Case	**-**	-	-
Nilai Kepuasan Pelanggan (CSI) Customer Satisfaction Index (CSI)	Skor Score	**85,66**	85,64	83,94

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Hingga akhir tahun 2025, PLNSC masih merupakan perusahaan tertutup yang tidak tercatat di bursa saham, sehingga tidak memiliki kode saham dan sahamnya tidak diperdagangkan secara publik. Dengan demikian, informasi terkait kinerja saham Perseroan tidak tersedia dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of the end of 2025, PLNSC remains a privately held company, not listed on a stock exchange. Therefore, it does not have a ticker code and its shares are not publicly traded. Thus, information regarding the Company's stock performance is not available.

Ikhtisar Obligasi dan Efek Lainnya
Bonds and/or Other Securities Listing Highlights

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan obligasi maupun efek lainnya di bursa saham mana pun. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki ikhtisar pencatatan obligasi atau efek lainnya untuk disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of the end of 2025, the Company has not issued bonds or other securities on any stock exchange. Therefore, the Company does not have a summary of listed bonds or other securities in this Integrated Report.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Pembatalan Pencatatan Saham (*Delisting*)
Temporary Suspension of Stock Trading (Suspension) and/or Stock Listing Deletion (Delisting)

Saat ini PLNSC tidak terdaftar di bursa saham, sehingga tidak memiliki kode saham dan tidak diperdagangkan secara publik. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi terkait penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun pembatalan pencatatan saham (*delisting*).

PLNSC is not listed on a stock exchange, so it does not have a ticker code and is not publicly traded. Therefore, the Company has no information regarding any temporary suspension or delisting of its shares.

Aksi Korporasi
Corporate Action

Sepanjang tahun 2025, PLNSC tidak melakukan kegiatan merger maupun akuisisi dengan entitas lain. Selain itu, Perseroan juga tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham selama periode pelaporan tersebut. Dengan demikian, Perseroan tidak mencatatkan aksi korporasi berupa merger maupun pembagian dividen dalam Laporan Terintegrasi ini.

Throughout 2025, PLNSC did not undertake any acquisitions or mergers with other entities. Furthermore, the Company did not distribute dividends to shareholders during the reporting period. Therefore, the Company does not record any corporate actions in the form of mergers or dividend distributions in this Integrated Report.

Peristiwa Penting Tahun 2025
Key Events in 2025

13 Februari I February **2025**



- Penyelenggarakan Rapat Kerja Perusahaan dengan tema "*Growing Together*" yang dihadiri oleh Direksi, manajemen, dan juga karyawan. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Perusahaan atas capaian Kinerja Pendapatan Perusahaan tahun 2024. Selain itu, disampaikan juga bahwa terlepas dari pencapaian tersebut, *improvement* dan fokus kepada manajemen risiko tetap harus dilakukan.
- Penandatanganan komitmen sebagai pemenuhan kebijakan strategis Manajemen Kepatuhan dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan karyawan. Komitmen tersebut bertujuan untuk mengupayakan capaian kinerja manajemen secara maksimal dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

- The Company held its Annual Work Meeting under the theme "Growing Together," attended by the Board of Directors, management, and employees. During the meeting, the President Director of PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan, expressed his appreciation to all Company personnel for the Company's Revenue Performance achievement in 2024. In addition, it was conveyed that, notwithstanding this achievement, continuous improvement and a focus on risk management must remain priorities.
- The Board of Directors, management, and employees signed a commitment as part of the implementation of the strategic Compliance Management policy and the Anti-Bribery Management System. This commitment aims to maximize management performance by adhering to the principles of Good Corporate Governance.

18 Februari I February **2025**



PT PLN Suku Cadang bekerja sama dengan Bank Mandiri menyelenggarakan *knowledge sharing* bertema "*Financial Planning for Better Living*" yang di kantor PLN Suku Cadang sebagai bentuk pelaksanaan *Organization Capital Readiness* (OCR) *Business Ecosystem* dan program *Wellbeing* Budaya Perusahaan.

PT PLN Suku Cadang, in collaboration with Bank Mandiri, held a knowledge-sharing session entitled "Financial Planning for Better Living" at the PLN Suku Cadang office as part of the implementation of the Organization Capital Readiness (OCR) Business Ecosystem and the Company's Wellbeing Culture program.

27 Februari I February **2025**



PT PLN Suku Cadang berhasil mendapatkan Associate Special Awards Highest Sustainable Growth dalam acara Portfolio Leadership Forum atas capaian Compound Annual Growth Rate (Pertumbuhan Tahunan) selama 5 tahun sebesar 97%.

PT PLN Suku Cadang received the Associate Special Awards – Highest Sustainable Growth at the Portfolio Leadership Forum in recognition of its five-year Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 97%.

7 Maret I March **2025**

Serah terima jabatan Direktur Bisnis dan Keuangan dari Bahtiar Wibisana kepada Andreas Arthur.

Handover of the position of Director of Business and Finance from Bahtiar Wibisana to Andreas Arthur.



15 April I April **2025**

PT PLN Suku Cadang berpartisipasi dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta International Convention Center pada tanggal 15-17 April 2025. Dalam acara ini, PLN Suku Cadang memamerkan produk-produk Hydrogen yang menjadi produk unggulan Perusahaan, seperti Hydrogen Fuel-Cell, Hydrogen Generators, hingga berbagai kendaraan berbasis sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) seperti Cruiser Hydrogen Fuel Cell Van, Hydrogen Fuel Cell Moped dari Motor listrik Segway-Ninebot MMAX110, hingga 3-Ton Hydrogen Fuel Cell Forklift.

PT PLN Suku Cadang participated in the Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2025, held at the Jakarta International Convention Center on April 15–17, 2025. During the event, PT PLN Suku Cadang showcased its flagship hydrogen products, including Hydrogen Fuel Cell, Hydrogen Generators, and various fuel cell electric vehicles (FCEVs), such as the Cruiser Hydrogen Fuel Cell Van, the Hydrogen Fuel Cell Moped by Segway-Ninebot MMAX110 electric motorcycle, and the 3-Ton Hydrogen Fuel Cell Forklift.



7 Juni I June **2025**

Penyaluran bantuan qurban kepada dua lembaga sosial, yaitu Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Al-Andalusia, sebagai wujud pelaksanaan program TJSL: PLNSC Peduli.

Distribution of qurban donation to two social institutions, namely Yayasan Sayap Ibu and Yayasan Al-Andalusia, as part of the implementation of the Company's CSR program: PLNSC Peduli.



4 Juli I July **2025**

PT PLN Suku Cadang meraih penghargaan The Best Special Award pada kategori Strategic Partnership Company dalam ajang Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025.

PT PLN Suku Cadang received the The Best Special Award in the Strategic Partnership Company category at the Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025.



8 Juli I July **2025**



Penandatanganan perjanjian *Supplementary Agreement* atas *Master Service Agreement* (MSA) antara PT PLN Suku Cadang dan PT Wartsila Indonesia untuk penyediaan komponen-komponen suku cadang serta tenaga kerja pendukung untuk kebutuhan operasional PLTMG Sumbagut Arun 2 Peaker yang berada di bawah kepemilikan PT PLN (Persero).

Signing of the Supplementary Agreement to the Master Service Agreement (MSA) between PT PLN Suku Cadang and PT Wartsila Indonesia for the provision of spare parts components and supporting manpower for the operational requirements of the PLTMG Sumbagut Arun 2 Peaker power plant owned by PT PLN (Persero).

7 Agustus I August **2025**



Sebagai wujud nyata pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, PT PLN Suku Cadang menyelenggarakan kegiatan Interntrip *Site Visit* Pembangkitan bagi mahasiswa magang PT PLN Suku Cadang ke PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi sekaligus membuka peluang bagi mahasiswa magang untuk mengasah keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif mereka di dunia industri melalui pengalaman bekerja dan belajar langsung di proyek, mempersiapkan mereka dalam bersaing di dunia kerja.

As part of the implementation of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) Program in the field of education and Human Resources development, PT PLN Suku Cadang organized the Interntrip Site Visit Pembangkitan for PT PLN Suku Cadang interns at PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang. The program was intended to provide education while offering internship students the opportunity to develop their skills, knowledge, and positive attitudes toward the industrial working environment through direct project-based work and learning experiences, thereby preparing them to compete in the job market.

28 Agustus I August **2025**



Direktur Utama PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan, dan *President HUB Asia* ABB, Anders Maltesen, melakukan penandatanganan *Strategic Framework Agreement*. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memodernisasi sektor energi Indonesia guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Dengan ditandatanganinya kerja sama strategis ini, PT PLN Suku Cadang dan ABB menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dan berperan aktif dalam membangun sektor energi Indonesia yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi secara stabil.

The President Director of PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan, and the President of HUB Asia ABB, Anders Maltesen, signed a Strategic Framework Agreement. This initiative forms part of the parties' shared commitment to modernizing Indonesia's energy sector in support of sustainable growth in the years ahead. Through the signing of this strategic cooperation agreement, PT PLN Suku Cadang and ABB reaffirmed their commitment to continue collaborating and playing an active role in developing a reliable, efficient, and sustainable energy sector in Indonesia, while ensuring a stable electricity supply for the public.

29 Agustus I August **2025**

PT PLN Suku Cadang bersama Persatuan Ibu Karyawan dan Karyawati (PIKK) PT PLN Suku Cadang melaksanakan kegiatan Donor Darah di lingkungan Kantor Pusat PT PLN Suku Cadang, bekerja sama dengan Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan. Selain sebagai bentuk perwujudan program TJSL Perusahaan, kegiatan juga dilaksanakan dalam rangka peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.

PT PLN Suku Cadang with Persatuan Ibu Karyawan dan Karyawati (PIKK) of PT PLN Suku Cadang, organized a blood donation drive at the Company's Head Office in collaboration with the Blood Donor Unit (UDD) of the Indonesian Red Cross (PMI) of South Tangerang City. In addition to the implementation of the Company's CSR program, the activity was also held in commemoration of the 80th Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia.



12 September I September **2025**

Penandatanganan perjanjian kerja sama dalam pengadaan jasa dan material untuk proyek-proyek berbasis hidrogen oleh PT PLN Suku Cadang bersama BTE Inc. dan PT Gheni Artha Sejahtera di Kantor Pusat PT PLN Suku Cadang. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan; *Chief Executive Officer* BTE Inc., Gyu-Jung Shim; serta Direktur Utama PT Gheni Artha Sejahtera, Zulfa Rofiq Iskandar.

Signing of a cooperation agreement for the procurement of services and materials for hydrogen-based projects between PT PLN Suku Cadang, BTE Inc., and PT Gheni Artha Sejahtera at the PT PLN Suku Cadang Head Office. The agreement was signed by the President Director of PT PLN Suku Cadang, Thommi Haposan; the Chief Executive Officer of BTE Inc., Gyu-Jung Shim; and the President Director of PT Gheni Artha Sejahtera, Zulfa Rofiq Iskandar.



17 September I September **2025**

PT PLN Suku Cadang bersama dengan PT PLN Nusantara Power dan PT Nusantara Power Services berpartisipasi pada pameran industri terbesar di bidang energi dan engineering di Asia Tenggara, *Electric & Power Indonesia (EPI) 2025*, yang berlangsung pada Rabu, 17 September hingga Sabtu, 20 September 2025. Partisipasi ini menjadi momentum penting bagi PT PLN Suku Cadang untuk memperkuat sinergi dengan anak perusahaan PLN Nusantara Group lainnya, sekaligus memperkenalkan secara lebih luas peran strategis perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional.

PT PLN Suku Cadang, together with PT PLN Nusantara Power and PT Nusantara Power Services, participated in Electric & Power Indonesia (EPI) 2025, the largest energy and engineering industry exhibition in Southeast Asia, held from Wednesday, September 17, to Saturday, September 20, 2025. The participation served as an important opportunity for PT PLN Suku Cadang to strengthen synergies with other subsidiaries within the PLN Nusantara Group while further introducing the Company's strategic role in supporting the development of Indonesia's energy infrastructure.



19 September I September **2025**



Penandatanganan *Blanket Purchase Agreement* (BPA) antara PT PLN Suku Cadang dengan PT SKF Industrial Indonesia. Kerja sama ini menegaskan komitmen PT PLN Suku Cadang dan PT SKF Industrial Indonesia dalam memperkuat kemitraan jangka panjang, tidak hanya mencakup penyediaan *bearing*, tetapi juga pengenalan layanan *remanufacturing, reliability services*, serta solusi efisiensi energi.

Signing of a Blanket Purchase Agreement (BPA) between PT PLN Suku Cadang and PT SKF Industrial Indonesia. This collaboration reinforces the long-term partnership between PT PLN Suku Cadang and PT SKF Industrial Indonesia, covering not only the supply of bearings but also the introduction of remanufacturing services, reliability services, and energy efficiency solutions.

22 September I September **2025**



PT PLN Suku Cadang bersama PT PLN Nusantara Power, PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Nusantara Power Construction, serta PT Nusantara Renewables turut berpartisipasi dalam ajang *Nusantara Business Xcelleration (NBX) 2025* di InterContinental Pondok Indah, Jakarta. Partisipasi PT PLN Suku Cadang dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan perusahaan dalam mewujudkan komitmen PLN Group, khususnya PT PLN Nusantara Power, untuk menciptakan ekosistem energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

PT PLN Suku Cadang, together with PT PLN Nusantara Power, PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Nusantara Power Construction, and PT Nusantara Renewables, participated in the Nusantara Business Xcelleration (NBX) 2025 event at InterContinental Pondok Indah, Jakarta. PT PLN Suku Cadang's participation in the event reflects the Company's tangible support for the commitment of the PLN Group, particularly PT PLN Nusantara Power, to create a greener and more sustainable energy ecosystem.

30 September I September **2025**



Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT PLN Suku Cadang dan PT Banter Prima Sentosa terkait penyediaan berbagai kebutuhan material untuk pembangunan kapal keruk jenis *cutter suction dredger*

Signing of a cooperation agreement between PT PLN Suku Cadang and PT Banter Prima Sentosa concerning the provision of various materials required for the construction of a cutter suction dredger.

2 Oktober I October **2025**



Dukungan terhadap Pogram Rumah Sehat 2025 melalui penyerahan bantuan tambahan dana untuk pembangunan Rumah Sehat bagi keluarga almarhum Bapak Sujono. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap pengembangan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup melalui program TJSL.

Support for the Rumah Sehat 2025 Program through the provision of additional funding assistance for the construction of a Rumah Sehat for the family of the late Mr. Sujono. This initiative reflects the Company's commitment to community development and improving quality of life through its CSR program.

8 Oktober I October **2025**

PT PLN Suku Cadang resmi menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi PLN (ITPLN) dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Gedung Institut Teknologi PLN. Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda, baik dalam aspek *soft skill* maupun *hard skill* melalui pengalaman terjun langsung dalam dunia bisnis.

PT PLN Suku Cadang officially established a partnership with Institut Teknologi PLN (ITPLN) through the signing of a memorandum of understanding at the Institut Teknologi PLN Building. This collaboration forms part of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program, which aims to enhance the competencies of the younger generation in both soft skills and hard skills through direct exposure to the business environment.



12 Oktober I October **2025**

Dalam rangka mendukung pengembangan energi bersih dan berkelanjutan, serta sebagai bagian dari *kick off* menuju Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026, PT PLN Suku Cadang bersama PT Hidro Dinamika Internasional turut berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan Fun Walk Hydrogen Day 2025 yang bertema Mengusung tema 'Langkah Ringan, Dunia Lebih Bersih'. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy Society (IFHE) dan bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan hidrogen sebagai energi masa depan.

In support of clean and sustainable energy development, and as part of the kick-off toward the Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026, PT PLN Suku Cadang, together with PT Hidro Dinamika Internasional, participated in and supported the Fun Walk Hydrogen Day 2025 under the theme "Light Steps, a Cleaner World." The event was organized by the Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy Society (IFHE) and aimed to broaden knowledge, increase public awareness, and encourage collaboration among various stakeholders in the development and utilization of hydrogen as the energy of the future.



15 Oktober I October **2025**

PT PLN Suku Cadang melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Rockwell Automation Indonesia untuk pengadaan suku cadang dan jasa untuk sistem pembangkit listrik di Indonesia. Melalui sinergi ini, PT PLN Suku Cadang dan PT Rockwell Automation Indonesia optimistis dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan kinerja pembangkit listrik dan pengembangan teknologi industri energi di Indonesia.

PT PLN Suku Cadang signed a cooperation agreement with PT Rockwell Automation Indonesia for the procurement of spare parts and services for power generation systems in Indonesia. Through this synergy, PT PLN Suku Cadang and PT Rockwell Automation Indonesia are optimistic that they can make greater contributions to improving power plant performance and advancing industrial energy technology in Indonesia.



12 November I November **2025**



Dalam rangka menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat sinergi secara internal dengan PLN Group, yaitu PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Suku Cadang turut berpartisipasi dalam Vendor Appreciation Day 2025 (VenCiation Day 2025) yang diselenggarakan di The Westin Surabaya. Melalui keikutsertaan ini, Perusahaan memperkuat perannya dalam membangun hubungan kemitraan yang produktif dan mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang.

As part of its commitment to strengthening internal synergy within the PLN Group, particularly with PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Suku Cadang participated in Vendor Appreciation Day 2025 (VenCiation Day 2025), held at The Westin Surabaya. Through its participation, the Company strengthened its role in building productive partnerships and promoting broader collaboration in the future.

19 November I November **2025**



Dalam mendukung pertumbuhan infrastruktur kelistrikan serta memperkuat transisi menuju energi bersih, PT PLN Suku Cadang bersama PT PLN Nusantara Power dan anak perusahaannya—PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Nusantara Power Construction, dan PT PLN Renewables—turut berpartisipasi dalam acara Electricity Connect 2025 yang diselenggarakan pada Rabu, 19 November hingga Jumat, 21 November 2025.

Electricity Connect 2025 merupakan forum ketenagalistrikan berskala global yang diinisiasi oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Mengusung tema “Strengthening Energy Resilience, Powering Sovereignty,” forum ini menjadi wadah untuk memperluas jaringan kemitraan, menggelar diskusi strategis, serta menampilkan pameran teknologi ketenagalistrikan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80.

In support of electricity infrastructure development and the transition toward clean energy, PT PLN Suku Cadang, together with PT PLN Nusantara Power and its subsidiaries—PT PLN Nusantara Power Services, PT PLN Nusantara Power Construction, and PT PLN Renewables—participated in Electricity Connect 2025, held from Wednesday, November 19, to Friday, November 21, 2025.

Electricity Connect 2025 is a global electricity forum initiated by Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Carrying the theme “Strengthening Energy Resilience, Powering Sovereignty,” the forum served as a platform for expanding partnership networks, conducting strategic discussions, and showcasing electricity technologies. The event also formed part of the commemoration of the 80th National Electricity Day.

28 November I November **2025**

Untuk membangun kesadaran, kemampuan bekerja, serta memperkuat kompetensi seluruh karyawan Perusahaan, PT PLN Suku Cadang menyelenggarakan kegiatan Capacity Building pada Jumat, 28 November hingga Sabtu, 29 November 2025. Pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan Capacity Building PT PLN Suku Cadang yang bertujuan dalam meningkatkan *ownership mindset* dan kemampuan komunikasi efektif, memperkuat sinergi antar tim, meningkatkan kualitas kinerja, serta mendorong penerapan pola pikir strategis yang selaras dengan tujuan organisas dari karyawan.

To build awareness, enhance work capabilities, and strengthen the competencies of all Company employees, PT PLN Suku Cadang organized a Capacity Building program from Friday, November 28, to Saturday, November 29, 2025. This training formed part of the Company's Capacity Building program, which aims to enhance employees' ownership mindset and effective communication skills, strengthen synergy among teams, improve work performance, and encourage the adoption of a strategic mindset aligned with the organization's objectives.



9 Desember I December **2025**

Penyaluran bantuan donasi kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari program TJSL: PLNSC Peduli.

Distribution of donation assistance to victims of natural disasters in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra as part of the Company's CSR program: PLNSC Peduli.



Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

Penghargaan I Awards

THE BEST SPECIAL AWARD



Tanggal Perolehan Date of Awarded	**4 Juli** I July **2025**
Kategori Category	**Strategic Partnership Company**
Penyelenggara Organizer	**Majalah Listrik Indonesia**
Acara Event	**Indonesia Best Electricity Award (IBEA)**

ASSOCIATE SPECIAL AWARDS HIGHEST SUSTAINABLE GROWTH

Tanggal Perolehan Date of Awarded	**27 Februari** I February **2025**
Kategori Category	**Compound Annual Growth Rate**
Penyelenggara Organizer	**PT PLN (Persero)**
Acara Event	**Portfolio Leadership Forum**



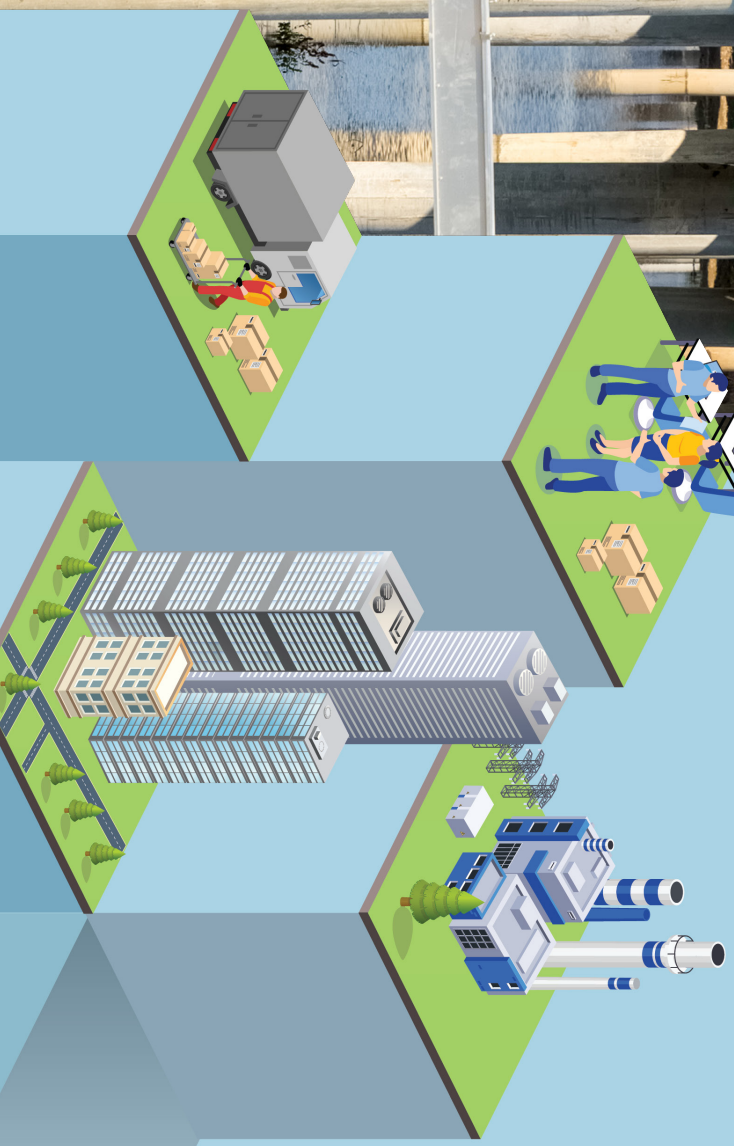
Sertifikasi I Certifications

Sertifikasi Certification	**Tanggal Perolehan** Certification Date	**Masa Berlaku** Validity	**Badan Pemberi** Certification Agency	**Lingkup** Scope
SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	02 Juli 2025 July 02, 2025	01 Juli 2028 July 01, 2028	TUV Rheinland Indonesia	Penyedia Perdagangan dan Pemasokan Suku Cadang Mekanik & Elektrikal, Kimia, dan Pelumas untuk Pembangkit Listrik dan Industri Lainnya Provision of Trading and Supply of Mechanical & Electrical Spare Part, Chemical, and Lubricant for Power Plants and Other Industries
SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 Quality Management System	21 Juli 2025 July 21, 2025	20 Juli 2028 July 20, 2028	TUV Rheinland Indonesia	Penyedia Perdagangan dan Pemasokan Suku Cadang Mekanik & Elektrikal, Kimia, dan Pelumas untuk Pembangkit Listrik dan Industri Lainnya Provision of Trading and Supply of Mechanical & Electrical Spare Part, Chemical, and Lubricant for Power Plants and Other Industries
SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2015 Environmental Management System	21 Juli 2025 July 21, 2025	20 Juli 2028 July 20, 2028	TUV Rheinland Indonesia	Penyedia Perdagangan dan Pemasokan Suku Cadang Mekanik & Elektrikal, Kimia, dan Pelumas untuk Pembangkit Listrik dan Industri Lainnya Provision of Trading and Supply of Mechanical & Electrical Spare Part, Chemical, and Lubricant for Power Plants and Other Industries
SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja SNI ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System	22 Juli 2025 July 22, 2025	21 Juli 2028 July 21, 2028	TUV Rheinland Indonesia	Penyedia Perdagangan dan Pemasokan Suku Cadang Mekanik & Elektrikal, Kimia, dan Pelumas untuk Pembangkit Listrik dan Industri Lainnya Provision of Trading and Supply of Mechanical & Electrical Spare Part, Chemical, and Lubricant for Power Plants and Other Industries









Laporan Manajemen

Management Report

02

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners



SUPARYANTO

Plt. Komisaris Utama
Act. President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC atau Perseroan) mampu melalui tahun 2025 dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan perkembangan industri yang terus berubah. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan.

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan secara aktif, independen, dan objektif guna memastikan bahwa pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG), serta arah strategis yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi kepada Direksi, khususnya terkait penguatan strategi bisnis, pengelolaan risiko, peningkatan efektivitas operasional, serta upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan usaha Perseroan di tengah tantangan lingkungan bisnis yang dinamis.

Tinjauan Makroekonomi dan Kondisi Industri

Tahun 2025 ditandai oleh masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, perlambatan pertumbuhan di sejumlah negara maju, serta volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0% pada tahun 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,3%.

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,03%, didukung oleh konsumsi domestik, investasi, dan aktivitas industri yang tetap tumbuh positif. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp23.821 triliun dari Rp22.139 triliun pada tahun 2024, sementara inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran Pemerintah dan Bank Indonesia.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Praise be to God Almighty for His grace and blessings, which enabled PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC or the "Company") to successfully navigate 2025 amid global economic dynamics and the continuously evolving industry landscape. On behalf of the Board of Commissioners, we are pleased to present the Board of Commissioners' Report for fiscal year 2025 as a form of accountability for the execution of our supervisory and advisory functions to the Board of Directors in the management of the Company.

Throughout fiscal year 2025, the Board of Commissioners carried out its supervisory duties actively, independently, and objectively to ensure that the Company's management was conducted in accordance with the prevailing regulations, the principles of Good Corporate Governance (GCG), and the established strategic direction. In performing these functions, the Board of Commissioners consistently provided guidance, input, and recommendations to the Board of Directors, particularly with respect to strengthening the Company's business strategy, risk management, enhancing operational effectiveness, and supporting sustainable business growth amid the challenges of a dynamic business environment.

Macroeconomic and Industry Overview

2025 continued to be marked by global economic uncertainty driven by geopolitical developments, slower growth in several advanced economies, and volatility in financial markets and commodity prices. The International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 3.0% in 2025, slightly lower than the 3.3% recorded in 2024.

Amid these global conditions, Indonesia's economy demonstrated relatively strong performance. National economic growth reached 5.11%, increased from 5.03% in the previous year, supported by domestic consumption, investment, and continued positive industrial activity. Gross Domestic Product (GDP) at current market prices increased to Rp23,821 trillion from Rp22,139 trillion in 2024, while inflation remained within the target range set by the Government and Bank Indonesia.

Dewan Komisaris memandang bahwa kondisi ekonomi nasional yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya telah memberikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi Perseroan. Pertumbuhan kebutuhan energi listrik, berlanjutnya investasi infrastruktur ketenagalistrikan, serta program transisi energi nasional membuka peluang yang semakin besar bagi pengembangan usaha Perseroan. Namun demikian, volatilitas nilai tukar, fluktuasi harga material impor, dan risiko gangguan rantai pasok global tetap menjadi tantangan yang perlu dikelola secara cermat. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah merespons kondisi tersebut dengan baik melalui penguatan kemitraan strategis dengan principal dan manufaktur, optimalisasi pengelolaan rantai pasok, serta penguatan manajemen risiko sehingga Perseroan tetap mampu menjaga kualitas layanan dan memenuhi komitmen kepada pelanggan.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Keputusand an Arahan RUPS, RKAP serta *Business Plan* Perseroan, selama tahun 2025, Dewan Komisaris secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas jalannya Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, serta memberikan saran adn masukan yang disampaikan dalam Rapat Pengawasan Dewan Komisaris – Direksi, RUPS maupun secara tertulis melalui surat. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan selama tahun 2025 bertujuan untuk memastikan pencapaian target kinerja, keberhasilan implementasi strategi, efektivitas pengelolaan risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025, realisasi kinerja operasional dan keuangan, serta berbagai inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dalam mendukung transformasi dan pertumbuhan usaha Perseroan. Berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi RKAP, Dewan Komisaris telah memberikan arahan agar Direksi melakukan pengendalian serta melakukan prinsip kehati-hatian, mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mengembangkan lini bisnis serta melakukan tindakan strategis, khususnya yang berdampak pada kinerja Perseroan secara keseluruhan.

The Board of Commissioners view that the stronger national economic conditions compared to the previous year provided a more conducive business environment for the Company. Growing electricity demand, continued investment in electricity infrastructure, and the national energy transition program created greater opportunities for the Company's business development. Nevertheless, exchange rate volatility, fluctuations in the prices of imported materials, and the risk of global supply chain disruptions remained challenges that required careful management. The Board of Commissioners view that the Board of Directors had responded effectively to these conditions by strengthening strategic partnerships with principals and manufacturers, optimizing supply chain management, and reinforcing risk management, thereby enabling the Company to maintain service quality and fulfill its commitments to customers.

Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Function

In accordance with the Company's Articles of Association, the resolutions and directives of the GMS, the Company's RKAP, and the Company's Business Plan, throughout 2025, the Board of Commissioners continuously monitored the management of the Company carried out by the Board of Directors, while providing advice and input through the Board of Commissioners–Board of Directors Supervisory Meetings, the GMS, and written correspondence. The supervisory function, carried out actively and continuously throughout 2025, was intended to ensure the achievement of performance targets, the successful implementation of strategies, the effectiveness of risk management, and the implementation of Good Corporate Governance.

The Board of Commissioners' supervision covered the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2024–2028, the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP), the realization of operational and financial performance, and various strategic initiatives undertaken by the Board of Directors to support the Company's transformation and business growth. In relation to its oversight of the realization of the RKAP, the Board of Commissioners provided directives to the Board of Directors to exercise appropriate control and apply the prudential principle, uphold compliance with applicable laws and regulations, develop business lines, and undertake strategic measures, particularly those affecting the Company's overall performance.

Dewan Komisaris juga secara konsisten memberikan arahan, masukan, dan rekomendasi strategis kepada Direksi, khususnya terkait penguatan kemitraan dengan *principal*, pengembangan pasar, optimalisasi rantai pasok, transformasi digital, penguatan organisasi, serta pengelolaan risiko di tengah dinamika ekonomi global dan industri ketenagalistrikan. Dewan Komisaris juga secara berkala mengevaluasi perkembangan pelaksanaan strategi perusahaan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arah yang ditetapkan dan mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi Perseroan.

Selain memastikan tercapainya sasaran bisnis, Dewan Komisaris turut mengawasi penerapan prinsip-prinsip GCG, efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris juga secara berkala melakukan penelaahan atas berbagai inisiatif strategis, perkembangan lingkungan usaha, dan risiko-risiko utama yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki arah pengembangan yang jelas, fondasi tata kelola yang kuat, serta kesiapan organisasi yang memadai dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang pertumbuhan di masa mendatang.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap implementasi RKAP dan pelaksanaan berbagai inisiatif strategis Perseroan. Fokus pengawasan diarahkan pada penguatan bisnis inti, pengembangan portofolio produk dan jasa, peningkatan kualitas layanan pelanggan, efektivitas pengelolaan rantai pasok, penguatan struktur organisasi, pengembangan kompetensi SDM, serta percepatan transformasi digital.

Dewan Komisaris menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan Direksi telah sejalan dengan arah strategis Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam RJPP 2024–2028. Berbagai program penguatan fondasi yang dilaksanakan selama tahun 2025 menunjukkan kemajuan yang baik dan menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan fase Akselerasi Pertumbuhan pada tahun 2026–2027.

The Board of Commissioners also consistently provided guidance, input, and strategic recommendations to the Board of Directors, particularly in relation to strengthening partnerships with principals, market development, supply chain optimization, digital transformation, organizational strengthening, and risk management amid the dynamics of the global economy and the electricity industry. The Board of Commissioners also periodically evaluated the progress of the Company's strategic implementation to ensure that all programs were carried out in line with the established direction and were able to create sustainable value for the Company.

In addition to ensure the achievement of the Company's business objectives, the Board of Commissioners oversaw the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the effectiveness of the internal control system, risk management, and the Company's compliance with prevailing laws, regulations, and provisions. The Board of Commissioners also periodically reviewed various strategic initiatives, developments in the business environment, and key risks that could affect the Company's performance. The supervision was carried out to ensure that the Company has a clear development direction, a strong governance foundation, and adequate organizational readiness to address future challenges and capitalize on growth opportunities.

Supervision of the Implementation of the Company's Strategy

Throughout 2025, the Board of Commissioners actively supervised the implementation of the RKAP and the execution of the Company's various strategic initiatives. The supervision focused on strengthening the Company's core business, developing its product and service portfolio, improving customer service quality, enhancing the effectiveness of supply chain management, strengthening the organizational structure, developing human resources competencies, and accelerating digital transformation.

The Board of Commissioners considered that the measures undertaken by the Board of Directors were aligned with the Company's strategic direction as set out in the 2024–2028 RJPP. The various foundation strengthening programs implemented throughout 2025 demonstrated solid progress and served as important prerequisites for the implementation of the Growth Acceleration phase in 2026–2027.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris juga memberikan berbagai arahan strategis terkait pengembangan pasar di luar PLN Group, penguatan kemitraan strategis dengan principal, optimalisasi pengelolaan risiko, serta peningkatan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan digitalisasi proses bisnis.

Penilaian atas Kinerja Direksi dalam Pengelolaan Perseroan

Secara khusus berkaitan dengan kondisi global, Dewan Komisaris menilai Direksi cukup berhasil dalam membuat beberapa program strategis termasuk dalam rangka mencapai target pendapatan tahun 2025 yang sangat menantang dan dalam pelaksanaannya akan tetap melakukan *monitoring* secara rutin oleh Dewan Komisaris sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian target kienrja Perseroans ecara maksimal.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengelola Perseroan di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang. Berbagai inisiatif strategis yang dijalankan selama tahun 2025 turut mendukung peningkatan efektivitas operasional, penguatan kapabilitas organisasi, serta pengembangan kapasitas bisnis Perseroan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris melaporkan bahwa selama tahun 2025, Perseroan berhasil mencapai kinerja yang baik meskipun realisasi beberapa kinerja di bawah target RKAP. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa kondisi telah menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris serta dalam proses *improvement* dan akan dijadikan *lesson-learned* untuk tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, Perseroan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,98 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,69 triliun. Realisasi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang mencapai Rp133,42 miliar kami lihat mencerminkan kinerja operasional yang solid sepanjang tahun dengan total realisasi 1.007 kontrak baru dan *sales order* mencapai Rp2,07 triliun. Dewan Komisaris juga mengapresiasi

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners also provided strategic guidance on market development beyond the PLN Group, strengthening strategic partnerships with principals, optimizing risk management, and enhancing the effectiveness of data-driven decision-making and the digitalization of business processes.

Assessment of the Board of Directors' Performance in Managing the Company

With particular regard to the global conditions, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors was fairly successful in formulating several strategic programs, including those aimed at achieving the Company's highly challenging 2025 revenue target. The implementation of these programs continued to be monitored regularly by the Board of Commissioners to support the achievement of the Company's performance targets to the fullest extent possible.

On the other hand, the Board of Commissioners also considers that the Board of Directors demonstrated excellent capability in managing the Company amid the continuously evolving business environment. The various strategic initiatives implemented throughout 2025 contributed to enhancing operational effectiveness, strengthening organizational capabilities, and expanding the Company's business capacity.

Based on the results of its supervisory activities, the Board of Commissioners reports that the Company achieved solid performance throughout 2025, although the realization of several performance indicators fell below the RKAP targets. In this regard, several matters have become the Board of Commissioners' particular concerns and are currently undergoing improvement, and they will serve as lessons learned for the following year.

In 2025, the Company recorded operating revenue amounting to Rp1.98 trillion, increased from Rp1.69 trillion in the previous year. The realization of revenue growth and net profit, which amounted to Rp133.42 billion, reflects solid operational performance throughout the year, supported by the realization of 1,007 new contracts and Sales Orders amounting to Rp2.07 trillion. The Board of Commissioners also appreciates the increase in the realization of new

peningkatan realisasi jumlah kontrak baru yang diiringi oleh keberhasilan manajemen dalam mempertahankan kualitas layanan dengan capaian Service Level Agreement (SLA) Kontrak sebesar 98,20%, yang mencerminkan kinerja yang baik dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, mutu, serta ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Di sisi lain, Dewan Komisaris melihat bahwa mayoritas indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/ KPI) Perseroan berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja 103,62. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas Direksi dalam menjalankan strategi bisnis serta menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi Perseroan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh aktivitas perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja perusahaan, serta pembahasan berbagai isu strategis yang memengaruhi operasional dan keberlanjutan usaha Perseroan. Dewan Komisaris juga memperoleh dukungan yang memadai dari Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya terkait efektivitas pengendalian internal, pengelolaan risiko, proses audit, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Dewan Komisaris terus mendorong penguatan budaya integritas melalui implementasi *Whistleblowing System*, peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, serta penguatan aspek *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) secara berkelanjutan.

contracts, accompanied by Management's success in maintaining service quality, as reflected in the achievement of a Contract Service Level Agreement (SLA) of 98.20%, demonstrating strong performance in occupational safety and health, quality, and the timely execution of work.

On the other hand, the Board of Commissioners notes that the majority of the Company's Key Performance Indicators (KPIs) were achieved in accordance with the established targets, resulting in a Performance Score of 103,62. This achievement reflects the effectiveness of the Board of Directors in executing the Company's business strategy and maintaining the continuity of the Company's operations.

Implementation of Good Corporate Governance

The Board of Commissioners believes that the implementation of Good Corporate Governance constitutes the primary foundation for creating long-term value for the Company. Accordingly, the Board of Commissioners continuously promotes the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness throughout the Company's activities.

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out its supervisory function through Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors, periodic evaluations of the Company's performance achievements, and discussions on various strategic issues affecting the Company's operations and business sustainability. The Board of Commissioners also received adequate support from the Audit Committee in carrying out its supervisory function, particularly with respect to the effectiveness of internal control, risk management, the audit process, and compliance with the prevailing regulations.

In addition, the Board of Commissioners continued to promote the strengthening of the integrity culture through the implementation of the Whistleblowing System, enhanced compliance with the Company's policies, and the continuous strengthening of Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Sesuai struktur dan mekanisme GCG di Perseroan, selama tahun 2025, pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dibantu oleh komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit. Komite Audit yang berperan dalam membantu pelaksanaan pengawasan atas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, implementasi manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Komite Audit menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan Piagam Komite Audit dan kebutuhan pengawasan Perseroan.

Selama periode tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelahaan atas informasi keuangan, penelahaan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko, Sistem Pengendalian Internal serta memberikan pandangan dan masukan untuk pengendalian pencapaian kienrja dan pengembangan Perseroan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan efektif selama tahun 2025.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Penerapan ESG

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan bagian integral dari strategi bisnis dan fondasi penting dalam menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari PLN Group yang berperan dalam mendukung ketahanan energi nasional, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap proses pengambilan keputusan bisnis.

Sejalan dengan arah kebijakan PLN Group, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi perusahaan, pengelolaan risiko, dan operasional bisnis. Fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup upaya peningkatan efisiensi operasional yang berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan bisnis terhadap isu perubahan iklim, pengintegrasian aspek keberlanjutan ke dalam proses bisnis, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

In accordance with the Company's GCG structure and mechanism, throughout 2025, the Board of Commissioners was assisted in carrying out its duties and functions by the committee under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee. The Audit Committee assisted the Board of Commissioners in overseeing financial reporting, the effectiveness of internal control, the implementation of risk management, compliance with prevailing laws and regulations, and the implementation of GCG principles. The Board of Commissioners periodically evaluated the Audit Committee to ensure that it carried out its functions and responsibilities effectively in accordance with the Audit Committee Charter and the Company's supervisory requirements.

Throughout 2025, the Board of Commissioners considered that the Audit Committee had carried out its duties by providing recommendations to the Board of Commissioners based on its review of financial information, the implementation of risk management activities, and the Internal Control System, as well as by providing views and input regarding the control of performance achievement and the Company's development. Overall, the Board of Commissioners considers that the Audit Committee carried out its duties and responsibilities effectively throughout 2025.

The Board of Commissioners' View and Role in ESG Implementation

The Board of Commissioners considers the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles to be an integral part of the Company's business strategy and an important foundation for creating sustainable long-term value. As part of the PLN Group, which plays a role in supporting national energy security, the Company has the responsibility to conduct its business activities responsibly by taking environmental, social, and governance aspects into consideration in every business decision-making process.

In line with the strategic direction of the PLN Group, the Board of Commissioners continuously encourages the Board of Directors to integrate ESG principles into the Company's strategy, risk management, and business operations. The Board of Commissioners' oversight focuses on improving environmentally responsible operational efficiency, strengthening business resilience to climate change issues, integrating sustainability aspects into business processes, and implementing the Social and Environmental Responsibility (CSR) program to deliver benefits to the community and stakeholders.

Dewan Komisaris juga mendukung penguatan implementasi ESG melalui integrasi aspek keberlanjutan ke dalam sistem manajemen risiko Perseroan. Pendekatan tersebut memungkinkan Perseroan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko maupun peluang yang berkaitan dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penerapan ESG tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap arahan Pemegang Saham dan PLN Group, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam memperkuat daya saing, meningkatkan ketahanan bisnis, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek Usaha Tahun 2026

Dewan Komisaris memandang prospek usaha Perseroan pada tahun 2026 tetap positif seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan kebutuhan energi nasional, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, serta percepatan agenda transisi energi yang membuka peluang baru bagi pelaku usaha di sektor energi dan utilitas. Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pembangkit, penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi dan target *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tetap berada pada kisaran 5%, didukung oleh meningkatnya investasi dan aktivitas industri, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi listrik nasional secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris menilai bahwa perkembangan tersebut memberikan peluang yang semakin besar bagi Perseroan untuk memperkuat perannya sebagai penyedia solusi supply chain sektor ketenagalistrikan dan utilitas. Sejalan dengan RKAP 2026, Perseroan menargetkan pertumbuhan sales order menjadi Rp2,42 triliun atau meningkat sekitar 17% dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar Rp2,07 triliun. Pendapatan usaha ditargetkan mencapai Rp2,18 triliun, meningkat sekitar 13% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1,93 triliun, dengan laba bersih ditargetkan sebesar Rp177,84 miliar. Target tersebut akan didukung oleh optimalisasi bisnis inti, penguatan kemitraan strategis dengan principal dan manufaktur, peningkatan efektivitas pengelolaan rantai pasok, serta pengembangan portofolio produk dan jasa yang lebih beragam.

The Board of Commissioners also supports the strengthening of ESG implementation through the integration of sustainability aspects into the Company's risk management system. This approach enables the Company to identify and manage risks and opportunities related to environmental, social, and governance issues in a more comprehensive manner. Accordingly, ESG implementation not only represents compliance with the directives of the Shareholders and the PLN Group but also forms part of the Company's efforts to strengthen its competitiveness, enhance business resilience, and create sustainable growth.

Outlook for the Company's Business Prospects in 2026

The Board of Commissioners views the Company's business prospects for 2026 as remaining positive, supported by the continued growth in national energy demand, the development of electricity infrastructure, and the acceleration of the energy transition agenda, which creates new opportunities for businesses in the energy and utilities sector. The Government continues to promote the expansion of power generation capacity, the strengthening of transmission and distribution networks, and the development of new and renewable energy as part of its efforts to achieve energy security and the Net Zero Emissions (NZE) 2060 target. Meanwhile, Indonesia's economic growth, which is projected to remain at around 5%, supported by increasing investment and industrial activity, is expected to drive sustained growth in national electricity consumption.

The Board of Commissioners considers these developments to present greater opportunities for the Company to strengthen its role as a supply chain solutions provider for the electricity and utilities sector. In line with the 2026 RKAP, the Company targets Sales Orders amounting to Rp2.42 trillion, increased by approximately 17% compared to Rp2.07 trillion in 2025 realization. Operating revenue is targeted to reach Rp2.18 trillion, increased by approximately 13% compared to Rp1.93 trillion in the previous year's realization, while net profit is targeted at Rp177.84 billion. These targets will be supported by the optimization of the Company's core business, strengthened strategic partnerships with principals and manufacturers, enhanced effectiveness of supply chain management, and the development of a more diversified product and service portfolio.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi untuk mempercepat implementasi agenda Akselerasi Pertumbuhan sebagaimana tertuang dalam roadmap Perseroan 2024–2028. Fokus pengembangan diarahkan pada perluasan pasar di luar PLN Group, penguatan bisnis transmisi dan distribusi, pengembangan peluang usaha di sektor energi baru terbarukan, optimalisasi captive power dan Independent Power Producer (IPP), serta peningkatan kapabilitas digital dan pengelolaan inventori. Dengan fondasi bisnis yang telah dibangun selama dua tahun terakhir, Dewan Komisaris optimistis Perseroan memiliki kapasitas yang memadai untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam ekosistem ketenagalistrikan nasional.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga terus menghimbau kesiapan Perseroan terkait pelaksanaan Program Streamlining PLN Group yang direncanakan untuk mulai dilaksanakan pada Semester II tahun 2026. Berkaitan dengan inisiatif tersebut, Dewan Komisaris melihat Direksi dan seluruh Manajemen telah secara aktif telah melaksanakan langkah-langkah persiapan di internal Perseroan untuk menjadi bagian dari transformasi bisnis PLN Group. Dewan Komisaris juga telah memberikan rekomendasi dan arahan dalam setiap tahapan, antara lain pembentukan Tim *Task Force Streamlining* PT PLNSC, penyusunan Arah Strategis dan Rencana Aksi Korporasi, pihak konsultan *streamlining*. Perseroan, rapat-rapat serta town hall meeting serta penyampaian keterbukaan informasi di media massa nasional terkait rencana pengambilalihan saham Perseroan oleh PT PLN Electricity Services sebagai bagian dari Program Streamlining PLN Group. Dewan Komisaris berharap, Perseroan dapat terus mendukung transformasi bisnis di PLN Group dan memperkuat sektor ketenagalistrikan di Indonesia secara keseluruhan.

To support the achievement of these targets, the Board of Commissioners has provided directives to the Board of Directors to accelerate the implementation of the Growth Acceleration agenda as set out in the Company's 2024–2028 roadmap. The Company's development priorities are focused on expanding markets beyond the PLN Group, strengthening the transmission and distribution business, developing business opportunities in the new and renewable energy sector, optimizing captive power and Independent Power Producer (IPP) opportunities, and enhancing digital capabilities and inventory management. With the business foundation established over the past two years, the Board of Commissioners is optimistic that the Company has the necessary capacity to sustain its growth while further strengthening its position as a strategic partner within Indonesia's electricity ecosystem.

On the other hand, the Board of Commissioners also continued to encourage the Company’s readiness for the implementation of the PLN Group Streamlining Program, which is planned to commence in the second half of 2026. In relation to this initiative, the Board of Commissioners observed that the Board of Directors and the entire Management had actively undertaken internal preparatory measures to position the Company as part of the PLN Group’s business transformation. The Board of Commissioners also provided recommendations and guidance at each stage of the process, including the establishment of the PT PLNSC Streamlining Task Force Team, the preparation of the Corporate Strategic Direction and Corporate Action Plan, the appointment of a streamlining consultant, the conduct of meetings and town hall meetings, and the disclosure of information through the national mass media regarding the proposed acquisition of the Company’s shares by PT PLN Electricity Services as part of the PLN Group Streamlining Program. The Board of Commissioners expects the Company to continue supporting the PLN Group’s business transformation while strengthening Indonesia’s overall electricity sector.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada 13 Februari 2026, komposisi Dewan Komisaris mengalami perubahan dengan informasi perubahan sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2025 – 12 Februari 2026

Komisaris Utama I President Commissioners

Tri Tjahjonoputro

Periode 13 Februari 2026 – sekarang

Plt. Komisaris Utama I Act. President Commissioners

Suparyanto

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

On February 13, 2026, the composition of the Board of Commissioners changed as follows:

January 1, 2025 – February 12, 2026

Komisaris I Commissioners

- **Muhammad Ramadhansyah**
- **Sapto Harjono Wahjoe Sedjati**

February 13, 2026 – Present

Plt. Komisaris I Act. Commissioners

- **Hariyanto**
- **Abdan Hanif Satria Budiman**

Penutup

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemegang Saham, Direksi, seluruh Insan PLNSC, pelanggan, mitra usaha, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan.

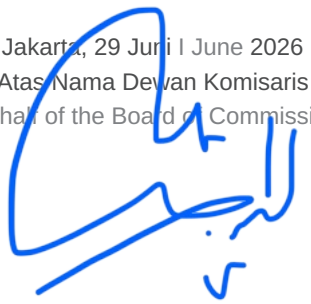
Dewan Komisaris akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara optimal guna memastikan Perseroan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaborasi, tata kelola yang baik, dan komitmen terhadap keunggulan operasional, kami optimistis Perseroan akan mampu mencapai kinerja yang lebih baik pada masa mendatang.

Closing Remarks

On behalf of the Board of Commissioners, we extend our appreciation and gratitude to the Shareholders, the Board of Directors, all PLNSC personnel, customers, business partners, regulators, and all stakeholders for their continued support and trust in the Company.

The Board of Commissioners will continue to carry out its supervisory and advisory functions optimally to ensure that the Company remains on a path of strong and sustainable growth while continuing to create added value for all stakeholders. With a spirit of collaboration, good corporate governance, and a commitment to operational excellence, we are optimistic that the Company will continue to achieve stronger performance in the years ahead.

Jakarta, 29 Juni I June 2026
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



SUPARYANTO
Plt. Komisaris Utama I Act. President Commissioners

Laporan Direksi
Report of the Board of Directors



THOMMI HAPOSAN

Plt. Direktur Utama
Act. President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) dapat melalui tahun 2025 dengan baik serta mencatatkan kinerja yang positif di tengah dinamika dan tantangan industri yang terus berkembang. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis secara konsisten, memperkuat kapabilitas operasional, serta menjaga keandalan layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

Perkenankan kami, jajaran Direksi, untuk menyampaikan Laporan Tahunan 2025 yang memuat uraian mengenai pelaksanaan strategi Perseroan dalam merespons berbagai tantangan dan peluang usaha, analisis atas pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, prospek usaha Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Tinjauan Makroekonomi

Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi dunia bergerak moderat di kisaran 3,2% akibat fragmentasi perdagangan [IMF]. Di tengah situasi tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketangguhan tinggi dengan mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 5,11%, dengan nilai nominal menyentuh Rp23.821,1 triliun. Stabilitas domestik yang solid ini menjadi fondasi kuat bagi industri strategis, khususnya dalam menjaga kepastian permintaan energi nasional di tengah komitmen besar menuju pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE).

Iklim usaha didukung oleh inflasi nasional yang terkendali pada rentang 2,3-2,7%, sementara suku bunga acuan global (The Fed) mulai melonggarkan kebijakan ke kisaran 3,75%–4,00%. Tren global ini memengaruhi pergerakan pasar domestik, dengan rata-rata nilai tukar Rupiah bergerak dinamis di kisaran Rp16.475 per Dolar AS. Terjaganya stabilitas mata uang dan defisit fiskal di bawah 3 persen menjadi indikator krusial bagi industri kelistrikan untuk memitigasi risiko biaya investasi jangka panjang, terutama kaitannya dengan proyek transisi energi bersih dan infrastruktur rendah karbon.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise be to Almighty God for His abundant grace and blessings, which have enabled PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) to successfully navigate 2025 and achieve positive performance amid the dynamics and challenges of an ever-evolving industry. This achievement reflects the Company's commitment to consistently implementing its business strategy, strengthening its operational capabilities, and maintaining reliable services for customers and stakeholders.

Allow us, the Board of Directors, to present the 2025 Annual Report, which contains an overview of the Company's strategy implementation in responding to various business challenges and opportunities, an analysis of the Company's performance achievements against the established targets, the Company's business prospects, and the progress of the implementation of Good Corporate Governance.

Macroeconomic Overview

Throughout 2025, global economic growth moved moderately in the range of 3.2% due to trade fragmentation [IMF]. Amid this situation, Indonesia's economy demonstrated high resilience by recording GDP growth of 5.11%, with a nominal value reaching Rp23,821.1 trillion. This solid domestic stability serves as a strong foundation for strategic industries, particularly in maintaining certainty of national energy demand amid the strong commitment toward achieving the Net Zero Emission (NZE) target.

The business climate was supported by controlled national inflation within the range of 2.3-2.7%, while the global benchmark interest rate (The Fed) began to ease policy to the range of 3.75%-4.00%. This global trend affected the movement of the domestic market, with the average Rupiah exchange rate moving dynamically in the range of Rp16,475 per US Dollar. The stability of the currency and the fiscal deficit below 3 percent served as crucial indicator for the electricity industry to mitigate long-term investment cost risks, particularly in relation to clean energy transition projects and low-carbon infrastructure.

Kualitas pertumbuhan ekonomi 2025 tercermin dari penurunan pengangguran menjadi 4,76 persen serta peningkatan PDB per kapita ke angka Rp83,7 juta. Meluasnya kelas menengah dan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,85% secara langsung mendorong geliat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Bagi Perseroan, peningkatan produktivitas masyarakat ini tidak hanya mendongkrak konsumsi energi, tetapi juga meningkatkan kesiapan pasar domestik untuk menyerap agenda dekarbonisasi dan mendukung peta jalan *Net Zero Emission* Indonesia secara berkelanjutan.

Kinerja Industri Ketenagalistrikan

Industri kelistrikan nasional mencatatkan kinerja operasional yang solid sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik. Suplai tenaga listrik nasional oleh PT PLN (Persero) meningkat 3,75% menjadi 317,69 Terawatt-hour (TWh), didorong oleh penguatan permintaan pada segmen industri, bisnis, dan rumah tangga. Guna mengimbangi tren peningkatan tersebut, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional ditingkatkan hingga mencapai 107,51 GW, yang berhasil mendorong konsumsi listrik per kapita melampaui target nasional sebesar 1.464 kWh hingga menyentuh angka 1.584 kWh.

Untuk menopang lompatan kapasitas terpasang dan pemenuhan konsumsi nasional tersebut, konfigurasi penyediaan energi dalam peta bauran pembangkit masih didominasi oleh aset berbasis bahan bakar fosil sebagai pilar utama baseload, berdampingan dengan ekspansi energi baru dan terbarukan (EBT) yang terus ditingkatkan perkembangannya. Di tengah dominasi PLTU batubara sebagai penopang beban utama, armada pembangkit berbasis gas yang mencakup PLTG, PLTGU, PLTMG, serta PLTMGU memegang peranan krusial sebagai kontributor terbesar kedua di segmen hidrokarbon. Karakteristik pembangkit gas yang fleksibel dan memiliki kemampuan respon cepat (*ramping rate* tinggi) menjadikannya solusi andal untuk menjaga kestabilan grid nasional, sekaligus bertindak sebagai jembatan transisi yang rendah emisi jika dibandingkan dengan infrastruktur fosil lainnya.

The quality of 2025 economic growth is reflected in the decline of unemployment to 4.76 percent and the increase of GDP per capita to Rp83.7 million. The expansion of the middle class and the decline of extreme poverty to 0.85% directly drove the surge of economic activity in various regions. For the Company, this increase in public productivity not only boosted energy consumption, but also enhanced the readiness of the domestic market to absorb the decarbonization agenda and sustainably support Indonesia's Net Zero Emission roadmap.

Performance of the Electricity Industry

The national electricity industry recorded solid operational performance in line with the growth of domestic economic activity. National electricity supply by PT PLN (Persero) increased by 3.75% to 317.69 terawatt-hours (TWh), driven by stronger demand in the industrial, commercial, and residential segments. To keep pace with this upward trend, the nation's installed power generation capacity was expanded to 107.51 GW, successfully driving per capita electricity consumption beyond the national target of 1,464 kWh to reach 1,584 kWh.

To support this surge in installed capacity and meet national consumption needs, the energy supply configuration in the power generation mix remains dominated by fossil fuel-based assets as the mainstay of baseload power, alongside the expanding development of new and renewable energy (NRE). Amid the dominance of coal-fired power plants as the main load support, the gas-fired power plant fleet, which includes gas-fired power plants (PLTG), combined cycle gas turbine power plants (PLTGU), gas-fired microturbine power plants (PLTMG), and combined cycle microturbine gas turbine power plants (PLTMGU), plays a crucial role as the second-largest contributor in the hydrocarbon segment. The flexible nature of gas-fired power plants and their ability to respond quickly (high ramping rate) make them a reliable solution for maintaining the stability of the national grid, while also serving as a low-emission transition bridge compared to other fossil fuel infrastructure.

Tahun buku 2025 menjadi landasan strategis bagi transformasi rendah karbon melalui pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034, yang mengalokasikan porsi mayoritas penambahan kapasitas pembangkit dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Merespons dinamika industri tersebut, PLNSC secara proaktif mengambil peran strategis untuk mengoptimalkan keandalan serta ketersediaan pasokan listrik di tanah air. Melalui langkah integratif ini, Perseroan berkomitmen memperkokoh kedaulatan energi nasional sekaligus mengakselerasi dekarbonisasi menuju ekosistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, efisien, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2025

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) telah menyusun strategi dan kebijakan strategis yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Dengan mempertimbangkan perkembangan industri ketenagalistrikan, dinamika pasar, serta arah transformasi PLN Group, Perseroan menetapkan berbagai langkah strategis guna memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan bagian dari fase “Membangun Pondasi yang Kokoh” sebagaimana ditetapkan dalam roadmap Perseroan periode 2024–2028. Pada fase ini, Perseroan berfokus pada penguatan fondasi bisnis melalui peningkatan kapabilitas organisasi, penyempurnaan proses bisnis, penguatan kemitraan strategis, pengembangan portofolio produk dan jasa, serta percepatan transformasi digital sebagai landasan bagi akselerasi pertumbuhan pada periode berikutnya.

Berdasarkan arah pengembangan usaha tersebut, Perseroan menetapkan sejumlah kebijakan dan inisiatif strategis yang meliputi:

1. Penguatan Bisnis *Supply Chain* Jangka Panjang
   Perseroan mengembangkan model bisnis *supply chain* yang lebih terintegrasi melalui implementasi *demand planning* dan penguatan bisnis *stockist material* guna mendukung keandalan pasokan suku cadang dan material ketenagalistrikan.

The fiscal year 2025 serves as a strategic foundation for low-carbon transformation through the adoption of the General Electricity Supply Plan (RUPTL) for the 2025–2034 period, which allocates the majority of new generation capacity to Renewable Energy (EBT). In response to these industry dynamics, PLNSC is proactively taking on a strategic role to optimize the reliability and availability of electricity supply across the country. Through these integrated measures, the Company is committed to strengthening national energy sovereignty while accelerating decarbonization toward a cleaner, more efficient electricity ecosystem that aligns with the principles of sustainable development in Indonesia.

Strategy and Strategic Policies for 2025

To achieve its established targets, PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) has formulated a strategy and strategic policies aligned with the Company’s Long-Term Plan (RJPP) for 2024–2028 and the Company’s 2025 Work Plan and Budget (RKAP). Taking into account developments in the electric power industry, market dynamics, and the direction of the PLN Group’s transformation, the Company has established various strategic measures to strengthen its competitiveness and support sustainable business growth.

2025 is part of the “Building a Solid Foundation” phase as outlined in the Company’s roadmap for the 2024–2028 period. During this phase, the Company focuses on strengthening its business foundation by enhancing organizational capabilities, streamlining business processes, strengthening strategic partnerships, developing its product and service portfolio, and accelerating digital transformation as the foundation for accelerated growth in the subsequent period.

Based on this business development direction, the Company has established a number of strategic policies and initiatives, including:

1. Strengthening the Long-Term Supply Chain Business
   The Company develops a more integrated supply chain business model through the implementation of demand planning and the strengthening of the material stockist business to support the reliability of the supply of spare parts and electricity materials.

2. Pengembangan Portofolio Produk dan Jasa
   Perseroan memperluas portofolio bisnis melalui pengembangan produk dan jasa yang mendukung kebutuhan sektor ketenagalistrikan dan utilitas, termasuk peluang pada segmen energi baru terbarukan dan layanan pendukung operasional pembangkit.
3. Penguatan Kemitraan Strategis dengan *Principal* dan Manufaktur
   Perseroan meningkatkan kerja sama dengan *principal*, manufaktur, dan mitra strategis guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan ketersediaan produk, serta menciptakan peluang pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
4. Peningkatan Penetrasi Pasar dan Pengembangan Pelanggan
   Perseroan mengoptimalkan peluang pasar di lingkungan PLN Group sekaligus memperluas pangsa pasar Non-PLN Group melalui penguatan fungsi pemasaran, pengembangan basis pelanggan, dan peningkatan kualitas layanan.
5. Pengembangan Platform dan Sistem Digital
   Perseroan melanjutkan transformasi digital melalui pengembangan platform dan sistem yang terintegrasi guna mendukung efektivitas proses bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
6. Peningkatan Efektivitas Operasional dan Pengelolaan Persediaan
   Perseroan melakukan optimalisasi proses bisnis dan pengelolaan persediaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengendalian biaya, serta mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan secara tepat waktu.
7. Penguatan Struktur Pendanaan dan Likuiditas Perusahaan
   Perseroan terus memperkuat pengelolaan keuangan dan likuiditas guna mendukung kebutuhan operasional, pengembangan usaha, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan secara berkelanjutan.

Berbagai strategi dan kebijakan strategis tersebut menjadi fokus Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sepanjang tahun 2025. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi melalui program kerja dan inisiatif perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP, dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi bisnis, kebutuhan pelanggan, serta dinamika industri ketenagalistrikan. Strategi tersebut juga menjadi dasar bagi Perseroan dalam menjaga kesinambungan usaha sekaligus memperkuat fondasi bisnis sesuai arah pengembangan yang ditetapkan dalam RJPP 2024–2028.

2. Development of Product and Service Portfolio
   The Company expands its business portfolio through the development of products and services that support the needs of the electricity and utility sectors, including opportunities in the new and renewable energy segment and power plant operational support services.
3. Strengthening Strategic Partnerships with Principals and Manufacturers
   The Company enhances cooperation with principals, manufacturers, and strategic partners to strengthen the supply chain, increase product availability, and create sustainable business development opportunities.
4. Increasing Market Penetration and Customer Development
   The Company optimizes market opportunities within the PLN Group while also expanding market share outside the PLN Group through strengthening the marketing function, developing the customer base, and improving service quality.
5. Development of Digital Platforms and Systems
   The Company continues digital transformation through the development of integrated platforms and systems to support the effectiveness of business processes, improve service quality, and enable faster and more accurate decision-making.
6. Improving Operational Effectiveness and Inventory Management
   The Company optimizes business processes and inventory management to increase operational efficiency, strengthen cost control, and support the timely fulfillment of customer needs.
7. Strengthening the Company's Funding Structure and Liquidity
   The Company continues to strengthen financial and liquidity management to support operational needs, business development, and to sustainably maintain the Company's financial health.

These various strategies and strategic policies became the Company's focus in carrying out its business activities throughout 2025. The implementation was carried out in an integrated manner through work programs and corporate initiatives that had been established in the RKAP, while continuing to take into account the development of business conditions, customer needs, and the dynamics of the electricity industry. This strategy also serves as the basis for the Company in maintaining business continuity while strengthening its business foundation in accordance with the development direction set out in the RJPP 2024–2028.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memiliki peran utama dalam merumuskan arah strategis Perseroan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 yang mengacu pada RJPP 2024–2028. Dalam proses penyusunannya, Direksi melakukan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya, mengkaji perkembangan industri ketenagalistrikan, memetakan peluang dan tantangan usaha, serta mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan arah transformasi PLN Group.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Direksi menetapkan fokus pengembangan Perseroan pada penguatan fondasi bisnis melalui pengembangan *supply chain* jangka panjang, peningkatan kualitas layanan pelanggan, penguatan kemitraan strategis dengan principal dan manufaktur, perluasan pasar, pengembangan platform digital, serta peningkatan efektivitas organisasi dan proses bisnis. Fokus tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran strategis, program kerja, indikator kinerja utama, dan target operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan usaha Perseroan sepanjang tahun 2025.

Dalam perumusan strategi, Direksi juga melibatkan seluruh fungsi terkait untuk memastikan sinergi antara aspek bisnis, operasional, keuangan, manajemen risiko, teknologi informasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar yang kuat, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha Perseroan.

Direksi secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian target yang telah ditetapkan melalui mekanisme pemantauan kinerja perusahaan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian program kerja maupun kebijakan usaha sesuai perkembangan kondisi internal dan eksternal Perseroan.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategy and Strategic Policies

The Board of Directors has a key role in formulating the Company's strategic direction through the preparation of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) which refers to the RJPP 2024–2028. In the preparation process, the Board of Directors evaluates the previous year's performance, reviews the development of the electricity industry, maps business opportunities and challenges, and considers customer needs and the direction of the PLN Group's transformation.

Based on the results of this study, the Board of Directors set the Company's development focus on strengthening the business foundation through the development of a long-term supply chain, improving customer service quality, strengthening strategic partnerships with principals and manufacturers, market expansion, the development of digital platforms, and improving the effectiveness of the organization and business processes. This focus was subsequently translated into strategic objectives, work programs, key performance indicators, and operational targets that serve as guidelines for the implementation of the Company's business throughout 2025.

In formulating the strategy, the Board of Directors also involves all relevant functions to ensure synergy among business, operational, financial, risk management, information technology, and human resource management aspects. This approach is taken so that every policy established has a strong, measurable basis and is in accordance with the Company's business development needs.

The Board of Directors periodically evaluates the implementation of the strategy and the achievement of established targets through the company performance monitoring mechanism. The results of this evaluation are used as a basis for adjusting work programs and business policies in accordance with the development of the Company's internal and external conditions.

Pencapaian atas Kinerja Perseroan

Pada tahun 2025, Perseroan berhasil mempertahankan kinerja yang baik di tengah dinamika industri ketenagalistrikan dan tantangan lingkungan usaha yang terus berkembang. Berbagai strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan secara konsisten memberikan kontribusi terhadap penguatan bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan kapabilitas organisasi dalam mendukung kebutuhan sektor ketenagalistrikan dan utilitas.

Dari aspek keuangan, Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1,98 triliun, tumbuh 17,16% dibandingkan tahun sebelumnya dan didukung oleh pertumbuhan aktivitas bisnis di lingkungan PLN Group maupun pelanggan non-PLN Group. Pertumbuhan pendapatan tersebut turut mendorong peningkatan profitabilitas Perseroan, yang tercermin dari laba usaha sebesar Rp278,33 miliar, laba sebelum pajak sebesar Rp177,79 miliar, dan laba bersih sebesar Rp133,42 miliar.

Posisi keuangan Perseroan juga menunjukkan penguatan yang tercermin dari total aset sebesar Rp1,50 triliun dan total ekuitas sebesar Rp467,06 miliar pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas usaha, pengelolaan modal kerja yang efektif, serta kemampuan Perseroan dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Dari aspek operasional, Perseroan berhasil membukukan *sales order* sebesar Rp2,07 triliun yang berasal dari 1.007 kontrak baru selama tahun 2025. Perseroan juga mampu mempertahankan kualitas layanan dengan capaian *Service Level Agreement* (SLA) Kontrak sebesar 98,32%, yang mencerminkan kinerja yang baik dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, mutu, serta ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, Perseroan mencatatkan nilai Kontrak Kinerja sebesar 103,62 yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan berbagai program dan inisiatif strategis sepanjang tahun pelaporan.

The Company's Performance Achievements

In 2025, the Company successfully maintained excellent performance amid the dynamics of the electricity industry and an ever-evolving business environment. Various strategic initiatives and policies, implemented consistently, contributed to strengthening the business, improving service quality, and developing organizational capabilities to support the needs of the electricity and utilities sectors.

From financial aspects, the Company recorded operating revenue of Rp1.98 trillion, increased by 17.16% compared to the previous year and supported by business growth within the PLN Group and non-PLN Group customers. This revenue growth also drove an increase in the Company's profitability, as reflected in operating profit of Rp278.33 billion, profit before tax of Rp177.79 billion, and net profit of Rp133.42 billion.

The Company's financial position also demonstrated resilience, as indicated by total assets of Rp1.50 trillion and total equity of Rp467.06 billion as of the end of 2025. This growth was supported by increased business activity, effective working capital management, and the Company's ability to maintain its financial soundness.

From the operational aspects, the Company successfully recorded sales orders of Rp2.07 trillion from 1,007 new contracts throughout 2025. The Company was also successful in maintaining service quality, achieving a Contract Service Level Agreement (SLA) of 98,32%, which reflects strong performance in occupational safety and health, quality, and on-time project delivery. In addition, the Company recorded a Performance Contract score of 103.62, demonstrating its success in implementing various strategic programs and initiatives throughout the reporting year.

Perbandingan Target dan Realisasi

Secara umum, Perseroan berhasil mencapai bahkan melampaui sebagian besar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Kinerja tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi bisnis, optimalisasi pengelolaan operasional, serta kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan peluang usaha yang tersedia sepanjang tahun.

Dari aspek keuangan, pendapatan usaha Perseroan mencapai 109,20% dari target RKAP. Sementara itu, laba usaha mencapai 123,80% dari target, sedangkan laba sebelum pajak dan laba bersih masing-masing mencapai 133,72% dan 128,65% dari target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan volume penjualan, penguatan sinergi bisnis di lingkungan PLN Group, optimalisasi portofolio bisnis, serta pengelolaan biaya yang lebih efektif.

Dari sisi posisi keuangan, total aset mencapai 147,30% dari target RKAP dan ekuitas mencapai 101,56% dari target. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memperkuat struktur keuangan sekaligus mendukung peningkatan aktivitas usaha sepanjang tahun 2025.

Realisasi *sales order* PLN Group melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh peningkatan kebutuhan pelanggan dan optimalisasi sinergi antar entitas PLN Group. Selain itu capaian nilai Kontrak Kinerja Tahun 2025 sebesar 103,62% atau melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Perseroan juga berhasil memenuhi target implementasi berbagai program strategis, antara lain pengembangan bisnis energi baru terbarukan, implementasi program stockist, penguatan proses bisnis, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Tantangan dan Kendala yang Dihadapi Perusahaan

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perkembangan industri ketenagalistrikan, dinamika pasar, serta meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap kualitas layanan dan keandalan rantai pasok. Kondisi tersebut menuntut Perseroan untuk terus meningkatkan kapabilitas bisnis dan operasional agar mampu mempertahankan daya saing di tengah lingkungan usaha yang semakin dinamis.

Comparison of Targets and Realization

In general, the Company succeeded in achieving and even exceeding most of the targets established in the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP). This performance reflects the effectiveness of the business strategy's implementation, the optimization of operational management, and the Company's ability to capitalize on business opportunities throughout the year.

From financial aspects, the Company's operating revenue reached 109.20% of the RKAP target. Meanwhile, operating profit reached 123.80% of the target, while profit before tax and net profit reached 133.72% and 128.65%, respectively, of the set targets. These achievements were supported by increased sales volume, strengthened business synergies within the PLN Group, optimization of the business portfolio, and more effective cost management.

In terms of financial position, total assets reached 147.30% of the RKAP target, and equity reached 101.56% of the target. These results demonstrate the Company's ability to strengthen its financial structure while supporting increased business activities throughout 2025.

The PLN Group's sales order realization exceeded the set target, supported by increased customer demand and optimized synergies among PLN Group entities. In addition, the 2025 Performance Contract value reached 103.62%, exceeding the target set at the beginning of the year. The Company also successfully met its targets for implementing various strategic programs, including the development of renewable energy businesses, the implementation of the stockist program, the strengthening of business processes, the enhancement of human resource competencies, and the implementation of risk management and corporate governance.

Challenges and Constraints Faced by the Company

Throughout 2025, the Company faced various challenges arising from the development of the electricity industry, market dynamics, and increasing customer demands for service quality and supply chain reliability. These conditions required the Company to continue improving its business and operational capabilities in order to maintain competitiveness amid an increasingly dynamic business environment.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Perseroan adalah semakin ketatnya persaingan dalam penyediaan suku cadang, material, dan jasa pendukung ketenagalistrikan. Di sisi lain, kebutuhan pelanggan yang semakin beragam dan menuntut kecepatan pemenuhan material mendorong Perseroan untuk terus memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan ketersediaan produk, serta menjaga kualitas layanan secara konsisten.

Perseroan juga menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan usaha yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan modal kerja dan pengelolaan likuiditas. Selain itu, pengembangan pasar di luar PLN Group, penguatan kemitraan strategis dengan principal dan manufaktur, serta percepatan transformasi digital menjadi agenda penting yang memerlukan dukungan sumber daya, proses bisnis, dan sistem yang semakin terintegrasi.

Prospek Usaha 2026

Perseroan memandang prospek usaha pada tahun 2026 tetap positif seiring dengan berlanjutnya kebutuhan sektor ketenagalistrikan terhadap pasokan suku cadang, material, dan jasa pendukung yang andal. Sebagai bagian dari ekosistem PLN Group, Perseroan memiliki peluang untuk terus mendukung peningkatan keandalan pembangkit melalui penyediaan solusi *supply chain* yang terintegrasi, sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan yang berasal dari pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan peningkatan kebutuhan operasional pelanggan.

Selain pasar *captive* PLN Group, Perseroan juga melihat peluang pengembangan usaha yang berasal dari segmen non-PLN Group, termasuk perusahaan pembangkit listrik, sektor industri, dan pelanggan utilitas lainnya. Pengembangan portofolio produk dan jasa, penguatan kemitraan strategis dengan principal dan manufaktur, serta perluasan akses pasar diharapkan dapat mendukung peningkatan kontribusi bisnis dari segmen tersebut.

Perseroan juga mencermati peluang yang muncul dari pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan transformasi sektor energi nasional. Sejalan dengan arah pengembangan bisnis yang ditetapkan dalam RJPP 2024–2028, Perseroan akan terus mengembangkan kapabilitas dalam penyediaan produk, material, dan layanan yang mendukung kebutuhan pembangkit berbasis energi terbarukan serta infrastruktur pendukungnya.

One of the main challenges faced by the Company is increasingly intense competition in the provision of spare parts, materials, and electricity support services. On the contrary, increasingly diverse customer needs and demands for rapid material fulfillment are driving the Company to continuously strengthen its supply chain management, improve product availability, and consistently maintain service quality.

The Company also faces challenges in managing business growth, which is followed by increased working capital requirements and liquidity management. In addition, market expansion outside the PLN Group, strengthening strategic partnerships with principals and manufacturers, and accelerating digital transformation key priorities that require increasingly integrated resources, business processes, and systems.

Business Outlook for 2026

The Company remains positive regarding its business outlook for 2026, given the electricity sector's ongoing need for a reliable supply of spare parts, materials, and support services. As part of the PLN Group ecosystem, the Company has the opportunity to continue supporting improvements in power plant reliability by providing integrated supply chain solutions, while also capitalizing on growth opportunities arising from the development of electricity infrastructure and increased customer operational needs.

In addition to the PLN Group's captive market, the Company also views business development opportunities arising from non-PLN Group segments, including power generation companies, the industrial sector, and other utility customers. The development of the product and service portfolio, the strengthening of strategic partnerships with principals and manufacturers, and the expansion of market access are expected to support increased business contributions from these segments.

The Company is also closely monitoring opportunities arising from the development of new and renewable energy (EBT) and the transformation of the national energy sector. In line with the business development direction set out in the 2024–2028 RJPP, the Company will continue to develop its capabilities in providing products, materials, and services that support the needs of renewable energy-based power plants and their supporting infrastructure.

Dalam menghadapi peluang dan tantangan tersebut, Perseroan akan melanjutkan berbagai program penguatan fondasi bisnis melalui optimalisasi pengelolaan rantai pasok, pengembangan platform digital, peningkatan kualitas layanan pelanggan, penguatan likuiditas, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Perseroan dalam jangka panjang.

Penerapan Tata Kelola

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pencapaian kinerja perusahaan. Sebagai Entitas Anak PT PLN Nusantara Power, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan secara konsisten dalam seluruh aktivitas pengelolaan perusahaan guna memastikan terciptanya proses bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan efektivitas penerapan tata kelola, Perseroan melaksanakan penilaian implementasi GCG melalui mekanisme self assessment setiap dua tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN beserta indikator dan parameter penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, serta mencakup berbagai aspek tata kelola, antara lain komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, serta aspek tata kelola lainnya. Penilaian self assessment terakhir dilaksanakan pada tahun 2024, dan hasil penilaian tersebut telah disajikan dalam Laporan Terintegrasi Perseroan Tahun 2024.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat implementasi tata kelola melalui penyempurnaan kebijakan dan perangkat tata kelola perusahaan, penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Implementasi tata kelola tersebut didukung oleh berbagai pedoman yang berlaku di lingkungan Perseroan, antara lain Pedoman *Good Corporate*

In addressing these opportunities and challenges, the Company will continue various programs to strengthen its business foundation through the optimization of supply chain management, the development of digital platforms, improvements in customer service quality, the strengthening of liquidity, and the development of human resource competencies. These measures are aimed at supporting sustainable business growth and increasing the Company's competitiveness in the long term.

Implementation of Governance

The Company believes that the implementation of good corporate governance (GCG) is one of the important factors in supporting business sustainability and the achievement of company performance. As a Subsidiary of PT PLN Nusantara Power, the Company implements the principles of Integrated Governance (TKT), which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The implementation of these principles is carried out consistently in all company management activities to ensure the creation of business processes that are transparent, accountable, and in accordance with applicable provisions.

To ensure the effectiveness of its governance implementation, the Company conducts an assessment of GCG implementation through a self-assessment mechanism once every two years in accordance with the prevailing regulations. The assessment refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning the Guidelines on Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, along with the assessment indicators and parameters established by the Ministry of SOEs. It covers various governance aspects, including commitment to the sustainable implementation of GCG, shareholders and the GMS, the Board of Commissioners, the Board of Directors, information disclosure and transparency, as well as other governance aspects. The most recent self-assessment was conducted in 2024, and the assessment results were presented in the Company's 2024 Integrated Report.

Throughout 2025, the Company continued to strengthen governance implementation through the refinement of company governance policies and instruments, the strengthening of the internal control system, the integrated implementation of risk management, and the improvement of compliance with laws, regulations, and company policies. This governance implementation is supported by various guidelines applicable within the Company, including the Good Corporate Governance Guidelines, Code of

Governance, Code of Conduct, Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi, pedoman benturan kepentingan, pedoman Satuan Pengawas Intern, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta pedoman pengendalian gratifikasi.

Perseroan juga secara konsisten melaksanakan fungsi Satuan Pengawas Intern dan pengawasan guna memastikan efektivitas pengendalian serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selain melaksanakan program audit berbasis risiko, Perseroan terus memperkuat budaya kepatuhan melalui implementasi pelaporan gratifikasi, benturan kepentingan, dan *whistleblowing system*, termasuk pemanfaatan *Compliance Online System* sebagai sarana pelaporan dan pemantauan kepatuhan di lingkungan perusahaan.

Penerapan ESG

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan, Perseroan terus mengintegrasikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ke dalam pengelolaan perusahaan dan proses pengambilan keputusan bisnis. Penerapan ESG dilakukan secara bertahap dan selaras dengan arah kebijakan pemegang saham serta strategi pengembangan Perseroan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melanjutkan penguatan implementasi ESG melalui integrasi aspek keberlanjutan ke dalam sistem manajemen risiko perusahaan, pengembangan model bisnis berbasis risiko, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi secara efektif. Perseroan juga terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan prinsip four eyes principle, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan pengembangan usaha, guna memastikan terciptanya tata kelola yang lebih prudent, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Sejalan dengan Program Streamlining PLN Group, memasuki tahun 2026, Direksi secara aktif telah melaksanakan langkah-langkah persiapan di internal Perseroan untuk menjadi bagian dari transformasi bisnis PLN Group. Selain pembentukan *Tim Task Force Streamlining* PT PLNSC, Manajeme juga telah mempersiapkan Arah Strategis dan Rencana Aksi Korproasi Perseroan meliputi seluruh aspek yang relevan, termasuk Teknologi Informasi serta melibatkan pihak konsultan streamlining. Perseroan juga telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui

Conduct, Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors, conflict of interest guidelines, Internal Audit Unit guidelines, the whistleblowing system, and gratuity control guidelines.

The Company also consistently carries out Internal Audit Unit and control functions to ensure the effectiveness of controls and compliance with applicable procedures and provisions. In addition to carrying out a risk-based audit program, the Company continues to strengthen its compliance culture through the implementation of gratuity reporting, conflict of interest, and the whistleblowing system, including the use of the Compliance Online System as a means of reporting and monitoring compliance within the Company.

Implementation of ESG

As part of the Company's commitment to support sustainable business practices, the Company continues to integrate Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects into company management and business decision-making processes. The implementation of ESG is carried out gradually and in line with the direction of shareholder policy and the Company's development strategy in creating long-term value for the company and its stakeholders.

Throughout 2025, the Company continued to strengthen ESG implementation through the integration of sustainability aspects into the company's risk management system, the development of a risk-based business model, and the effective implementation of integrated risk management and governance. The Company also continues to evaluate the effectiveness of the implementation of the four eyes principle, particularly in decision-making processes related to investment and business development, to ensure the creation of governance that is more prudent, accountable, and sustainability-oriented.

In line with the PLN Group Streamlining Program, upon entering 2026, the Board of Directors actively undertook internal preparatory measures to position the Company as part of the PLN Group's business transformation. In addition to establishing the PT PLNSC Streamlining Task Force, Management also prepared the Company's Corporate Strategic Direction and Corporate Action Plan covering all relevant aspects, including Information Technology, and engaged a streamlining consultant. The Company also coordinated with all relevant stakeholders through meetings and Town Hall Meetings and disclosed

rapat – rapat serta *town hall meeting* dan menyampaikan keterbukaan informasi di media massa nasional terkait rencana pengambilalihan saham Perseroan oleh PT PLN Electricity Services sebagai bagian dari Program Streamlining PLN Group. Ke depan, seluruh lini di Perseroan berkomitmen untuk terus mendukung transformasi bisnis di PLN Group sebagai salah satu agenda pertumbuhan ekonomi nasional di tahun mendatang.

information through the national mass media regarding the proposed acquisition of the Company's shares by PT PLN Electricity Services as part of the PLN Group Streamlining Program. Going forward, all functions across the Company remain committed to supporting the PLN Group's business transformation as one of the national economic growth initiatives in the years ahead.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada tahun 2025 terdapat perubahan komposisi Direksi PLNSC dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Andy Adam sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan dan Bapak Bahtiar Wibisana yang masa jabatannya sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan. Serta penunjukkan Bapak Zeta Junisar Muda sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan dan penunjukkan Bapak Andreas Arthur sebagai Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan.

Dengan demikian, informasi perubahan komposisi Direksi PLNSC sampai dengan 31 Desember 2025, sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2025 – 31 Januari 2025

Plt. Direktur Utama I President Commissioners

Thommi Haposan

Periode 1 Februari 2025 – 28 Februari 2025

Plt. Direktur Utama I President Commissioners

Thommi Haposan

Periode 1 Maret 2025 – sekarang

Plt. Direktur Utama I President Commissioners

Thommi Haposan

Changes in the Composition of the Board of Directors

In 2025, the composition of the PLNSC Board of Directors changed following the end of Mr. Andy Adam's term of office as Acting Director of Engineering and Services and Mr. Bahtiar Wibisana's term of office as Director of Business and Finance, as well as the appointment of Mr. Zeta Junisar Muda as Acting Director of Engineering and Services and Mr. Andreas Arthur as Acting Director of Business and Finance.

Therefore, the composition of the Board of Directors of PLNSC as of December 31, 2025, was as follows:

January 1, 2025 – January 31, 2026

Direktur Bisnis dan Keuangan I Business and Finance Director

- **Bahtiar Wibisana**

Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan I Act. Director of Engineering and Services

- **Andy Adam**

February 1, 2025 – February 28, 2026

Direktur Bisnis dan Keuangan I Business and Finance Director

- **Bahtiar Wibisana**

Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan I Act. Director of Engineering and Services

- **Zeta Junisar Muda**

March 1, 2025 - Present

Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan I Act. Business and Finance Director

- **Andreas Arthur**

Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan I Act. Director of Engineering and Services

- **Zeta Junisar Muda**

Penutup

Direksi PT PLN Suku Cadang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan, nasihat, dan pengawasan yang diberikan sepanjang tahun 2025 sehingga Perseroan dapat menjalankan berbagai agenda strategis serta mencatatkan kinerja yang positif. Direksi juga menyampaikan penghargaan kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungan yang senantiasa diberikan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Perseroan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, principal, pemasok, regulator, serta seluruh entitas di lingkungan PLN Group atas kerja sama dan sinergi yang terjalin selama tahun 2025. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh insan PLNSC atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi yang diberikan dalam mendukung pencapaian kinerja Perseroan sepanjang tahun.

Dengan fondasi bisnis yang semakin kuat serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Perseroan akan terus melanjutkan upaya pengembangan usaha secara berkelanjutan sesuai dengan arah strategis yang telah ditetapkan dalam RJPP 2024–2028 guna mendukung pertumbuhan perusahaan dan peningkatan kontribusi bagi sektor ketenagalistrikan nasional.

Closing Remarks

The Board of Directors of PT PLN Suku Cadang expresses its appreciation and gratitude to the Board of Commissioners for the guidance, advice, and supervision provided throughout 2025, enabling the Company to carry out various strategic agendas and record positive performance. The Board of Directors also expresses its appreciation to the Shareholders for the trust and support consistently given in the management and development of the Company's business.

We also extend our gratitude to all customers, business partners, principals, suppliers, regulators, and all entities within the PLN Group for the cooperation and synergy established during 2025. We extend our highest appreciation to all PLNSC personnel for their dedication, professionalism, and contribution in supporting the achievement of the Company's performance throughout the year.

With an increasingly strong business foundation and the support of all stakeholders, the Company will continue its sustainable business development efforts in accordance with the strategic direction set out in the RJPP 2024–2028 to support company growth and increased contribution to the national electricity sector.

Jakarta, 29 Juni I June 2026
Atas Nama Direksi
On Behalf of the Board of Directors

THOMMI HAPOSAN
Plt. Direktur Utama I Act. President Director

Tanggung Jawab Atas Laporan Terintegrasi 2025

Statement Letter of Responsibility for Integrated Report 2025

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Terintegrasi 2025 PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Statement Letter of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the Responsibility for the 2025 Integrated Report of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Terintegrasi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran seluruh isi Laporan Terintegrasi Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in PT Prima Layanan Suku Cadang's 2025 integrated report has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the Company's Integrated Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hereby, this statement is made truthfully.

Jakarta, 29 Juni I June **2026**

Dewan Komisaris I Board of Commissioners

Suparyanto
Plt. Komisaris Utama I Act. President Commissioners

Hariyanto
Plt. Komisaris I Act. Commissioners

Abdan Hanif Satria Budiman
Plt. Komisaris I Act. Commissioners

Direksi I Board of Directors

Thommi Haposan
Plt. Direktur Utama I Act.President Director

Andreas Arthur
Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan
Act. Director of Business and Finance

Zeta Junisar Muda
Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan
Act. Director of Engineering and Services



03

Profil Perusahaan

Company Profile

Identitas Perusahaan

Corporate Identify [GRI 2-1]



Nama Perusahaan Company Name [GRI 2-1, POJK B.3]	**PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang**
Nama Sebutan Commercial Name	**PLNSC atau / or PT PLN Suku Cadang**
Status Perusahaan Company Status [GRI 2-1]	**Perseroan Terbatas** Limited Liability Company
Tanggal Pendirian Establishment Date	**16 Juni 2017** June 16, 2017
Modal Dasar Authorized Capital	**Rp 600.000.000.000,-**
Jumlah Sumber Daya Manusia Number of Human Resources	**Tahun** | years **2025 : 58 orang** | people **Tahun** | years **2024 : 60 orang** | people
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Notaris Nomor 5 tanggal 16 Juni 2017 dari Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri S.H., M.kn di Surabaya dan Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0030040.AH.01.01. Tahun 2017 Tanggal 14 Juli 2017. Notarial Deed Number 5 dated June 16, 2017, from Notary Ni Putu Ayunita Waspuri S.H., M.kn in Surabaya, and Approval by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number AHU-0030040. AH.01.01. Year 2017 dated July 14, 2017.
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	**Rp 150.000.000.000,-**
Kepemilikan Saham Share Ownership [GRI 2-1, POJK 3.C.3]	**51%** PT PLN Nusantara Power **49%** PT PLN Indonesia Power



Kegiatan Usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Business Activities in accordance with the Articles of Association [POJK C.4]	**Menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang mencakup pengadaan listrik, konstruksi ketenagalistrikan, perdagangan besar dan eceran terkait ketenagalistrikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis di bidang ketenagalistrikan, serta aktivitas pergudangan dan penunjang angkutan yang mendukung operasional sektor ketenagalistrikan.** Organizing the electricity business, which includes electricity procurement, electricity construction, wholesale and retail trade related to electricity, professional, scientific, and technical activities in the electricity sector, as well as warehousing and transportation support activities that support the operation of the electricity sector.
Produk dan Jasa Layanan Products and Services [POJK C.4]	Tiga lini bisnis yaitu: • Penyediaan suku cadang dan consumables pembangkitan listrik seperti Power Plant Material; • Penyediaan jasa dan retrofit pembangkit listrik seperti Power Plant Services; serta • Penyediaan material dan part energi baru terbarukan seperti Renewable Energy Part. Three line of business: • Provision of power plant spare parts and consumables, such as Power Plant Materials; • Provision of power plant services and retrofits, such as Power Plant Services; and • Provision of renewable energy materials and parts, such as Renewable Energy Parts.
Wilayah Operasional Operational Area [POJK51-3.C.4]	**Seluruh Indonesia** Throughout Indonesia
Alamat Kantor Pusat Head Office Address [GRI 2-1, POJK C.2]	Gedung Recapital Lt. 1 - 3 Jl. Aditiyawarman No.55, RT.3/RW.2, Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.
Kontak Perusahaan Company Contact	**Sekretaris Perusahaan** I Corporate Secretary: **Catur Ruwahyunita Minardhany** **Telephone.** 021- 7246184 ext.123 I **Email.** corsec@plnsc.co.id

Telepon Phone	+62 21-7246184	**Media Sosial** Social Media	@pln.sc PLN Suku Cadang @plnsc PT PLN Suku Cadang @pln_sc @pln.sc
Email	eng@plnsc.co.id info@plnsc.co.id		
Website	www.plnsc.co.id		

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (selanjutnya disebut PT PLN Suku Cadang/PLNSC) didirikan pada tanggal 16 Juni 2017 oleh PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi rantai pasok untuk sektor ketenagalistrikan dan utilitas di Indonesia. Kehadiran Perseroan merupakan bagian dari upaya mendukung keandalan operasional industri ketenagalistrikan nasional melalui penyediaan produk, jasa, dan layanan yang terintegrasi serta berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan industri energi dan meningkatnya kebutuhan sektor ketenagalistrikan, Perseroan terus melakukan pengembangan dan transformasi bisnis guna memperkuat perannya sebagai perusahaan solusi *supply chain* di lingkungan PT PLN (Persero). Strategi bisnis Perseroan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui penyediaan suku cadang dan consumables pembangkit listrik, jasa dan layanan retrofit pembangkit listrik, serta penyediaan material dan parts untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (hereinafter referred to as PT PLN Suku Cadang/PLNSC) was established on June 16, 2017 by PT PLN Nusantara Power and PT PLN Indonesia Power as a company engaged in providing supply chain solutions for the power and utilities sector in Indonesia. The Company's establishment forms part of the effort to support the operational reliability of the national power industry through the provision of integrated and sustainable products, services, and solutions.

In line with developments in the energy industry and the growing needs of the power sector, the Company continues to pursue business development and transformation to strengthen its role as a supply chain solutions provider within the PT PLN (Persero) Group. The Company's business strategy is focused on delivering added value to customers through the supply of spare parts and consumables for power plants, power plant retrofit services and solutions, as well as the provision of materials and parts to support the development of new and renewable energy.

Dalam mendukung kegiatan usahanya, PLNSC telah menjalin kemitraan strategis dengan lebih dari 500 (lima ratus) pabrikan dan manufaktur yang tersebar di 4 (empat) benua. Jaringan kemitraan global tersebut memungkinkan Perseroan menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas, tepat waktu, serta mampu memenuhi kebutuhan sektor ketenagalistrikan dan utilitas secara optimal.

Komitmen Perseroan terhadap kualitas dan keandalan operasional diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar internasional. Penerapan sistem tersebut menjadi landasan bagi Perseroan dalam menjalankan proses bisnis secara efektif, efisien, dan terukur guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan kepuasan pelanggan.

Dalam perjalanannya, PLNSC terus berinovasi dan melakukan transformasi untuk menjawab dinamika industri energi dan perkembangan teknologi. Perseroan juga senantiasa mendukung program pemerintah dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional, termasuk pengembangan pembangkit listrik yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan energi di Indonesia. [GRI 102-9]

Keterangan Perubahan Nama

Selama Perseroan berdiri, PLNSC belum mengalami perubahan nama hingga Laporan Terintegrasi ini diterbitkan.

Perubahan Signifikan Pada Perusahaan Selama Tahun Buku 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak ada perubahan signifikan pada Perseroan yang diakibatkan oleh aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau pembukaan/penutupan kantor dan wilayah operasional. Sehingga informasi tersebut tidak dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini. [GRI 102-10, POJK51-C.6]

To support its business operations, PLNSC has established strategic partnerships with more than 500 (five hundred) manufacturers across 4 (four) continents. This global partnership network enables the Company to deliver high-quality products and services in a timely manner while effectively meeting the needs of the power and utilities sector.

The Company's commitment to quality and operational reliability is demonstrated through the implementation of an integrated management system that refers to international standards. The implementation of this system serves as the foundation for the Company in conducting its business processes effectively, efficiently, and in a measurable manner to support improved corporate performance and customer satisfaction.

Throughout its history, PLNSC has continued to innovate and undertake transformation to respond to changes in the energy industry and technological advancements. The Company also consistently supports the Government's programs in the development of the national power sector, including the development of reliable, affordable, and environmentally friendly power plants to support energy sustainability in Indonesia. [GRI 102-9]

Information on Changes in the Company's Name

Since its establishment, PLNSC has not undergone any change in its corporate name up to the publication of this Integrated Report.

Significant Changes in the Company During Fiscal Year 2025

Throughout 2025, there were no significant changes to the Company resulting from corporate actions such as mergers, acquisitions, or the opening or closing of offices and operational areas. Therefore, this information cannot be presented in this Integrated Report. [GRI 102-10, POJK51-C.6]

Makna dan Logo Perusahaan

Corporate Logo and Meaning

Logo PT PLN Suku Cadang menegaskan identitas perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar PLN, sehingga makna dan filosofi dasarnya mengikuti logo PT PLN (Persero). Untuk makna logo PLN adalah melambangkan tenaga listrik melalui bentuk petir merah, yang menembus tiga gelombang biru yang melambangkan tiga bidang usaha utama PLN (pembangkitan, penyaluran, dan distribusi). Latar belakang kuning melambangkan pencerahan dan semangat yang menyala-nyala. Secara keseluruhan, logo ini merepresentasikan kerja cepat, tepat, dan keberanian dalam menghadapi tantangan untuk memberikan solusi energi terbaik bagi masyarakat.

The logo of PT PLN Suku Cadang affirms the Company's identity as part of the PLN Group, and therefore its meaning and underlying philosophy follow those of the PT PLN (Persero) logo. The meaning of the PLN logo is to symbolize electrical power through the red lightning bolt, which passes through three blue waves representing PLN's three main business areas, namely power generation, transmission, and distribution. The yellow background symbolizes enlightenment and a burning spirit. Overall, the logo represents speed, precision, and the courage to face challenges in providing the best energy solutions for the community.

PLN Suku Cadang

Bidang persegi panjang kuning vertikal melambangkan pencerahan dan semangat. Berperan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Warna kuning melambangkan pencerahan, yang diharapkan listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala–nyala yang dimiliki tiap insan PLN grup yang berkarya di perusahaannya.

The vertical yellow rectangular field symbolizes enlightenment and spirit. It signifies that PT PLN (Persero) serves as a well-organized institution or organization. The yellow color symbolizes enlightenment, reflecting the expectation that electricity will bring enlightenment to people's lives. Yellow also symbolizes the burning spirit possessed by every member of the PLN Group in carrying out their work within the Company.

Simbol petir atau kilat merah menggambarkan tenaga listrik sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh Perusahaan. Selain itu, petir mengartikan kerja cepat dan tepat para PT PLN (Persero) grup dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggan. Warna yang merah melambangkan kedinamisan gerak laju perusahaan PLN Grup serta keberanian setiap insan PLN Grup mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman.

The red lightning bolt symbol represents electrical power as the Company's primary service product. In addition, the lightning bolt signifies the swift and precise work of the PT PLN (Persero) Group in providing the best solutions to its customers. The red color symbolizes the dynamic movement of the PLN Group as well as the courage of every member of the PLN Group to face the challenges of changing times.

Tiga gelombang biru yang sejajar melambangkan tiga pilar utama bisnis ketenagalistrikan, yakni pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Sedangkan diberikan warna biru untuk menampilkan kesan konstan seperti halnya listrik tetap diperlukan dalam kehidupan manusia juga melambangkan keandalan yang dimiliki para insan PT PLN (Persero) grup dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

The three parallel blue waves symbolize the three main pillars of the electricity business, namely power generation, transmission, and distribution. The blue color is used to convey a sense of constancy, just as electricity remains an essential part of human life, and also symbolizes the reliability of the people of the PT PLN (Persero) Group in delivering the best services to their customers.

Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Core Value [GRI 102-16] [POJK51-C1]

Visi Vision

Menjadi Pilihan Utama Solusi Supply Chain yang Inovatif dan Berkelanjutan untuk Ketenagalistrikan dan Utilitas di Indonesia.

To be the First Choice for Innovative and Sustainable Supply Chain Solutions for Electricity and Utilities in Indonesia.





Misi Vision

a. Menyediakan solusi supply chain suku cadang, material, dan Jasa Pendukung lainnya yang inovatif, efisien dan berkelanjutan untuk mendukung sektor ketenagalistrikan dan energi terbarukan dengan harga kompetitif untuk pasar Indonesia dan luar negeri.
b. Meningkatkan value creation melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
c. Mengembangkan talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang adaptif dan inovatif.

a. Provide innovative, efficient, and sustainable supply chain solutions for spare parts, materials, and other supporting services to support the electricity and renewable energy sectors, with competitive pricing for domestic and international markets.
b. Increase value creation through the implementation of good corporate governance principles.
c. Develop the best talent to build an adaptive, innovative, and highly competitive organization.

Review Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Visi dan Misi Perusahaan ditetapkan dan diberlakukan melalui tinjauan secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan arah pengembangan, posisi bisnis yang akan dicapai serta sasaran yang ingin dicapai oleh Perseroan di masa mendatang. Perseroan telah memutakhirkan visi, misi dan tata nilai sesuai dengan Keputusan Direksi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) No. 002.S/DIR/PLNSC/2024 tanggal 11 November 2024.

Hingga laporan tahunan terintegrasi ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan review dan menyatakan bahwa Visi dan Misi Perusahaan masih relevan dengan perkembangan, kondisi lingkungan bisnis serta arah dan tujuan bisnis Perusahaan.

Review of the Vision and Mission by the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company's Vision and Mission are established and implemented through periodic reviews to ensure their continued relevance to the Company's development direction, targeted business position, and future objectives. The Company updated its Vision, Mission, and Corporate Values pursuant to the Circular Resolution of the Board of Directors of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang No. 002.S/DIR/PLNSC/2024 dated November 11, 2024.

As of the publication of this Integrated Annual Report, the Board of Commissioners and the Board of Directors have conducted a review and concluded that the Company's Vision and Mission remain relevant to developments, the business environment, and the Company's business direction and objectives.

Tata Nilai Perusahaan

Corporate core values

AKHLAK

Sebagai bagian dari penguatan budaya perusahaan, PLNSC menerapkan *Core Values* AKHLAK sebagai pedoman perilaku bagi seluruh insan perusahaan yang mengacu pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0073.P/DIR/2020 tentang Budaya Perusahaan. Tata Nilai Perusahaan terdiri atas dua elemen utama, yaitu *Values* sebagai landasan budaya kerja perusahaan dan *Panduan Perilaku* sebagai implementasi nyata dalam sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari insan PLNSC. *Core Values* AKHLAK terdiri atas 6 (enam) nilai dan panduan perilaku terdiri atas 18 (delapan belas) perilaku utama sebagai berikut:

As part of strengthening the Company's culture, PLNSC implements the AKHLAK Core Values as the code of conduct for all Company personnel, in accordance with the Board of Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0073.P/DIR/2020 concerning Corporate Culture. The Company's Corporate Values consist of two main elements, namely the Values as the foundation of the Company's work culture and the Code of Conduct as the practical implementation of the values in the attitudes, actions, and day-to-day behavior of PLNSC personnel. The AKHLAK Core Values consist of 6 (six) values, while the Code of Conduct comprises 18 (eighteen) key behaviors, as follows:

A Amanah I Trustworthy

Memegang Teguh Kepercayaan yang Diberikan
Uphold the Trust Given

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh pada nilai moral dan etika.

- Fulfilling promises and commitments;
- Responsible for tasks, decisions and actions taken;
- Adhere to moral and ethical values.

K Kompeten I Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Keep learning and develop capabilities

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

- Improve self-competence to answer ever-changing challenges;
- Help others learn;
- Complete tasks with the best quality.

H Harmonis I Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Care for each other and respect differences

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Respect everyone regardless of their background;
- Like to help others;
- Build a conducive work environment.

L Loyal I Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Dedicated and prioritizes the interests of the Nation and State

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOC, and the State;
- Will to sacrifice to achieve a greater goal;
- Obey the leader as long as it does not conflict with the law & ethics.

A Adaptif I Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.

- Quickly adapt to be better;
- Continuously make improvements following; technological developments.
- Act proactively.

K Kolaboratif I Collaborative

Membangun kerjasama yang sinergis
Building synergistic cooperation

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka untuk bekerjasama menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

- Providing opportunities for various parties to contribute;
- Open to working together to produce added value;
- Mobilizing the use of various resources for common goals.

Panduan Perilaku sebagai implementasi dari nilai-nilai utama perusahaan menjadi pedoman bagi insan PLN Suku Cadang dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku, sebagaimana tercermin pada penjelasan berikut:

The Code of Conduct, as the implementation of the Company's core values, serves as a guideline for PLNSC personnel in their attitudes, actions, and behavior, as reflected in the following descriptions:

Amanah
Trustworthy

A

Karyawan berkomitmen dalam mendukung dan mempersiapkan keberhasilan holding-subholding dengan penuh tanggung jawab dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
Employees are committed to supporting and preparing for the success of the holding and its subholdings, with full responsibility and adherence to moral and ethical values.

Kompeten
Competent

K

Karyawan konsisten meningkatkan kompetensi diri, bersedia membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik untuk keberhasilan pembentukan holding-subholding menuju proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.
Employees consistently improve their own competencies, are willing to help others learn, and complete tasks to the highest quality standards to support the success of the holding and its subholdings formation towards more active, efficient business processes.

Harmonis
Harmonious

H

Karyawan berperan aktif untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menghargai setiap orang dari berbagai latar belakang budaya, proses bisnis, alat, dan sistem operasional maupun penunjang operasional yang beragam menuju keberhasilan holding-subholding.
Employees play an active role in building a conducive work environment by respecting everyone from diverse cultural backgrounds, business processes, tools, and operational systems, as well as various operational supports, towards the success of the holding and its subholdings.

Loyal
Loyal

L

Karyawan memiliki sikap rela berkorban, memberikan kontribusi pemikiran, waktu, tenaga, serta kesediaan untuk memprioritaskan keberhasilan proses pembentukan holding-subholding dengan tetap menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara serta patuh kepada pimpinan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku.
Employees are willing to sacrifice, contribute ideas, time, and energy, and to prioritize the success of the holding and its subholdings formation process while maintaining the good name of fellow employees, executives, State-Owned Enterprises (SOEs), and the State, and obeying executives in accordance with applicable legal and ethical provisions.

Adaptif
Adaptive

A

Karyawan bertindak proaktif dan terus menerus mengikuti perkembangan bisnis demi terwujudnya pembentukan holding-subholding yang lebih efektif dan efisien.
Employees act proactively and continuously follow business developments to facilitate more effective, efficient formation of the holding and its subholdings.

Kolaboratif
Collaborative

K

Karyawan bersikap terbuka dalam bekerja sama, menggerakkan pemanfaatan sumber daya dan senantiasa bersedia untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen perusahaan demi kesuksesan pembentukan holding-subholding dengan segala tantangannya.
Employees act proactively and continuously follow business developments to facilitate more effective, efficient formation of the holding and its subholdings.

Maksud dan Tujuan Perusahaan

Corporate Purpose and Objectives [POJK51-C.4]

Mengacu pada Pasal 3 Anggaran Dasar PT PLN Suku Cadang, Perseroan didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan dan sektor pendukungnya guna mendukung keandalan serta keberlanjutan industri energi nasional. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mencakup pengadaan tenaga listrik, konstruksi ketenagalistrikan, perdagangan besar dan eceran yang berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan, aktivitas keuangan, jasa profesional, ilmiah dan teknis, hingga kegiatan pergudangan dan penunjang angkutan di bidang ketenagalistrikan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menjalankan berbagai kegiatan usaha strategis untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan sektor ketenagalistrikan secara terintegrasi dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

1. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya (Kode KBLI 46599);
2. Perdagangan besar suku cadang elektronik (Kode KBLI 46521);
3. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas serta produk yang berkaitan (Kode KBLI 46610);
4. Perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu (Kode KBLI 46634);
5. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (Kode KBLI 46651);
6. Instalasi listrik (Kode KBLI 43211);
7. Aktivitas perusahaan holding (Kode KBLI 64200);
8. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (Kode KBLI 70209);
9. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan (Kode KBLI 71102);
10. Penyelenggaraan pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik (Kode KBLI 35122);
11. Jasa pengurusan transportasi (Kode KBLI 52291);
12. Jasa inspeksi teknik instalasi (Kode KBLI 71204);
13. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa (Kode KBLI 72102);
14. Pengerukan (Kode KBLI 42914); dan
15. Kegiatan usaha lainnya dalam rangka memaksimalkan potensi Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).

Referring to Article 3 of the Articles of Association of PT PLN Suku Cadang, the Company was established to conduct business activities in the electricity sector and its supporting industries in order to support the reliability and sustainability of the national energy industry. The scope of the Company's business activities includes electricity-related activities, electricity construction, wholesale and retail trade related to the electricity sector, financial activities, professional, scientific and technical services, as well as warehousing and transportation support activities in the electricity sector.

In carrying out its business, the Company undertakes various strategic business activities to support the operational requirements and development of the electricity sector in an integrated and sustainable manner, including the following:

1. Wholesale of machinery, equipment, and other supplies (KBLI Code 46599);
2. Wholesale of electronic spare parts (KBLI Code 46521);
3. Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products (KBLI Code 46610);
4. Wholesale of cement, lime, sand, and stone (KBLI Code 46634);
5. Wholesale of chemical materials and products (KBLI Code 46651);
6. Electrical installation (KBLI Code 43211);
7. Holding company activities (KBLI Code 64200);
8. Other management consulting activities (KBLI Code 70209);
9. Engineering activities and related technical consultancy (KBLI Code 71102);
10. Operation of electricity utilization installations (KBLI Code 35122);
11. Freight forwarding services (KBLI Code 52291);
12. Technical inspection services for installations (KBLI Code 71204);
13. Research and development in technology and engineering (KBLI Code 72102);
14. Dredging (KBLI Code 42914); and
15. Other business activities aimed at maximizing the Company's potential in accordance with the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

Dalam pengembangan perusahaan sesuai maksud dan tujuan, Perseroan memiliki inisiatif transformasi produk dan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan, yaitu solusi pembangkit listrik non EBT, solusi pembangkit listrik EBT, solusi transmisi dan distribusi, dan solusi digital pada pembangkit Listrik (IoT). Berdasarkan arah pengembangan tersebut, PLNSC memiliki klasifikasi atau segmentasi usaha Perusahaan dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Penjualan Perangkat, Suku Cadang, Material Pembangkit Listrik Non EBT dan item umum serta pendukung lainnya;
2. Penyediaan Jasa Pendukung EBT; dan
3. Penjualan Material Pendukung Ekosistem EBT.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan Tahun 2025 [POJK51-C.4]

Sepanjang tahun 2025, PLNSC menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan arah pengembangan bisnis dan kebutuhan operasional Perseroan. Ruang lingkup usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan, meskipun belum seluruh kegiatan usaha tersebut diimplementasikan secara penuh. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Perseroan tetap berfokus pada kegiatan usaha yang selaras dengan strategi perusahaan serta kebutuhan sektor ketenagalistrikan dan utilitas.

Adapun kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh PLNSC selama tahun 2025 meliputi:

1. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya;
2. Perdagangan besar suku cadang elektronik;
3. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas serta produk yang berkaitan;
4. Perdagangan besar bahan dan barang kimia.

In developing the Company in line with its purpose and objectives, the Company has introduced product and solution transformation initiatives to meet customer needs, namely solutions for non-renewable energy power plants, renewable energy power plants, transmission and distribution, and digital solutions for power plants (IoT). Based on this development direction, PLNSC classifies its business into the following three segments:

1. Sales of equipment, spare parts, and materials for non-renewable energy power plants, as well as general and other supporting items;
2. Provision of supporting services for renewable energy; and
3. Sales of supporting materials for the renewable energy ecosystem.

Business Activities Conducted in 2025 [POJK51-C.4]

Throughout 2025, PLNSC conducted its business activities in line with the Company's business development direction and operational requirements. The scope of business stipulated in the Company's Articles of Association serves as the basis for the implementation of the Company's business activities, although not all of the business activities set out therein have been fully implemented. In conducting its business operations, the Company continues to focus on business activities that are aligned with its corporate strategy and the needs of the power and utilities sector.

The business activities carried out by PLNSC during 2025 include:

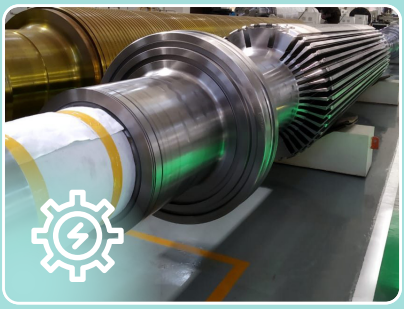
1. Wholesale of machinery, equipment, and other supplies;
2. Wholesale of electronic spare parts;
3. Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products;
4. Wholesale of chemical materials and products.

Produk dan Layanan

Products and Services [POJK51-C.4]

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan menghadirkan solusi rantai pasok (*supply chain solution*) yang terintegrasi guna mendukung operasional pembangkit listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan komitmen dalam mendukung sektor ketenagalistrikan nasional, kegiatan bisnis Perseroan difokuskan pada tiga lini bisnis, yaitu penyediaan suku cadang pembangkit listrik (*Power Plant Material*), penyediaan jasa/*services* pembangkit listrik (*Power Plant Services*), serta penyediaan material energi baru dan terbarukan (*Renewable Energy Part*).

The Company conducts its business activities by providing integrated supply chain solutions to support the reliable, safe, and sustainable operation of power plants in Indonesia. In line with its commitment to supporting the national electricity sector, the Company's business activities are focused on three business lines, namely the supply of power plant spare parts (Power Plant Material), the provision of power plant services (Power Plant Services), and the supply of renewable energy materials (Renewable Energy Part).



POWER PLANT MATERIAL
Auto-Z Power Plant Material

1. Turbine and auxiliary
2. Generators and Auxiliary
3. Boilers and Auxiliary
4. Balance of Plant
5. Coal and Ash Handling
6. Consumable Material



POWER PLANT SERVICES
One-Stop Services

1. Repairing Services
2. Upgrading & Replacement
3. Installation Services
4. Expert Assistance Services
5. Supervision Services
6. Troubleshooting Services
7. Logistic Management



RENEWABLE ENERGY PART
Solar, Hydro and Geothermal

1. Hydrogen Solution
2. Hydro Turbine
3. Steam Valve
4. Solar Panel / Array
5. Battery Bank
6. String / Central Inverter
7. AC Distribution
8. Transformer, etc.

1. Penyediaan Suku Cadang & *Consumables (Power Plant Material)*

Penyediaan suku cadang pembangkit yang dilakukan oleh Perseroan melingkupi seluruh area Perseroan menyediakan berbagai jenis suku cadang pembangkit yang mencakup seluruh sistem dan area operasional pembangkit guna mendukung keandalan, pemeliharaan, dan keberlangsungan operasi pembangkitan. Cakupan penyediaan suku cadang tersebut meliputi:

a. Boiler & Fuel (Coal and Ash Handling, Gas)
b. Generator & Transformer
c. Balance of Plant & Control Room
d. Turbine & Cooling System, dan *Power Plant Tools & Auxiliary*

2. Penyediaan Jasa/*Services* Pembangkit *(Power Plant Services)*

PLNSC mengembangkan lini bisnis jasa dengan layanan yang ditawarkan mencakup jasa pendukung pembangkit listrik, seperti instalasi, perbaikan (*repair*), supervisi, dan layanan teknis lainnya, serta jasa manajemen logistik dan jasa pengerukan (*dredging services*). Segmen jasa ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di lingkungan PLN Group maupun pelanggan eksternal.

Sebagai bagian dari PLN Group, PLNSC memiliki posisi strategis untuk mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan memenuhi berbagai kebutuhan jasa di lingkungan PLN Group secara lebih efektif dan terkoordinasi. Dengan dukungan kompetensi dan jaringan yang dimiliki, Perseroan terus berupaya memperluas kontribusi sektor jasa sebagai salah satu pilar pertumbuhan bisnis. Seluruh layanan tersebut dipasarkan melalui pendekatan *business-to-business* (B2B) secara langsung (*direct sales*) guna memastikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan pelanggan dan penyediaan solusi yang tepat sasaran.

1. Power Plant Spare Parts & Consumables (Power Plant Material)

The Company's power plant spare parts supply covers all operational areas of power plants. The Company provides various types of power plant spare parts covering all systems and operational areas to support the reliability, maintenance, and continuity of power generation operations. The scope of spare parts supply includes:

a. Boiler & Fuel (Coal and Ash Handling, Gas);
b. Generator & Transformer;
c. Balance of Plant & Control Room; and
d. Turbine & Cooling System, and Power Plant Tools & Auxiliary.

2. Power Plant Services

In addition to providing spare parts and material solutions, PLNSC also develops its services business line as a complement to its business portfolio. The services offered include power plant support services, such as installation, repair, supervision, and other technical services, as well as logistics management services and dredging services. This service segment is intended to meet the needs of customers within the PLN Group as well as external customers.

As part of the PLN Group, PLNSC holds a strategic position in identifying, integrating, and fulfilling various service requirements within the PLN Group in a more effective and coordinated manner. Supported by its competencies and network, the Company continues to expand the contribution of its services business as one of the pillars of business growth. All of these services are marketed through a direct business-to-business (B2B) approach to ensure a deeper understanding of customer needs and the delivery of appropriate solutions.

3. Penyediaan Material EBT *(Renewable Energy Part)*

Perseroan menyediakan material dan suku cadang untuk mendukung pengembangan serta operasional pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta solusi hidrogen. Dukungan yang diberikan mencakup berbagai kebutuhan material dan komponen pada setiap jenis pembangkit, dengan kategori produk yang disesuaikan dengan karakteristik teknologi dan kebutuhan operasional masing-masing pembangkit, antara lain sebagai berikut:

3. Renewable Energy Materials (Renewable Energy Part)

The Company provides materials and spare parts to support the development and operation of New and Renewable Energy (NRE)-based power plants, including Hydroelectric Power Plants (PLTA), Geothermal Power Plants (PLTP), Solar Power Plants (PLTS), as well as hydrogen solutions. The support provided covers a wide range of material and component requirements for each type of power plant, with product categories tailored to the technological characteristics and operational requirements of each power plant, including the following:

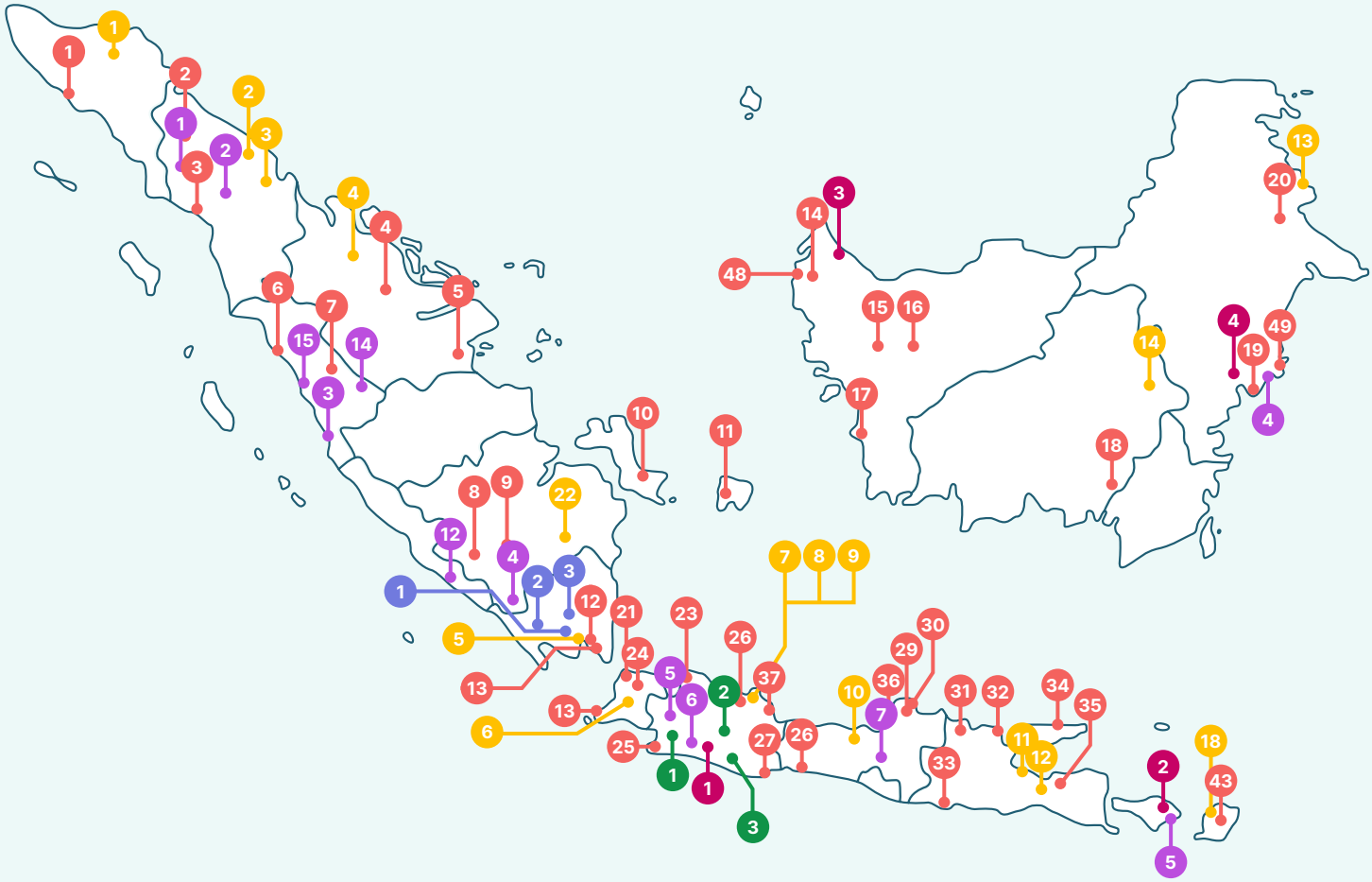
PLTS	PLTP	PLTA	Hidrogen
1. Solar Panel 2. Inverter 3. Battery 4. Switchgear 5. Transformer	1. Valve 2. Tube 3. Turbine	1. Turbine 2. Generator 3. Transformer 4. Bushing 6 kV 5. Battery	1. Portable Fuel Cell 2. Hydrogen Fuel Cell Generator 3. Drone Hydrogen

Melalui ketiga pilar kegiatan usaha tersebut, Perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan solusi rantai pasok yang andal, layanan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta dukungan terhadap pengembangan energi bersih di Indonesia. Perseroan juga senantiasa memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik domestik maupun internasional, guna menghadirkan solusi yang inovatif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk mendukung pertumbuhan sektor ketenagalistrikan nasional.

Through these three business pillars, the Company continues to strengthen its role in supporting national energy security by providing reliable supply chain solutions, sustainable maintenance services, and support for the development of clean energy in Indonesia. The Company also continues to expand strategic collaborations with various stakeholders, both domestic and international, to deliver innovative, efficient, and sustainability-oriented solutions in support of the growth of the national electricity sector.

Wilayah Operasional

Operational Area [POJK51-C.3.4]



PLTU

1. PLTU Nagan Raya
2. PLTU Pangkalan Susu
3. PLTU Labuhan Angin
4. PLTU Tenayan
5. PLTU Tembilahan
6. PLTU Teluk Sirih
7. PLTU Ombilin
8. PLTU Banjasari
9. PLTU Bukit Asam
10. PLTU Air Anyir (Bangka)
11. PLTU Suge Belitung
12. PLTU Tarahan
13. PLTU Sembalang
14. PLTU Kalbar 1
15. PLTU Sanggau
16. PLTU Sintang
17. PLTU Ketapang
18. PLTU Pulang Pisang
19. PLTU Kaltim Teluk
20. PLTU Berau
21. PLTU Suralaya
22. PLTU Labuan
23. PLTU Lontar
24. PLTU Jawa-7
25. PLTU Pelabuhan Ratu
26. PLTU Indramayu
27. PLTU Cilacap
28. PLTU Adipala
29. PLTU Tanjung Jati B #1&2
30. PLTU Tanjung Jati B #3&4
31. PLTU Rembang
32. PLTU Tanjung Awar-Awar
33. PLTU Pacitan
34. PLTU Paiton #1&2
35. PLTU Paiton #9
36. PLTU Batang
37. PLTU Cirebon
38. PLTU Barru
39. PLTU Punagaya
40. PLTU Nii Tanasa Kendari
41. PLTU Anggrek
42. PLTU Amurang
43. PLTU Jeranjang
44. PLTU Sumbawa Barat
45. PLTU Ropa
46. PLTU Bolok
47. PLTU Holtekamp
48. PLTU Bengkayang
49. PLTU Muara Jawa

PLTMG & PLTGU

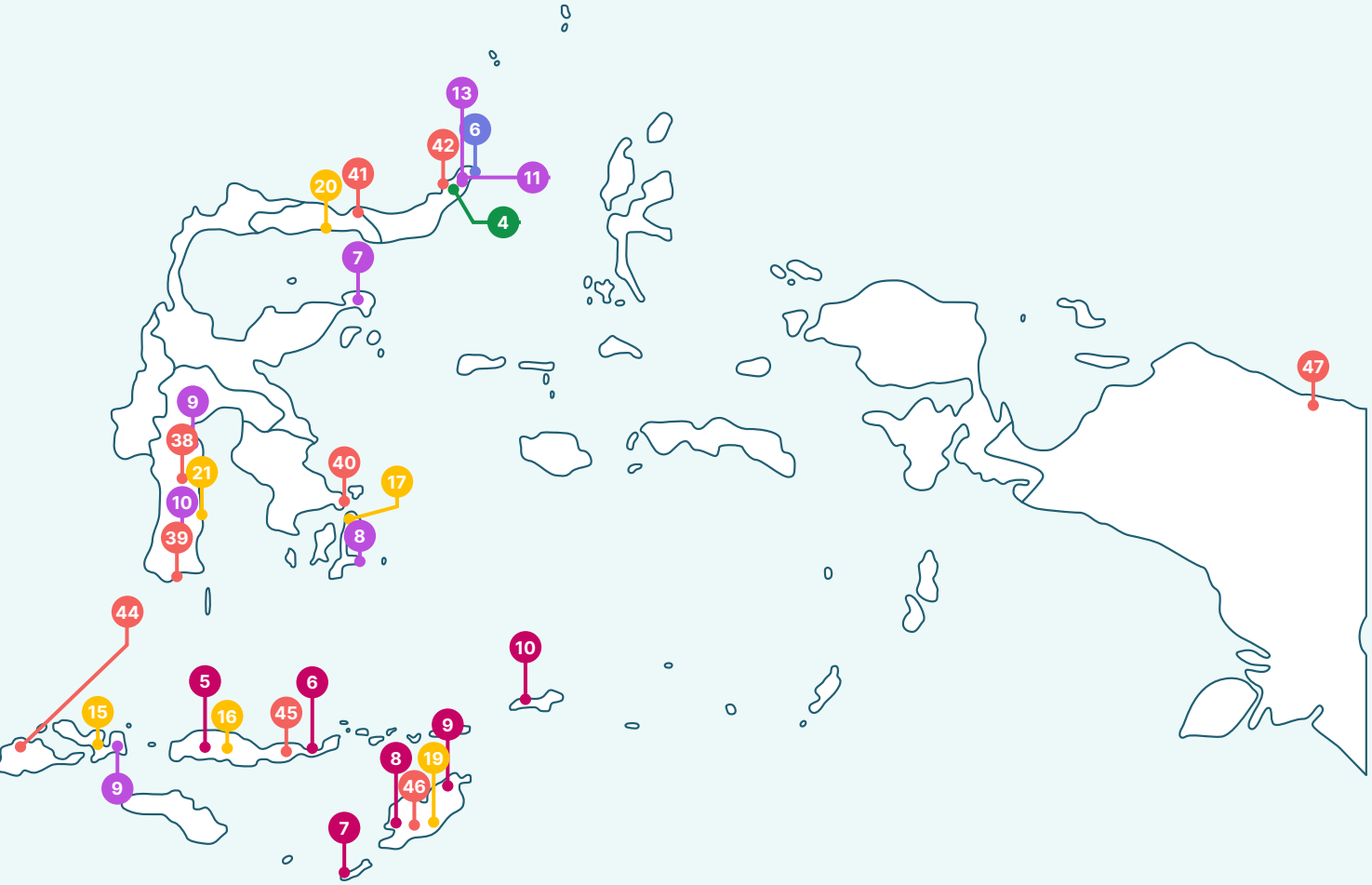
1. PLTMG Arun 1 & 2
2. PLTGU Belawan
3. PLTMG Paya Pasir
4. PLTG Duri
5. PLTG Tarahan
6. PLTGU Cilegon
7. PLTGU Muara Karang
8. PLTGU Muara Tawar
9. PLTGU Priok
10. PLTGU Semarang
11. PLTGU Gresik
12. PLTGU Grati
13. PLTMG Gunung Belah
14. PLTMG Bangkanai
15. PLTMG Bima
16. PLTMG Rangko
17. PLTMG Kendari
18. PLTMGU Lombok Peaker
19. PLTMG Panaf
20. PLTG Maleo
21. PLTGU Sengkang
22. PLTGU Indralaya

PLTP

23. PLTP Gunung Salak
24. PLTP Kamojang
25. PLTP Darajat
26. PLTP Lahendong

PLTA, PLTM, PLTMH

1. PLTA Asahan-1
2. PLTA Renun
3. PLTM Sako
4. PLTA Besai
5. PLTA Cirata
6. PLTA Saguling
7. PLTM Mrica
8. PLTMH Tenguwe
9. PLTA Bakaru
10. PLTA Bili-Bili
11. PLTA Tonsealama
12. PLTM Padang Guci
13. PLTA Tanggari
14. PLTM Lintau 1
15. PLTA Maninjau



PLTD

1. PLTD Tarahan
2. PLTD Tegineneng
3. PLTD Teluk Betung
4. PLTD Gunung Malang
5. PLTD Nusa Penida
6. PLTD Bitung
7. PLTD Luwuk
8. PLTD Raha
9. PLTD Ni'u

PLTS

1. PLTS Cirata
2. PLTS Bali
3. PLTS Temajuk
4. PLTS IKN
5. PLTS Messah
6. PLTS Palue
7. PLTS Raijua
8. PLTS Semau
9. PLTS Nule
10. PLTS Pura

Non-PLN

1. Cirebon Electric Power
2. PLTU Cilacap S2P
3. PT Bhimasena Power Indonesia
4. PT Brantas Cakrawala Energi
5. PT Brantas Hidro Energi
6. PT Calipfena Sinambung Daya
7. PT Ikhwan Mega Power
8. PT Komipo Pembangkit Jawa Bali
9. PT SGPJB
10. PT POMI
11. PT CSEI
12. PT GCL Indo Tenaga
13. PT CS Energy
14. PT Indo Raya Tenaga
15. PT Berca Schindler
16. PT Cikarang Listrindo
17. PT Kerinci Merangin Hidro
18. PT Brantas Abipraya
19. PT Pertamina Geothermal Energy
20. PT Perta Daya Gas
21. PT TJB Power Service
22. PT KPJB
23. PT BPI PLTU Banjarsari
24. PT Rekind Daya Mamuju
25. PT Paiton Energy (POMI)
26. PT Energia Prima Nusantara
27. PT Pertamina Cilegon
28. PT Panrita Utama Sejahtera
29. PT Bekasi Power
30. PT Inti Karya Persada Tehnik
31. Medco Energi Power
32. Brantas Energy
33. PT Nadika Independent Power Producer
34. PT Kelinci Mas Unggul

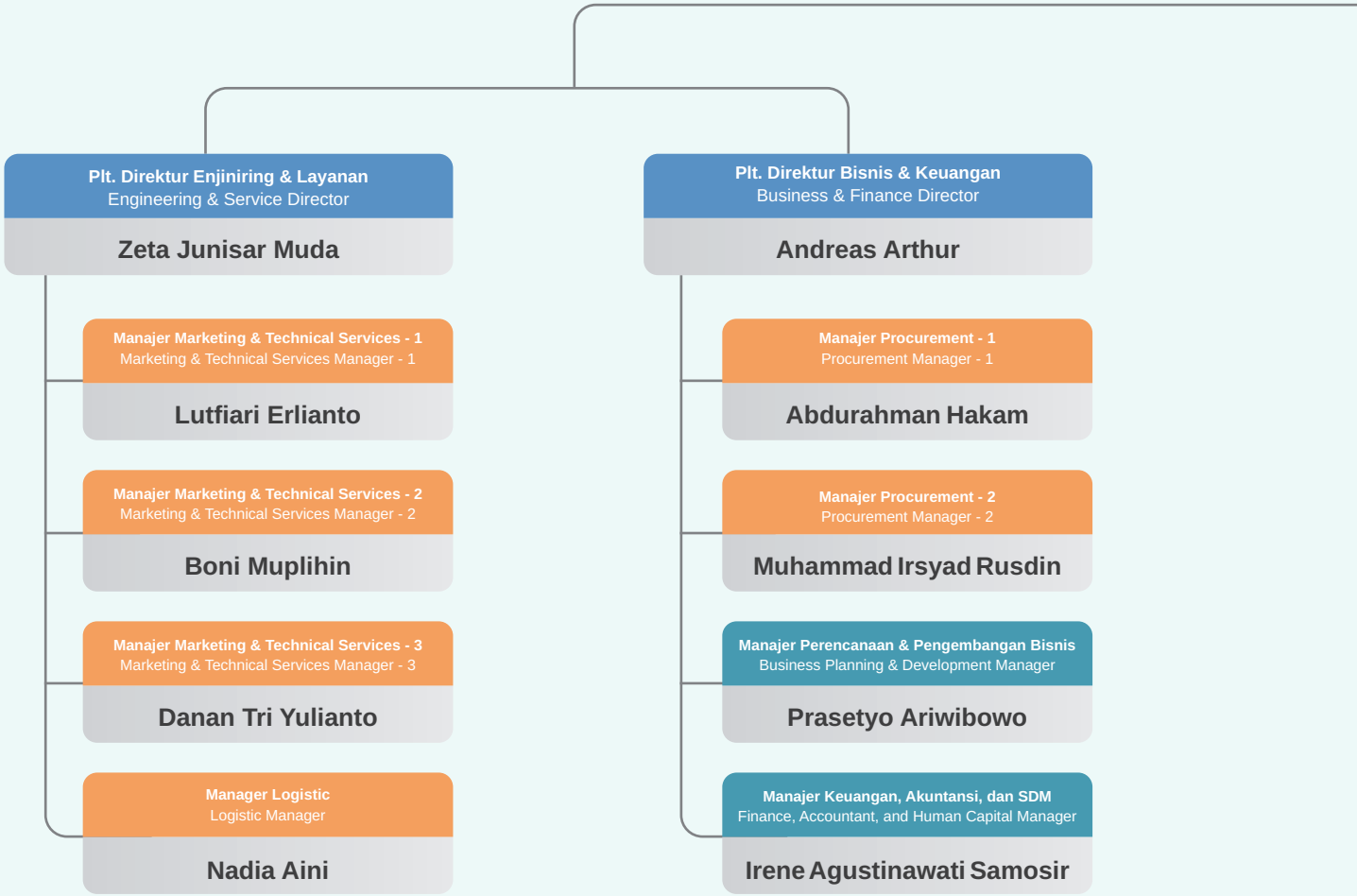
Non-Powerplant

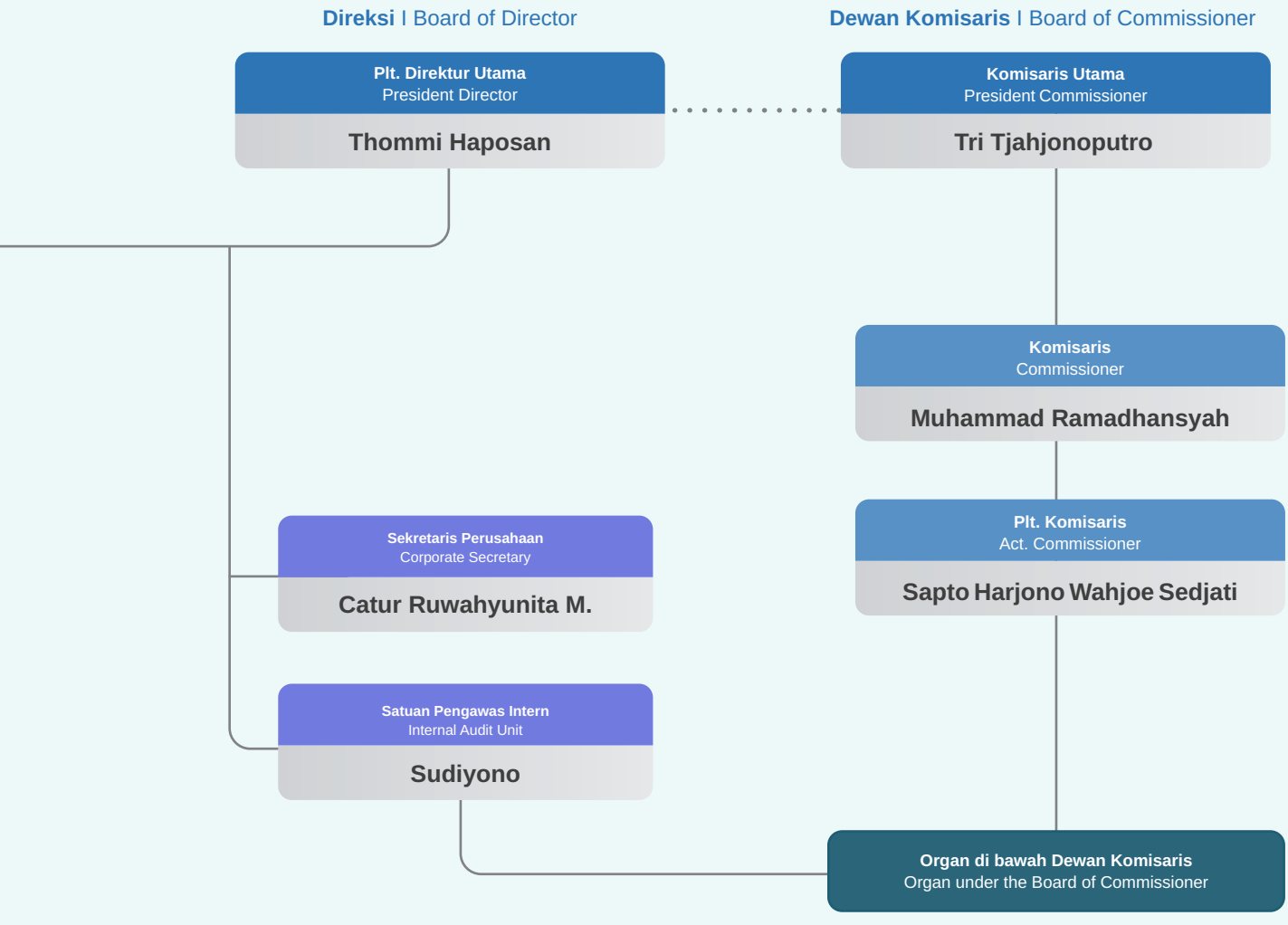
35. PT Banter Prima Sentosa
36. PT PG Rajawali 2
37. CV Astra Inovasi Mandiri
38. Universitas Gajah Mada
39. PT Kentjana Sakti Indonesia
40. PT Bahtera Adhiguna
41. PT Electricity Services
42. PT PLN Icon Plus
43. PT PLN (Persero) Pusertif
44. PT PLN (Persero) Pusharlis
45. PT PLN Nusantara Construction
46. PT PLN Nusantara Renewables
47. PT PLN Nusantara Power Services
48. PT PLN Indonesia Power Services
49. PT PLN Electricity Services
50. PT PLN Energi Primer Indonesia
51. PT PLN NP UMRO
52. PT PLN Indonesia Power MSU

Struktur Organisasi
Organization Structure

Struktur organisasi PT PLN Suku Cadang disusun untuk mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan, optimalisasi proses bisnis, serta pencapaian strategi Perseroan secara berkelanjutan. Struktur organisasi Perseroan ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Prima Layanan Suku Cadang Nomor: 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi, peran, dan tanggung jawab di setiap unit kerja. Adapun struktur organisasi PT PLN Suku Cadang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The organization structure of PT PLN Suku Cadang is designed to support effective corporate management, optimize business processes, and achieve the Company's strategy on a sustainable basis. The Company's organization structure is established pursuant to the Board of Directors' Regulation No. 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, which serves as the guideline for the implementation of the functions, roles, and responsibilities of each work unit. The organization structure of PT PLN Suku Cadang in 2025 is as follows:



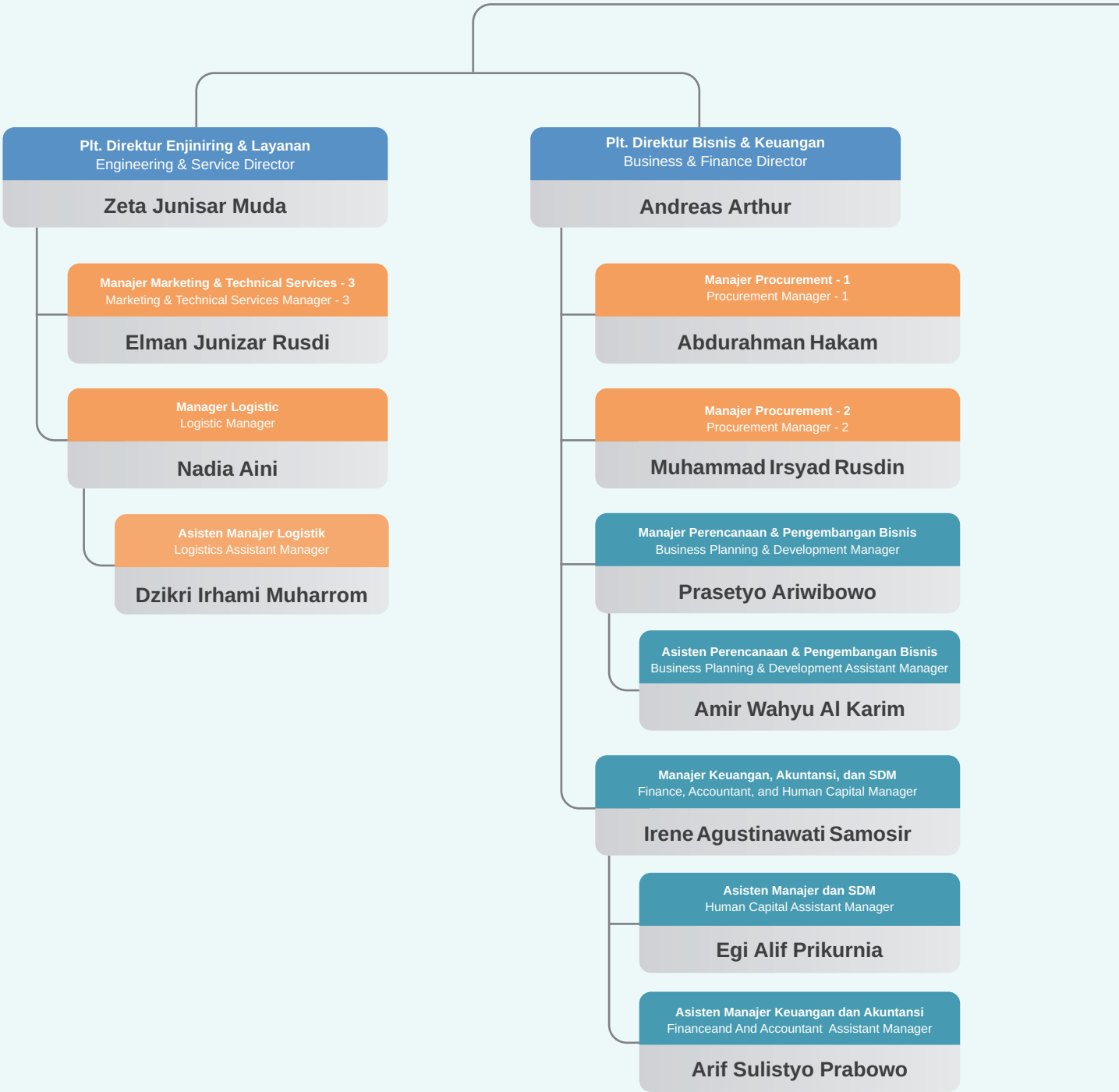


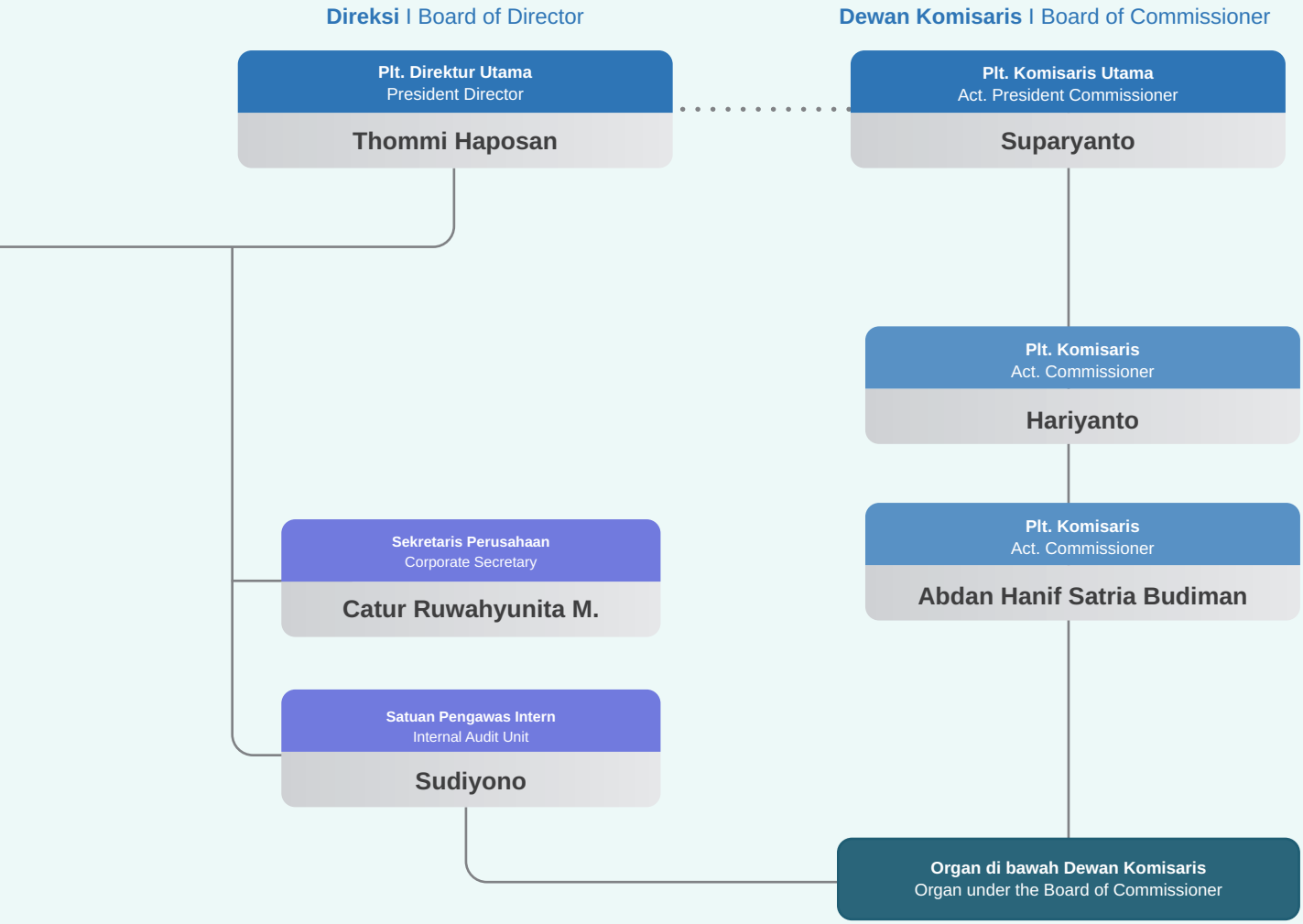
Keterangan I Information

- **Fungsi Bisnis** Business Function
- **Fungsi Pendukung Bisnis** Business Support Function
- **Fungsi Pendukung** Support Function
- **Jalur Hierarki** Hierarchy Path
- **Jalur Koordinasi** Coordination Path

Seiring perkembangan usaha Perseroan, Stuktur Organisasi PLNSC mengalami penyesuaian, dengan demikian, per tanggal penerbitan Laporan Terintegrasi ini, Struktur Organisasi Perseroan sebagai berikut:

In line with the Company's business development, PLNSC's Organization Structure has undergone adjustment, therefore, as of the date of publication of this Integrated Report, the Company's Organization Structure is as follows:





Keterangan I Information

- **Fungsi Bisnis** Business Function
- **Fungsi Pendukung Bisnis** Business Support Function
- **Fungsi Pendukung** Support Function
- **Jalur Hierarki** Hierarchy Path
- **Jalur Koordinasi** Coordination Path

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



Suparyanto

Plt. Komisaris Utama I Act. President Commisioner

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jawa Tengah** Central Java
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Magelang, 8 Februari 1971 Magelang, February 8, 1971
Usia Age	55 tahun 55 years old
Masa Jabatan Term of Office	13 Februari 2026 – saat ini February 13, 2026 – present

Riwayat Pendidikan Educational Background	Diploma dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1994. Diploma Degree from the Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 1994.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau menjabat di berbagai posisi penting di PT PLN (Persero) dengan pernah menduduki jabatan antara lain: • 2023: VP Manajemen Kinerja HC; • 2023: Plt. EVP Pelayanan HC; • 2024 – 2025: EVP Pelayanan HC. He served various key positions at PT PLN (Persero), including: • 2023: VP Performance Management HC; • 2023: Plt. EVP Service HC; • 2024 – 2025: EVP Service HC.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Served as Act. President Commissioner since February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 dated March 13, 2026.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	• Ketua Pengawas di YPK PLN. • EVP Human Talent Development PT PLN (Persero) • Supervisory Board at YPK PLN • EVP Human Talent Development PT PLN (Persero)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.

Hariyanto

Plt. Komisaris I Act. Commisioner



Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Tangerang Selatan** South Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Wonogiri, 1 Maret 1970 Wonogiri, March 1, 1970
Usia Age	56 tahun 56 years old
Masa Jabatan Term of Office	13 Februari 2026 – saat ini February 13, 2026 – present

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 1994; • Magister Teknik Mesin dari Universitas Indonesia Tahun 2002; • Doktor bidang Teknik Kimia dari UI-TU Munich tahun 2008. • Bachelor of Chemical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology in 1994; • Master of Mechanical Engineering from University of Indonesia in 2002; • Doctorate in Chemical Engineering from UI-TU Munich in 2008.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Kementrian ESDM pada tahun 2021 sampai 2022. He served as Head of the Research and Development Center at the Ministry of Energy and Mineral Resources from 2021 to 2022.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Plt. Komisaris sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Served as Act. Commissioner since February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 dated March 13, 2026.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Head of Planning Bureau at General Secretariat of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.



Abdan Hanif Satria Budiman

Plt. Komisaris I Act.Commisioner

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 9 September 1985 Bandung, September 9, 1985
Usia Age	41 tahun 41 years old
Masa Jabatan Term of Office	13 Februari 2026 – saat ini February 13, 2026 – present

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2009; • Magister bidang Sustainable Energy Technology dari University of Twente, Belanda, tahun 2016 • Magister Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2017; • Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology, 2009; • Master's degree in Sustainable Energy Technology from the University of Twente, the Netherlands, 2016 • Master of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology, 2017;
Riwayat Jabatan Career History	Beliau menjabat di berbagai posisi penting di PT PLN (Persero) dengan pernah menduduki jabatan antara lain: • 2021 – 2022: Manajer Pengembangan dan Penyelarasan Strategi; • 2022 – 2024: Vice President Monitoring dan Evaluasi Manajemen Transformasi; He served various key positions at PT PLN (Persero), including: • 2021–2022: Manager of Strategic Development and Alignment; • 2022–2024: Vice President of Monitoring and Evaluation of Transformation Management;
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Plt. Komisaris sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Served as Act. Commissioner since February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., No. 09 dated March 13, 2026.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Executive Vice President Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi di PT PLN (Persero). He currently also serves as Executive Vice President of Corporate Business Development and Investment at PT PLN (Persero).
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Thommi Haposan

Plt. Direktur Utama I Act. President Director



Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Tapanuli, 5 Juni 1967 Tapanuli, June 5, 1967
Usia Age	58 tahun pada akhir tahun buku 2025 58 years old as of the end of fiscal year 2025
Masa Jabatan Term of Office	1 November 2021 – 31 Oktober 2024 (Periode Pertama); 1 November 2024 – Sekarang (Periode Kedua). November 1, 2021 – October 31, 2024 (First Term); November 1, 2024 – Present (Second Term).

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Fisika dari Universitas Sumatera Utara tahun 1992; • Magister Teknik Industri dari Universitas Indonesia tahun 2008. • Bachelor of Physics from the University of North Sumatra in 1992; • Master of Industrial Engineering from the University of Indonesia in 2008.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menempati berbagai posisi penting di PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), yang saat ini bernama PT PLN Nusantara Power dengan pernah menduduki jabatan antara lain: • 2013 – 2014: Asisten Deputi Infrastruktur dan Energi, Deputi • 2012 – 2013: Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance Rembang; • 2013 – 2015: Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur; • 2015 – 2017: Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat; • 2017 – 2020: Direktur Proyek PT PJB Services (saat ini bernama PT PLN Nusantara Power Services); • 2021 – 2022: General Manager Unit Pembangkit Muara Karang. He has held various important positions at PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), which is currently called PT PLN Nusantara Power, including: • 2012 – 2013: General Manager of Rembang Operation and Maintenance Services Business Unit; • 2013 – 2015: General Manager of Eastern Region Maintenance Services Unit; • 2015 – 2017: General Manager of Western Region Maintenance Services Unit; • 2017 – 2020: Project Director of PT PJB Services (currently named PT PLN Nusantara Power Services); • 2021 - 2022: General Manager of Muara Karang Generating Unit.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 1 November 2021 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 10 tanggal 8 November 2021. Kemudian diangkat kembali dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan sejak 1 November 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 21 tanggal 25 November 2024. First served as the Company's President Director since November 1, 2021, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Lenny Janis Ishak, SH No. 10 dated November 8, 2021, and then reappointed as Acting President Director since November 1, 2024, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 21 dated November 25, 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain. Currently, he does not serve any concurrent positions in other companies.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.



Zeta Junisar Muda

Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan I Act. Director of Engineering and Services

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Palembang, 24 April 1973 Palembang, April 24, 1973
Usia Age	52 tahun pada akhir tahun buku 2025 52 years old as of the end of fiscal year 2025
Masa Jabatan Term of Office	1 Februari 2025 – saat ini February 1, 2025 – present

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Teknik Elektro dari Institut Sains & Teknologi Nasional tahun 1997 Bachelor of Electrical Engineering from the National Institute of Science & Technology in 1997
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menempati berbagai posisi penting di PT Indonesia Power antara lain: • 2022: Manager of Business Development Planning and Controlling PT Indonesia Power; • 2023 – 2025: Manager Sales and Account Executive PT Indonesia Power; He has held various important positions at PT Indonesia Power, including: • 2022: Manager of Business Development Planning and Controlling at PT Indonesia Power; • 2023 – 2025: Manager of Sales and Account Executive at PT Indonesia Power;
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan sejak 1 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 tanggal 20 Februari 2025. Served as Act. Director of Engineering and Services since February 1, 2025, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 dated February 20, 2025.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain. Currently, he does not serve any concurrent positions in other companies
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.

Andreas Arthur



Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan I Act. Director of Business and Finance

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Palangkaraya, 10 November 1979 Palangkaraya, November 10, 1979
Usia Age	47 tahun pada akhir tahun buku 2025 47 years old as of the end of fiscal year 2025
Masa Jabatan Term of Office	1 Maret 2025 – saat ini March 1, 2025 – present

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia tahun 2002;
- Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin Tahun 2008.

- Bachelor of Mechanical Engineering from the University of Indonesia in 2002;
- Master of Management from Hasanuddin University in 2008.

Riwayat Jabatan
Career History

Beliau pernah menempati berbagai posisi penting di PT PLN (Persero) antara lain:

- 2015 – 2017: Assistant Manager Operation and Maintenance PT PLN (Persero) Sektor KDI;
- 2017 – 2018: Engineer Analisa dan Evaluasi Sistem Mekanikal (Plt Deputi Manajer Enjiniring) Bidang Pembangkitan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat;
- 2018: Engineer Reverse dan Rekayasa (Plt Deputi Manajer Enjiniring) Bidang Pembangkitan Pada PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi;
- 2018-2019: Manager Enjiniring Bidang Pembangkitan Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi;
- 2019-2025: Manager Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Minahasa Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi.

He served various important positions at PT PLN (Persero), including:

- 2015-2017: Assistant Manager of Operations and Maintenance for KDI Sector at PT PLN (Persero);
- 2017-2018: Mechanical System Analysis and Evaluation Engineer (Act. Deputy Manager of Engineering) for the Power Generation Sector at PT PLN (Persero) South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and West Sulawesi Regions;
- 2018: Reverse Engineer and Engineering (Act. Deputy Manager of Engineering) for the Power Generation Sector at PT PLN (Persero) Sulawesi Power Generation and Distribution;
- 2018-2019: Manager of Engineering for the Power Generation Sector at PT PLN (Persero) Sulawesi Power Generation and Distribution Main Unit;
- 2019-2025: Manager of Implementation Unit for Minahasa Power Generation Control at PT PLN (Persero) Sulawesi Power Generation and Distribution Main Unit.

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis dan Keuangan sejak 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 tanggal 02 Maret 2025.
Served as Act. Director of Business and Finance since March 1, 2025, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 dated March 2, 2025.

Rangkap Jabatan
Concurrent Positions

Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain.
Currently, he does not serve any concurrent positions in other companies.

Hubungan Afiliasi
Affiliations

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham.
He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.

Kepemilikan Saham
Share Ownership

Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain.
He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.

Andy Adam*

Plt. Direktur Enjinering & Layanan | Act. Director of Engineering and Services

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 29 Januari 1971 Jakarta, January 29, 1971
Usia Age	54 tahun pada akhir tahun buku 2025 54 years old as of the end of fiscal year 2025
Masa Jabatan Term of Office	22 Maret 2019 – 31 Desember 2023 (Periode Pertama); 1 Januari 2024 – 31 Januari 2025 (Periode Kedua). March 22, 2019 – December 31, 2023 (First Term); January 1, 2024 – January 31, 2025 (Second Term).
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Trisakti tahun 1994 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1998; • Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2013. • Bachelor of Mechanical Engineering from Trisakti University in 1994 and Bachelor of Economics from the University of Indonesia in 1998; • Master of Management from Gadjah Mada University in 2013.
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah menempati berbagai posisi strategis antara lain: • 2012 – 2015: Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi, PT PLN (Persero); • 2015: Deputy General Manager Energi Primer UBP Suralaya; • 2015 – 2017: Deputy General Manager Energi Primer UP SLA; • 2017 – 2018: ES(F) Bidang Operasi Pembangkit KP Tugas Karya ke PT ADC; • 2019 – 2021: Ahli Senior Pembangkit II PT PLN (Persero). He served various strategic positions, including: • 2012 – 2015: Manager of Operations Planning and Control, PT PLN (Persero); • 2015: Deputy General Manager of Primary Energy, UBP Suralaya; • 2015 – 2017: Deputy General Manager of Primary Energy, UP SLA; • 2017 – 2018: ES(F) for Power Plant Operations, KP Tugas Karya, PT ADC; • 2019 – 2021: Senior Power Plant Expert II, PT PLN (Persero).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Pertama kali menjabat sebagai Direktur Enjiniring dan Layanan sejak 2 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 01 tanggal 4 Januari 2021. Kemudian diangkat kembali dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Direktur Enjiniring dan Layanan Perseroan sejak 1 Januari 2024, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 1 Januari 2024 dan Surat dari Komisaris Utama PT PLNSC Nomor AEZZ0001014 tanggal 2 Januari 2024 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Enjiniring dan Layanan PT PLN Suku Cadang. First served as Director of Engineering and Services since January 2, 2021, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Lenny Janis Ishak, SH No. 01 dated January 4, 2021, and then reappointed as Acting Director of Engineering and Services since January 1, 2024, based on the Circular GMS Resolutions dated January 1, 2024, and PT PLNSC President Commissioner Letter Number AEZZ0001014 dated January 2, 2024, regarding the Appointment of Acting Director of Engineering and Services of PT PLN Suku Cadang.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain. Currently, he does not serve concurrent positions in other companies.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. *He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.*
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. *He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.*

*Keterangan: Bapak Andy Adam berhenti menjabat sesuai dengan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 31 Januari 2025.
**Remarks: Mr. Andy Adam resigned from his position pursuant to Circular GMS Resolutions dated January 31, 2025.*

Bahtiar Wibisana*

Direktur Bisnis dan Keuangan | Director of Business and Finance

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Bandung, 22 Januari 1982 Bandung, January 22, 1982
Usia Age	43 tahun pada akhir tahun buku 2025 43 years old as of the end of fiscal year 2025
Masa Jabatan Term of Office	1 Januari 2024 – 28 Februari 2025 January 1, 2024 – February 28, 2025

Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana Elektronika dari Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun 2001 Bachelor of Electronics from the University of General Ahmad Yani in 2001
Riwayat Jabatan Career History	Beliau pernah dipercaya di berbagai posisi penting di PT PLN (Persero), antara lain: • 2020 – 2021: Manager Operasi Pembangkit Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara; • 2021 – 2022: Manajer Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Kapuas; • 2023: Manajer Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Kapuas PT PLN Nusantara Power. He has held various important positions at PT PLN (Persero), including: • 2020 – 2021. : Manager of Power Generation Operations for North Sumatra Main Development Unit; • 2021 – 2022: Manager of Kapuas Power Generation Control Implementation Unit; • 2023: Manager of Kapuas Power Generation Control Implementation Unit, at PT PLN Nusantara Power.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) yang dituangkan dalam Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 tanggal 17 Januari 2024. Served as Director of Business and Finance since January 1, 2024, based on the Circular GMS Resolutions as stated in Notarial Deed from Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. No. 15 dated January 17, 2024.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di Perusahaan lain. Currently, he does not serve concurrent positions in other companies.
Hubungan Afiliasi Affiliations	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham. He has no affiliations with other member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang maupun perusahaan lain. He does not own shares in PT PLN Suku Cadang or other companies.

*Keterangan: Bapak Bahtiar Wibisana berhenti menjabat sesuai dengan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 28 Februari 2025.
*Remarks: Mr. Bahtiar Wibisana resigned from his position pursuant to Circular GMS Resolutions dated February 28, 2025.

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Changes to the Composition of the Board of Commissionersand Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2025, susunan komposisi Dewan Komisaris PLNSC yakni sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the composition of the PLNSC Board of Commissioners is as follows:

Tabel Susunan Dewan Komisaris Periode Januari – Desember 2025

Table of the Composition of the Board of Commissioners for the Period of January–December 2025

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	**Tri Tjahjonoputro**	Komisaris Utama President Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Utama PT PLN Suku Cadang sejak 1 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as President Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of February 1, 2023, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
2	**Muhammad Ramadhansyah**	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024, pursuant to the Circular GMS Resolutions.
3	**Sapto Harjono Wahjoe Sedjati**	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 15 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of August 15, 2022, pursuant to the Circular GMS Resolutions.

Pada tanggal 13 Februari 2026, Bpk. Tri Tjahjonoputro sebagai Komisaris Utama, Bpk. Muhammad Ramadhansyah sebagai Komisaris, dan Bpk. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati sebagai Plt. Komisaris diberhentikan dengan segala hormat dari segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Bpk. Suparyanto sebagai Plt. Komisaris Utama, Bpk. Hariyanto dan Bpk. Abdan Hanif Satria B. sebagai Plt. Komisaris. Sehingga susunan komposisi Dewan Komisaris PLNSC terhitung sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai Laporan Terintegrasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

On February 13, 2026, Mr. Tri Tjahjonoputro, as Chairman of the Board of Commissioners; Mr. Muhammad Ramadhansyah, as Commissioner; and Mr. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, as Act. Commissioner, were respectfully dismissed from all their duties and responsibilities as members of the Company's Board of Commissioners, and Mr. Suparyanto was appointed as Act. Chairman of the Board of Commissioners, Mr. Hariyanto and Mr. Abdan Hanif Satria B. as Act. Commissioners. Consequently, the composition of the PLNSC Board of Commissioners, effective from February 13, 2026, until the publication of this Integrated Report, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	**Suparyanto**	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Diangkat sebagai Plt. Komisaris Utama PT PLN Suku Cadang sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Act. President Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
2	**Hariyanto**	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Diangkat sebagai Plt. Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Act. Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
3	**Abdan Hanif Satria B.**	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Diangkat sebagai Plt. Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 13 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Act. Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of February 13, 2026, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.

Tabel Susunan Direksi Periode Januari – Desember 2025

Table of the Composition of the Board of Commissioners for the Period of January–December 2025

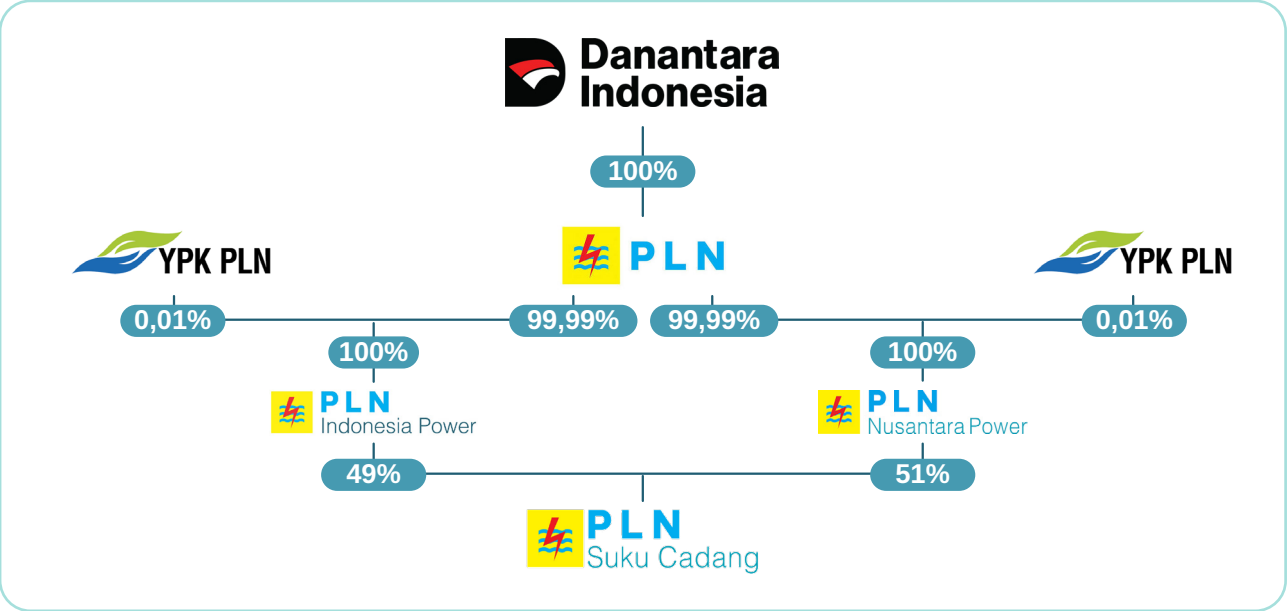
No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	**Thommi Haposan**	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PLN Suku Cadang sejak 1 November 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Acting President Director of PT PLN Suku Cadang as of November 1, 2024, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
2	**Zeta Junisar Muda**	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Diangkat sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) Appointed as Act. Director of Engineering and Services of PT PLN Suku Cadang as of February 1, 2025 pursuant to the Circular GMS Resolutions.
3	**Andreas Arthur**	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan Act. Director of Business and Finance	Diangkat sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Director of Business and Finance of PT PLN Suku Cadang as of March 1, 2025, pursuant to the Circular GMS Resolutions.
5	**Andy Adam**	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Diangkat sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) Appointed as Act. Director of Engineering and Services of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024 until January 31, 2025 pursuant to the Circular GMS Resolutions.
6	**Bahtiar Wibisana**	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Diangkat sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Director of Business and Finance of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024 until February 28, 2025, pursuant to the Circular GMS Resolutions.

Informasi Pemegang Saham

Shareholders Information [POJK51-C.3]

Sampai dengan 31 Desember 2025, Struktur Pemegang Saham Mayoritas dan Pengendali PT PLN Suku Cadang adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the structure of the Majority and Controlling Shareholders of PT PLN Suku Cadang is as follows:



Komposisi Pemegang Saham PLN Suku Cadang

Sampai dengan 31 Desember 2025, kepemilikan saham PT PLN Suku Cadang dimiliki oleh PT PLN Nusantara Power sebesar 51% dan PT PLN Indonesia Power sebesar 49%.

Shareholder Composition of PT PLN Suku Cadang

As of December 31, 2025, the shareholder of PT PLN Suku Cadang is held by PT PLN Nusantara Power with a 51% ownership and PT PLN Indonesia Power with a 49% ownership.

Komposisi Pemegang Saham PT PLN Suku Cadang adalah sebagai berikut:

The shareholder composition of PT PLN Suku Cadang is as follows:

Nama Pemegang Saham Name of Shareholder	**31 Desember 2024** I December 31, 2024		**31 Desember 2025** I December 31, 2025	
	Jumlah Saham Number of Shares	**Persentase Saham** Percentage of Shares	**Jumlah Saham** Number of Shares	**Persentase Saham** Percentage of Shares
PT PLN Nusantara Power	76.500	51%	**76.500**	**51%**
PT PLN Indonesia Power	73.500	49%	**73.500**	**49%**
Jumlah I Total	**150.000**	**100%**	**150.000**	**100%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Jenis Investor

Sampai dengan 31 Desember 2025, komposisi pemegang saham PT PLN Suku Cadang berdasarkan Jenis Investor disampaikan pada tabel di bawah ini:

Shareholder Composition by Type of Investor

As of December 31, 2025, the shareholder composition of PT PLN Suku Cadang by type of investor is presented in the following table.

Komposisi Pemegang Saham PT PLN Suku Cadang adalah sebagai berikut:

The shareholder composition of PT PLN Suku Cadang is as follows:

Kelompok Pemegang Saham Shareholder Group	**31 Desember 2024** I December 31, 2024			**31 Desember 2025** I December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	**Jumlah Lembar Saham** Total Shares	**Persentase Saham** Percentage of Shares	**Jumlah Pemegang Saham** Total Shareholders	**Jumlah Lembar Saham** Total Shares	**Persentase Saham** Percentage of Shares
Domestik Domestic						
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Company	2	150.000	100,00%	2	150.000	100,00%
Yayasan Foundation	-	-	-	-	-	-
Asuransi Insurance	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Others	-	-	-	-	-	-
Luar Negeri Overseas						
Perorangan Asing Foreign Individual	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Company	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	**2**	**150.000**	**100,00%**	**2**	**150.000**	**100,00%**

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Sampai dengan 31 Desember 2025, Kepemilikan saham PT PLN Suku Cadang dengan komposisi saham di atas 5% atau lebih adalah PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power dengan persentase kepemilikan saham masing-masing sebesar 51% dan 49%.

Shareholders with 5% or More Share Ownership

As of December 31, 2025, shareholders of PT PLN Suku Cadang with share ownership of 5% or more are PT PLN Nusantara Power and PT PLN Indonesia Power, with share ownership of 51% and 49%, respectively.

Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5% atau Lebih

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PLN Suku Cadang belum menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Terkait hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

Public Shareholders with Less Than 5% Share Ownership

As of December 31, 2025, PT PLN Suku Cadang had not become a public company listed on the stock exchange. Accordingly, there is no information regarding public shareholders with less than 5% share ownership.

Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki saham di PT PLN Suku Cadang, sebagaimana komposisi kepemilikan saham yang telah dijelaskan pada struktur pemegang saham.

Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors

As of December 31, 2025, none of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors own shares in PT PLN Suku Cadang, as reflected in the shareholding composition described under the shareholding structure.

Kronologi Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Chronology of Stock Listing on the Indonesia Stock Exchange

Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PLN Suku Cadang belum menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai pencatatan saham Perseroan di bursa efek dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of December 31, 2025, PT PLN Suku Cadang had not become a public company listed on the stock exchange. Therefore, there is no information regarding the listing of the Company's shares on the stock exchange in this Integrated Report.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

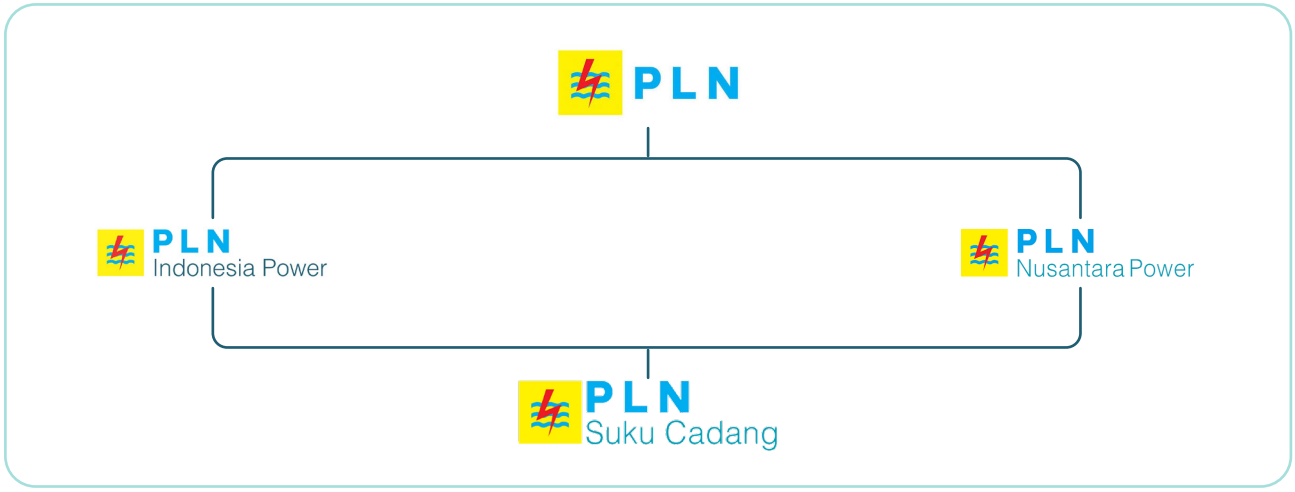
Sampai dengan 31 Desember 2025, PT PLN Suku Cadang belum menjadi perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi pengungkapan penerbitan efek lainnya dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of December 31, 2025, PT PLN Suku Cadang had not become a public company listed on the stock exchange. Therefore , there is no disclosure regarding the issuance of other securities in this Integrated Report.

Struktur Grup Perseroan
Structure of Company Group

Sampai dengan 2025, PT PLN Suku Cadang tidak memiliki Entitas Anak, Perusahaan patungan maupun Perusahaan Asosiasi. Adapun bagan struktur grup PLNSC hingga per 31 Desember 2025 disampaikan di bawah ini:

As of 2025, PT PLN Suku Cadang did not have any Subsidiaries, Joint Ventures, or Associates. The PLNSC Group structure as of December 31, 2025, is presented below:



Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Perusahaan Patungan dan/ atau *Special Purpose Vehicle*

Entitas Anak
Sampai dengan 31 Desember 2025, PLNSC tidak memiliki Anak Perusahaan. Sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Perusahaan Asosiasi
Sampai dengan 31 Desember 2025, PLNSC tidak memiliki Anak Perusahaan. Sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Special Purpose Vehicles
Sampai dengan 31 Desember 2025, PLNSC tidak memiliki *Special Purpose Vehicle*. Sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Perusahaan Patungan
Sampai dengan 31 Desember 2025, PLNSC tidak memiliki Perusahaan Patungan. Sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Names and Addresses of Subsidiaries, Associates, Joint Ventures, and/or Special Purpose Vehicles

Subsidiaries
As of December 31, 2025, PLNSC did not have any Subsidiaries. Therefore, there is no information to be presented in this Integrated Report.

Associates
As of December 31, 2025, PLNSC did not have any Associates. Therefore, there is no information to be presented in this Integrated Report.

Special Purpose Vehicles
As of December 31, 2025, PLNSC did not have any Special Purpose Vehicles. Therefore, there is no information to be presented in this Integrated Report.

Joint Ventures
As of December 31, 2025, PLNSC did not have any Joint Ventures. Therefore, there is no information to be presented in this Integrated Report.

Keanggotaan Asosiasi
Association Membership [POJK51- C.5], [GRI 102-13]

Sampai dengan 31 Desember 2025, PLNSC belum menjadi keanggotaan asosiasi skala nasional maupun internasional. Sehingga tidak terdapat informasi keanggotaan asosiasi Perseroan yang dapat disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of December 31, 2025, PLNSC was not a member of any national or international association. Therefore, there is no information regarding the Company's membership in associations to be presented in this Integrated Report.

Lembaga dan Profesional Penunjang Perusahaan
Institutions and Professionals Supporting the Company

Uraian Description	Nama Lembaga Penunjang Name of Supporting Institution	Periode Period	Jasa yang Diberikan Services Provided
Akuntan Publik Public Accountant	Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan World Trade Center III Jalan Jenderal Sudirman Kav.29 – 31, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12190 Tel: 021 – 50992901/3119 2901 Fax: 021 – 52905555/5290 5050	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Jasa audit laporan keuangan Perusahaan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. The Company's financial report audit services that comply with Financial Accounting Standards are the applicable Financial Accounting Standards Statements.
	Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi The Boulevard, 1 D1, RT.1/RW.7, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Jasa audit Kinerja dan Kepatuhan Perusahaan yang sesuai dengan Standar Jasa Terkait (SJT) 4400. The Company's Performance audit and Corporate compliance services in accordance with Standards on Related Services (ISRS) 4400.
Notaris Notary	Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6, Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120 Tel: (021) 7221077	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Penyusunan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan maupun persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Preparation of Notarial Deed of Statement of Company Shareholders' Decision and Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.
Konsultan Audit Audit Consultant	PT Mitra Kualitas Utama Menara Rajawali Lt 11 Jl. Ide Anak Agung Gede Agung Lot 5.1, RT 5/RW 2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Pendampingan audit pengawasan terhadap implementasi Sistem Manajemen Terpadu PLNSC yang telah disertifikasi. Assistance in surveillance audits of PLNSC's certified Integrated Management System.
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	PT Surveyor Indonesia (Persero) Graha Surveyor Indonesia Lt. 4-11, Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12950	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Pengukuran tingkat kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan PLNSC. Measurement of PLNSC customer satisfaction, dissatisfaction, and loyalty
Konsultan Pajak Tax Consultant	SF CONSULTING Menara Karya, Jl. Hr. Rasuna Said Blox X 5, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950	Januari – Desember 2025 January – December 2025	Pendampingan dalam penyusunan dan pelaporan kewajiban perpajakan, pendampingan selama proses pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan, serta penyusunan dokumentasi *transfer* pricing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Assistance in the preparation and reporting of tax obligations, assistance during tax audits by tax authorities, and the preparation of transfer pricing documentation in accordance with prevailing regulations.

Informasi Jumlah Karyawan

Information on the Number of Employees

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan didukung 58 orang karyawan tidak termasuk 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebanyak 60 orang karyawan.

Adapun, jumlah karyawan Perseroan disajikan berdasarkan jenjang pendidikan, usia, status kepegawaian, dan jenis kelamin, disampaikan pada tabel di bawah ini:

As of December 31, 2025, the Company was supported by 58 employees, excluding 3 (three) members of the Board of Directors and 3 (three) members of the Board of Commissioners. This number decreased by 60 employees compared to 2024.

The Company's number of employees, by level of education, age, employment status, and gender, is presented in the following table:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition by Level of Education

Jenjang Pendidikan Education Level	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Pasca Sarjana Post Graduate	**3**	5
Sarjana Bachelor's Degree	**53**	54
Diploma	**2**	1
SMA/Sederajat High School/Equivalents	**-**	-
SMP/Sederajat Junior High School/Equivalents	**-**	-
Sekolah Dasar Elementary School	**-**	-
Jumlah Total	**58**	**60**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia Age	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
18 – 25 tahun I years old	**13**	12
26 – 35 tahun I years old	**37**	37
36 – 45 tahun I years old	**7**	5
46 – 55 tahun I years old	**1**	2
>56 tahun I years old	**0**	1
Jumlah Total	**58**	**60**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian *Employment Status*	31 Desember 2025 *December 31, 2025*	31 Desember 2024 *December 31, 2024*
Karyawan Purna Karya Retired Employees	**0**	1
Karyawan Tugas Karya Work Assignment Employees	**13**	14
Karyawan Tetap Permanent Employees	**19**	19
Karyawan Tidak Tetap Non-Permanent Employees	**26**	26
Jumlah Total	**58**	**60**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Laki-laki Male	**36**	38
Perempuan Female	**22**	22
Jumlah Total	**58**	**60**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition by Position Level

Jenjang Pendidikan Education Level	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Manajemen Dasar Lower Management	**10**	9
Asisten Manajer Assistant manager	**2**	0
Fungsional 5 Functional 5	**20**	15
Fungsional 6 Functional 6	**26**	36
Jumlah Total	**58**	**60**

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi
Training and Competency Development

Perseroan menyadari bahwa pengembangan kompetensi manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis dan peningkatan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, PT PLN Suku Cadang secara konsisten memberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme Dewan Komisaris, Direksi, Internal Audit Unit, serta Sekretaris Perusahaan melalui berbagai program pengembangan kompetensi.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai program pendidikan, pelatihan, *workshop*, dan sertifikasi keahlian yang diselenggarakan baik oleh pihak eksternal maupun secara internal (*in house training*). Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap perkembangan industri, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kepemimpinan, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Adapun pelaksanaan program pengembangan kompetensi manajemen selama tahun 2025 disampaikan pada tabel berikut:

The Company recognizes that the development of management competencies is a key factor in supporting sustainable business growth and improving corporate performance. Therefore, PT PLN Suku Cadang consistently supports the capacity building and professional development of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Internal Audit Unit Department, and the Corporate Secretary through various competency development programs.

Throughout 2025, the Company implemented various educational programs, training sessions, workshops, and professional certification programs organized by both external parties and internally (in-house training). These programs were designed to enhance competencies, strengthen understanding of industry developments, corporate governance, risk management, and leadership, as well as to support the effective execution of management's duties and responsibilities in conducting the Company's business activities. The implementation of management competency development programs throughout 2025 is presented in the table as follows:

Pengembangan Kompentensi Dewan Komisaris

Competency Development for the Board of Commissioners

Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Apakah Kerugian BUMN Bukan Lagi Kerugian Negara? Are SOEs Losses No Longer Considered as National Losses?	RAP Consulting	25 Juli 2025 July 25, 2025

Pengembangan Kompentensi Direksi

Competency Development for the Board of Directors

Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Risk Mitigation in Digital Transformation	LSPMR	3 – 4 Juli 2025 July 3 – 4, 2025

Pengembangan Kompentensi Sekretaris Perusahaan

Competency Development for Corporate Secretary

Nama Pelatihan/Sertifikasi Training/Certification Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
Social Mapping for Effectively CSR	Kanaka	23 – 24 Juni 2025 June 23 – 24, 2025

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawas Intern

Competency Development for Internal Audit

Nama Pelatihan/Sertifikasi *Training/Certification Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal Pelaksanaan *Date of Implementation*
QIA Tingkat Manajerial Managerial Level QIA	YPIA	19 – 28 Mei 2025 May 19 – 28, 2025
Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Risk Mitigation in Digital Transformation	LSPMR	3 – 4 Juli 2025 July 3 – 4, 2025
Audit Investigasi: Mengungkap Fakta dibalik Data Investigative Audits: Uncovering the Facts Behind the Data	YPIA	8 – 9 Desember 2025 December 8 – 9, 2025

Informasi Pada Website Perusahaan

Information on the Company Website

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan, PLNSC terus mengoptimalkan pengelolaan situs web perusahaan yang dapat diakses secara publik melalui https://www. plnsc.co.id/. Pengelolaan situs web Perseroan mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan komprehensif.

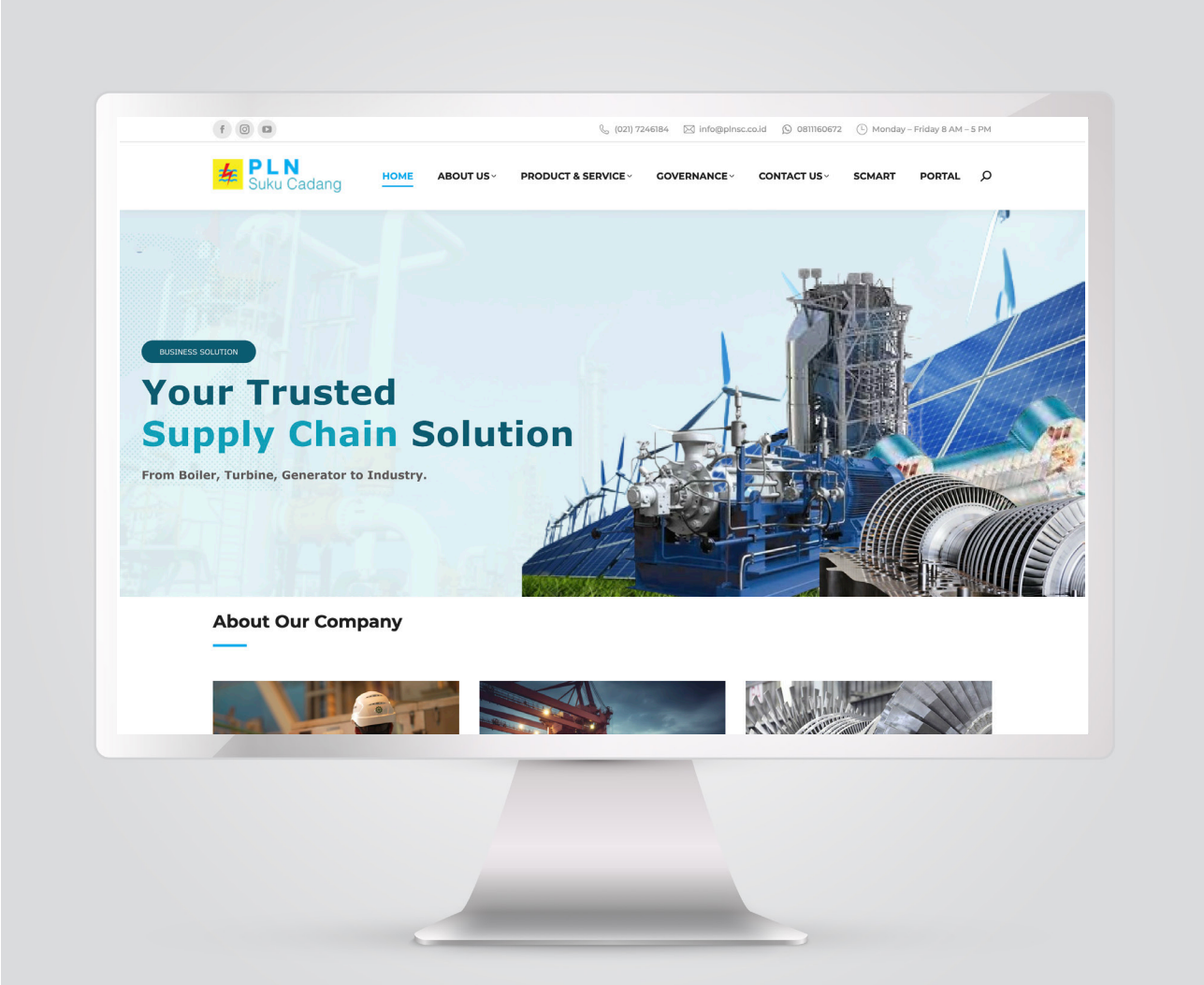
As part of its commitment to transparency and information disclosure to the public and stakeholders, PLNSC continues to optimize the management of its publicly accessible website at https://www.plnsc.co.id/. The Company's website management adheres to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 on Websites of Issuers or Public Companies as part of the Company's commitment to providing relevant, accurate, and comprehensive information.

Perseroan memastikan bahwa informasi yang disajikan melalui situs web disusun secara informatif dan mudah diakses guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi terkait kegiatan usaha, kinerja perusahaan, tata kelola, hingga informasi pendukung lainnya. Selain menjadi media komunikasi perusahaan, situs web Perseroan juga berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, dan pemegang saham terhadap Perseroan. Informasi yang disajikan dalam situs web Perseroan antara lain sebagai berikut:

The Company ensures that the information presented on the website is organized in an informative and easily accessible manner to facilitate the public's access to information regarding business activities, corporate performance, corporate governance, and other supporting information. In addition to serving as a corporate communication channel, the Company's website also functions as a platform for information transparency to enhance the trust of the public, investors, and shareholders in the Company. The information presented on the Company's website includes the following:

Informasi Kanal Channel Information	**Penjelasan** Description	**Poin-Poin Kanal** Channel Points
Home	Portal Home menampilkan profil awal PT PLN Suku Cadang yang mencakup gambaran perusahaan, produk dan layanan utama, portofolio proyek, berita terbaru, serta informasi kontak dan tautan ke kanal lain. The Home Portal displays the initial profile of PT PLN Suku Cadang, including a company overview, main products and services, project portfolio, latest news, contact information, and links to other channels.	-
About Us	Portal About Us menampilkan profil PT PLN Suku Cadang yang mencakup sejarah, visi dan misi, bidang usaha utama seperti Power Plant Spare Parts dan Renewable Energy Parts, nilai-nilai perusahaan, struktur manajemen, serta portofolio proyek unggulan dan informasi kontak. The About Us portal displays the profile of PT PLN Suku Cadang, including history, vision and mission, main business areas such as Power Plant Spare Parts and Renewable Energy Parts, company values, management structure, a portfolio of featured projects, and contact information.	1. Profil Perusahaan 2. *Experience*/Kompetensi Bisnis 3. Visi dan Misi 4. Tata Nilai/Nilai Perusahaan 5. Manajemen 6. Pengalaman Proyek & Klien 1. Company Profile 2. Business Experience/Competencies 3. Vision and Mission 4. Corporate Values 5. Management 6. Project & Client Experience

Informasi Kanal Channel Information	**Penjelasan** Description	**Poin-Poin Kanal** Channel Points
Product & Services	Informasi yang tercantum pada portal ini adalah berbagai produk dan layanan yang dijalankan Perseroan. The information listed on this portal relates to various products and services run by the Company.	1. *Power Plant Material* 2. *Power Plant Services* 3. *Renewable Energy Part*
Governance	Portal ini menjelaskan framework dan praktik tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) yang diadopsi oleh PT PLN Suku Cadang. This portal explains the Good Corporate Governance (GCG) framework and practices adopted by PT PLN Suku Cadang.	1. Komitmen terhadap GCG sebagai dasar untuk operasi perusahaan agar transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 2. Kebijakan-kebijakan spesifik yang menjadi bagian dari tata kelola, seperti: a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG Code); b. Pedoman Etika/Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*); c. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*); d. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi; e. Kebijakan *Whistleblowing System*; f. Kebijakan Transparansi Informasi Publik g. Penjelasan kebijakan untuk membangun budaya perusahaan yang bersih, sehat, dan beretika, menghindari korupsi, kolusi, nepotisme (PLNSC Bersih). 1. Commitment to GCG as the foundation for transparent, accountable, and sustainable company operations. 2. Specific policies that are part of governance, including: a. Corporate Governance Guidelines (GCG Code); b. Ethics Guidelines/Code of Conduct; c. Board Manual d. Gratification Control Policy; e. Whistleblowing System Policy; f. Public Information Transparency Policy g. Explanation of policies for building a clean, healthy, and ethical corporate culture, avoiding corruption, collusion, and nepotism (Clean PLNSC).
Contact	Portal ini menyediakan informasi lengkap agar pengguna/pemangku kepentingan dapat menghubungi PT PLN Suku Cadang. This portal provides complete information so that users/stakeholders can contact PT PLN Suku Cadang.	1. Berita; 2. Publikasi; 3. Pengumuman Pengadaan; 4. Siaran Pers; 5. Sarana WBS. 1. News; 2. Publications; 3. Procurement Announcements; 4. Press Releases; 5. WBS Tools.
SCMART	Portal ini merupakan kanal e-commerce B2B (business to business) milik PLNSC yang menyediakan katalog produk dan layanan rantai pasok untuk sektor ketenagalistrikan dan utilitas. This portal is PLNSC's B2B (business-to-business) e-commerce channel, offering a catalog of products and supply chain services for the electricity and utilities sectors.	1. Katalog Produk Lengkap; 2. Sistem Penawaran/*Quotation Online*; 3. Akun Pelanggan & Login; 4. Dukungan Pelanggan & Informasi Kontak; 5. Multibahasa/Pilihan Bahasa; 6. Navigasi & Pencarian. 1. Complete Product Catalog; 2. Online Quotation System; 3. Customer Account & Login; 4. Customer Support & Contact Information; 5. Multilingual/Language Selection; 6. Navigation & Search.



Melalui portal *website* PLNSC, Perseroan menyajikan informasi yang memadai, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penyampaian informasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat luas, pelanggan, serta para pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Perseroan berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan.

Through the PLNSC website portal, the Company provides information that is comprehensive, informative, and easily accessible to the public. The dissemination of this information is part of the Company's commitment to upholding the principles of transparency, accountability, and open communication with the general public, customers, and stakeholders. Through accurate and accountable information management, the Company expects to increase public trust in its performance and corporate governance.





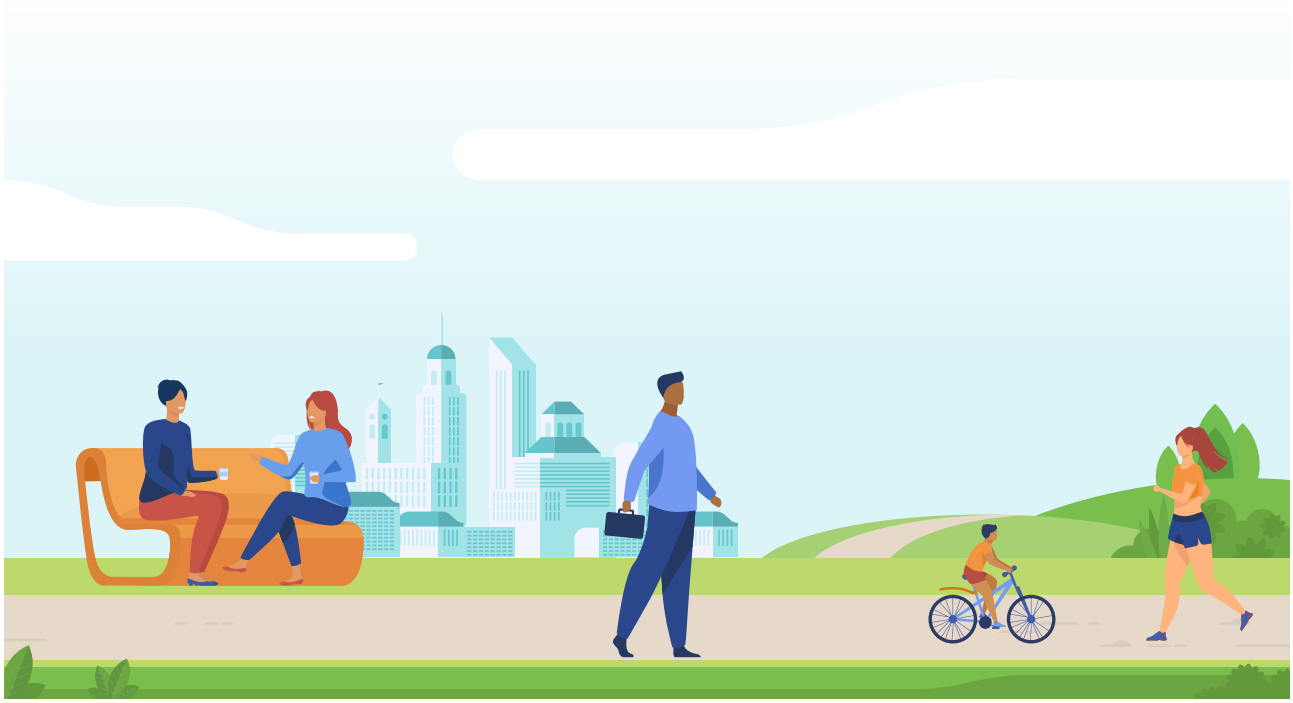


Tijauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

04

Sumber Daya Manusia
Human Resources



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan utama yang mendorong PLNSC untuk terus bertumbuh, berinovasi, dan menghadapi dinamika industri yang terus berkembang. Perseroan meyakini bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh strategi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas individu yang menjalankan dan mengembangkan Perseroan setiap harinya. Oleh karena itu, SDM dipandang sebagai aset strategis yang memiliki peran penting dalam menciptakan kinerja, budaya kerja, serta keberlanjutan bisnis Perseroan.

Dalam mendukung terciptanya SDM yang unggul, Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang mendorong pengembangan kompetensi, profesionalisme, dan kolaborasi. Perusahaan juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas karyawan melalui berbagai program pengembangan yang selaras dengan kebutuhan bisnis dan tantangan masa depan. Dengan SDM yang kompeten, adaptif, dan memiliki semangat untuk terus berkembang, Perusahaan optimistis dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Human Resources (HR) are the primary driving force that enables PLNSC to continue growing, innovating, and responding to the dynamics of an evolving industry. The Company believes that business success is determined not only by strategy and technology, but also by the quality of the individuals who operate and develop the Company on a daily basis. Accordingly, Human Resources are regarded as a strategic asset that plays an important role in driving performance, fostering the Company's work culture, and ensuring business sustainability.

In supporting the development of high-quality Human Resources, the Company is committed to fostering a work environment that encourages competency development, professionalism, and collaboration. The Company also continues to enhance employees' capacity and capabilities through various development programs aligned with business needs and future challenges. With competent, adaptive Human Resources who are committed to continuous development, the Company remains confident in its ability to create sustainable value for all stakeholders.

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Human Resource Management Strategy

Perseroan menerapkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, hingga persiapan masa purna tugas. Pengelolaan SDM dilakukan sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, menjawab tantangan bisnis, serta mendukung terciptanya proses bisnis yang adaptif dan berdaya saing. [GRI 103-1]

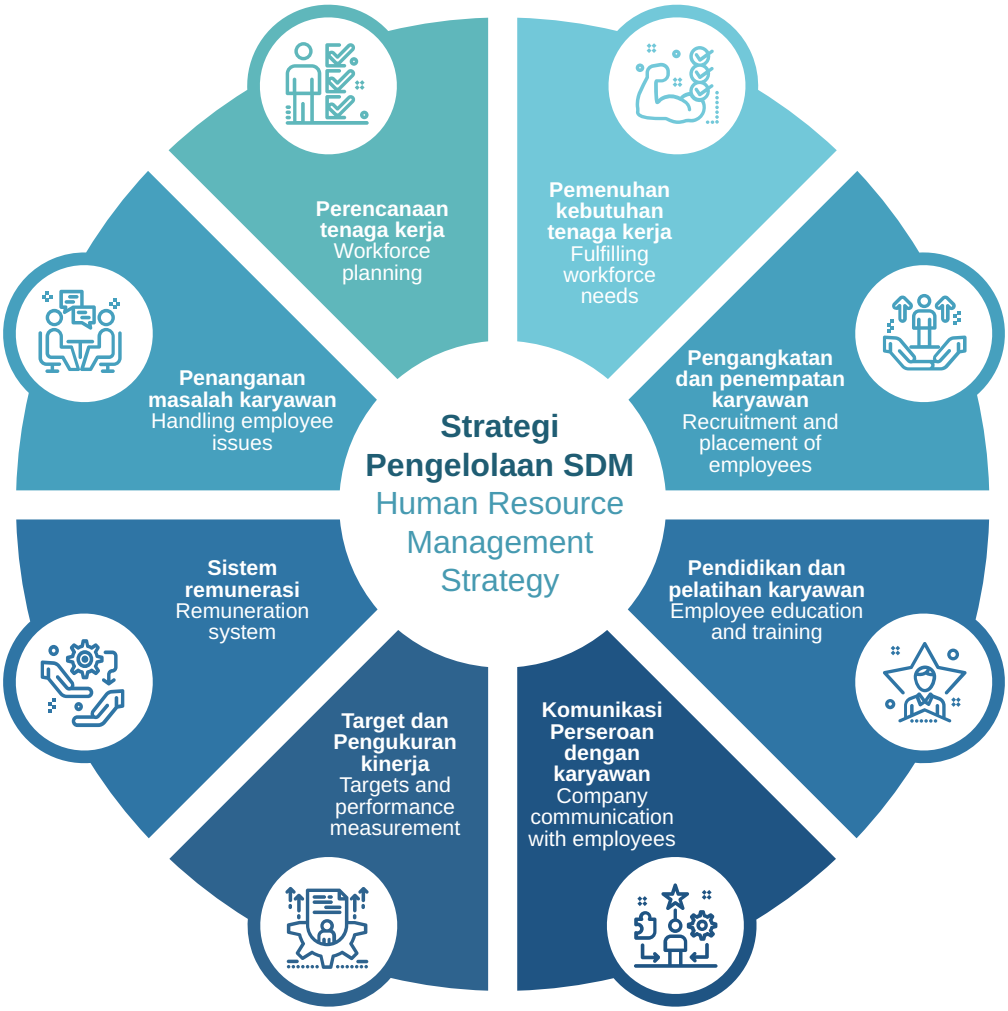
Dalam mendukung keberlangsungan usaha, fungsi manajemen SDM memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya talenta yang kompeten, profesional, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat strategi pengelolaan SDM agar mampu mengakomodasi dinamika industri sekaligus mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan organisasi yang berkelanjutan, Perseroan merumuskan strategi pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan arah bisnis dan budaya kerja Perseroan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Strategi tersebut menjadi pedoman dalam mengarahkan pengembangan karyawan agar mampu memberikan kontribusi optimal, meningkatkan produktivitas, serta mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

The Company implements comprehensive and sustainable Human Resources (HR) management, ranging from workforce planning and competency development to retirement preparation. Human Resources management is carried out as part of the Company's efforts to ensure organizational readiness in responding to change, addressing business challenges, and supporting the establishment of adaptive and competitive business processes. [GRI 103-1]

In supporting business sustainability, the Human Resources management function plays an important role in ensuring the availability of competent and professional talent aligned with the Company's needs. Accordingly, the Company continues to strengthen its Human Resources management strategy to accommodate industry dynamics while supporting the achievement of the Company's long-term objectives.

As part of its commitment to sustainable organizational development, the Company has established an integrated Human Resources management strategy aligned with its business direction and corporate culture through the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 concerning the Good Corporate Governance Guidelines (Corporate Governance Code) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. This strategy serves as a guideline for directing employee development to enable employees to contribute optimally, enhance productivity, and support sustainable business growth, and covers the following key aspects:



Dalam memastikan tersedianya SDM yang kompeten dan selaras dengan perkembangan bisnis, PLNSC menyusun perencanaan tenaga kerja secara terukur untuk mendukung kebutuhan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dengan perencanaan yang tepat, Perusahaan dapat menjaga keberlangsungan operasional sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Berikut landasan perencanaan tenaga kerja yang dilakukan oleh Perseroan:

1. Analisis beban kerja organisasi baik perkiraan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang disesuaikan dengan perubahan organisasi, lingkungan bisnis, kebijakan dan strategi Perseroan;
2. Rencana optimasi karyawan dengan mempertimbangkan rencana pengisian jabatan, mutasi, pensiun, pemberhentian karyawan;
3. Rencana perbaikan komposisi pendidikan dan kompetensi karyawan;
4. Rencana pensiun dan pemberhentian karyawan; serta
5. Rencana optimasi pemanfaatan *outsourcing*.

To ensure the availability of competent Human Resources aligned with business development, PLNSC prepares a structured workforce plan to support short-, medium-, and long-term requirements. Through effective workforce planning, the Company is able to maintain operational continuity while supporting sustainable business growth. The basis of the Company's workforce planning includes the following:

1. Analysis of organizational workload covering short-, medium-, and long-term projections, taking into account changes in the organization, business environment, and the Company's policies and strategies;
2. Employee optimization plans by considering succession planning, employee transfers, retirement, and employee termination;
3. Plans to improve the composition of employees' educational qualifications and competencies;
4. Retirement and employee termination plans; and
5. Plans to optimize the utilization of outsourced personnel.

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resource Development

Perseroan meyakini bahwa sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan adaptif merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung pengembangan bisnis solusi *supply chain* suku cadang, material, dan jasa pendukung di sektor ketenagalistrikan nasional. Oleh karena itu, PLNSC terus memperkuat sistem pengelolaan SDM secara berkelanjutan melalui berbagai program pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, serta pengelolaan kesejahteraan karyawan guna mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

Pengelolaan SDM Perseroan disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, perkembangan industri pembangkitan listrik, serta arah strategi bisnis perusahaan. Proses pengelolaan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, penempatan karyawan, pengembangan kompetensi, hingga penyusunan sistem remunerasi dan paket kesejahteraan karyawan. Perseroan juga menjunjung prinsip kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh karyawan dalam memperoleh akses terhadap program pengembangan kompetensi maupun sistem remunerasi berbasis kinerja.

Dalam mendukung implementasi strategi perusahaan, Perseroan telah melakukan penyelarasan strategi korporat ke dalam *Key Performance Indicators* (KPI) dan target kinerja yang diterapkan secara berjenjang sebagai dasar pengukuran kinerja serta penerapan sistem *reward and punishment*. Implementasi tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan produktivitas, akuntabilitas, dan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian kinerja perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan berbagai program kerja strategis di bidang pengelolaan SDM, antara lain:
- Pelaksanaan program pelatihan berdasarkan hasil *Training Needs Analysis* (TNA);
- Pemetaan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* karyawan;
- Implementasi *Cascading KPI* bagi seluruh karyawan melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Karyawan (SIMKK); serta
- Penguatan sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung peningkatan efektivitas dan produktivitas kerja.

The Company believes that competent, professional, and adaptive Human Resources are one of the key factors in supporting the development of its supply chain solutions business for spare parts, materials, and supporting services in the national electricity sector. Therefore, PLNSC continues to strengthen its HR management system on a sustainable basis through various competency development programs, performance improvement initiatives, and employee welfare management to support the Company's business growth.

The Company's HR management is designed comprehensively by considering organization needs, developments in the power generation industry, and the Company's business strategy. The management process covers all stages, ranging from workforce planning, recruitment, employee placement, competency development, to the establishment of remuneration systems and employee welfare packages. The Company also upholds the principles of fairness and equal opportunity by providing all employees with equal access to competency development programs and performance-based remuneration systems.

To support the implementation of the Company's strategy, the Company has aligned its corporate strategy with Key Performance Indicators (KPIs) and performance targets implemented throughout all organizational levels as the basis for performance measurement and the implementation of the reward and punishment system. This implementation is intended to encourage higher productivity, accountability, and a performance-oriented work culture.

Throughout 2025, the Company implemented various strategic Human Resources management programs, including:
- Implementation of training programs based on the results of the Training Needs Analysis (TNA);
- Mapping of employees' hard skills and soft skills;
- Implementation of Cascading KPIs for all employees through the Employee Performance Management Information System (SIMKK); and
- Strengthening the performance management system to support improvements in work effectiveness and productivity.

Selain fokus pada pengembangan kompetensi karyawan, Perseroan juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan melalui penguatan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM). Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program manajemen risiko, pengawasan kepatuhan, serta penyampaian Laporan Manajemen Risiko dan Evaluasi Kepatuhan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui pengelolaan SDM yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan, PLNSC optimistis mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi karyawan, memperkuat kompetensi organisasi, menjaga kesejahteraan insan perusahaan, serta meningkatkan kesiapan Perseroan dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis yang terus berkembang secara berkelanjutan.

In addition to focusing on employee competency development, the Company also continued to enhance the quality of corporate management by strengthening the implementation of Enterprise Risk Management (ERM). These efforts were carried out through the implementation of risk management programs, compliance monitoring, and the quarterly submission of Risk Management Reports and Compliance Evaluation Reports as part of strengthening good corporate governance.

Through integrated Human Resources management aligned with the Company's strategic objectives, PLNSC remains confident in its ability to enhance the effective utilization of employee potential, strengthen organizational competencies, maintain employee welfare, and improve the Company's readiness to respond to evolving business dynamics and challenges on a sustainable basis.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Recruitment Policy and Implementation

Kebijakan rekrutmen PLNSC disusun berdasarkan standar internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, transparan, adil, serta bebas dari diskriminasi. Setiap tahapan rekrutmen dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan perlindungan data pribadi kandidat. Melalui kebijakan ini, PLNSC berkomitmen menghadirkan proses rekrutmen yang efektif dan tepat sasaran untuk mendapatkan talenta terbaik dalam mendukung pertumbuhan dan pencapaian tujuan Perseroan.

Rekrutmen Yang Adil dan Bertanggung Jawab [GRI 401-1]

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 014.K/020/DIR- PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, rekrtumen dilakukan melalui dua sumber meliputi:

PLNSC's recruitment policy is formulated based on the Company's internal standards and prevailing laws and regulations to ensure that the entire process is conducted professionally, transparently, fairly, and free from discrimination. Every stage of the recruitment process is carried out with a strong commitment to legal compliance and the protection of candidates' personal data. Through this policy, PLNSC is committed to deliver an effective and targeted recruitment process to attract the best talent in support of the Company's growth and the achievement of its objectives.

Fair and Responsible Recruitment [GRI 401 1]

According to the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 regarding the Corporate Governance Code of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, recruitment is conducted through two sources, including:

1. Sumber internal yang berasal dari internal Perseroan;
2. Sumber eksternal yang berasal dari luar Perseroan meliputi:
   a. PT PLN (Persero);
   b. PT Pembangkitan Jawa-Bali (yang sekarang bernama PT Nusantara Power) dan Anak Perusahaan;
   c. PT Indonesia Power dan Anak Perusahaan;
   d. Perusahaan di lingkungan PT PLN (Persero) lainnya;
   e. Pasar Tenaga kerja;
   f. Institusi Lain.

Perseroan juga melakukan rekrutmen karyawan dari sumber eksternal yang dilakukan melalui metode:
a. Rekrutmen Fresh Graduate;
b. Rekrutmen Kualifikasi Tertentu; serta
c. Tugas Karya.

PLNSC berkomitmen menghadirkan proses rekrutmen yang profesional dan berorientasi pada kualitas SDM. Setiap peserta yang memenuhi kualifikasi dan dinyatakan lulus akan ditempatkan pada jalur kompetensi serta posisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Dalam setiap tahapan seleksi, Perseroan memastikan seluruh kandidat diperlakukan secara adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi etika profesional.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan, PLNSC menerapkan sistem rekrutmen yang terstruktur, efektif, dan selaras dengan skala operasional perusahaan. Seluruh proses dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang, sehingga tercipta kesempatan yang setara bagi setiap kandidat terbaik. [GRI 103-2, GRI 103-3]

Turnover [GRI 401-1]

Perubahan jumlah karyawan di Perseroan terjadi seiring dengan adanya dinamika ketenagakerjaan. Pergantian tenaga kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pengunduran diri, memasuki masa pensiun, mutasi kembali ke anak perusahaan, pemutusan hubungan kerja, hingga kondisi tertentu seperti meninggal dunia. Perseroan senantiasa mengelola proses tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjaga keberlangsungan operasional perseroan.

1. Internal sources originating from within the Company;
2. External sources from outside the Company, including:
   a. PT PLN (Persero);
   b. PT Pembangkitan Jawa-Bali (now known as PT Nusantara Power) and its subsidiaries;
   c. PT Indonesia Power and its subsidiaries;
   d. Other companies within the PT PLN (Persero) group;
   e. The labor market;
   f. Other institutions.

The Company also recruits employees from external sources through the following methods:
a. Fresh graduate recruitment;
b. Recruitment based on specific qualifications; and
c. Work assignments.

PLNSC is committed to conduct professional recruitment process focused on the quality of human resources. Every candidate who meets the qualifications and passes the selection process will be placed in a competency track and position that aligns with their abilities and potential. At every stage of the selection process, the Company ensures that all candidates are treated fairly, with dignity, and in accordance with professional ethics.

To meet the need for competent workforce and support the Company's business growth, PLNSC implements a structured, effective recruitment system aligned with the Company's operational scale. The entire process is conducted by prioritizing the principles of transparency, honesty, and fairness without discrimination based on ethnicity, religion, race, or background, thereby creating equal opportunities for every top candidate. [GRI 103-2, GRI 103-3]

Turnover [GRI 401 1]

Changes in the number of employees at the Company occur in line with labor market dynamics. Employee turnover can be attributed to various factors, including resignation, retirement, transfer back to a subsidiary, termination of employment, and certain circumstances such as death. The Company consistently manages these processes professionally and in accordance with applicable regulations to ensure the continuity of its operations.

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Performance Management and Evaluation [GRI 404-3]

PLNSC menerapkan sistem penilaian kinerja sebagai sarana untuk mengukur, memantau, dan mengembangkan performa individu maupun tim secara berkelanjutan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Perseroan. Melalui proses evaluasi ini, Perseroan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan serta kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan agar mampu beradaptasi dan bersaing di lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Pelaksanaan penilaian kinerja di PLNSC mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Corporate Governance Code) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Berdasarkan pedoman tersebut, setiap karyawan wajib menyusun target dan sasaran kinerja yang disepakati bersama atasan sebagai acuan pencapaian kerja. Proses penilaian dilakukan secara formal setiap 6 (enam) bulan antara karyawan dan atasan langsung guna memastikan objektivitas dan efektivitas evaluasi. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penting bagi Perseroan dalam merencanakan program pelatihan, promosi, serta pengembangan karier karyawan secara berkelanjutan.

Sistem Penilaian Kinerja

Secara berkala, Perseroan melakukan proses review melalui Evaluasi Kompetensi (EK) dan Penilaian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam menilai kualitas serta kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Sistem penilaian kinerja di PLNSC dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompetensi, perilaku, dan capaian kerja setiap karyawan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam dokumen Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (P3) dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan kenaikan skala maupun golongan gaji secara objektif dan terukur. [GRI 103-1]

Dalam mendukung proses evaluasi yang efektif, PLNSC mengembangkan sistem informasi SDM yang terintegrasi untuk memantau pencapaian kinerja individu yang selaras dengan target dan sasaran strategis Perseroan. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, mempersiapkan

PLNSC implements a performance appraisal system as a means to continuously measure, monitor, and develop both individual and team performance to support the achievement of the Company's strategic objectives. Through this evaluation process, the Company can identify opportunities for improvement as well as the need to develop employee competencies so they can adapt and compete in a dynamic and competitive business environment. The implementation of performance appraisals at PLNSC is based on the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 regarding the Corporate Governance Code of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Based on these guidelines, every employee is required to set performance targets and objectives agreed upon with their supervisor as a benchmark for work achievement. The evaluation process is conducted formally every 6 (six) months between employees and their immediate supervisors to ensure the objectivity and effectiveness of the evaluation. The results of these evaluations serve as a crucial basis for the Company in planning training programs, promotions, and the continuous career development of employees.

Performance Appraisal System

Periodically, the Company conducts a review process through Competency Evaluation (EK) and Performance Appraisal (PK) as the basis for assessing employees' quality and contributions to the company. The performance appraisal system at PLNSC is designed to provide a comprehensive overview of each employee's competencies, behavior, and work achievements. The results of these appraisals are documented in the Job Performance Appraisal (P3) report and used as a reference for determining pay scale and grade increases in an objective and measurable manner. [GRI 103-1]

To support an effective evaluation process, PLNSC has developed an integrated HR information system to monitor individual performance against the Company's strategic targets and objectives. This system enables the Company to identify competency development needs, map out employee career paths, and build the capabilities required

jalur karier karyawan, serta membangun kapabilitas yang dibutuhkan guna mendukung produktivitas perusahaan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan dapat menetapkan tindak lanjut pengembangan karier, seperti promosi jabatan, rotasi posisi, maupun penyesuaian level jabatan sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM jangka panjang. [GRI 103-3]

to support sustainable corporate productivity. Based on the results of these evaluations, the Company can determine career development actions, such as promotions, job rotations, or adjustments to job levels, as part of its long-term HR development strategy. [GRI 103-3]

Implementasi Budaya Perusahaan
Corporate Culture Implementation

Sebagai bagian dari upaya penguatan budaya perusahaan, PLNSC secara konsisten menjalankan berbagai agenda dan program yang mendukung internalisasi nilai-nilai budaya kerja pada seluruh lini organisasi. Penguatan budaya tersebut difokuskan pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan kolaborasi dan kinerja, serta pengembangan budaya pelayanan yang unggul guna mendukung keberlanjutan dan pencapaian tujuan strategis Perseroan.

As part of its efforts to strengthen corporate culture, PLNSC consistently carries out various initiatives and programs that support the internalization of work culture values across all levels of the organization. This cultural strengthening is focused on implementing good corporate governance, enhancing collaboration and performance, and developing a culture of excellence in service to support the Company's sustainability and the achievement of its strategic objectives.

Program Budaya Perusahaan di PLNSC diimplementasikan dengan mengacu pada budaya perusahaan PT PLN (Persero) serta selaras dengan kebijakan induk perusahaan PT PLN Nusantara Power. Program ini dibangun melalui tiga pilar utama budaya perusahaan, yaitu *GRC Culture* (PLN 1), *Collaboration & Performance Culture* (PLN 2), dan *Service Culture* (PLN 3), sebagai landasan dalam membentuk lingkungan kerja yang profesional, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Implementasi budaya perusahaan di PLNSC mengacu pada Peraturan Direksi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Nomor 002A.P/010/DIR-PLNSC/2021 tentang Budaya Perusahaan.

The Corporate Culture Program at PLNSC is implemented in accordance with the corporate culture of PT PLN (Persero) and is aligned with the policies of the parent company, PT PLN Nusantara Power. This program is built upon three main pillars of corporate culture: GRC Culture (PLN 1), Collaboration & Performance Culture (PLN 2), and Service Culture (PLN 3), which serve as the foundation for creating a professional, collaborative, and integrity-driven work environment that is service-oriented. The implementation of corporate culture at PLNSC is based on PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Board of Directors Regulation No. 002A.P/010/DIR-PLNSC/2021 on Corporate Culture.

Upaya penguatan budaya perusahaan yang dibangun melalui tiga pilar utama tersebut diwujudkan dalam berbagai agenda dan program strategis yang meliputi:
1. Perilaku Pemimpin (*Leaders Behaviors*);
2. Organisasi dan Sistem (*Organizational Systems*); dan
3. Meningkatkan simbol (*Enhancing Symbols*).

Efforts to strengthen the corporate culture built upon these three main pillars are realized through various strategic agendas and programs, including:
1. Leader Behaviors;
2. Organizational Systems; and
3. Enhancing Symbols.

Roadmap Budaya Perusahaan pada prinsipnya mengikuti PT PLN Nusantara Power sebagai induk Perseroan sebagaimana tujuan penyelarasan Budaya Perusahaan untuk:
a. Mengoptimalkan sinergi organisasi PT PLN Nusantara Power Group dalam implementasi Budaya Perusahaan;

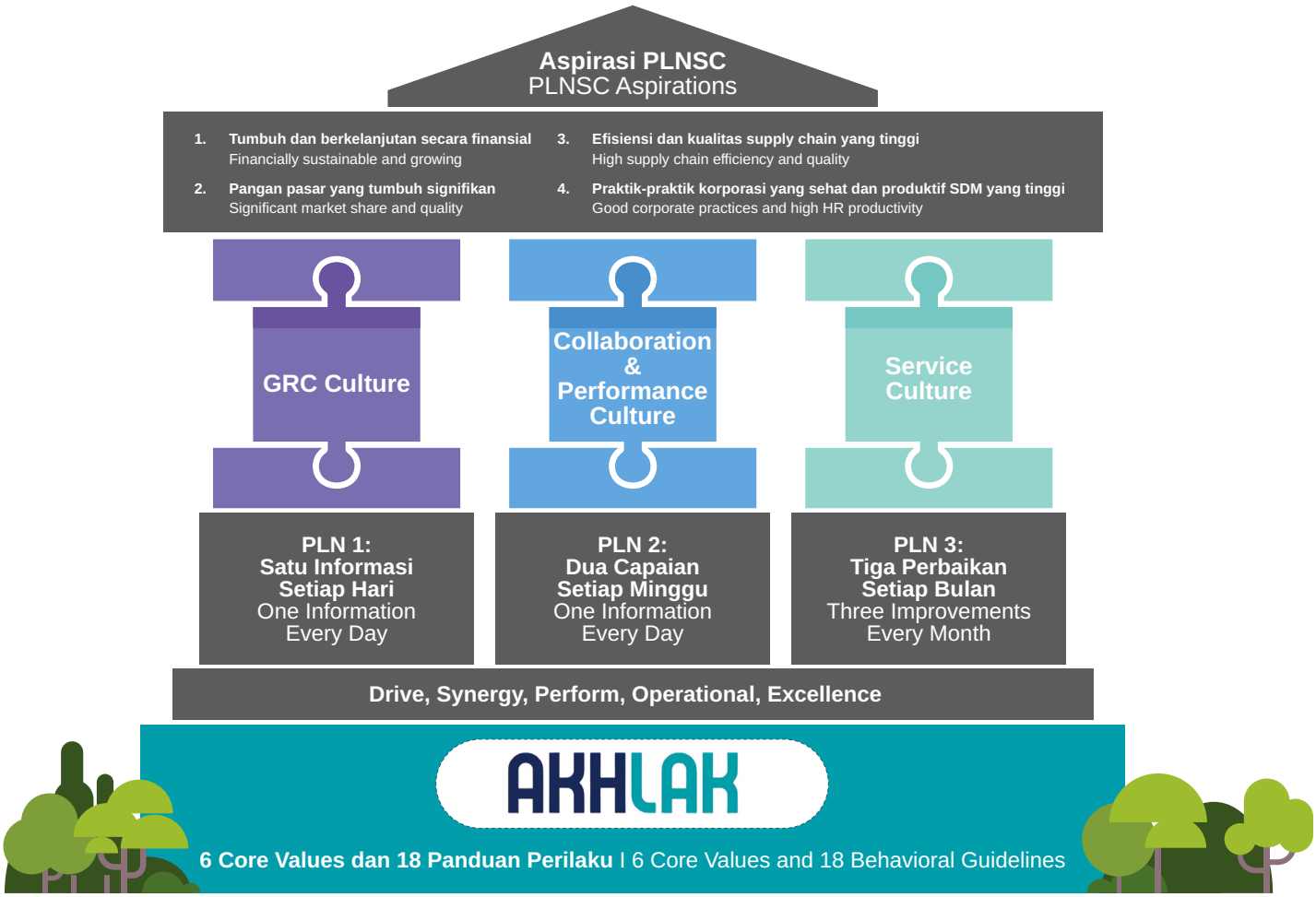
The Corporate Culture Roadmap essentially aligns with that of PT PLN Nusantara Power, the Company's parent company, in accordance with the objectives of harmonizing the Corporate Culture to:
a. Optimize organizational synergy within the PT PLN Nusantara Power Group in the implementation of the Corporate Culture;

b. Mendorong tercapainya visi PT PLN Nusantara Power dan PT PLNSC melalui penguatan Budaya Perusahaan;
c. Terbangunya *governance, risk & compliance culture, collaboration & performance culture*, serta *service culture* yang akan menjamin pencapaian kinerja unggul jangka panjang; serta
d. Terbangunnya Budaya Perusahaan yang selalu selaras dengan visi, misi, aspirasi dan strategi PT PLN Nusantara Power dan PT PLNSC.

Implementasi Budaya Perusahaan di PLNSC diterjemahkan ke dalam program budaya kerja yang terintegrasi dan aplikatif sebagai bentuk penguatan nilai-nilai perusahaan dalam aktivitas sehari-hari. Program tersebut diwujudkan melalui "PLN 1: Satu Informasi Setiap Hari" sebagai implementasi *GRC Culture*, "PLN 2: Dua Capaian Setiap Minggu" sebagai representasi *Collaboration & Performance Culture*, serta "PLN 3: Tiga Perbaikan Setiap Bulan" yang mendukung penerapan *Service Culture*.

b. Drive the achievement of the visions of PT PLN Nusantara Power and PT PLNSC through the strengthening of the Corporate Culture;
c. Establishing a governance, risk & compliance culture, a collaboration & performance culture, and a service culture that will ensure the achievement of long-term excellence in performance; and
d. Establishing a Corporate Culture that is always aligned with the vision, mission, aspirations, and strategies of PT PLN Nusantara Power and PT PLNSC.

The implementation of Corporate Culture at PLNSC is translated into an integrated and practical work culture program as a means of reinforcing corporate values in daily activities. These programs are realized through "PLN 1: One Update Every Day" as the implementation of GRC Culture, "PLN 2: Two Achievements Every Week" as a representation of Collaboration & Performance Culture, and "PLN 3: Three Improvements Every Month" which supports the implementation of Service Culture.



Perseroan terus melakukan penguatan dan penyelarasan budaya perusahaan melalui penerapan budaya AKHLAK PLN Group sebagai nilai inti dalam lingkungan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselarasan budaya kerja dengan Pemegang Saham serta seluruh entitas di lingkungan PLN Group, sekaligus memperkuat transformasi perusahaan menuju organisasi yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kinerja.

Dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan implementasi budaya perusahaan tersebut, PLNSC menetapkan 5 (lima) *critical few behavior* dari nilai-nilai AKHLAK yang diinternalisasikan ke dalam setiap program budaya perusahaan, yaitu:

a. Memenuhi janji & komitmen (value Amanah);
b. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik (value Kompeten);
c. Terus-menerus melakukan perbaikan mengi-kuti perkembangan teknologi (value Adaptif);
d. Bertindak proaktif (value Adaptif); serta
e. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama (value Kolaboratif).

Implementasi program budaya di PLNSC dijalankan oleh seluruh insan perusahaan dengan mengacu pada objektif budaya dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam panduan penyusunan program budaya. Dalam pelaksanaannya, *Ranger Leader* dan *Ranger* memiliki peran strategis sebagai penggerak utama sekaligus fasilitator komunikasi dalam proses internalisasi Budaya Perusahaan. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan sosialisasi tata nilai budaya secara berkala kepada seluruh jajaran perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi, manajemen, hingga seluruh karyawan baik di kantor pusat maupun wilayah operasional Perseroan, sebagai bentuk komitmen dalam membangun budaya kerja yang selaras dan berkelanjutan.

The Company continues to strengthen and align its corporate culture by implementing PLN Group's AKHLAK culture as core values within the workplace. This initiative is undertaken to ensure alignment of the work culture with shareholders and all entities within the PLN Group, while also reinforcing the Company's transformation into a professional, collaborative, and performance-oriented organization.

To ensure the effectiveness and success of this corporate culture implementation, PLNSC has identified 5 (five) "critical few behaviors" derived from the AKHLAK values, which are integrated into every corporate culture program, namely:

a. Fulfilling promises and commitments (Trustworthy value)
b. Completing tasks with the highest quality (Competent value);
c. Continuously improving in line with technological advancements (Adaptive value);
d. Acting proactively (Adaptive value); and
e. Mobilizing the use of various resources for a common purpose (Collaborative value).

The implementation of the corporate culture program at PLNSC is carried out by all company personnel in accordance with the cultural objectives and performance targets set forth in the corporate culture program development guidelines. In its implementation, Ranger Leaders and Rangers play a strategic role as the primary drivers and facilitators of communication in the process of internalizing the Corporate Culture. In addition, the Company also conducts periodic socialization of cultural values to all levels of the organization, ranging from the Board of Commissioners and the Board of Directors, to management, and all employees—both at the headquarters and in the Company's operational regions—as a demonstration of its commitment to foster harmonious and sustainable work culture.

Pengembangan Karir
Career Development

PLNSC memandang pengembangan karier sebagai bagian penting dalam membangun kualitas dan keberlanjutan sumber daya manusia perusahaan. Melalui berbagai program pengembangan seperti pelatihan, rotasi kerja, mentoring, dan evaluasi kinerja, Perseroan berupaya membantu karyawan mengenali serta mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan karier diarahkan untuk menciptakan jalur karier yang terstruktur, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan. PLNSC juga memastikan bahwa pengembangan kompetensi individu berjalan selaras dengan kebutuhan organisasi, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

PLNSC views career development as a vital component in building the quality and sustainability of the company's human resources. Through various development programs such as training, job rotations, mentoring, and performance evaluations, the Company strives to help employees recognize and develop their full potential so they can make optimal contributions to the company.

In practice, career development is designed to create structured, transparent career paths that provide equal opportunities for all employees. PLNSC also ensures that the development of individual competencies aligns with the organization's needs, thereby supporting the company's sustained performance improvement.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan
Employee Remuneration and Welfare [GRI 401-2]

PLNSC berkomitmen untuk memberikan remunerasi dan kesejahteraan yang layak kepada seluruh karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan kinerja yang diberikan kepada Perseroan. Kebijakan remunerasi diterapkan secara adil, kompetitif, dan selaras dengan tanggung jawab, kompetensi, serta pencapaian kinerja masing-masing karyawan guna menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

Selain memberikan kompensasi yang sesuai, Perseroan juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai program dan fasilitas pendukung yang bertujuan menciptakan rasa aman, nyaman, dan seimbang dalam kehidupan kerja. PLNSC meyakini bahwa kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong motivasi, loyalitas, dan keberlanjutan kinerja perusahaan secara keseluruhan. [GRI 103-1]

PLNSC is committed to provide appropriate compensation and welfare to all employees as a form of appreciation for their contributions and performance. Compensation policies are implemented fairly, competitively, and in line with each employee's responsibilities, competencies, and performance achievements to foster a professional and productive work environment.

In addition to provide appropriate compensation, the Company also continuously strives to improve employee well-being through various programs and support facilities aimed at fostering a sense of security, comfort, and balance in work life. PLNSC believes that employee well-being is a key factor in driving motivation, loyalty, and the sustainability of the Company's overall performance. [GRI 103-1]

Remunerasi Karyawan

Mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 001.K/DK-PLNSC/2020, pemberian remunerasi di PLNSC merupakan bentuk penghargaan atas kompetensi individu, tanggung jawab jabatan, serta prestasi kerja karyawan terhadap Perseroan. Setiap karyawan berhak memperoleh kompensasi dan manfaat kerja yang diberikan secara adil sesuai dengan kontribusi, tingkat kompetensi, dan tanggung jawab yang diemban dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan remunerasi Perseroan senantiasa mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota/Kabupaten yang berlaku di wilayah operasional Perseroan. [GRI 103-2] Selain itu, penetapan remunerasi juga mempertimbangkan golongan karyawan, status kepegawaian, dan jenjang jabatan yang disesuaikan melalui *remuneration survey* pada industri sejenis. Perseroan memastikan tidak terdapat perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin, ras, maupun agama. [GRI 405-2] Penentuan benefit dan failitas yang diterima karyawan dipengaruhi oleh perbedaan kategori, yaitu kategori karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.

PLNSC berkomitmen menjaga prinsip kesetaraan dalam pemberian remunerasi dengan memastikan kompensasi yang diberikan kepada karyawan laki-laki maupun perempuan dilakukan secara adil dan kompetitif sesuai fungsi, tanggung jawab, serta kontribusi kerja yang diemban. Meskipun status kepegawaian dapat memengaruhi benefit dan tunjangan yang diterima, Perseroan tidak membedakan upah berdasarkan gender, ras, maupun latar belakang lainnya. PLNSC menyadari bahwa komposisi tenaga kerja bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, namun Perseroan tetap konsisten dalam menjaga penerapan prinsip kesetaraan di lingkungan kerja. [GRI 202-1] [6.c.2)b)] [GRI 405-2] [GRI 103-1, GRI 103- 2, [GRI 103-3]

Employee Remuneration

Referring to the Corporate Governance Code established through Joint Decisions of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 001. K/DK-PLNSC/2020, the provision of compensation at PLNSC serves as a form of recognition for individual competence, job responsibilities, and employees' work performance toward the Company. Every employee is entitled to receive compensation and employment benefits that are provided fairly in accordance with their contributions, level of competence, and responsibilities undertaken in supporting the achievement of the Company's objectives.

In its implementation, the Company's remuneration policy consistently adheres to the Labor Law as well as the provisions of the Provincial Minimum Wage (UMP) and the City/Regency Minimum Wage applicable in the Company's operational areas. [GRI 103-2] In addition, remuneration determinations also take into account employee categories, employment status, and job levels, which are adjusted based on remuneration surveys within the same industry. The Company ensures there are no wage disparities based on gender, race, or religion. [GRI 405-2] The determination of benefits and facilities received by employees is influenced by differences in employee categories, namely permanent and non-permanent employees.

PLNSC is committed to uphold the principle of equality in remuneration by ensuring that compensation provided to both male and female employees is fair and competitive, commensurate with their functions, responsibilities, and work contributions. While employment status may affect the benefits and allowances received, the Company does not differentiate wages based on gender, race, or other backgrounds. PLNSC recognizes that the workforce composition is dynamic and subject to change at any time; however, the Company remains consistent in upholding the principle of equality in the workplace. [GRI 202-1] [6.c.2)b)] [GRI 405-2] [GRI 103-1, GRI 103-2, [GRI 103-3]

Selain itu, PLNSC juga memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan sejak awal bergabung telah memenuhi bahkan berada di atas standar upah minimum yang berlaku sesuai wilayah operasional Perseroan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, PLNSC berharap dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, lingkungan kerja yang sehat dan inklusif, serta mendorong terciptanya produktivitas dan kinerja optimal dari seluruh karyawan secara berkelanjutan.

In addition, PLNSC also ensures that the starting salary offered to employees upon joining the company meets or even exceeds the applicable minimum wage standards in the Company's operational regions. Through these various initiatives, PLNSC hopes to foster harmonious working relationships, a healthy and inclusive work environment, and to promote sustainable productivity and optimal performance from all employees.

Pengembangan Kompetensi
Competency Development

Untuk dapat menghadapi dinamika dan percepatan perubahan bisnis, PLNSC berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa daya saing perusahaan harus didukung oleh karyawan yang memiliki kompetensi unggul, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan industri.

To address the dynamics and accelerating pace of business change, PLNSC is committed to continuously improving the quality of its human resources as a key factor in supporting the Company's sustainable growth. The Company believes that its competitiveness must be supported by employees who possess outstanding competencies, are adaptable, and are capable of keeping pace with industry developments.

Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kompetensi di PLNSC difokuskan pada peningkatan *skill*, *knowledge*, dan *attitude* melalui berbagai program pengembangan, seperti pelatihan kepemimpinan, *on the job training*, penugasan, mutasi, rotasi, hingga promosi jabatan. Melalui program tersebut, karyawan diharapkan mampu menetapkan tujuan kerja, memahami proses kerja secara optimal, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dalam menjalankan tugasnya. [GRI 103-3]

Therefore, PLNSC's competency development policy focuses on enhancing skills, knowledge, and attitude through various development programs, such as leadership training, on-the-job training, assignments, transfers, rotations, and promotions. Through these programs, employees are expected to be able to set work goals, understand work processes optimally, and improve effectiveness, efficiency, and productivity in performing their duties. [GRI 103-3]

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan, PLNSC secara konsisten melaksanakan program pendidikan dan pelatihan karyawan (Diklat) guna membangun, meningkatkan, dan memelihara kompetensi karyawan sekaligus memperkuat internalisasi nilai-nilai Perseroan.

As a demonstration of its commitment to continuous learning, PLNSC consistently implements employee education and training programs (Diklat) to build, enhance, and maintain employee competencies while strengthening the internalization of the Company's values.

Program pengembangan SDM dirancang setiap tahun berdasarkan *Training Need Analysis* yang mencakup *knowledge management* dan *learning services*, serta diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal. PLNSC menerapkan *Competency Model* yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan untuk mengikuti program pelatihan sesuai kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi, dan arah pengembangan bisnis Perseroan dengan persetujuan Kepala Divisi terkait.

Human Resource Development programs are designed annually based on a Training Needs Analysis that covers knowledge management and learning services, and are conducted in collaboration with both internal and external partners. PLNSC implements a Competency Model that provides equal opportunities for all employees to participate in training programs in accordance with their job requirements, competency development plans, and the Company's business development direction, subject to approval by the relevant Division Head.

Program pengembangan ini juga berlaku bagi karyawan baru sebagai bagian dari proses pembentukan kompetensi dan kesiapan kerja sejak awal bergabung dengan Perseroan.

These development programs also apply to new employees as part of the process of building competencies and work readiness from the moment they join the Company.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, PLNSC telah mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan dan sertifikasi sebagai program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada karyawan. Berikut daftar pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh berbagai divisi:

Competency Development in 2025

Throughout 2025, PLNSC has enrolled employees in various training and certification programs as part of its Human Resources (HR) development initiatives aimed at enhancing employee value. The following is a list of training and certification programs participated in by various divisions:

Judul Pelatihan dan Sertifikasi Title of Training and Certification	**Tangal Pelaksanaan** Date of Implementation
a-z Coretax System Cara Tepat dan Cepat Memahami Coretax a-z Coretax System: The Right and Fast Way to Understand Coretax	7 Februari 2025 February 7, 2025
FIDIC Contract Management	11 – 12 Februari 2025 February 11 – 12, 2025
Sales Forecasting and Targetting	13 – 14 Februari 2025 February 13 – 14, 2025
Sales Forecasting and Targetting	13 – 14 Februari 2025 February 13 – 14, 2025
Ujian Ulang SCM - Strategy and Planning SCM Makeup Exam - Strategy and Planning	15 Februari 2025 February 15, 2025
Certified Risk Management Officer (CRMO)	17 – 19 dan 24 Februari 2025 February 17 – 19 and 24, 2025
Certified Procurement Specialist (CPSp)	24 Feb – 14 Maret 2025 February 24 – March 14, 2025
Ahli Kepabeanan (PPJK) Customs Specialist (PPJK)	3 Maret – 26 Juni 2025 March 3 – June 26, 2025
General Affair Professional	19 Maret 2025 March 19, 2025
Perhitungan Aktuaria sesuai PSAK 24 Actuarial Calculations in Accordance with PSAK 24	16 – 17 April 2025 April 16 – 17, 2025
Perhitungan Aktuaria sesuai PSAK 24 Actuarial Calculations in Accordance with PSAK 24	16 – 17 April 2025 April 16 – 17, 2025
Strategic Sourcing and Vendor Management	16 – 17 April 2025 April 16 – 17, 2025
Corporate Social Responsibility (CSR)	28 – 29 April 2025 April 28 – 29, 2025
Financial for Non Finance Professional	6 – 7 Mei 2025 May 6 – 7, 2025
Damkar D Fire Department D	7 – 10 Mei 2025 May 7 – 10, 2025
Damkar D Fire Department D	7 – 10 Mei 2025 May 7 – 10, 2025
Internal Audit Unit for New Internal Auditor	19 – 20 Mei 2025 May 19 – 20, 2025
Strategic Sourcing and Vendor Management	19 – 20 Mei 2025 May 19 – 20, 2025
Effective Business Communication	21 – 22 Mei 2025 May 21 – 22, 2025

Judul Pelatihan dan Sertifikasi Title of Training and Certification	Tangal Pelaksanaan Date of Implementation
Effective Business Communication	21 – 22 Mei 2025 May 21 – 22, 2025
Negotiation Skills for Sales and Marketing	26 – 27 Mei 2025 May 26 – 27, 2025
Procurement Negotiation and Contracting Strategy	27 – 28 Mei 2025 May 27 – 28, 2025
Procurement Negotiation and Contracting Strategy	27 – 28 Mei 2025 May 27 – 28, 2025
Effective Leadership	27 – 28 Mei 2025 May 27 – 28, 2025
Project Management	10 – 12 Juni 2025 June 10 – 12, 2025
Project Management	10 – 12 Juni 2025 June 10 – 12, 2025
Supply Chain Management	17 – 19 Juni 2025 June 17 – 19, 2025
Supply Chain Management	17 – 19 Juni 2025 June 17 – 19, 2025
Supply Chain Management	17 – 19 Juni 2025 June 17 – 19, 2025
Advanced Competitive Marketing Strategy	18 – 20 Juni 2025 June 18 – 20, 2025
Advanced Competitive Marketing Strategy	18 – 20 Juni 2025 June 18 – 20, 2025
Project Procurement and Risk Management	24 – 25 Juni 2025 June 24 – 25, 2025
Project Procurement and Risk Management	24 – 25 Juni 2025 June 24 – 25, 2025
Industrial Relation Conflict Resolution	24 – 25 Juni 2025 June 24 – 25, 2025
Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Risk Mitigation in Digital Transformation	3 – 4 Juli 2025 July 3 – 4, 2025
Mitigasi Risiko dalam Transformasi Digital Risk Mitigation in Digital Transformation	3 – 4 Juli 2025 July 3 – 4, 2025
Petugas P3K (First Aid) First Aid (P3K) Officer	7 – 9 Juli 2025 July 7 – 9, 2025
Supply Chain Management	9 – 11 Juli 2025 July 9 – 11, 2025
Supply Chain Management	9 – 11 Juli 2025 July 9 – 11, 2025
Supply Chain Management	9 – 11 Juli 2025 July 9 – 11, 2025
Cobid 2019	10 – 11 Juli 2025 July 10 – 11, 2025
OSS RBA dan Penyusunan LKPM OSS RBA and Preparation of LKPM	10 – 11 Juli 2025 July 10 – 11, 2025
Certified Human Resources Manager (CHRM)	15 – 18, 25 Juli 2025 July 15 – 18, 25, 2025

Judul Pelatihan dan Sertifikasi Title of Training and Certification	**Tangal Pelaksanaan** Date of Implementation
Owner Estimate/Harga Perkiraan Sendiri	16 – 17 Juli 2025 July 16 – 17, 2025
Owner Estimate/Harga Perkiraan Sendiri	16 – 17 Juli 2025 July 16 – 17, 2025
Negotiation Skills for Procurement	21 – 22 Juli 2025 July 21 – 22, 2025
Inventory Management	23 – 24 Juli 2025 July 23 – 24, 2025
Detection and Protection of Financial Distress	23 – 25 Juli 2025 July 23 – 25, 2025
Apakah Kerugian BUMN Bukan Lagi Kerugian Negara? Are Losses Incurred by State-Owned Enterprises No Longer Considered Losses to the State?	25 Juli 2025 July 25, 2025
Ujian CRMO CRMO Test	28 Juli 2025 July 28, 2025
Procurement and Warehouse Safety Management	28 – 29 Juli 2025 July 28 – 29, 2025
Managing People for Productivity	30 – 31 Juli 2025 July 30 – 31, 2025
Managing People for Productivity	30 – 31 Juli 2025 July 30 – 31, 2025
Warehouse Management	6 – 7 Agustus 2025 August 6 – 7, 2025
Manajemen Transportasi dan Distribusi Transportation and Distribution Management	9 Agustus 2025 August 9, 2025
Certified Professional in Logistic Management (CPLM)	12 – 23 Agustus 2025 August 12 – 23, 2025
Corporate Cash Management for Financial Stability	13 – 15 Agustus 2025 August 13 – 15, 2025
Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis	14 – 15 Agustus 2025 August 14 – 15, 2025
Tax Audit dan Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Tax Audits and Strategies for Dealing with Tax Audits	20 – 21 Agustus 2025 August 20 – 21, 2025
Customer Satisfaction Management	20 – 21 Agustus 2025 August 20 – 21, 2025
Customer Satisfaction Management	20 – 21 Agustus 2025 August 20 – 21, 2025
Detection and Protection of Financial Distress	20 – 22 Agustus 2025 August 20 – 22, 2025
Corporate Finance & Budgeting, Control and Investment Decisions	25 – 26 Agustus 2025 August 25 – 26, 2025
Manajemen PPh Pasal 21, Ekualisasi Pajak dan SP2DK Management of Income Tax Article 21, Tax Equalization, and SP2DK	26 – 27 Agustus 2025 August 26 – 27, 2025
Perpanjangan Certified Supply Chain Manager (CSCM) Certified Supply Chain Manager (CSCM) Renewal	26 – 29 Agustus 2025 August 26 – 29, 2025
Comperhensive Corporate Financial Performance Analysis	27 – 29 Agustus 2025 August 27 – 29, 2025
Memahami Implementasi dan Implikasi Hukum Kebijakan Impor Pasca Terbitnya Permendag 16/2025 di Indonesia Understanding the Implementation and Legal Implications of Import Policies Following the Issuance of Ministry of Trade Regulation No. 16/2025 in Indonesia	9 September 2025 September 9, 2025

Judul Pelatihan dan Sertifikasi Title of Training and Certification	Tangal Pelaksanaan Date of Implementation
Memahami Implementasi dan Implikasi Hukum Kebijakan Impor Pasca Terbitnya Permendag 16/2025 di Indonesia Understanding the Implementation and Legal Implications of Import Policies Following the Issuance of Ministry of Trade Regulation No. 16/2025 in Indonesia	9 September 2025 September 9, 2025
Sustainability Reporting: Standards and Implementation + Update Terkini ISSB Standars: IFRS S1 & S2 Sustainability Reporting: Standards and Implementation + Latest Update on ISSB Standards: IFRS S1 & S2	10 – 11 September 2025 September 10 – 11, 2025
Workload Analysis (WLA)	24 – 25 September 2025 September 24 – 25, 2025
Finon: Understanding Financial Statement	30 Sep – 1 Oktober 2025 September 30 – October 1, 2025
Basic Marketing	1 – 2 Oktober 2025 October 1 – 2, 2025
Teamwork and Leadership	1 – 2 Oktober 2025 October 1 – 2, 2025
Teamwork and Leadership	1 – 2 Oktober 2025 October 1 – 2, 2025
Teamwork and Leadership	1 – 2 Oktober 2025 October 1 – 2, 2025
Legal Opinion	1 – 3 Oktober 2025 October 1 – 3, 2025
Legal Opinion	1 – 3 Oktober 2025 October 1 – 3, 2025
IT Infrastructure Library Vol. 4	8 – 10 Oktober 2025 October 8 – 10, 2025
Certified Risk Management Officer (CRMO)	20 – 22 Oktober 2025 October 20 – 22, 2025
Growth Marketing Strategy for 2026	5 – 6 November 2025 November 5 – 6, 2025
Sales Forecasting	11 – 12 November 2025 November 11 – 12, 2025
Managing Business Partnership	12 – 13 November 2025 November 12 – 13, 2025
Managing Business Partnership	12 – 13 November 2025 November 12 – 13, 2025
Performance Auditting: Enssuring Effective and Efficient Business Processes	17 – 18 November 2025 November 17 – 18, 2025
Linux System Administrator	17 – 20 November 2025 November 17 – 20, 2025
Supply Chain Management	26 – 28 November 2025 November 26 – 28, 2025
Supply Chain Management	26 – 28 November 2025 November 26 – 28, 2025
Effective Sales Negotiation	3 – 5 Desember 2025 December 3 – 5, 2025
Effective Sales Negotiation	3 – 5 Desember 2025 December 3 – 5, 2025
Effective Sales Negotiation	3 – 5 Desember 2025 December 3 – 5, 2025

Judul Pelatihan dan Sertifikasi Title of Training and Certification	Tangal Pelaksanaan Date of Implementation
Fast Closing: Monthly & Year End Accounts and Tax Impact	10 – 12 Desember 2025 December 10 – 12, 2025
Fast Closing: Monthly & Year End Accounts and Tax Impact	10 – 12 Desember 2025 December 10 – 12, 2025
Fast Closing: Monthly & Year End Accounts and Tax Impact	10 – 12 Desember 2025 December 10 – 12, 2025
Outsourcing Management Essentials	29 – 30 Desember 2025 December 29 – 30, 2025

Hubungan Industrial

Perseroan terus berkomitmen membangun hubungan industrial yang harmonis, selaras, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan kondusif. Dalam menjalankan operasional bisnis, Perseroan senantiasa mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak pekerja, termasuk menjamin kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. [GRI 103-1]

Sebagai implementasi hubungan industrial, Perseroan rutin melakukan forum komunikasi dan konsultasi antara manajemen dan Serikat Pekerja dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di lingkungan Perusahaan. Forum ini menjadi wadah bagi karyawan untuk menyampaikan usulan perbaikan, masukan, maupun pendapat terkait operasional Perseroan, sekaligus mendukung terciptanya budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. [GRI 102-41] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Perseroan juga menghormati kebebasan berpendapat setiap karyawan serta memastikan penyampaian informasi secara transparan terkait perubahan kebijakan operasional, struktur organisasi, maupun keputusan strategis lainnya sebelum implementasi dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keterlibatan karyawan dan menciptakan hubungan kerja yang saling percaya. [GRI 402-1]

Dalam mendukung produktivitas dan pengembangan kompetensi insan perusahaan, PT PLNSC menyediakan berbagai fasilitas kerja yang memadai serta secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, paket benefit, dan aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja. Selain peningkatan aspek material, Perseroan juga terus melakukan berbagai perbaikan guna menciptakan lingkungan kerja yang

Industrial Relations

The Company remains committed to foster harmonious, balanced, and equitable industrial relations as part of its efforts to create a professional and conducive work environment. In conducting its business operations, the Company consistently optimizes human resource management while taking into account the interests and rights of workers, including guaranteeing freedom of association as stipulated in Law No. 21 of 2000 on Labor Unions. [GRI 103-1]

As part of its industrial relations implementation, the Company regularly conducts communication and consultation forums between Management and the Labor Union to discuss various matters related to industrial relations within the Company. These forums serve as a platform for employees to convey suggestions for improvement, feedback, and opinions regarding the Company's operations, while supporting the development of an open and collaborative. [GRI 102-41] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

The Company also respects every employee's right to freedom of expression and ensures the transparent communication of information regarding changes in operational policies, organizational structure, or other strategic decisions prior to their implementation. This measure is taken to maintain employee engagement and foster a working relationship based on mutual trust. [GRI 402-1]

To support productivity and the development of employees' competencies, PT PLNSC provides adequate workplace facilities and periodically evaluates its compensation policies, benefit packages, and other aspects related to workforce management. In addition to improving material aspects, the Company also continues to make various improvements to create a comfortable, safe work environment that upholds the value of camaraderie. The

nyaman, aman, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional tercermin dari tingkat *turnover* karyawan yang tetap terjaga. Selain itu, sepanjang tahun pelaporan tidak terdapat kecelakaan kerja pada seluruh unit operasional Perseroan. [GRI 401-1]

Program Pensiun

Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan pengabdian karyawan selama bekerja, PT PLNSC memberikan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan yang telah memasuki masa purna bakti melalui program pensiun yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengelola dana pensiun karyawan guna memastikan manfaat pensiun dapat diberikan secara optimal dan berkelanjutan. [GRI 404-2] [GRI 201-3]

Rencana Pengembangan SDM Tahun 2026

Pada tahun 2026, PT PLNSC terus memperkuat komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja dan daya saing Perseroan. Pengembangan kompetensi karyawan dilakukan secara berkelanjutan melalui penguatan kesiapan SDM dan organisasi, antara lain dengan peningkatan kompetensi pada setiap direktorat dan divisi, pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, penguatan budaya perusahaan, serta peningkatan peran dan kontribusi karyawan dalam mendukung pencapaian target bisnis Perseroan.

Dalam mendukung efektivitas pengelolaan talenta, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kompetensi organisasi serta menyusun program pengembangan yang selaras dengan arah transformasi bisnis Perseroan. Beberapa strategi tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari pengelolaan SDM Perseroan di tahun mendatang guna meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat budaya perusahaan, meminimalisir risiko bisnis, serta mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, PLNSC optimistis dapat menciptakan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri di masa mendatang.

Company's commitment to create healthy and professional work environments is reflected in its consistently low employee turnover rate. Furthermore, throughout the reporting year, there were no workplace accidents across all of the Company's operational units. [GRI 401-1]

Pension Program

As a token of appreciation for employees' loyalty and dedication during their service, PT PLNSC prioritizes the well-being of retired employees through a pension program in accordance with Law No. 13 of 2003 on Manpower. In implementing this program, the Company collaborates with financial institutions to manage employee pension funds to ensure that pension benefits are provided optimally and sustainably. [GRI 404-2] [GRI 201-3]

Human Resources Development Plan for 2026

In 2026, PT PLNSC continues to strengthen its commitment to human resources development as part of the Company's strategy to improve performance and competitiveness. Employee competency development is carried out continuously by strengthening human resource and organizational readiness, including through competency enhancement in each directorate and division, the development of a more integrated system, the strengthening of corporate culture, and the enhancement of employees' roles and contributions in supporting the achievement of the Company's business targets.

To support effective talent management, the Company periodically evaluates organizational competency needs and designs development programs aligned with the direction of the Company's business transformation. These strategies are being prepared as part of the Company's human resources management for the coming year to boost work productivity, strengthen corporate culture, minimize business risks, and support the Company's sustainable business growth. Through these measures, PLNSC is confident it can cultivate a workforce that is professional, adaptable, and ready to face future industry challenges.

Teknologi Informasi
Information Technology

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong PLNSC untuk terus melakukan pengembangan dan transformasi teknologi informasi sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing dan efektivitas operasional perusahaan. Sejalan dengan visi Perseroan yaitu “Menjadi Pilihan Utama Solusi Supply Chain yang Inovatif dan Berkelanjutan untuk Ketenagalistrikan dan Utilitas di Indonesia”, transformasi teknologi informasi menjadi langkah penting dalam mendukung proses bisnis yang lebih terintegrasi, adaptif, efisien, serta mampu menjawab tantangan bisnis di era digital yang terus berkembang.

Perseroan meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi proses kerja, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penguatan keamanan informasi terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan operasional perusahaan berjalan secara efektif, aman, dan andal.

Selain mendukung efisiensi operasional, transformasi teknologi informasi juga menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan berbasis digital. Melalui pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan, Perseroan optimistis dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan bisnis, dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan di masa mendatang.

The rapid advancement of information technology has encouraged PLNSC to continuously develop and transform its information technology as part of its strategy to enhance the Company's competitiveness and operational effectiveness. In line with the Company's vision, "To Become the Preferred Provider of Innovative and Sustainable Supply Chain Solutions for the Power and Utilities Sector in Indonesia," information technology transformation has become an important step in supporting more integrated, adaptive, and efficient business processes, while addressing the evolving business challenges of the digital era.

The Company believes that the optimal utilization of information technology not only improves the speed and accuracy of work processes, but also strengthens decision-making, data management, and services provided to all stakeholders. Therefore, the Company continues to develop digital systems, enhance its technology infrastructure, and strengthen information security on a sustainable basis to ensure that its operations are carried out effectively, securely, and reliably.

In addition to supporting operational efficiency, information technology transformation also serves as an important foundation for driving business innovation, strengthening corporate governance, and fostering a more collaborative and digitally driven work culture. Through the continuous development of information technology, the Company remains confident in its ability to enhance productivity, strengthen business resilience, and support sustainable corporate growth in the future.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

PT PLN Suku Cadang terus memperkuat penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi bisnis dan peningkatan efektivitas operasional Perseroan.

Penerapan tata kelola ini dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkesinambungan guna memastikan bahwa setiap pengembangan sistem, investasi teknologi, serta kebijakan teknologi informasi selaras dengan strategi bisnis perusahaan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komitmen Perseroan terhadap penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Melalui kebijakan tersebut, Direksi memiliki peran strategis dalam menetapkan arah pengelolaan teknologi informasi, termasuk penyusunan kebijakan, pengembangan strategi digital perusahaan, serta pengawasan terhadap implementasi teknologi informasi di seluruh lini organisasi.

Dalam mendukung pelaksanaan tata kelola teknologi informasi yang efektif, Perseroan juga membentuk tim teknologi informasi yang bertugas mengawasi pengelolaan dan pengembangan teknologi secara terintegrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung proses bisnis secara optimal, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengelolaan risiko, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

PT PLN Suku Cadang continues to strengthen the implementation of Information Technology (IT) Governance as part of its efforts to support the Company's business transformation and improve operational effectiveness.

The implementation of Information Technology Governance is carried out in a structured, measurable, and sustainable manner to ensure that every system development, technology investment, and information technology policy is aligned with the Company's business strategy and the principles of good corporate governance.

The Company's commitment to implement Information Technology Governance is stipulated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 concerning the Good Corporate Governance Guidelines (Corporate Governance Code) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Through this policy, the Board of Directors has a strategic role in determining the direction of information technology management, including the formulation of policies, the development of the Company's digital strategy, and the oversight of information technology implementation across all organizational functions.

To support the effective implementation of Information Technology Governance, the Company has also established an information technology team responsible for overseeing the integrated management and development of technology. This initiative is intended to ensure that the utilization of information technology effectively supports business processes, enhances operational efficiency, strengthens risk management, and facilitates faster and more accurate decision-making.

Melalui implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi yang konsisten, Perseroan optimistis dapat memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan kualitas layanan dan operasional perusahaan, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang adaptif dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi dan dinamika industri yang terus berubah.

Through the consistent implementation of Information Technology Governance, the Company remains confident in its ability to strengthen business resilience, improve the quality of its services and operations, and support adaptive and sustainable business growth amid ongoing technological advancements and evolving industry dynamics.

Arsitektur Teknologi Informasi
Information Technology Architecture

Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting bagi PT PLN Suku Cadang dalam memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) yang terintegrasi, Perseroan memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga menjadi enabler strategis dalam mendorong inovasi, ketahanan bisnis, dan pengembangan organisasi yang adaptif terhadap perubahan industri.

Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*). Dalam implementasinya, arsitektur teknologi informasi PT PLN Suku Cadang dibangun melalui empat pilar utama, yaitu:

- Arsitektur Informasi
  Mengatur pengelolaan data dan informasi perusahaan agar dapat diolah menjadi *knowledge* yang bernilai serta dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses bisnis Perseroan.
- Arsitektur Aplikasi
  Fokus pada pengembangan dan integrasi aplikasi guna mendukung proses bisnis secara efektif, efisien, dan saling terhubung antar fungsi organisasi.
- Arsitektur Infrastruktur
  Menempatkan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebagai fondasi utama dalam mendukung sistem, aplikasi, dan kebutuhan operasional digital Perseroan.

Digital transformation has become one of the key foundations for PT PLN Suku Cadang in strengthening its competitiveness, improving operational efficiency, and supporting sustainable business growth. Through the implementation of integrated Information Technology (IT) Governance, the Company ensures that information technology management not only serves as operational support but also acts as a strategic enabler in driving innovation, strengthening business resilience, and fostering organizational development that is adaptive to changes in the industry.

The implementation of Information Technology Governance refers to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 concerning the Good Corporate Governance Guidelines (Corporate Governance Code). In its implementation, the information technology architecture of PT PLN Suku Cadang is built upon the following four key pillars:

- Information Architecture
  Governs the management of the Company's data and information to ensure that they can be processed into valuable knowledge and utilized optimally to support the Company's business processes.
- Application Architecture
  Focuses on the development and integration of applications to support business processes in an effective, efficient, and interconnected manner across organizational functions.
- Infrastructure Architecture
  Positions the development of information technology infrastructure as the primary foundation for supporting the Company's systems, applications, and digital operational requirements.

- Manajemen Teknologi Informasi (*IT Management)* Mencakup pengelolaan, pengawasan, dan pengembangan teknologi informasi guna memastikan implementasi TI berjalan optimal, terukur, dan selaras dengan strategi perusahaan.

Melalui penguatan keempat pilar tersebut, Perseroan terus berupaya membangun ekosistem digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Dengan tata kelola teknologi informasi yang kuat, PLNSC optimistis mampu menghadapi tantangan transformasi digital dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

- Information Technology Management (IT Management) Covers the management, supervision, and development of information technology to ensure that IT implementation is carried out optimally, in a measurable manner, and in alignment with the Company's strategy.

Through strengthening these four pillars, the Company continues to build an integrated, secure, and sustainable digital ecosystem to enhance service quality, accelerate business processes, and support more accurate, data-driven decision-making. With strong Information Technology Governance, PLNSC remains confident in its ability to address the challenges of digital transformation and create sustainable value for all stakeholders.

Strategi Teknologi Informasi Perusahaan

Corporate Information Technology Strategy

Mengacu pada arah pengembangan yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2024–2028 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Perseroan menempatkan teknologi informasi sebagai salah satu strategic enabler dalam mendukung pencapaian sasaran bisnis, peningkatan keunggulan operasional, serta transformasi perusahaan secara berkelanjutan. Pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk membangun sistem yang terintegrasi, adaptif, aman, dan andal guna mendukung digitalisasi proses bisnis, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menciptakan nilai tambah bagi Perseroan.

Strategi pengembangan teknologi informasi dilaksanakan secara bertahap mengikuti roadmap Perseroan. Pada fase Pembangunan Pondasi (2024–2025), Perseroan memprioritaskan penyusunan IT Blueprint sebagai arah pengembangan teknologi informasi jangka panjang serta pembangunan sistem informasi yang terintegrasi sebagai fondasi transformasi digital perusahaan. Implementasi strategi ini dilakukan secara selaras dengan berbagai inisiatif penguatan perusahaan, meliputi penyempurnaan proses bisnis, penguatan struktur organisasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia, pengembangan portofolio bisnis, serta implementasi fungsi-fungsi strategis yang mendukung pertumbuhan Perseroan.

In line with the development direction outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2024–2028 and further detailed in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company views information technology as a key strategic enabler in supporting the achievement of business objectives, enhancing operational excellence, and driving sustainable corporate transformation. Information technology development is geared towards building integrated, adaptive, secure, and reliable systems to support the digitization of business processes, improve the quality of decision-making, and create added value for the Company.

Entering the Growth Acceleration phase (2026–2027), the Company aims to achieve Fully Digitalized status through the implementation of effective information technology systems to support all of the Company's business processes. The digitization of these business processes is expected to improve operational efficiency, strengthen integration between business processes, accelerate decision-making, and support market expansion and business growth. In line with these targets, the Company has also identified achieving Digital Readiness as one of its strategic objectives to strengthen operational excellence and support the Company's value creation.

Memasuki fase Akselerasi Pertumbuhan (2026–2027), Perseroan menargetkan tercapainya kondisi Fully Digitalized melalui penerapan sistem teknologi informasi yang efektif dalam mendukung seluruh proses bisnis perusahaan. Digitalisasi proses bisnis tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat integrasi antarproses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung ekspansi pasar dan pertumbuhan usaha. Sejalan dengan target tersebut, Perseroan juga menempatkan pencapaian Digital Readiness sebagai salah satu sasaran strategis untuk memperkuat keunggulan operasional dan mendukung penciptaan nilai (value creation) perusahaan.

Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, Perseroan terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui program modernisasi infrastruktur TI, peningkatan keandalan sistem, serta penguatan cyber security. Pengembangan infrastruktur ini didukung melalui investasi teknologi informasi yang diarahkan untuk meningkatkan keandalan operasional dan memperkuat ketahanan sistem dalam mendukung keberlangsungan bisnis Perseroan. Melalui pengembangan teknologi informasi yang terencana dan berkelanjutan, Perseroan optimistis mampu membangun kapabilitas digital yang semakin matang, meningkatkan efektivitas operasional, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan secara berkelanjutan.

Entering the Growth Acceleration phase (2026–2027), the Company targets the achievement of a Fully Digitalized environment through the implementation of effective information technology systems to support all business processes. The digitalization of business processes is expected to enhance operational efficiency, strengthen integration across business processes, accelerate decision-making, and support market expansion and business growth. In line with this target, the Company has also identified the achievement of Digital Readiness as one of its strategic objectives to strengthen operational excellence and support the Company's value creation.

As part of implementing this strategy, the Company continues to strengthen its information technology infrastructure through IT infrastructure modernization programs, improvements in system reliability, and strengthening of cybersecurity. This infrastructure development is supported by information technology investments aimed at improving operational reliability and strengthening system resilience to support the Company's business continuity. Through planned and sustainable information technology development, the Company is optimistic about its ability to build increasingly mature digital capabilities, improve operational effectiveness, and support the sustainable achievement of the company's strategic objectives.

Realisasi Program Kerja Sistem Teknologi Informasi Tahun 2025

Information Technology System Performance Achievements in 2025

Selama tahun 2025, Perseroan telah mengimplementasikan program kerja Teknologi Informasi untuk menjawab tantangan terkait dukungan terhadap proses bisnis dan data, salah satunya untuk menjamin akurasi dan ketersediaan informasi teknis pembangkit listrik sebagai pelanggan utama Perseroan. Inisiatif tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur IT untuk operasional, antara lain:
   - Upgrade server aplikasi utama
   - Upgrade storage NAS PLNSC
   - Implementasi SAN Switch
2. Pengembangan aplikasi *Compliance Online System (COS)*.
3. Pengembangan aplikasi I-Care PLNSC, yang dapat diakses menggunakan jaringan intranet atau VPN.
4. Pengembangan layanan SC Mart untuk percepatan proses binis utama.
5. Pengembangan ERP.
6. Pengembangan HRIS 2 PLNSC v1.3.8 pada modul presensi, *HR Regulation*, *Dossier, CV, Training*, dan VO.
7. Penambahan infrastruktur jaringan (*access point* dan *switch*) PLN Suku Cadang pada lantai 1, 2, dan 3.
8. Peremajaan *firewall security* jaringan PLNSC, untuk meningkatkan keamanan sekaligus melakukan peremajaan *firewall device* PLNSC.

Throughout 2025, the Company implemented its Information Technology work program to address challenges related to support business processes and data, including ensuring the accuracy and availability of technical information for power plants as the Company's primary customers. These initiatives were carried out through the following activities:

1. Provision of IT infrastructure to support operations, including:
   a. Upgrade of the main application server;
   b. Upgrade of the PLNSC NAS storage;
   c. Implementation of a SAN Switch;
2. Development of the Compliance Online System (COS).
3. Development of the PLNSC I-Care application, accessible through the intranet or VPN network.
4. Development of the SC Mart service to accelerate core business processes.
5. ERP Development.
6. Development of HRIS 2 PLNSC v1.3.8 covering the Attendance, HR Regulation, Dossier, CV, Training, and VO modules.
7. Expansion of the PLNSC network infrastructure (access points and switches) on the 1st, 2nd, and 3rd floors.
8. Modernization of the PLNSC network firewall security to enhance security while replacing the existing firewall devices.

Arah Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2026

Directions for Information Technology Development in 2026

Perseroan mengarahkan pengembangan teknologi informasi melalui program yang difokuskan pada penguatan infrastruktur informasi teknologi. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem teknologi informasi sebagai pendukung operasional perusahaan sekaligus menjadi *factor enablers* dalam pencapaian sasaran strategis Perseroan.

Pada tahun 2026, Perseroan merencanakan pelaksanaan Program Investasi Infrastruktur Informasi Teknologi yang meliputi:

- Peremajaan *Server* Aplikasi Satelit, untuk meningkatkan keandalan sistem aplikasi sehingga mampu mendukung operasional perusahaan secara optimal.

- *Upgrade Storage Server* Utama, untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja media penyimpanan data dalam mendukung pengelolaan informasi perusahaan yang semakin berkembang.

Pelaksanaan kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan teknologi informasi serta memperkuat keamanan siber guna mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis, memperkuat kualitas layanan teknologi informasi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis perusahaan secara berkelanjutan.

The Company directs its information technology development through programs focused on strengthening its information technology infrastructure. These initiatives are undertaken to enhance the reliability of the Company's information technology systems in supporting business operations while serving as enabling factors in achieving the Company's strategic objectives.

In 2026, the Company plans to implement the Information Technology Infrastructure Investment Program, which includes:

- Replacement of the Satellite Application Server to enhance the reliability of the application system, enabling it to support the Company's operations more effectively.
- Upgrade of the Main Storage Server to increase the capacity and performance of data storage media in supporting the management of the Company's growing information.

The implementation of these two programs is expected to enhance the reliability of the Company's information technology systems while strengthening cybersecurity to support business continuity. The development of the Company's information technology infrastructure also forms part of its efforts to improve the effectiveness of business processes, strengthen the quality of information technology services, and support the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.







Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

05

Tinjauan Perekonomian Makroekonomi

Macroeconomic Overview



Perekonomian Global

Perekonomian global sepanjang tahun 2025 dihadapkan pada meningkatnya ketidakpastian akibat eskalasi ketegangan perdagangan, fragmentasi geopolitik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi di berbagai negara. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2025, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 sebesar 2,8%, lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 3,3% dan berada di bawah rata-rata historis sebesar 3,7% pada periode 2000–2019. Penurunan proyeksi tersebut mencerminkan dampak meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan tarif, serta melemahnya investasi dan aktivitas perdagangan global.

Di samping tantangan perdagangan, kondisi keuangan global juga tetap dipengaruhi oleh tingginya tingkat suku bunga riil, volatilitas pasar keuangan, serta meningkatnya risiko terhadap stabilitas sektor keuangan di sejumlah negara berkembang. Ketidakpastian yang berkepanjangan mendorong pelaku usaha dan investor untuk bersikap lebih berhati-hati, sehingga berpotensi menekan pertumbuhan investasi, konsumsi, dan arus perdagangan internasional.

Global Economy

Throughout 2025, the global economy was characterized by heightened uncertainty driven by escalating trade tensions, geopolitical fragmentation, and shifts in economic policy across various countries. In its April 2025 World Economic Outlook (WEO), the International Monetary Fund (IMF) projected global economic growth of 2.8% for 2025, lower than the 3.3% recorded in 2024 and below the historical average of 3.7% during the 2000–2019 period. The downward revision reflected the impact of increasing trade barriers, uncertainty surrounding tariff policies, as well as weaker investment and global trade activity.

In addition to trade-related challenges, global financial conditions continued to be influenced by elevated real interest rates, financial market volatility, and increasing risks to financial sector stability in a number of emerging economies. Prolonged uncertainty prompted businesses and investors to adopt a more cautious approach, potentially constraining investment growth, consumption, and international trade flows.

Dampak perlambatan tersebut turut dirasakan oleh kawasan Asia yang masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif kuat dibandingkan kawasan lainnya, laju ekspansi ekonomi di beberapa negara diproyeksikan melambat. IMF memperkirakan ekonomi Tiongkok hanya akan tumbuh sekitar 4,0% pada tahun 2025, seiring berlanjutnya pelemahan sektor properti, rendahnya permintaan domestik, serta meningkatnya tekanan dari dinamika perdagangan global. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas perdagangan dan rantai pasok global, termasuk bagi negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan Tiongkok.

The impact of the slowdown was also felt across Asia, which remained the main driver of global economic growth. Although the region continued to record relatively stronger growth than other regions, economic expansion in several countries was projected to moderate. The IMF projected China's economy to grow by approximately 4.0% in 2025, amid the continued weakness of the property sector, subdued domestic demand, and increasing pressure arising from global trade dynamics. These conditions could affect global trade and supply chain activities, including those of countries with close economic ties to China.

Perekonomian Indonesia

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sepanjang tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat dengan ditopang oleh permintaan domestik, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang tetap positif. Stabilitas makroekonomi yang terjaga, didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter, turut menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada tahun 2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.139,0 triliun. Sementara itu, PDB per kapita meningkat menjadi Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% (c-to-c), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi lapangan usaha, Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, didukung oleh meningkatnya aktivitas jasa dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 7,03%, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09% dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,98% yang tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional.

Indonesian Economy

Amid heightened global economic uncertainty throughout 2025, the Indonesian economy continued to demonstrate strong resilience, supported by domestic demand, increased investment, and positive export performance. Sustained macroeconomic stability, underpinned by the synergy between fiscal and monetary policies, also played an important role in maintaining the momentum of national economic growth amid the global economic slowdown.

Based on data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy in 2025, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current market prices, reached Rp23,821.1 trillion, an increase from Rp22,139.0 trillion in the previous year. Meanwhile, GDP per capita increased to Rp83.7 million or approximately USD5,083.4, reflecting higher economic activity and income levels.

Overall, Indonesia's economy grew by 5.11% (c-to-c) in 2025, higher than the 5.03% growth recorded in 2024. By industry, Other Services recorded the highest growth at 9.93%, supported by increased service activities and community mobility. From the expenditure side, Exports of Goods and Services recorded the highest growth at 7.03%, followed by Gross Fixed Capital Formation (GFCF) at 5.09% and Household Consumption Expenditure at 4.98%, which remained the largest contributor to national GDP.

Di sisi lain, stabilitas harga tetap terjaga sepanjang tahun 2025. Pada Desember 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 2,92%, masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia. Sementara itu, inflasi year-to-date (y-to-d) juga tercatat sebesar 2,92%, dengan inflasi inti sebesar 2,38%, yang menunjukkan bahwa tekanan inflasi tetap terkendali meskipun terjadi kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta harga emas perhiasan. Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap solid, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta terjaganya stabilitas sistem keuangan. Kondisi tersebut memperkuat optimisme terhadap prospek perekonomian nasional sekaligus menjadi landasan yang kondusif bagi dunia usaha untuk terus bertumbuh di tengah dinamika ekonomi global.

On the contrary, price stability was maintained throughout 2025. As of December 2025, year-on-year (y-o-y) inflation stood at 2.92%, remaining within Bank Indonesia's target range. Meanwhile, year-to-date (y-t-d) inflation was also recorded at 2.92%, while core inflation stood at 2.38%, indicating that inflationary pressures remained under control despite price increases in the food, beverages, and tobacco category, as well as in gold jewelry. These conditions reflected the effectiveness of coordination between the Government and Bank Indonesia in maintaining price stability and preserving consumers' purchasing power.

Overall, Indonesia's economic fundamentals remained solid in 2025, as reflected in stronger economic growth, controlled inflation, and a stable financial system. These conditions reinforced optimism regarding the outlook for the national economy while providing a conducive foundation for the business sector to continue growing amid the dynamics of the global economy.

Tinjauan Industri
Industry Overview

Tinjauan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia

Industri ketenagalistrikan Indonesia pada tahun 2025 terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional, percepatan transisi energi, serta penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 mengarahkan pengembangan sektor ketenagalistrikan pada peningkatan bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT), penguatan sistem transmisi dan distribusi, serta peningkatan keandalan pasokan listrik.

RUPTL 2025–2034 menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar sekitar 69,5 GW, dengan sekitar 76% di antaranya berasal dari pembangkit berbasis EBT dan sistem penyimpanan energi (*energy storage*). Arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) 2060, sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi.

Indonesia's Electricity Industry Overview

Indonesia's electricity industry continued to develop in 2025, driven by growing national energy demand, the acceleration of the energy transition, and the strengthening of electricity infrastructure to support economic growth. Through the National Electricity General Plan (RUKN) 2025–2060 and PLN's Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2025–2034, the Government directed the development of the electricity sector toward increasing the share of New and Renewable Energy (NRE), strengthening transmission and distribution systems, and enhancing the reliability of electricity supply.

The RUPTL 2025–2034 sets out a plan to add approximately 69.5 GW of power generation capacity, of which approximately 76% will come from NRE-based power plants and energy storage systems. This policy direction forms part of the Government's efforts to achieve the Net Zero Emissions (NZE) target by 2060 while strengthening national energy security through the diversification of energy sources. The development of

Pengembangan pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, serta infrastruktur pendukung juga meningkatkan kebutuhan terhadap pengadaan material, peralatan, suku cadang, dan layanan logistik yang terintegrasi.

Di sisi lain, transformasi digital di sektor ketenagalistrikan terus berlanjut melalui penerapan *digital asset management*, *predictive maintenance*, digitalisasi pengadaan, serta pengelolaan rantai pasok berbasis teknologi informasi. Perkembangan tersebut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap pengelolaan persediaan yang lebih efisien, sistem logistik yang terintegrasi, serta penyediaan suku cadang yang tepat waktu untuk mendukung keandalan operasi pembangkit dan jaringan kelistrikan.

Perkembangan industri tersebut sejalan dengan arah pengembangan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Roadmap 2024–2028, yang menitikberatkan pada penguatan kapabilitas inti di bidang pengelolaan suku cadang, pengadaan, dan logistik melalui transformasi digital, peningkatan efisiensi proses bisnis, serta penguatan tata kelola rantai pasok. Roadmap Perseroan juga mencakup pengembangan pasar di luar PLN Group, penguatan layanan logistik dan pengadaan terintegrasi, serta pengembangan kapabilitas untuk mendukung kebutuhan proyek pembangkit, termasuk pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan.

power plants, transmission networks, substations, and supporting infrastructure also increases the demand for the procurement of materials, equipment, spare parts, and integrated logistics services.

Meanwhile, digital transformation in the electricity sector continued through the implementation of digital asset management, predictive maintenance, procurement digitalization, and information technology-based supply chain management. These developments drove increased demand for more efficient inventory management, integrated logistics systems, and the timely provision of spare parts to support the reliability of power plant operations and electricity networks.

These industry developments are in line with the Company's development direction as outlined in its 2024–2028 Roadmap, which focuses on strengthening its core capabilities in spare parts management, procurement, and logistics through digital transformation, enhanced business process efficiency, and stronger supply chain governance. The Company's Roadmap also includes market expansion beyond the PLN Group, the enhancement of integrated logistics and procurement services, and the development of capabilities to support the requirements of power plant projects, including new and renewable energy-based power plants.

Strategi Utama Perusahaan Tahun 2025
Company's Main Strategy in 2025

PT PLN Suku Cadang (PLNSC) telah menyusun sebuah Strategic Roadmap pada RJPP PLNSC tahun 2024-2028 yang menggambarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2024 sampai 2028. Roadmap strategi PLNSC tahun 2024- 2028 dapat dilihat pada gambar berikut:

PT PLN Suku Cadang (PLNSC) has established a Strategic Roadmap in its 2024–2028 Long-Term Corporate Plan (RJPP), outlining the strategic objectives to be achieved each year throughout the 2024–2028 period. The Company's 2024–2028 Strategic Roadmap is presented in the following figure.

3 2026–2027 ACCELERATING GROWTH

- Akselerasi penetrasi pasar non-PLN Group
- Kemitraan strategis untuk portfolio baru: solusi transmisi dan distribusi
- Ekspansi ke pasar global Bersama PLN Group
- Ekspansi Bisnis: Penyertaan modal pada bisnis Logistik dan Produsen *spare parts* pembangkit EBT
- *Fully Digitalized*

- Accelerating market penetration beyond the PLN Group
- Establishing strategic partnerships to develop new portfolios in transmission and distribution solutions
- Expanding into global markets together with the PLN Group
- Business expansion through equity participation in logistics businesses and manufacturers of spare parts for renewable energy power plants
- Achieving full digitalization

2 2024–2025 BUILDING A STRONG FOUNDATION

- Perkuatan kemitraan dengan principal
- Optimalisasi sinergi dengan PLN Group
- Penyempurnaan proses bisnis di seluruh lini
- Penyempurnaan struktur organisasi
- Peningkatan kompetensi SDM & internalisasi budaya perusahaan
- Penyusunan *blueprint* IT dan membangun system terintegrasi
- Membangun *brand image*
- Implementasi fungsi SMO dan *Project Management*
- Peningkatan permodalan Perseroan

- Strengthening strategic partnerships with principals
- Optimizing synergies across the PLN Group
- Enhancing business processes across all operational functions
- Strengthening the organizational structure
- Enhancing human capital competencies and fostering the Company's corporate culture
- Developing the IT Blueprint and establishing an integrated information system
- Strengthening the Company's brand image
- Implementing the Strategic Management Office (SMO) and Project Management functions
- Strengthening the Company's capital structure

1 BASELINE

- *Captive market* pada PLN Group
- Proses bisnis dan organisasi silo
- Pemanfaatan IT dan digitalisasi belum optimal

- Captive Market within the PLN Group
- Siloed Business Processes and Organizational Structure
- Suboptimal Utilization of Information Technology and Digitalization

4 POTENTIAL BUSINESS EXPANSION

- *High Performance Organization*
- Ekspansi Bisnis: Penyertaan modal pada bisnis *Consumable*

- Becoming a High-Performance Organization
- Business expansion through equity participation in consumable products businesses



Pada tahun 2024–2025 ini PLNSC berfokus pada roadmap strategis "Membangun Pondasi Yang Kokoh" dengan tema strategis pada tahun 2025 ini adalah "Strengthening Competitiveness through Market Expansion and Business Process Efficiency" (Memperkuat Daya Saing Melalui Ekspansi Pasar dan Efisiensi Proses Bisnis). Dengan beberapa program yang perlu dilakukan yaitu:

During the 2024–2025 period, PLNSC focused on the "Building a Strong Foundation" phase of its Strategic Roadmap. The strategic theme for 2025 is "Strengthening Competitiveness through Market Expansion and Business Process Efficiency." The programs to be carried out are as follows:

- Perkuatan kemitraan dengan principal.
- Optimalisasi sinergi dengan PLN Group.
- Penyempurnaan proses bisnis di seluruh lini.
- Penyempurnaan struktur organisasi.
- Peningkatan kompetensi SOM & internalisasi budaya perusahaan.
- Penyusunan blueprint IT dan membangun sistem terintegrasi.
- Perkuatan portfolio produk eksisting dan pengembangan portfolio produk baru (spare parts pembangkit non-EBT dan EBT, jasa terkait pembangkit listrik serta peralatan pendukung EBT lainnya).

- Implementasi fungsi produk dan sourcing management, SMO (strategy management office) dan project management.
- Perkuatan struktur pendanaan dan pemodalan Perseroan

Sebagai bagian dari pelaksanaan program strategis tahun 2025, PLNSC telah menetapkan 9 (sembilan) inisiatif strategi PLNSC 2021-2025. Beberapa strategic iniatives Perseroan sebagai berikut:

Selain inisiatif strategis, PLNSC diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik di PLN Group maupun Non PLN Group sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Shareholder, sehingga Perseroan melakukan beberapa strategis, yakni:

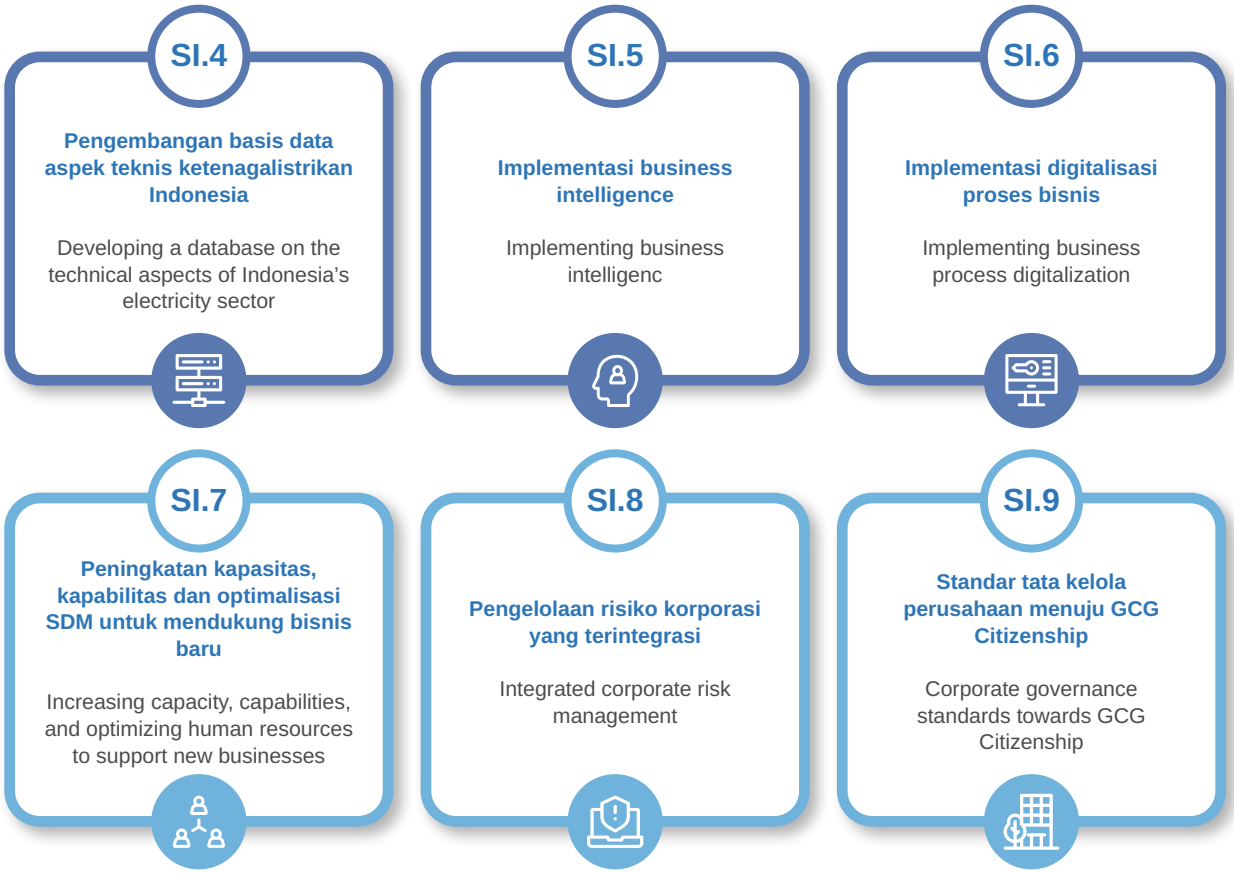
- Strengthening partnerships with principals.
- Optimizing synergies within the PLN Group.
- Enhancing business processes across all functions.
- Refining the organization structure.
- Enhancing human capital competencies and internalizing the Company's corporate culture.
- Developing the IT blueprint and establishing an integrated system.
- Strengthening the existing product portfolio and developing new product portfolios (including spare parts for conventional and new and renewable energy-based power plants, power plant-related services, and other supporting equipment for new and renewable energy).

- Implementing the product and sourcing management function, the Strategy Management Office (SMO), and project management.
- Strengthening the Company’s funding and capital structure.

As part of the implementation of its strategic programs in 2025, PLNSC established nine strategic initiatives under the PLNSC 2021–2025 Strategic Initiatives. The Company’s strategic initiatives are presented as follows:

In addition to the strategic initiatives, PLNSC is expected to increase its revenue from both the PLN Group and the non-PLN Group to create added value for its Shareholders by implementing the following strategies:





1. Peningkatan revenue melalui optimalisasi skema bisnis dan perluasan pasar melalui;
   a. Implementasi Manajemen Inventory (Stockiest);
   b. Mapping dan pengembangan database suku cadang dan material customer;
   c. Peningkatan partnership dengan mitra untuk penetrasi pasar di luar Pembangkit dan industri sejenis;
   d. Freelance Account Executive untuk penetrasi pasar di luar pembangkit dan industri sejenis;

2. Peningkatan pelayanan customer dan kinerja SLA melalui:
   a. Pemenuhan Formasi Tenaga Kerja (FTK);
   b. Assessment organisasi;
   c. Peningkatan kompetensi engineering dan manajemen inventory dengan skema megang, pedampingan dan tugas karya;
   d. Penguatan budaya perusahaan;
   e. Penyesuaian Account Executive sesuai dengan wilayah kerjanya;
   f. Pengembangan portal customer;
3. Peningkatan kinerja Collection Period melalui penguatan proses bisnis dan sistem digitalisasi dalam pengelolaan piutang.

1. Increasing revenue through the optimization of business schemes and market expansion by:
   a. Implementing Inventory Management (Stockist);
   b. Mapping and developing customer spare parts and material databases;
   c. Strengthening partnerships with business partners to penetrate markets beyond the power generation sector and related industries;
   d. Engaging freelance Account Executives to penetrate markets beyond the power generation sector and related industries.

2. Enhancing customer service and SLA performance through:
   a. Fulfilling workforce formation requirements (FTK);
   b. Organization assessments;
   c. Enhancing engineering and inventory management competencies through internship, mentoring, and assignment schemes;
   d. Strengthening the Company's corporate culture;
   e. Aligning Account Executives with their respective areas of responsibility;
   f. Developing the customer portal.
3. Improving the Collection Period through strengthening business processes and the digitalization of accounts receivable management.

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Marketing Aspects and Market Share

Sebagai bentuk dukungan PLNSC terhadap program pemerintah terkait ketenagalistrikan, PLNSC ikut berperan aktif dalam merespon permintaan pasar dalam pengembangan energi di Indonesia. Hal ini dilakukan PLNSC untuk terus berupaya melakukan inovasi-inovasi yang searah dengan program Pemerintah. Dalam menjalankan aktivitas Perseroan, PLNSC senantiasa berupaya menangkap peluang dan memperluas pangsa pasar agar dapat lebih leluasa untuk mengembangkan produk yang ditawarkan ke depannya.

As part of its support for the Government's electricity program, PLNSC plays an active role in responding to market demand for energy development in Indonesia. This is carried out through PLNSC's continuous efforts to pursue innovations that are aligned with the Government's programs. In conducting its business activities, PLNSC consistently strives to capture market opportunities and expand its market share, thereby enabling the Company to further develop the products it offers in the future.

Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun 2025, PLNSC telah merumuskan beberapa strategi Perusahaan termasuk strategi pemasaran. Hal ini bertujuan agar Perseroan memperoleh informasi terkait potensi pasar, daya beli masyarakat, segmentasi, jumlah konsumen dan situasi persaingan pasar. Selain itu, Perseroan juga melakukan evaluasi dalam memperbaiki kualitas layanan dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran.

Untuk itu dalam menghadapi persaingan bisnis, perluasan market share, dan mempertajam target pemasaran dilakukan sasaran strategi pemasaran yang ditetapkan oleh PLNSC, yakni:

- Menjadi price setter dalam menyediakan suku cadang dan jasa pendukungnya untuk pembangkit thermal, renewable energy dan industri;
- Mengoptimalkan skema komersial dengan Manufaktur dan struktur harga lainnya dalam menyampaikan harga yang kompetitif ke pelanggan;
- Implementasi skema LTSA (Long Term Service Agreement) dengan pelanggan dan manufaktur; serta
- PLNSC akan menyelenggarakan penyediaan jasa freight forwarding.

Marketing Strategy

Throughout 2025, PLNSC formulated several corporate strategies, including its marketing strategy. This was intended to enable the Company to obtain information regarding market potential, purchasing power, market segmentation, the number of customers, and the competitive landscape. In addition, the Company also conducted evaluations to improve service quality and implement targeted marketing strategies.

To address business competition, expand its market share, and sharpen its marketing focus, PLNSC established the following marketing strategies:

- To become a price setter in the provision of spare parts and supporting services for thermal power plants, renewable energy, and industrial sectors;
- To optimize commercial schemes with manufacturers and other pricing structures in order to offer competitive prices to customers;
- To implement the Long Term Service Agreement (LTSA) scheme with customers and manufacturers;
- To provide freight forwarding services.

Pangsa Pasar

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang supply chain di sektor ketenagalistrikan, PLNSC secara berkala melakukan review dan evaluasi terkait strategi pemasaran yang diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien dalam memperluas pangsa pasar Perseroan. Selain itu, hal ini juga dijadikan Perseroan untuk mengetahui permintaan pasar yang akan menjadi bisnis Perseroan.

Market Share

As a company operating in the electricity sector supply chain, PLNSC periodically reviews and evaluates its marketing strategies. This is intended to assess the effectiveness and efficiency of these strategies in expanding the Company's market share. In addition, the reviews enable the Company to identify market demand that will support the development of its business.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Overview of Operations Per Business Segment

Sebagai Perusahaan yang menyediakan suku cadang di industri ketenagalistrikan, PLNSC menyajikan solusi rantai pasok terpercaya untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan penyediaan energi listrik di Indonesia. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen terhadap kualitas, PLNSC menawarkan rangkaian suku cadang berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan beragam peralatan pembangkit dan jasa yang relevan dengan tuntutan teknologi terkini dan standar berkelanjutan.

As a company engaged in the provision of spare parts for the electricity industry, PLNSC delivers reliable supply chain solutions to ensure the stability and continuity of electricity supply in Indonesia. Backed by extensive experience and a commitment to quality, PLNSC offers a range of high-quality spare parts specifically designed to meet the requirements of various power generation equipment, as well as services that are aligned with the latest technological developments and sustainability standards.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Ton	%
Nilai Perolehan Sales Order Sales Order Acquisition Value				
PLN Nusantara Power	**1.684.869**	1.604.127	80.542	5%
PLN Indonesia Power	**168.928**	234.036	(65.108)	-28%
PLN	**113.401**	134.422	(21.021)	-16%
Non PLN (IPP)	**102.282**	117.655	(15.373)	-13%
Jumlah I Total	**2.069.481**	2.088.230	(18.749)	-1%
Pendapatan Operasional Operating Income				
PLN Nusantara Power	**1.639.187**	1.153.067	486.120	42%
PLN Indonesia Power	**183.155**	223.161	(40.006)	-18%
PLN	**107.217**	103.177	4.040	4%
Non PLN (IPP)	**47.798**	208.294	(160.496)	-77%
Jumlah I Total	**1.977.357**	1.687.699	289.658	17%

Realisasi nilai Sales Order tahun 2025 sebesar Rp2.069,48 miliar. Mayoritas penjualan berasal dari PLN Nusantara Power dengan nilai Rp1.684,67 miliar atau 81% dari total nilai penjualan. Dari sisi pertumbuhan, nilai perolehan sales order yang mengalami pertumbuhan tertinggi juga berasal dari PLN Nusantara Power yakni 5%.

The realized Sales Order value in 2025 amounted to Rp2,069.48 billion. The majority of Sales Orders were generated from PLN Nusantara Power, which amounted to Rp1,684.67 billion, representing 81% of the total Sales Order value. In terms of growth, PLN Nusantara Power also recorded the highest growth in Sales Order acquisition, at 5%.

Sedangkan untuk pendapatan usaha tahun 2025 mencapai Rp1.977,36 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.687,70 miliar. Dengan mayoritas pendapatan usaha berasal dari PLN NP sebesar Rp1.639,19 miliar atau sebesar 83% dari total pendapatan usaha.

Sepanjang tahun 2025, sales order atau perolehan kontrak penjualan Perseroan meliputi pengadaan barang dan jasa ketenagalistrikan berupa penyediaan komponen utama, suku cadang, jasa penyalur dan rekanan (supplier) barang-barang atau alat-alat yang berhubungan dengan industri dan penunjang usaha pembangkit listrik. Selain itu, Perseroan juga menyediakan jasa yang berhubungan dengan *retrofit support* dan jasa lainnya seperti jasa perbaikan, instalasi, supervisi, peningkatan kapasitas, dan *troubleshooting* yang berhubungan dengan ketenagalistrikan dan utilitas.

Meanwhile, operating revenue in 2025 reached Rp1,977.36 billion, or increased by 17% from Rp1,687.70 billion in the previous year. The majority of the Company's operating revenue was generated from PLN Nusantara Power, which amounted to Rp1,639.19 billion, or 83% of total operating revenue.

Throughout 2025, the Company's Sales Orders, or sales contract acquisitions, comprised the procurement of electricity-related goods and services, including the supply of major components, spare parts, distribution services, and partnerships with suppliers of goods and equipment related to the power generation industry and its supporting businesses. In addition, the Company also provided retrofit support services, as well as other services, including repair, installation, supervision, capacity enhancement, and troubleshooting services related to the electricity and utilities sectors.

Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Nilai data keuangan penting PLNSC disajikan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Data-data keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (Pricewaterhousecoopers – PWC) dan telah mendapatkan opini penyajian secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PLN Suku Cadang tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PLNSC's key financial data are presented in the Company's Financial Statements for the years ended December 31, 2025 and 2024. The Financial Statements were audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers – PwC) and received an unmodified opinion, stating that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT PLN Suku Cadang as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan PLNSC terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Financial Performance

PLNSC's financial performance consists of the Statement of Financial Position, the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and the Statement of Cash Flows, presented as follows.

Laporan Posisi Keuangan — Statement of Financial Position

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

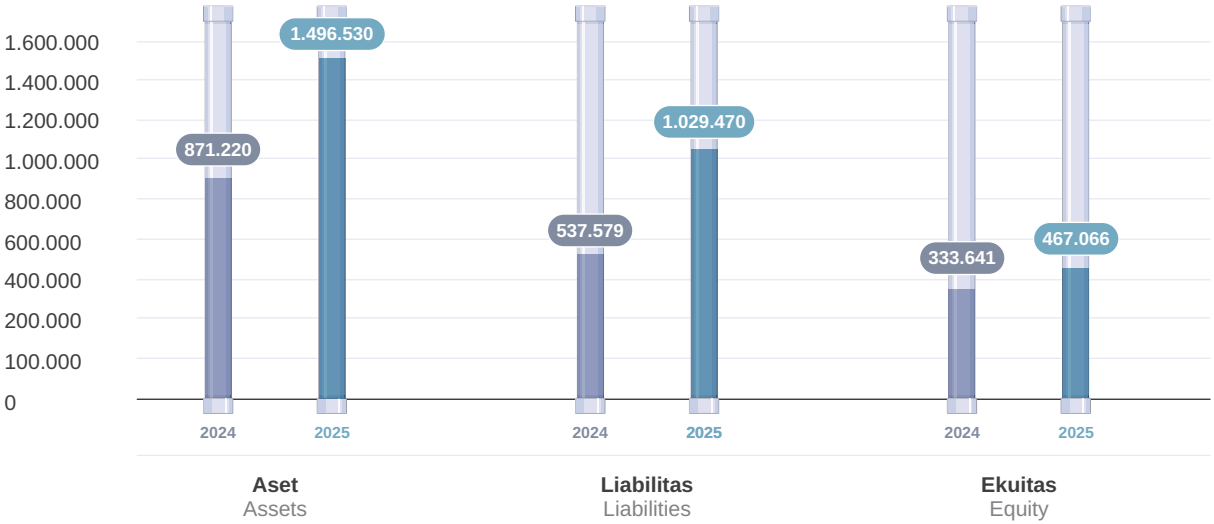
Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset Assets				
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**94.678**	80.925	13.753	17%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	**5.077**	16.258	(11.181)	-69%
Piutang usaha Accounts receivable	**821.769**	226.243	595.526	263%
Persediaan Inventories	**104.351**	165.967	(61.616)	-37%
Pajak dibayar di muka-bagian tidak lancar Prepaid taxes - non current portion	**83.804**	83.484	320	0%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	**72.270**	64.765	7.505	12%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**1.181.949**	**637.642**	**544.307**	**85%**
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets				
Piutang lain-lain -bagian tidak lancar Other receivables -non-current portion	**267**	74	193	261%
Kas dan Setara kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar Restricted cash and cash - equivalents - non current portion	**517**	-	517	100%
Aset Tetap Fixed Assets	**2.359**	1.676	683	41%
Aset Hak Guna Rights-of-use assets	4.295	3.024	1.271	42%
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar Prepaid taxes - non-current portion	302.362	219.037	83.325	38%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	2.446	1.595	851	53%
Aset tidak lancar lain Other non-current assets	2.334	8.172	(5.838)	-71%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**314.580**	**233.578**	**81.002**	**35%**
Jumlah Aset Total Assets	**1.496.529**	**871.220**	**625.309**	**72%**
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities				
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities				
Utang Usaha Accounts Payable	774.690	509.152	265.538	52%

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Utang lain-lain Other payables	1.494	1.306	188	14%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	59.189	15.209	43.980	289%
Utang Pajak Taxes Payable				
Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax	7.477		7.477	100%
Pajak lain-lain Other taxes	862	1.757	(895)	-51%
Liabilitas sewa - jangka pendek Lease liabilities - short-term	2.040	1.989	51	3%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholders	170.000	-	170.000	100%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Short-term employee benefits liabilities	12.224	6.948	5.276	76%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Total Short-Term Liabilities	**1.027.976**	**536.361**	**491.615**	**92%**
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities				
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liabilities	132	103	29	28%
Liabilitas sewa - jangka panjang Lease liabilities – long-term	1.355	1.115	240	22%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	**1.487**	**1.218**	**269**	**22%**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.029.463**	**537.579**	**491.884**	**91%**
Ekuitas Equity				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 600.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 150.000 saham Share capital - nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share Authorized capital - 600,000 shares Issued and fully paid-up capital of 150,000 share	**150.000**	150.000	-	-
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	**60.000**	60.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	**257.066**	123.641	133.425	108%
Total Ekuitas Total Equity	**467.066**	**333.641**	**133.425**	**40%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**1.496.529**	**871.220**	**625.309**	**72%**

Grafik Laporan Posisi Keuangan
Financial Position Statement

(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)



Aset

Pada tahun 2025, PLNSC membukukan aset sebesar Rp1.496,53 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 72% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp871,22 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar 85% dan aset tidak lancar sebesar 35%.

Assets

Assets In 2025, PLNSC booked assets amounted to Rp1,496.53 billion, increased by 72% compared to Rp871.22 billion in 2024. This increase was attributable to an 85.36% increase in current assets and a 35% increase in non-current assets.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset lancar Current Assets	**1.181.949**	637.642	544.307	85%
Aset tidak lancar Non-Current Asset	**314.580**	233.578	81.002	35%
Total Aset Total Assets	**1.496.529**	**871.220**	**625.309**	**72%**

Aset Lancar

Tahun 2025, PLNSC membukukan aset lancar sebesar Rp1.181,95 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 85% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp637,64 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha sebesar 263%, kas dan setara kas sebesar 17% dan biaya dibayar di muka dan uang muka sebesar 12%.

Current Assets

In 2025, PLNSC recorded current assets amounted to Rp1,181.95 billion, increased by 85% compared to Rp637.64 billion in 2024. This increase was driven by a 263% increase in accounts receivable, a 17% increase in cash and cash equivalents, and a 12% increase in prepaid expenses and advances.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**94.678**	80.925	13.753	17%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	**5.077**	16.258	(11.181)	-69%
Piutang usaha Accounts receivable	**821.769**	226.243	595.526	263%
Persediaan Inventories	**104.351**	165.967	(61.616)	-37%
Pajak dibayar di muka-bagian tidak lancar Prepaid taxes - non current portion	**83.804**	83.484	320	0%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	**72.270**	64.765	7.505	12%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**1.181.949**	**637.642**	**544.307**	**85%**

Aset Tidak Lancar

Tahun 2025, PLNSC membukukan aset tidak lancar sebesar Rp314,58 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 35% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp233,58 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya piutang lain-lain sebesar 261%, aset pajak tangguhan sebesar 53%, aset hak guna sebesar 42%, aset tetap sebesar 41% dan pajak dibayar di muka sebesar 38%.

Non-Current Assets

In 2025, PLNSC recorded non-current assets amounted to Rp314.58 billion, increased by 35% compared to Rp233.58 billion in 2024. This increase was primarily driven by a 261% increase in other receivables, a 53% increase in deferred tax assets, a 42% increase in right-of-use assets, a 41% increase in fixed assets, and a 38% increase in prepaid taxes.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset Tidak Lancar I Non-Current Assets				
Piutang lain-lain -bagian tidak lancar Other receivables -non-current portion	267	74	193	261%
Kas dan Setara kas yang dibatasi penggunaannya – bagian tidak lancar Restricted cash and cash - equivalents - non current portion	517	-	517	100%
Aset Tetap Fixed Assets	2.359	1.676	683	41%
Aset Hak Guna Rights-of-use assets	4.295	3.024	1.271	42%
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar Prepaid taxes - non-current portion	302.362	219.037	83.325	38%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	2.446	1.595	851	53%
Aset tidak lancar lain Other non-current assets	2.334	8.172	(5.838)	-71%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**314.580**	**233.578**	**81.002**	**35%**

Liabilitas

Tahun 2025, PLNSC membukukan liabilitas sebesar Rp1.029,46 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 91% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp537,58 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek dengan masing-masing sebesar 22% dan 92%.

Liabilities

In 2025, PLNSC recorded liabilities of Rp1,029.46 billion, increased by 91.66% compared to Rp537.58 billion in 2024. This increase was driven by growth in short-term and long-term liabilities, which increased by 92% and 22%, respectively.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.027.976	536.361	491.615	92%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	1.487	1.218	269	22%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**1.029.463**	**537.579**	**491.884**	**91%**

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun 2025, PLNSC membukukan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.027,98 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 92% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp536,36 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya biaya yang harus dibayar sebesar 289%, utang pajak penghasilan badan sebesar 100%, pinjaman dari pemegang saham sebesar 100%, liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar 76%, utang lain-lain sebesar 14% dan liabilitas sewa jangka pendek sebesar 3%.

Short-Term Liabilities

In 2025, PLNSC recorded short-term liabilities of Rp1,027.98 billion, an increase of 92% compared to Rp536.36 billion in 2024. This increase was driven by a 52% increase in trade payables, a 289% increase in accrued expenses, a 100% increase in corporate income tax liabilities, a 100% increase in loans from shareholders, a 76% increase in short-term employee benefit liabilities, a 14% increase in other payables, and a 3% increase in short-term lease liabilities.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities				
Utang Usaha Accounts Payable	**774.690**	509.152	265.538	52%
Utang lain-lain Other payables	**1.494**	1.306	188	14%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	**59.189**	15.209	43.980	289%
Utang Pajak Taxes Payable				
Pajak Penghasilan Badan Corporate income tax	**7.477**		7.477	100%
Pajak lain-lain Other taxes	**862**	1.757	(895)	-51%
Liabilitas sewa - jangka pendek Lease liabilities - short-term	**2.040**	1.989	51	3%

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pinjaman dari pemegang saham Loans from shareholders	**170.000**	-	170.000	100%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Short-term employee benefits liabilities	**12.224**	6.948	5.276	76%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Total Short-Term Liabilities	**1.027.976**	536.361	491.615	92%

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 2025, PLNSC membukukan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,49 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 22% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,22 miliar. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 28% dan liabilitas sewa jangka panjang sebesar 22%.

Long-Term Liabilities

In 2025, PLNSC recorded long-term liabilities amounted to Rp1.49 billion, increased by 22% compared to Rp1.22 billion in 2024. This increase was driven by a 28% increase in long-term employee benefit liabilities and a 22% increase in long-term lease liabilities.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities				
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefits liabilities	**132**	103	29	28%
Liabilitas sewa - jangka panjang Lease liabilities - long-term	**1.355**	1.115	240	22%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	**1.487**	**1.218**	**269**	**22%**

Ekuitas

Pada 2025, PLNSC membukukan ekuitas sebesar Rp467,07 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp333,64 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 108 %.

Equity

In 2025, PLNSC posted equity amounted to Rp467.07 billion, which increased by 40% compared to Rp333.64 billion in 2024. This increase was due to increase in retained earnings by 108%.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Ekuitas Equity				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 600.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 150.000 saham Share capital - nominal value Rp1,000,000 (full amount) per share Authorized capital - 600,000 shares Issued and fully paid-up capital of 150,000 share	**150.000**	150.000	-	-
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	**60.000**	60.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	**257.066**	123.641	133.425	108%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**467.066**	**333.641**	**133.425**	**40%**

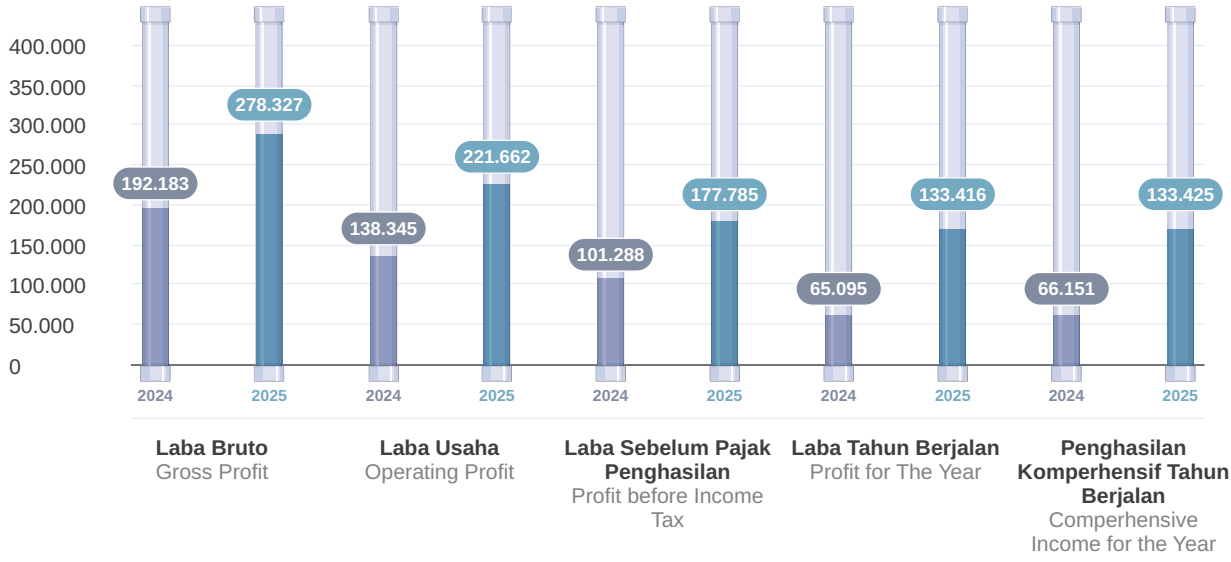
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pendapatan Revenue	1.977.357	1.687.699	289.658	17%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(1.699.030)	(1.495.516)	(203.514)	14%
Laba bruto Gross profit	278.327	192.183	86.144	45%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(56.665)	(53.838)	(2.827)	5%
Penghasilan keuangan Finance income	276	773	(497)	-64%
Beban keuangan Finance cost	(14.216)	(20.455)	6.239	-31%
Beban lain-lain - bersih Other expenses - net	(29.937)	(17.375)	(12.562)	72%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	177.785	101.288	76.497	76%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(44.369)	(35.193)	(9.176)	26%
Laba tahun berjalan Profit for the year	133.416	66.095	67.321	102%
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan: Other comprehensive income for the year:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items not to be reclassified to income statement:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Remeasurement of employee benefits liabilities	12	72	(60)	-83%
Pajak penghasilan terkait Related income tax	(3)	(16)	13	-81%
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak Income tax related to other comprehensive income, after tax	9	56	(47)	-84%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	**133.425**	**66.151**	**67.274**	**102%**

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income Chart

(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)



Pendapatan Usaha

Pada 2025, PLNSC membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.977,36 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1.687,70 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari penjualan material dan pendapatan jasa.

Operating Revenue

In 2025, PLNSC recorded operating revenue amounted to Rp1,977.36 billion, increased by 17% compared to Rp1,687.70 billion in 2024. This increase was driven by increasing from material sales and service income.

Beban Pokok Pendapatan

Pada 2025, beban pokok pendaptan PLNSC tercatat sebesar Rp1.699,03 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 14% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1.495,52 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pembelian suku cadang dan lain-lain.

Cost of Revenue

In 2025, PLNSC's cost of revenue was recorded at Rp1,699.03 billion, increased by 14% compared to Rp1,495.52 billion in 2024. This increase was driven by higher purchases of spare parts, in line with the rise in operating revenue.

Laba Bruto

Pada 2025, PLNSC membukukan laba bruto sebesar Rp278,33 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp Rp192,18 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan yang mempengaruhi laba bruto Perseroan.

Gross Profit

In 2025, PLNSC recorded a gross profit amounted to Rp278.33 billion, increased by 45% compared to Rp192.18 billion in 2024. This increase was driven by the rise in the Company's operating revenue, which affected the Company's gross profit.

Beban Umum dan Administrasi

Pada 2025, beban umum dan administrasi PLNSC tercatat sebesar Rp56,67 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp53,84 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan pada biaya-biaya perbaikan dan dan pemeliharaan, biaya sewa dan penyusutan.

General and Administrative Expenses

In 2025, PLNSC's general and administrative expenses were recorded at Rp56.67 billion, increased by 5% compared to Rp53.84 billion in 2024. This increase was driven by an increase in honoraria, depreciation, as well as postage and telecommunications expenses.

Penghasilan Keuangan

Pada 2025, PLNSC membukukan penghasilan keuangan sebesar Rp276 juta yang mengalami penurunan sebesar 64% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp773 juta.

Finance Income

In 2025, PLNSC recorded finance income amounted to Rp276 million, which decreased by 64% compared to Rp773 million in 2024 due to a decrease in interest income from demand deposits and the absence of time deposits.

Beban Keuangan

Pada 2025, beban keuangan PLNSC tercatat sebesar Rp14,22 miliar yang mengalami penurunan sebesar 31% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp20,46 miliar.

Finance Costs

In 2025, finance costs for PLNSC totaled Rp14.22 billion, decreased by 31% compared to Rp20.46 billion in 2024, due to interest expenses on SHL loans and Notional Pooling.

Beban Lain-Lain Bersih

Pada 2025, PLNSC membukukan beban lain-lain bersih sebesar Rp29,94 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 72% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp17,37 miliar.

Other Expenses, Net

In 2025, PLNSC recorded other expenses, net, amounted to Rp29.94 billion, increased by 72% compared to Rp17.37 billion in 2024, due to tax refunds and an increase in trade payables accruals.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Pada 2025, PLNSC membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp177,79 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 76% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp101,29 miliar.

Profit Before Income Tax

In 2025, PLNSC recorded profit before income tax amounted to Rp177.79 billion, increased by 76% compared to Rp101.29 billion in 2024.

Beban Pajak Penghasilan

Pada 2025, beban pajak penghasilan PLNSC tercatat sebesar Rp44,37 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp35,19 miliar.

Income Tax Expense

In 2025, PLNSC's income tax expense was recorded at Rp44.37 billion, increased by 26% compared to Rp35.19 billion in 2024.

Laba Tahun Berjalan

Pada 2025, PLNSC membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp133,42 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 125, 86% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp29,26 miliar.

Profit for the Year

In 2025, PLNSC posted a profit for the year amounted to Rp133.42 billion, increased by 101.86% compared to Rp66.10 billion in 2024.

Penghasilan Komprehensif

Pada 2025, PLNSC membukukan penghasilan komprehensif sebesar Rp133,42 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 101,70% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp66,15 miliar.

Comprehensive Income

In 2025, PLNSC booked comprehensive income amounted to Rp133.42 billion, increased by 101.70% compared to Rp66.15 billion in 2024.

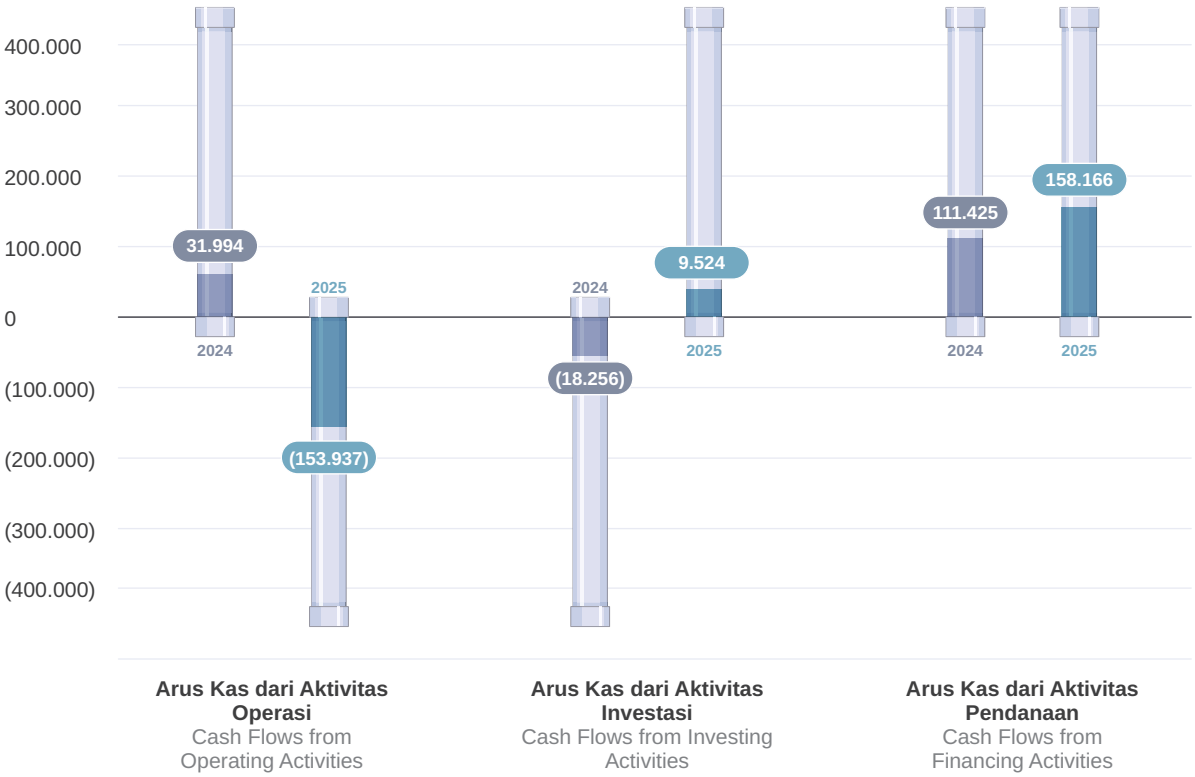
Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi Net cash flows from (for) operating activities	(153.937)	31.994	(185.931)	-581%
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi Net cash flows for investing activities	9.524	(18.256)	27.780	-152%
Arus kas bersih untuk (dari) aktivitas pendanaan Net cash flows for (from) financing activities	158.166	(111.425)	269.591	-242%
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	**13.753**	**(97.687)**	**111.440**	**-114%**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	**80.925**	**178.615**	**(97.690)**	**-55%**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	**94.678**	**80.925**	**13.753**	**17%**

Grafik Laporan Arus Kas
Cash Flows Statement Chart

(Dalam jutaan Rupiah I In million Rupiah)



Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Tahun 2025, Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi Perseroan mencapai Rp153,94 miliar yang mengalami penurunan sebesar 581% dibandingkan dengan tahun 2024 yang lebih banyak mengeluarkan kas untuk aktivitas operasi. Peningkatan ini terjadi karena penurunan penerimaan bunga.

Net Cash Flows from Operating Activities

In 2025, the Company's net cash used in operating activities amounted to Rp153.94 billion, decreased by 581% compared to 2024, in which more cash was used for operating activities. This decrease was due to the decline in customer receipts and interest income.

Arus Kas Bersih Untuk Aktivitas Investasi

Tahun 2025, Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan mencapai Rp9,52 miliar yang mengalami peningkatan sebesar 152% dibandingkan dengan tahun 2024 di mana Perseroan lebih banyak mengeluarkan kas untuk melakukan aktivitas investasi. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan penerimaan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Net Cash Flows Used for Investing Activities

In 2025, the net cash flows used for the Company's investing activities amounted to Rp9.52 billion, increased by 152% compared to 2024, when the Company used more cash for investing activities. This increase was due to an increase in withdrawals of restricted cash and cash equivalents.

Arus Kas Bersih Untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun 2025, Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan mencapai Rp158,17 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 242% dibandingkan dengan tahun 2024 di mana Perseroan menggunakan arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan mencapai Rp111,42 miliar. Penurunan ini terjadi disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan pinjaman dari pemegang saham dan pembayaran liabilitas sewa.

Net Cash Flows for Financing Activities

In 2025, the Company's net cash flows from financing activities reached Rp158.17 billion, increased by 242% compared to 2024, when the Company used Rp111.43 billion in net cash for financing activities. This decrease was due to an increase in loan proceeds from shareholders and lease liability payments.

Rasio Keuangan

Di tahun 2025, Rasio keuangan PLNSC mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Rasio keuangan Perseroan disajikan pada tabel berikut.

Financial Ratios

In 2025, PLNSC's financial ratios underwent significant changes compared to 2024. The Company's financial ratios are presented in the following table.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Rasio Solvabilitas (x) Solvency Ratio (x)		
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Debt to Total Equity	**2,20**	1,61
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Debt to Total Assets	**0,69**	0,62
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Assets / Total Short-Term Liabilities	**1,15**	1,19
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Assets / Total Long-Term Liabilities	**211,55**	191,77
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)		
Laba Bruto / Pendapatan Neto Gross Profit Margin	**14,08**	11,39
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto Net Profit Margin	**6,75**	3,92
Return on Asset (ROA)	**8,92**	7,59
Return on Equity (ROE)	**28,57**	19,81
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)		
Rasio Lancar Current Ratio	**1,15**	1,19
Rasio Kas Cash Ratio	**0,10**	0,18
Rasio Cepat Quick Ratio	**1,05**	0,88
Rasio Keuangan Lainnya (x) Other Financial Ratios (x)		
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset Total Equity / Total Assets	**0,31**	**0,38**

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Debt Repayment Capacity and Receivables Collectibility

Dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang Perseroan tepat waktu, PLNSC menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas untuk mengukut tingkat kemampuan Perusahaan.

To ensure the Company meets its short-term and long-term obligations in a timely manner, PLNSC utilizes liquidity ratios and solvency ratios to assess the Company's financial capacity.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Dalam menganalisa rasio likuiditas, Perseroan menggunakan rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio cepat (quick ratio).

Liquidity Ratios

Liquidity ratios are utilized to measure the Company's ability to meet financial obligations with a maturity of less than 1 (one) year. In analyzing liquidity ratios, the Company uses the current ratio, the cash ratio, and the quick ratio.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)		
Rasio Lancar Current Ratio	**1,15**	1,19
Rasio Kas Cash Ratio	**0,10**	0,18
Rasio Cepat Quick Ratio	**1,05**	0,88

Secara keseluruhan, likuiditas Perseroan berada dalam kondisi yang cukup stabil. Perseroan mampu mengelola pertumbuhan pendapatan usaha dan perputaran piutang. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dikategorikan lancar.

Overall, the Company's liquidity is relatively stable. The Company is able to manage its revenue growth and accounts receivable turnover. The Company's ability to meet its short-term liabilities is classified as sound.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menganalisa rasio solvabilitas, Perseroan menggunakan rasio utang terhadap aset (Debt to Assets Ratio/DAR) dan rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER).

Solvency Ratios

Solvency ratios are utilized to measure the Company's ability to fulfill its short-term and long-term liabilities. In analyzing solvency ratios, the Company uses the debt-to-assets ratio (DAR) and the debt-to-equity ratio (DER).

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Rasio Solvabilitas (x) Solvency Ratio (x)		
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas Debt to Equity	**2,20**	1,61
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset Debt to Assets	**0,59**	0,62

Namun secara keseluruhan, rasio solvabilitas Perseroan menggambarkan kondisi cukup baik, dimana utang Perseroan yang masih dapat ditutup dengan aset Perseroan.

Nevertheless, overall, the Company's solvency ratio indicates a relatively positive condition, as the Company's assets are sufficient to secure its liabilities.

Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi Perusahaan. Dalam menganalisa rasio profitabilitas, Perseroan menggunakan rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (Return on Asset/ROA), Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (Return on Equity/ROE), dan Rasio Laba (Rugi) terhadap Penjualan (Net Profit Margin/NIM).

Profitability Ratios

Profitability ratios are utilized to measure the Company's ability to generate profits. In analyzing profitability ratios, the Company uses the Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Profit Margin (NPM).

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)		
Laba Bruto / Pendapatan Neto Gross Profit Margin	**14,08**	11,39
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Neto Net Profit Margin	**6,75**	3,92

Secara keseluruhan, rasio profitabilitas Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan keuntungan masih tergolong stabil.

In general, the Company's profitability ratios indicate that its ability to generate profits remains stable.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat Kolektibilitas piutang menunjukkan seberapa banyak waktu (hari) yang dibutuhkan Perseroan dalam melakukan penagihan terhadap piutangnya. Dalam menghitung periode penagihan (collecting period), Perseroan menggunakan nilai collecting period yang menggambarkan kecepatan Perseroan dalam mengumpulkan piutang.

Receivables Collectability

The receivables collectability ratio indicates how many days are required for the Company to collect its receivables. In calculating the collecting period, the Company uses a value that reflects the rate at which it collects its receivables.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Piutang usaha dan piutang lain-lain Accounts receivable and other receivables	**821.769**	226.243	595.526	263,22
Pendapatan usaha Operating revenue	**1.977.357**	1.687.699	289.658	17,16
Rata-rata kolektibilitas piutang (hari) Average receivables collectibility (days)	**152**	**49**	**-**	**-**

Tingkat kolektabilitas piutang terus dilakukan review secara berkala untuk memudahkan Perseroan dalam menyisihkan anggaran terkait pencadangan kolektibilitas piutang. Tahun 2025, menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan dalam memperoleh kolektibilitas piutang selama 152 hari. Secara umum, kolektibilitas piutang Perseroan masih berada dalam kategori lancar dan Perseroan sangat baik dalam mengelola piutang usahanya dengan pihak ketiga.

The collectibility rate is reviewed periodically to enable the Company to allocate reserves for uncollectible receivables. In 2025, the Company's accounts receivable collection period was 152 days. Overall, the Company's accounts receivable remain stable and the Company is effectively managing its trade receivables with third parties.

Struktur Permodalan
Capital Structure

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Kebijakan dalam mengelola struktur modal harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penerapan atas komposisi dan proporsi modal Perseroan akan sangat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh Perseroan atas modal yang dikeluarkan untuk aktivitas bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan struktur modal harus dikaji secara berkala agar dapat meminimalisir risiko keuangan yang timbul serta dapat memproyeksikan kebutuhan modal di masa depan. Setiap langkah bisnis yang diambil, Perseroan harus selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan meminimalisasi biaya modal.

Dalam menetapkan kebijakan struktur modal, PLNSC mempertimbangkan beberapa hal yang dijadikan landasan, diantaranya:

- Fleksibilitas keuangan dan tingkat risiko bisnis; dan
- Perbandingan ekuitas terhadap likuiditas ditetapkan melalui pelaksanaan analisis sensitivitas dengan berbagai variasi asumsi inti yang paling mungkin dihadapi Perseroan.

Management Policy on Capital Structure

Policies for managing the capital structure shall prioritize the principle of prudence. The composition and proportion of the Company's capital will significantly impact the Company's profits derived from the capital invested in business activities. Therefore, the capital structure must be reviewed periodically to minimize financial risks and project future capital needs. For every business decision made, the Company must always assess potential financial risks to maximize corporate value and minimize the cost of capital.

In establishing its capital structure policy, PLNSC considers several underlying factors, including:

- Financial flexibility and the level of business risk; and
- The ratio of equity to liquidity is determined through sensitivity analysis using various variations of the most likely core assumptions the Company may face.

Struktur Modal Perusahaan

Struktur modal Perusahaan dikelola sedemikian rupa agar dapat memaksimalkan keuntungan melalui penggunaan liabilitas dan ekuitas secara optimal. Dalam pengelolaannya, Perseroan memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal, dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Liabilitas terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek, sedangkan ekuitas terdiri dari saham disetor dan laba ditahan.

Tahun 2025, komposisi struktur modal PLNSC terdiri dari ekuitas sebesar Rp467,07 miliar meningkat 39,99% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp333,64 miliar. Selain itu, liabilitas tahun 2025 sebesar Rp1.029,46 miliar, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 91,55% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp537,57 miliar.

The Company's Capital Structure

The Company's capital structure is managed in such a way as to maximize profits through the optimal use of liabilities and equity. In managing this structure, the Company ensures compliance with capital adequacy ratio limits and maximizes returns for shareholders. Liabilities consist of long-term and short-term liabilities, while equity consists of paid-in capital and retained earnings.

In 2025, PLNSC's capital structure consisted of equity amounting to Rp467.07 billion, increased by 39.99% compared to Rp333.64 billion in 2024. In addition, liabilities in 2025 amounted to Rp1,029.46 billion, increased by 91.55% compared to Rp537.57 billion in 2024.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	Persentase Percentage	2024	Persentase Percentage
Liabilitas Liabilities	**1.029.463**	68,79%	537.579	61,70%
Ekuitas Equity	**467.066**	31,21%	333.641	38,30%
Ekuitas dan Liabilitas Equity and Liabilities	**1.496.529**	**100,00%**	**871.220**	**100,00%**

Sampai dengan akhir Desember 2025, PLNSC menetapkan kebijakan pengelolaan struktur modal berupa penggunaan utang yang lebih optimal dan hati-hati agar kesehatan Perusahaan lebih stabil. Perseroan juga senantiasa mengelola struktur modal untuk melanjutkan kelangsungan usaha, memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal, dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

As of the end of December 2025, PLNSC has established capital structure management policies that involve more optimal and prudent use of debt to ensure the Company's financial stability. The Company also continuously manages its capital structure to ensure business continuity, ensure compliance with capital adequacy ratio limits, and maximize returns for shareholders.

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Fasilitas Pinjaman dari Pemegang Saham

Pada tanggal 30 April 2025, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari Pemegang Saham senilai maksimal Rp350 miliar untuk mendukung kebutuhan operasional. Fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu hingga 30 April 2026. Sebelum jatuh tempo, tepatnya pada 22 April 2026, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban atas fasilitas pinjaman tersebut.

Material Commitments Related to Capital Goods Investment

Loan Facility from Shareholders

On April 30, 2025, the Company obtained a shareholder loan facility of up to Rp350 billion to support its operational needs. The loan facility bore a fixed interest rate of 6.75% per annum and had a maturity date of April 30, 2026. Prior to its maturity, on April 22, 2026, the Company fully repaid all outstanding obligations under the loan facility.

Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan menggunakan fasilitas perbankan dalam bentuk Non-Cash Loan (NCL) yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) untuk pembukaan Letter of Credit (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pada tanggal 31 Desember 2025, PT PLN (Persero) menyetujui penggunaan fasilitas NCL oleh PLNSC di Mandiri dan BRI sebesar Rp460.092 miliar (2024: Rp174.405 miliar).

Tujuan Ikatan

PLNSC memiliki penyaluran investasu dari pembiayaan di atas dengan tujuan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan PLNSC untuk memenuhi ikatan yang material terkait investasi berasal dari instrumen pembiayaan.

Investasi Barang Modal

Investasi berupa barang modal merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap, yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi Perseroan di masa mendatang.

Tahun 2025, Perseroan menganggarkan sejumlah dana untuk investasi barang modal sebesar Rp1,14 milliar berupa perangkat *server* dan kelengkapannya.

Commitments and Contingencies

The Company utilizes banking facilities in the form of Non-Cash Loans (NCLs) provided by PT PLN (Persero) for the issuance of Letters of Credit (L/Cs) and/or Domestic Documentary Credit Letters (SKBDNs).

As of December 31, 2025, PT PLN (Persero) approved PLNSC's use of the NCL facility at Mandiri and BRI in the amount of Rp460,092 (2024: Rp174,405).

Purpose of Commitments

PLNSC utilizes the proceeds from the financing with the purpose of meeting the company's operational needs.

Source of Funds

The funds used by PLNSC to meet material commitments related to investments originated from financing instruments.

Capital Goods Investment

Capital goods investment refers to the expenditures used to purchase fixed assets or increase the value of fixed assets, which are expected to provide future benefits to the Company. In 2025, the Company did not allocate any funds for capital goods investment.

In 2025, the Company allocate funds for capital goods investment of Rp1,14 billion in the form of server devices and auxiliaries.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal
Tahun 2025, Perseroan tidak melakukan aktivitas investasi barang modal sehingga tidak terdapat informasi mengenai jenis dan investasi barang modal dalam laporan tahunan ini.

Tujuan Investasi Barang Modal
Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan.

Rencana Belanja Modal Pada Tahun 2025
PLNSC telah menganggarkan sejulah dana yang akan digunakan untuk modal kerja sepanjang tahun 2025 terutama yang akan diinvestasikan untuk penguatan infrastruktur teknologi. Rencana modal kerja tersebut tentunya digunakan untuk mendukung aktivitas Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, atau Restrukturisasi Hutang/Modal

Investasi
Tahun 2025, PLNSC tidak melakukan kegiatan investasi.

Ekspansi
Tahun 2025, PLNSC tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi
Tahun 2025, PLNSC tidak melakukan kegiatan divestasi.

Restrukturisasi Hutang/Modal
Tahun 2025, PLNSC tidak melakukan restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi modal.

Akuisisi
Tahun 2025, PLNSC tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Pencapaian Target dan Target Ke Depan
Untuk melihat mencapaian atas kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025, PLNSC membandingkan antara target dan pencapaian kinerja Perseroan yang tersaji dalam laporan terintegrasi ini.

Types and Values of Capital Goods Investments
In 2025, the Company did not engage in any capital goods investment activities; therefore, there is no information regarding the types and values of capital goods investments in this annual report.

Purpose of Capital Goods Investment
These capital goods investments are intended to support the seamless operation of the Company's business activities.

Capital Expenditure Plan for 2025
PLNSC has allocated budget to be utilized for working capital throughout 2025, primarily to be invested in strengthening technology infrastructure. This working capital plan is intended to support the Company's efforts to drive business growth.

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestitures, Acquisitions, or Debt/Capital Restructuring

Investments
In 2025, PLNSC did not engage in any investment activities.

Expansion
In 2025, PLNSC did not engage in any expansion activities.

Divestitures
In 2025, PLNSC did not engage in any divestiture activities.

Debt/Capital Restructuring
In 2025, PLNSC did not engage in any debt or capital restructuring.

Acquisitions
In 2025, PLNSC did not engage in any acquisition activities.

Target Achievement and Future Targets
To assess the Company's performance throughout 2025, PLNSC compares the Company's performance targets with its actual results as presented in this integrated report.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

No	Pos-pos Keuangan Utama Key Financial Items	Target 31 Desember 2025 Target December 31, 2025	Realisasi 31 Desember 2025 Realization December 31, 2025	Pencapaian Achievement
1	2	3	4	5=4/3*100%
Laporan Laba Rugi Statement of Profit or Loss				
1	Penjualan/Pendapatan Sales/Revenue	**1.810.684**	1.977.357	109,20%
2	Laba Bruto Gross Profit	**224.813**	278.327	123,80%
3	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**103.705**	133.416	128,55%
4	Laba Komprehensif Comprehensive Income	**103.705**	133.425	128,66%
Struktur Modal Capital Structure				
1	Liabilitas Liabilities	**556.071**	1.029.470	185,13%
2	Ekuitas Equity	**459.876**	467.061	101,56%
3	Ekuitas dan Liabilitas Equity and Liabilities	**1.015.946**	1.496.530	147,30%

Tahun 2025, pendapatan Perseroan mencapai Rp1.977,36 miliar atau sebesar 109,20% dari target yang ditetapkan, sedangkan target pendapatan mencapai Rp1.810,68 miliar. Di tahun yang sama, laba usaha Perseroan mencapai Rp278,33 miliar atau sebesar 123,80% dari target yang ditetapkan. Laba tahun berjalan Perseroan mencapai Rp133,42 miliar atau sebesar 128,55% dari target yang ditetapkan, sedangkan target laba tahun berjalan mencapai Rp103,71 miliar.

In 2025, the Company's revenue reached Rp1,977.36 billion, or 109.20% of the set target, while the revenue target was Rp1,810.68 billion. In the same year, the Company's operating profit reached Rp278.33 billion, or 123.80% of the set target. The Company's profit for the year reached Rp133.42 billion, or 128.55% of the set target, while the profit for the year target was Rp103.71 billion.

Dari sisi struktur modal, sepanjang tahun 2025, liabilitas Perseroan mencapai Rp1.029,47 miliar atau sebesar 185,13% dari target yang ditetapkan, sedangkan target liabilitas mencapai Rp556,07 miliar. Di tahun yang sama, ekuitas Perseroan mencapai Rp467,06 miliar atau sebesar 101,56% dari target yang ditetapkan, sedangkan target ekuitas mencapai Rp459,88 miliar. Untuk realisasi ekuitas dan liabilitas Perseroan mencapai Rp1.496,53 miliar atau sebesar 147,30 % dari target yang ditetapkan.

In terms of capital structure, throughout 2025, the Company's liabilities reached Rp1,029.47 billion, or 185.13% of the set target, while the liability target was Rp556.07 billion. In the same year, the Company's equity reached Rp467.06 billion, or 101.56% of the set target, while the equity target was Rp459.88 billion. The Company's realized equity and liabilities amounted to Rp1,496.53 billion, or 147.30% of the set target.

Prospek Usaha dan Strategi 2025

Business Outlook and Strategy for 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran 4,7-5,5%. Dibutuhkan kebijakan yang dapat menstimulus pertubuhan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor ketenagalistrikan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) agar menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan EBT menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diprioritaskan. Pemerintah telah mencanangkan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) agar percepatan pertumbuhan segera terealisasi dengan baik.

In 2025, Indonesia's economic growth is projected to be in the range of 4.7–5.5%. Policies that can stimulate overall economic growth are necessary. One sector expected to drive Indonesia's economic growth is the electricity sector through the development of New and Renewable Energy (NRE) to reach all segments of society. Therefore, NRE development policies have become one of the prioritized National Strategic Projects (PSN). The government has launched the Electricity Infrastructure Development (PIK) program to ensure that accelerated growth is promptly and effectively realized.

Pertumbuhan industri kelistrikan nasional dinilai akan konsisten sesuai perencanaan dalam RUPTL 2021-2030. Dalam perencanaan tersebut, pemerintah memproyeksikan tambahan supply baru sebesar 30GW berpusat pada gas, hidro dan batubara untuk menjamin kecukupan pasokan, solar, dan angin untuk meningkatkan bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan di masa depan. Penambahan kapasitas baru didominasi oleh EBT (51,6%) dengan porsi hidro (25,6%) sebagai teknologi yang paling tepat untuk memenuhi target 23% EBT pada tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RUPTL. Porsi batubara sebesar 34% dalam kapasitas tambahan hanya terdiri atas ongoing project. Jawa dan Sumatera tetap menjadi daerah dengan permintaan yang intensif dengan tingkat pertumbuhan 4% dan 6,6% secara berurutan.

Growth in the national electricity industry is expected to remain consistent with the plans outlined in the 2021–2030 Long-Term Electricity Supply Plan (RUPTL). Under this plan, the government projects an additional 30 GW of new supply, primarily from gas, hydro, and coal to ensure sufficient supply, as well as solar and wind to increase the share of energy from new and renewable power sources in the future. New capacity additions are dominated by renewable energy (51.6%), with hydropower (25.6%) being the most suitable technology to meet the 23% renewable energy target by 2025, as outlined in the RUPTL. The 34% share of coal in the additional capacity consists solely of ongoing projects. Java and Sumatra remain regions with high demand, with growth rates of 4% and 6.6%, respectively.

Menurut Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 – 2030 bahwa rencana penambahan kapasitas pembangkit selama 10 tahun mendatang (periode tahun 2021 – 2030) untuk seluruh Indonesia adalah 40,6 GW atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 4 GW per tahun. Dengan penambahan pembangkit EBT akan mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun sebesat 20,9 GW atau 51,6% terdiri dari PLTA/PLTM sebesar 10,4 GW atau 25,6% dari kapasitas total, disusul oleh PLTS sebesat 4,7 GW atau 11,5% , PLTP sebesar 3,4 GW atau 8,3% dan EBT lainnya 2,5 GW atau 6,2% berupa PLT EBT Base (1 GW), PLTB (0,6 GW) serta

According to PLN's 2021–2030 Electricity Supply Business Plan (RUPTL), the planned increase in power generation capacity over the next 10 years (2021–2030) for all of Indonesia is 40.6 GW, representing an average annual capacity increase of 4 GW. Renewable energy power plants will dominate the types of plants to be built, accounting for 20.9 GW or 51.6%. This includes PLTA/PLTM totaling 10.4 GW or 25.6% of the total capacity, followed by PLTS at 4.7 GW or 11.5%, PLTP at 3.4 GW or 8.3%, and other EBT at 2.5 GW or 6.2%, comprising PLT EBT Base (1 GW), PLTB (0.6 GW), and BESS (0.3 GW). Meanwhile, the development of coal-fired power plants is smaller than that

BESS (0,3 GW). Sedangkan untuk pengembangan PLTU batubara lebih kecil dari RUPTL 2019 – 2028 yaitu sebesar 13,8 GW atau 31,4% (terdiri dari PLTU MT sebesar 3,3 GW atau PLTU Non-MT 10,5 GW). PLTGU akan dibangun dengan kapasitas sebesar 3,8 GW atau 9,5% dan PLTG/MG sebesar 1,9 GW atau 4,9%.

Seiring rencana pengembangan industri kelistrikan tersebut, Perseroan telah mempersiapkan peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan layanan O&M serta suku cadang untuk seluruh unit pembangkit PLN Group. Prospek usaha Perseroan juga seiring langkah pemerintah untuk mencapai kedaulatan listrik nasional dalam program 35.000 MW dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik serta pengembangan pembangkit energi baru terbarukan.

Pada tahun 2025, Perusahaan juga menargetkan pengelolaan demand planning untuk Hotparts PLTMG dengan mesin pabrikan Wartsila dan MAN serta stockist Tube Boiler. Dengan melakukan konsolidasi pengadaan material untuk kebutuhan pemeliharaan Overhaul/Inspeksi pada pembangkit yang memiliki karakteristik engine yang sejenis, maka PLNSC akan memiliki daya tawar yang lebih baik kepada manufaktur sehingga dapat memberikan harga dan layanan yang lebih baik ke pelanggan. PLNSC telah memetakan kebutuhan Hotparts PLTMG untuk jenis mesin pabrikan Wartsila dan MAN berdasarkan jadwal inspeksi dan/atau overhaul rutin dari mesin. Pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat 7 PLTMG dan 27 unit pembangkit.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah, PLNSC telah menyusun rencana bisnis Perseroan dan strategi bisnis terutama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan beberapa kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2025-2026 serta asumsi-asumsi makro maupun mikro tersaji sebagai berikut:

outlined in the 2019–2028 RUPTL, totaling 13.8 GW or 31.4% (consisting of 3.3 GW of PLTU MT and 10.5 GW of PLTU Non-MT). PLTGU will be constructed with a capacity of 3.8 GW, or 9.5%, and PLTG/MG with a capacity of 1.9 GW, or 4.9%.

In line with the planned development of the electricity industry, the Company has prepared to enhance its capacity to meet the demand for O&M services and spare parts for all power generation units within the PLN Group. The Company's business prospects are also aligned with the Government's efforts to achieve national electricity sovereignty through the 35,000 MW program by developing power generation facilities and expanding new and renewable energy-based power plants.

In 2025, the Company also targets the implementation of demand planning for Hotparts for PLTMG with Wärtsilä and MAN engines, as well as serving as the stockist for boiler tubes. By consolidating the procurement of materials required for overhaul and inspection maintenance activities at power plants with similar engine characteristics, PLNSC is expected to strengthen its bargaining position with manufacturers, enabling the Company to offer more competitive prices and better services to its customers. PLNSC has mapped the demand for Hotparts for PLTMG equipped with Wärtsilä and MAN engines based on the scheduled routine inspections and/or overhauls of the engines. In 2025, the demand is projected to cover 7 PLTMG and 27 generating units.

In support of the Government's programs, PLNSC has prepared the Company's business plan and business strategy, particularly for electricity infrastructure development in 2025, taking into consideration current economic conditions, economic projections for 2025–2026, and the following macroeconomic and microeconomic assumptions.

Proyeksi Indikator Makro Indonesia di Tahun 2025-2026

Indonesia's Macroeconomic Indicator Projections for 2025–2026

No	Indikator Ekonomi Economic Indicators	APBN 2025	RAPBN 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi Economic Growth	**5,2%**	5,5 – 6,0%
2	Inflasi Inflation	**2,5%**	1,5 – 3,5%
3	Nilai Tukar (Rp/1 USD) Exchange Rate (Rp/ 1 USD)	**16.000**	14.900 – 15.400
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%) SUN 10 year Interest Rate (%)	**7,0%**	6,3 – 7,3%
5	Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel) Indoensian crude oil price (USD/barrel)	**82**	70 – 90
6	Lifting minyak mentah (ribu barel per hari) Crude oil lifting (thousand barrels per day)	**605**	593 – 621
7	Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) Gas lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	**1,005**	1.087 – 1.151

Sumber I Source:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
State Budget (APBN) for Fiscal Year 2025 and State Budget Plan (RAPBN) for Fiscal Year 2026

Tabel Proyeksi Keuangan

Table of Financial Projections

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

No	Pos-pos Keuangan Utama Key Financial Items	Proyeksi 2025 2025 Projections
Laba Rugi Komprehensif Comprehensive Profit or Loss		
1	Pendapatan Revenue	**1.810.684**
2	Laba Bruto Gross Profit	**224.813**
3	Laba Usaha Operating Profit	**132.956**
4	Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**103.705**
Struktur Modal Capital Structure		
1	Aset Lancar Current Assets	**1.001.088**
2	Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	**14.858**
	Total Aset Total Assets	**1.015.946**

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

No	Pos-pos Keuangan Utama Key Financial Items	Proyeksi 2025 2025 Projections
3	Ekuitas Equity	459.876
4	Liabilitas Lancar Current Liabilities	555.931
5	Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	140
	Total Liabilitas Total Liabilities	**556.071**

Proyeksi Kebijakan Dividen

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka telah merencanakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham maksimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Namun, pembayaran tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, keuntungan yang diperoleh Perseroan, kewajiban yang dimiliki Perseroan, alokasi dana cadangan serta tingkat pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

Dividend Policy Projections

Referring to the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company, as a publicly listed company, has planned to pay dividends to shareholders of up to 20% of the issued and paid-in capital. However, the payment must still take into account the Company's financial condition, the profits earned by the Company, the Company's liabilities, the allocation of reserve funds, and the Company's future growth rate.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts After the Auditor's Reporting Date

Pinjaman dari Pemegang Saham

Pada tanggal 30 April 2025, Perseroan dan PLN Nusantara Power selaku pemegang saham, menandatangani perjanjian pinjaman untuk kebutuan tambahan modal kerja dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Pinjaman ini akan berakhir 1 (satu) tahun setelah penandatanganan perjanjian pinjaman.

Pada 22 April 2026, Perseroan telah melunasi seluruh kewajiban atas pinjaman tersebut.

Loan from Shareholders

On April 30, 2025, the Company and PLN Nusantara Power, as a shareholder, signed a loan agreement for additional working capital needs with a maximum facility amount of Rp350,000,000,000 at a fixed interest rate of 6.75% per year. This loan will mature 1 (one) year after the signing of the loan agreement.

On April 22, 2026, the Company has fully repaid all outstanding obligations under the loan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Foreign Exchange Rate Risk

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Perseroan untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

The Company is exposed to exchange rate fluctuations arising from transactions with customers and suppliers denominated in foreign currencies, thereby exposing the Company to foreign exchange rate fluctuations. The Company's policy is to manage foreign currency exposure within acceptable limits.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Policies, Announcements, and Payments of Dividends

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen Perseroan merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana Perseroan berhak membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen juga dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif dengan mempertimbangkan laba, kondisi keuangan dan likuiditas yang dimiliki oleh Perseroan.

Besaran dividen yang akan dibagikan tergantung dari laba tahun berjalan yang dikurangi Cadangan wajib minimal 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Penetapan besaran dividen yang ditetapkan oleh Direksi harus telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika Perseroan mengalami kerugian pada saat berakhirnya tahun buku, maka dividen yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Adapun Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dividend Policy

The Company's dividend policy is in accordance with the Limited Liability Companies Act (UUPT), under which the Company is entitled to distribute interim dividends before the end of the Company's fiscal year, provided that such distribution is stipulated in the Company's Articles of Association. Dividend distributions are also made based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), and the Company may only distribute cash dividends if it has a positive retained earnings balance, taking into account the Company's profits, financial condition, and liquidity.

The amount of dividends to be distributed depends on the current year's profit, less the mandatory reserve of at least 20% of the issued and paid-in capital. The dividend amount determined by the Board of Directors must be approved by the Board of Commissioners. If the Company incurs a loss at the end of the fiscal year, the dividends that have been distributed must be returned by the shareholders to the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors shall be jointly and severally liable for such repayment if the interim dividends are not repaid by the shareholders.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Keputusan RUPST, Perseroan melaksanakan pengumuman dan pembagian dividen sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan para Pemegang Saham menyetujui penyisihan saldo laba yang tercantum pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Pada tahun 2025, Perseroan mengajukan pembayaran dividen sebesar Rp30 milliar sesuai RKAP 2025 kepada pemegang saham. Realisasi pembayaran dividen akan ditetapkan kemudian oleh pemegang saham mayoritas.

Announcement and Payment of Dividends

Based on the resolution of the AGMS, the Company shall announce and distribute dividends in accordance with the following provisions.

In accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders, the shareholders approved the allocation of retained earnings as stipulated in Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (Limited Liability Companies Law). In 2025, the Company proposed dividend payment of Rp30 billion to the shareholders, according to the Work and Budget Plan (RKAP). The actual dividend payment will be determined later by the majority shareholder.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan

Policy on Performance-Based Long-Term Compensation for Management and/or Employees

Sampai dengan tahun 2025, PLNSC tidak memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang ditetapkan dalam Program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP). Sehingga tidak terdapat informasi terkait dalam Laporan Tahunan ini.

As of 2025, PLNSC does not have a policy for providing performance-based long-term compensation to management and/or employees established under the Management and Employee Stock Option Program (MESOP). Therefore, there is no related information in this Annual Report.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering

Sampai dengan akhir tahun 2025, PT PLN Suku Cadang belum mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak terdapat informasi terkait dalam Laporan Terintegrasi ini.

As of the end of 2025, PT PLN Suku Cadang has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange, and therefore no related information is included in this Integrated Report.

Informasi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Material Information Involving Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates

PLNSC telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai bagian dari kebijakan akuntansi penting terkait hubungan afiliasi (pihak berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2025.

Tahun 2025, PLNSC tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
   c. Personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
2. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
   b. Satu Entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu Entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

PLNSC has disclosed all nature and details of transactions with related parties as part of its significant accounting policies regarding affiliate relationships (related parties), which can be found in the 2025 Consolidated Financial Statements.

In 2025, PLNSC had no material transactions involving conflicts of interest.

Transactions with Related Parties

Related parties are individuals or entities related to the reporting entity:

1. An individual or immediate family member is considered related to the Group if that individual:
   a. a. Has control or joint control over the Group;
   b. b. Exercises significant influence over the Group; or
   c. c. Is a key management personnel of the Group or the Group's parent entity.
2. An entity is related to the Group if it meets one of the following criteria:
   a. The entity and the Group are members of the same business group (meaning the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiaries are related to one another);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One Entity is a joint venture of a third party and the other Entity is an associate of that third party;
   e. e. The Entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity administering the plan, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;

f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka a);
g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci pada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. An entity controlled or jointly controlled by the person identified in subparagraph (a);

g. The person identified in subparagraph (1)(a) has significant influence over the entity or the entity's key management personnel (or the entity's parent);

h. h. The entity, or a member of the group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Significant transactions with related parties, whether conducted on the same terms and conditions as with third parties or not, are disclosed in the financial statements.

Nama Pihak Yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Adapun nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Names of Related Parties and Nature of Relations

All transactions with related parties have been conducted in accordance with mutually agreed-upon policies and terms. The names and nature of the related-party relationships are as follows.

Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	**Sifat Hubungan** Nature of Relationship	**Sifat Transaksi** Nature of Transaction
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunaannya Placement of cash and cash equivalents and restricted cash
Bank Rakyat Indoensia (BRI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan setara kas Placement of Cash and cash equivalents
Bank Negara Indonesia (BNI)	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control through the Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Kas dan setara kas Placement of Cash and cash equivalents
PLN Nusantara Power (PLN NP)	Pemegang Saham Shareholders	Piutang Usaha, utang lain-lain, penyertaan modal dan transaksi penjualan material Trade Receivables, other payables, capital participation and material sales transactions
PLN Indonesia Power (PLN IP)	Pemegang Saham Shareholders	Piutang Usaha, utang lain-lain, penyertaan modal dan transaksi penjualan material Trade Receivables, other payables, capital participation and material sales transactions
PLN	Pemegang Saham Utama Perseroan Major Shareholder of the Company	Piutang usaha dan transaksi penjualan material Trade receivables and material sales transactions
PT Nusantara Power Services (PNPS)	Entitas anak dari PLN NP Subsidiary of PLN NP	Piutang usaha dan transaksi penjualan material Trade receivables and material sales transactions
PT Haleyora Power	Entitas anak dari PLN A subsidiary of PLN	Piutang usaha dan transaksi penjualan material Trade receivables and material sales transactions

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2025, seluruh transaksi dilakukan Perseroan dengan pihak berelasi, atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Fairness and Rationale for Transactions

Transactions with related parties were conducted fairly in accordance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, all transactions conducted by the Company with related parties were based on the Company's business needs and were free from conflicts of interest.

Pemenuhan Peraturan Dan Ketentuan Terkait

Perseroan telah memenuhi peraturan dan ketentuan terkait tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; serta Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Compliance with Relevant Regulations and Provisions

The Company has complied with relevant regulations and provisions regarding Affiliated Party Transactions and Conflict of Interest Transactions, as well as Material Transactions and Changes in Business Activities, in accordance with applicable regulations.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Berikut jumlah keseluruhan atas transaksi pihak yang berelasi (selain manajemen kunci) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Realization of Related-Party Transactions

The following are the total amounts of related-party transactions (excluding key management) as of December 31, 2025, and 2024:

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents		
Bank Mandiri	**5.594**	16.258
Piutang Usaha Accounts Receivable		
PLN NP	**427.530**	140.991
PLN NPS	**337.103**	17.152
PLN IP	**48.338**	43.930
PLNNPC	**3.650**	-
PUSHARLIS	**866**	-
BAG	**178**	-
PLN	**-**	5.726
Haleyora	**-**	5.381
Jumlah Total	**817.665**	**213.180**
Utang Lain-lain Other Payables		
PLN NP	**892**	683
PLN IP	**58**	74
Jumlah Total	**950**	**757**

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from Shareholders		
PLN NP	**170.000**	-
Biaya masih harus dibayar Accrued Expenses		
PLN NP	**7.098**	-
Pendapatan Revenue		
PLN NP	**1.210.192**	1.118.097
PLN NPS	**425.345**	35.120
PLN IP	**183.155**	223.161
PLNNPC	**62.843**	65.355
PUSHARLIS	**43.188**	29.972
BAG	**3.650**	-
PLN	**1.186**	-
Haleyora	**-**	5.150
Jumlah Total	**1.929.559**	**1.476.855**
Beban keuangan Finance cost		
PLN NP	**7.098**	9.875

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan – ikatan akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

Seperti telah disampaikan pada bagian transaksi benturan kepentingan, Perseroan tidak memiliki kebijakan mengenai transaksi benturan kepentingan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh pejabat tertinggi di setiap level terkait dan dalam rapat Direksi untuk situasi benturan kepentingan yang terkait dengan Direksi. Transaksi material dengan pihak berelasi diputuskan dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati- hatian dan independen serta memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Policy on the Review Mechanism for Transactions and Compliance with Relevant Regulations and Provisions

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian financial accounting standards, which include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (DSAK-IAI).

As stated in the section on conflicts of interest, the Company does not have a policy regarding conflicts of interest, including transactions with related parties. Material transactions are decided by the highest-ranking officials at each relevant level and, in the case of conflicts of interest involving the Board of Directors, during Board of Directors meetings. Material transactions with related parties are decided by consistently adhering to the principles of prudence and independence, while complying with the regulations of the Financial Services Authority (OJK) and applicable laws and regulations.

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Throughout 2025, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties, nor were there any transactions involving conflicts of interest.

Transaksi Pihak Berelasi yang Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 224 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Pengungkapan ini telah dijelaskan terkait realisasi saldo dan transaksi dengan pihak berelasi di atas sejalan dengan informasi yang tertuang dalam Catatan No. 18 Laporan Keuangan audited terkait Informasi mengenai Pihak–Pihak Berelasi tahun buku 2024.

Related-Party Transactions that Generate Operating Revenue and Conducted on a Regular, Recurring, and/or Ongoing Basis

The Company has conducted transactions with certain related parties in accordance with PSAK No. 224 “Disclosure of Related Parties.” This disclosure explains the realization of balances and transactions with related parties as described above, in line with the information contained in Note No. 18 of the audited Financial Statements regarding Information on Related Parties for the fiscal year 2024.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan

Changes in Laws and Regulations That Significantly Affect the Company

Peraturan Perundang-undangan Regulation	Uraian Description	Dampak Impact
Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia BPS Regulation No. 7 of 2025 on the Standard Classification of Indonesian Economic Activities	Menetapkan KBLI 2025 sebagai standar nasional klasifikasi kegiatan usaha yang menggantikan KBLI 2020. Pembaruan dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan aktivitas ekonomi, harmonisasi dengan ISIC Revision 5, serta penyempurnaan kode dan ruang lingkup kegiatan usaha yang menjadi acuan dalam administrasi pemerintahan, statistik, dan penyelenggaraan perizinan berusaha. Establishes KBLI 2025 as the national standard for the classification of economic activities, replacing KBLI 2020. This update was conducted to reflect developments in economic activity, harmonize with ISIC Revision 5, and refine the codes and scope of business activities that serve as a reference for government administration, statistics, and the issuance of business licenses.	Perseroan perlu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian kode KBLI yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan data perizinan berusaha dengan KBLI 2025. Apabila terdapat perubahan klasifikasi, pemecahan, atau penambahan kode yang relevan dengan kegiatan usaha PT PLN Suku Cadang, Perseroan perlu melakukan penyesuaian administrasi dan perizinan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini regulasi tersebut belum memberikan dampak operasional yang material, namun memerlukan pemantauan dan penyesuaian apabila implementasi KBLI 2025 mengharuskan perubahan pada data legal Perseroan. The Company must evaluate the alignment of the KBLI codes listed in its Articles of Association and business licensing data with KBLI 2025. If there are changes in classification, subdivisions, or additions to codes relevant to the business activities of PT PLN Suku Cadang, the Company must make administrative and licensing adjustments to remain compliant with applicable regulations. Currently, these regulations have not had a material operational impact; however, monitoring and adjustments will be necessary if the implementation of KBLI 2025 requires changes to the Company’s legal records.

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan revisi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing -Kekurangan Ketertukaran"; dan
- PSAK No. 117: "Kontrak Asuransi"

Penerapan dari amendemen standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam; dan
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 119 dan Amendemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan".

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

The implementation of the following standards, amendments, and revisions effective on or after January 1, 2025, does not result in any changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the amounts reported in the current or prior financial statements:

- Amendment to PSAK No. 221: "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates—Exchange Deficits"; and
- PSAK No. 117: "Insurance Contracts"

The adoption of the following amendments to standards, effective as of January 1, 2026, does not result in any substantial changes to the Company's accounting policies or have a material effect on the amounts reported for the current or prior years:

- Amendments to PSAK No. 109, "Financial Instruments," and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosures," regarding the classification and measurement of financial instruments;
- Amendments to PSAK No. 109, "Financial Instruments," and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosures," regarding Contracts Referencing Natural Resources; and
- Revision to PSAK No. 338, "Business Combinations of Entities Under Common Control."

The new standards and amendments to previously issued standards, which are effective for fiscal years beginning on January 1, 2027, but for which early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK No. 119 and the Amendment to PSAK No. 119, "Non-Publicly Accountable Subsidiaries: Disclosures."

The following new standards are effective as of January 1, 2027. Retrospective application is required; therefore, comparative information for the fiscal year ended December 31, 2026, will be restated in accordance with these standards:

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements."

As of the date of these financial statements, the Company is assessing the potential impact of the adoption of new standards, amendments, and interpretations on the Company's financial statements.

Kontribusi Kepada Negara

Berdasarkan kinerja tahun 2025, pajak yang dibayarkan Perseroan kepada negara tercatat sebesar Rp99,71 miliar.

Contributions to the State

Based on performance in 2025, the Company's tax payments to the state totaled Rp99.71 billion.

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain I in million rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	Realisasi 31 Desember 2025 December 31, 2025 Realization	Realisasi 31 Desember 2024 December 31, 2024 Realization
Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 21 Corporate Income Tax Article 21	**3.798,57**	3.981,87
Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 21 Honor Corporate Income Tax (Article 21) – Honoraria	**333,59**	648,66
Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 23 Corporate Income Tax (Article 23)	**2.749,33**	4.152,22
Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 26 Corporate Income Tax (Article 26)	**-**	-
Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Corporate Income Tax (Article 4.2)	**535,81**	469,03
PPN Masukan Input Value Added Tax (Input VAT)	**133.080,56**	217.620,68
Total Pembayaran Pajak Total Tax Payments	**99.707,65**	**158.778,23**

Penilaian Kinerja Korporat

Corporate Performance Assessment

Sampai dengan berakhirnya Tahun Buku 2025, Perseroan telah melakukan self-assessment pencapaian Kontrak Kinerja yang pada Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Anak Perusahaan PLN Nusantara Power tahun buku 2025. Pencapaian kontrak kinerja Tahun 2025 (*Audited*) mendapatkan skor yakni 103,62 dengan rincian sebagai berikut:

As of the end of Fiscal Year 2025, the Company has conducted a self-assessment of its performance against the Performance Contract, in accordance with the Performance Contract Assessment Guidelines for PLN Nusantara Power Subsidiaries for Fiscal Year 2025. The Company's performance against the 2025 Performance Contract (Audited) received a score of 103.62, with the following breakdown:

No	Lima Prioritas BUMN Five Priorities of SOEs	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2025	Realisasi Tahun 2025 (Audited) 2025 Realization (Audited)			
					Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	NKO
A	**Nilai Ekonomi Sosial** Socio-Economic Value		**70**					
1	Pendapatan dari PLN Grup Revenue from PLN Group	Rp Miliar Rp Billion	8	**1.706,17**	1.706,17	1.929,56	110,00	8,80
2	Pendapatan di luar PLN Grup Revenue from outside of PLN Group	Rp Miliar Rp Billion	7	**104,51**	104,51	47,80	45,70	3,20

No	Lima Prioritas BUMN Five Priorities of SOEs	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2025	Realisasi Tahun 2025 (Audited) 2025 Realization (Audited)			
					Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	NKO
3	EBITDA	Rp Miliar Rp Billion	8	**137,29**	137,29	195,98	110,00	8,80
4	Collection Period	Hari Day	8	**55,00**	55,00	42,67	110,00	6,60
5	Sinergi antar Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi PNP (Income) Synergy between PNP Subsidiaries/Affiliated Companies (Income)	Rp Miliar Rp Billion	5	**151,00**	151,00	462,81	110,00	5,50
6	Sales Order PLN Group	Rp Miliar Rp Billion	7	**1.725,00**	1.725,00	1.967,20	110,00	7,70
7	Sales Order Non-PLN Group	Rp Miliar Rp Billion	7	**106,25**	106,25	106,28	100,03	7,00
8	Efisiensi Biaya Pembelian (Nilai Project > 500 juta)	Rp Miliar Rp Billion	5	**3,00**	3,00	9,25	11,00	5,50
9	Pendapatan dari Bisnis EBT	Rp Miliar Rp Billion	8	**115,00**	115,00	219,53	110,00	6,60
10	Kontrak Payung Mitra	Jumlah	6	**20,00**	20,00	22,00	110,00	6,60
11	Tingkat Penyelesaian Implementasi Stockist	5 tahap	5	**100,00**	100,00	110,00	110,00	5,50
B	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation		**12**					
1	Maturity Level Internal Proses Bisnis Anak Perusahaan Internal Maturity Level of Subsidiary's Business Processes	Level	4	**3,50**	3,50	3,86	110,00	4,40
2	Implementasi Digitalisasi Portal Customer Customer Portal Digitalization Implementation	%	4	**100,00**	100,00	101,00	101,00	4,04
3	Maturity Level Implementasi Aplikasi Acumatica	% proses	4	**2,00**	2,00	2,20	110,00	4,40
C	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership		**5**					
1	SLA Kontrak SLA Contract	Skor Score	5	**100,00**	100,00	98,32	98,32	4,92
D	**Pengembangan Investasi** Investment Development		**7**					
1	Pengendalian penggunaan Anggaran Investasi PNP sesuai RKAP 2025 (PP/PU) Controlling the use of the National Development Planning (PNP) Investment Budget in accordance with the 2025 Work Plan and Budget (PP/PU)	%	7	**95-100**	95-100	100,00	110,00	7,70

No	Lima Prioritas BUMN Five Priorities of SOEs	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2025	Realisasi Tahun 2025 (Audited) 2025 Realization (Audited)			
					Target Target	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement	NKO
E	**Pengembangan Talenta** Talent Development		**6**					
1	HCR – OCR & Produktivitas Pegawai	%	2	**2**	100,00	136,00	110,00	2,2
2	Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	%	2	**2**	100,00	100,00	110,00	2,20
3	Loss Time Injury Frequency Rate	%	2	**2**	100,00	0,00	110,00	2,20
F	Compliance							
1	Compliance	Maks -10	-	**-**	-	0,24	-	0.24
	Nilai Total I Total Score							**103,62**

Penilaian Kinerja Korporat diukur berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Nusantara Power nomor 006.K/DIR/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pedoman Penilaian Kontrak Kinerja Anak Perusahaan PT PLN Nusantara Power.

Corporate Performance Assessment is measured referring to PT PLN Nusantara Power Board of Directors Decree Number 006.K/DIR/2025 dated January 20, 2025 concerning Performance Contract Assessment Guideline for Subsidiaries of PT PLN Nusantara Power.

Keberlangsungan Usaha

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan BPI Danantara serta agenda transofrmasi bisnis PT PLN (Persero) untuk terus mendorong optimaisasi struktur bisnsi guna memperkuat daya saing global, Perseroan telah melakukan langkah-langkah persiapan Program *Streamlining* PLN Group secara bertahap sejak Juni 2026.

Merujuk pada Surat PT PLN (Persero) No. 28515/STH.01/02/F01000000/2026-R perihal Rencana Streamlining Entitas Bisnis Services PT PLN (Persero) Group, Perseroan telah membentuk *Tim Task Force Streamlining* PT PLNSC sesuai Keputusan Direksi PT PLNSC No. 010.K/020/DIR-PLNSC/2026 tentang Pembentukan Tim Task Force Streamlining PT PLNSC dan telah melakukan berbagai koordinasi, *Town Hall Meeting* dengan berbagai pihak terkait, melibatkan konsultan streamlining serta menyampaikan pengumuman di media massa terkait rencana pengambilalihan saham Perseroan oleh PT PLN Electricity Services.

Melalui langkah-langkah yang telah dilaksanakan secara cermat tersebut, Perseroan berupaya untuk menjaga kelangsungan usaha dengan terus memperkuat organisasi secara internal untuk tetap adaptif, efisien dan *agile* dalam mendukung dan memperkokoh posisi PLN sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing kelas dunia.

Information on Business Continuity

In line with the directives of the President of the Republic of Indonesia, BPI Danantara, and the business transformation agenda of PT PLN (Persero) to further optimize its business structure in order to strengthen global competitiveness, the Company has gradually undertaken preparatory measures for the PLN Group Streamlining Program since June 2026.

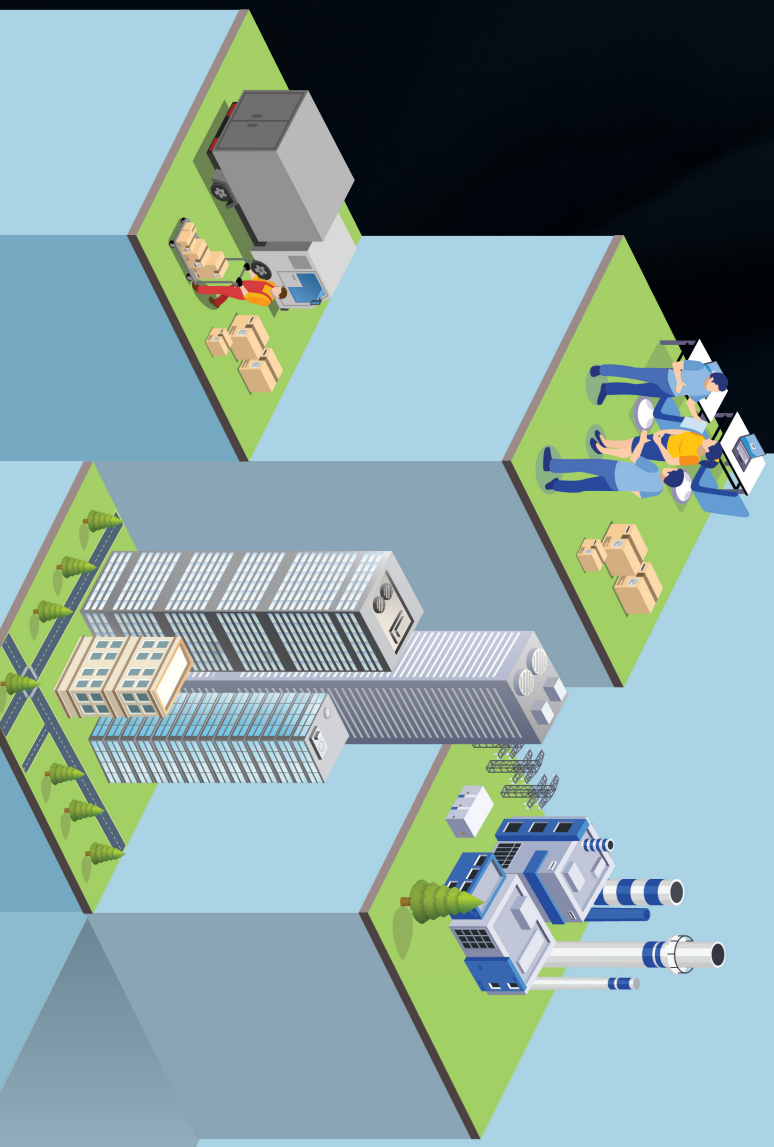
Referring to PT PLN (Persero) Letter No. 28515/STH.01/02/F01000000/2026-R concerning the Streamlining Plan for PT PLN (Persero) Group Services Business Entities, the Company established the PT PLNSC Streamlining Task Force pursuant to PT PLNSC Board of Directors' Decree No. 010.K/020/DIR-PLNSC/2026 concerning the Establishment of the PT PLNSC Streamlining Task Force. The Company has also carried out various coordination activities, conducted Town Hall Meetings with relevant stakeholders, engaged a streamlining consultant, and published announcements in the national mass media regarding the proposed acquisition of the Company's shares by PT PLN Electricity Services.

Through these carefully implemented measures, the Company seeks to maintain business continuity by continuously strengthening its internal organization to remain adaptive, efficient, and agile in supporting and reinforcing PLN's position as a driver of Indonesia's national economic growth with world-class competitiveness.




CORPORATE
GOVERNANCE





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

06

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan usaha, menciptakan nilai jangka panjang, serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan. GCG tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang konsisten, PLNSC berupaya memastikan setiap proses pengambilan keputusan dan aktivitas operasional dilaksanakan sesuai dengan standar etika dan praktik bisnis yang baik.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is the main foundation in maintaining business sustainability, creating long-term value, and strengthening the trust of stakeholders. GCG is not only viewed as a form of compliance with applicable laws and regulations, but also as a foundation for carrying out business activities in a professional, transparent, accountable, responsible, and highly principled manner. Through the consistent implementation of GCG principles, PLNSC strives to ensure that every decision-making process and operational activity is carried out in accordance with ethical standards and good business practices.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PLNSC terus memperkuat dan menyempurnakan implementasi tata kelola perusahaan secara berkelanjutan dengan mengacu pada perkembangan regulasi, kebutuhan bisnis, serta praktik terbaik yang berlaku. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan struktur dan mekanisme tata kelola, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, serta pengembangan budaya perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG. Dengan dukungan seluruh organ Perseroan dan insan perusahaan, implementasi GCG diharapkan mampu mendukung terciptanya kinerja yang sehat, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

In line with this commitment, PLNSC continues to strengthen and refine the implementation of corporate governance on an ongoing basis by referring to regulatory developments, business needs, and prevailing best practices. This commitment is realized through the strengthening of governance structures and mechanisms, the refinement of policies and procedures, and the development of a corporate culture that upholds GCG principles. With the support of all Company organs and personnel, the implementation of GCG is expected to support the creation of healthy performance, sustainable growth, and increased value for all stakeholders.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam seluruh aspek kegiatan usaha dan proses pengambilan keputusan. Implementasi tersebut tercermin melalui pelaksanaan fungsi dan peran organ Perseroan yang efektif, penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, penerapan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Perseroan juga terus mendorong terciptanya budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan etika bisnis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

Throughout 2025, the Company has consistently implemented GCG principles in all aspects of business activities and decision-making processes. This implementation is reflected through the effective performance of the functions and roles of the Company's organs, the strengthening of the internal control system and risk management, the implementation of compliance with applicable regulations, and the improvement of transparency and accountability in company management. The Company also continues to encourage the creation of a work culture that upholds integrity, professionalism, and business ethics as part of efforts to realize good and sustainable corporate governance.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basis for the Implementation of Corporate Governance

Komitmen untuk menerapkan GCG di seluruh lini Perseroan sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan yaitu menyelenggarakan usaha penunjang ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan telah melaksanakan praktik GCG sesuai dengan landasan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2004 (Pedomen Komite Audit KNKG 2004);
4. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2006 (Pedoman GCG KNKG 2006);
5. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2010 (Pedoman Etika KNKG 2010);
6. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Tahun 2012 (Pedoman Manajemen Risiko KNKG 2012);
7. PUGKI
8. Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, tahun 2005. (OECD SOE Guidelines 2005);
9. ISO/SNI 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
10. ISO/SNI 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan;
11. ISO/SNI 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. ISO/SNI 31000:2018 tentang Manajemen Risiko;
13. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
14. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

The commitment to implement GCG across all lines of the Company is in accordance with the Company's purpose of establishment, namely to conduct electricity support business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company.

To achieve the aforementioned aims and objectives, the Company has implemented GCG practices in accordance with the applicable regulatory basis, as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Guidelines for the Establishment of an Effective Audit Committee, issued by the National Committee on Governance Policy, 2004 (KNKG 2004 Audit Committee Guidelines);
4. General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia, issued by the National Committee on Governance Policy, 2006 (KNKG 2006 GCG Guidelines);
5. Corporate Business Ethics Guidelines, issued by the National Committee on Governance Policy, 2010 (KNKG 2010 Ethics Guidelines);
6. Guidelines for the Implementation of Governance-Based Risk Management, issued by the National Committee on Governance Policy, 2012 (KNKG 2012 Risk Management Guidelines);
7. PUGKI
8. Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises, 2005 (OECD SOE Guidelines 2005);
9. ISO/SNI 9001:2015 concerning the Quality Management System;
10. ISO/SNI 14001:2015 concerning the Environmental Management System;
11. ISO/SNI 45001:2018 concerning the Occupational Health and Safety Management System;
12. ISO/SNI 31000:2018 concerning Risk Management;
13. The Company's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS);
14. Company Regulations and Policies.

Selain berpedoman pada landasan peraturan yang berlaku, Perseroan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha, pengambilan keputusan, serta pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan bagi Perseroan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi
   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi Perusahaan. Perseroan mewujudkan prinsip transparansi melalui inisiatif pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan kepada *Stakeholders* dan informasi terkait Perseroan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan GCG *best practice*.
2. Akuntabilitas
   Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan dilaksanakan secara efektif. Penerapan akutanbilitas mendorong seluruh Organ Perusahaan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas serta kewenangan masingmasing sesuai peraturan perundangundangan.
3. Pertanggungjawaban
   Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan serta etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan Perusahaan. Pertanggungjawaban diwujudkan oleh Perusahaan dengan selalu berusaha menjadi warga Perusahaan yang baik (*Good Corporate Citizen*).
4. Kemandirian
   Perseroan melaksanakan prinsip kemandirian berupa pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip kemandirian diharapkan dapat memastikan seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan dapat dilaksanakan secara etis dan tanpa konflik kepentingan dalam bentuk apapun.

In addition to being guided by the applicable regulatory basis, the Company also implements GCG principles as a foundation for carrying out business activities, decision-making, and managing relationships with stakeholders. The implementation of these principles serves as a reference for the Company in realizing governance that is transparent, accountable, responsible, independent, and fair. The GCG principles implemented by the Company are as follows:

1. Transparency
   Openness in carrying out the decision-making process and disclosing material information relevant to the Company. The Company realizes the principle of transparency through initiatives to disclose financial and non-financial information to Stakeholders and other Company-related information in accordance with applicable laws and regulations and GCG best practices.
2. Accountability
   Accountability is defined as the clarity of the functions, implementation, and accountability of the Company's Organs so that the management of the Company is carried out effectively. The implementation of accountability encourages all Company Organs to be aware of their respective rights and obligations, duties, and authorities in accordance with laws and regulations.
3. Responsibility
   Compliance with applicable laws and regulations and the principles of corporate governance as well as sound business ethics in the management of the Company. Responsibility is realized by the Company through its continuous effort to become a Good Corporate Citizen.
4. Independence
   The Company implements the principle of independence in the form of managing the Company independently, free from conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations. Management of the Company in accordance with the principle of independence is expected to ensure that all of the Company's business and operational activities can be carried out ethically and without any form of conflict of interest.

5. Kewajaran
   Prinsip kewajaran dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak Stakeholder sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga menjamin bahwa setiap Pemegang Saham dan Stakeholders mendapatkan perlakuan yang wajar serta dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fairness
   The principle of fairness can be defined as an effort to fulfill the rights of Stakeholders in accordance with applicable agreements and laws and regulations. The Company also ensures that every Shareholder and Stakeholder receives fair treatment and can exercise their rights in accordance with prevailing laws and regulations.

Roadmap Penerapan GCG

GCG Implementation Roadmap

Sebagai wujud komitmen dari pelaksanaan GCG Perseroan terus meningkatkan dan menyempurnakan praktik GCG, sejalan dengan perkembangan standar terbaik tata kelola perusahaan. *Roadmap* GCG Perusahaan 2017 - 2032 merupakan *grand strategy* dan *milestone* implementasi penerapan prinsip-prinsip GCG sampai tahun 2022, dalam rangka menuju tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan merupakan fondasi penting dalam mendukung pencapaian kinerja yang unggul, menjaga keberlangsungan usaha, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan senantiasa memperkuat dan menyempurnakan berbagai kebijakan serta mekanisme pendukung GCG guna menumbuhkan budaya tata kelola yang baik di seluruh tingkat organisasi. Melalui upaya tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memastikan setiap kegiatan usaha dijalankan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

PLNSC telah menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, antara lain:

As a form of commitment to the implementation of GCG, the Company continues to improve and refine GCG practices, in line with the development of the best standards of corporate governance. The Company's GCG Roadmap 2017-2032 is the grand strategy and milestone for the implementation of GCG principles up to 2022, in order to move toward sustainable corporate governance.

The Company believes that the consistent and sustainable implementation of good corporate governance is an important foundation in supporting the achievement of excellent performance, maintaining business continuity, and creating long-term value for shareholders and all stakeholders. To that end, the Company continuously strengthens and refines various policies and supporting mechanisms for GCG in order to foster a good governance culture at all levels of the organization. Through these efforts, the Company is committed to ensuring that every business activity is carried out transparently, accountably, responsibly, and in line with the principles of sustainability.

PLNSC has formulated and implemented various policies in line with the principles of corporate governance to improve the quality of governance implementation on an ongoing basis, including:

Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	Keterangan Description
Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(GCG Code)* Corporate Governance Guidelines (GCG Code)	Implementasi tata kelola perusahaan yang efektif dan berlanjut menjadi dasar penting PT PLN Suku Cadang untuk memastikan pencapaian kinerja optimal, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan secara berkelanjut dalam jangka panjang. Kebijakan GCG di lingkungan PLN Suku Cadang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dekom 001.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. The implementation of effective and sustainable corporate governance is an important basis for PT PLN Suku Cadang to ensure the achievement of optimal performance, as well as increasing added value for shareholders and various interested parties in a sustainable manner in the long term. The GCG policy within PLN Suku Cadang is determined through the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 001.K/DK-PLNSC/2020 concerning Guidelines for Good Corporate Governance.
Pedoman Etika Perusahaan *(Code of Conduct*) Company Code of Conduct (Code of Conduct)	Pedoman Perilaku PT PLN Suku Cadang ditetapkan sebagai standar etika dan perilaku seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pedoman ini wajib disosialisasikan dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas sesuai dengan budaya perusahaan. Kebijakan Pedoman Perilaku di lingkungan PLN Suku Cadang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dekom 002.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct).* Code of Conduct of PT PLN Suku Cadang is established as a standard of ethics and behavior for all Company personnel in carrying out their duties and functions. This guideline must be disseminated and is expected to create a work environment that is professional, responsible and has integrity in accordance with company culture. The Code of Conduct policy within PLN Suku Cadang is established through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 002.K/DK-PLNSC/2020 concerning Code of Conduct.
Pedoman Kerja Direksi dan Komisaris *(Board Manual)* Board of Directors and Board of Commissioners Board Manual (Board Manual)	*Board Manual* merupakan seperangkat panduan dan pedoman yang digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arahan yang jelas tentang peran, fungsi, dan kewajiban masing-masing entitas dalam struktur perusahaan. Board Manual Diharapkan menjadi kebijakan induk bagi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) serta meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan Pemegang Saham secara berkelanjutan. Kebijakan *Board Manual* di lingkungan PLN Suku Cadang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dekom 003.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris *(Board Manual)*. Board Manual is a set of guidelines and guidelines used to explain the responsibilities of members of the company's Board of Directors and Board of Commissioners. This document is designed to provide clear direction about the roles, functions and obligations of each entity in the company structure. The Board Manual is expected to become the main policy for implementing Good Corporate Governance (GCG) and increasing added value for the Company and Shareholders on an ongoing basis. The Board Manual policy in the PLN Spare Parts environment is determined through a Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 003.K/DK-PLNSC/2020 concerning Work Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners (Board manual).
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Policy	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dibuat untuk mencegah dan mengendalikan penerimaan atau pemberian hadiah, suap, atau bentuk insentif lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas keputusan dalam perusahaan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan bertindak dengan integritas tinggi, menjaga etika bisnis, dan meminimalkan risiko konflik kepentingan. Kebijakan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PLN Suku Cadang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi 019.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dekom 006.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Gratification Control Policy was created to prevent and control the acceptance or giving of gifts, bribes, or other forms of incentives that could affect the objectivity and integrity of decisions within the company. The main objective of this policy is to ensure that all parties involved in company operations act with high integrity, maintain business ethics, and minimize the risk of conflicts of interest. The Gratification Reporting and Controlling Policy in the PLN Spare Parts environment is established through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 019.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Dekom Number 006.K/DK-PLNSC/2020 concerning Reporting and Controlling Gratification in the Environment PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Kebijakan dan Pedoman Policies and Guidelines	**Keterangan** Description
Kebijakan Benturan Kepentingan Conflict of Interest Policy	Kebijakan Benturan Kepentingan adalah pedoman internal yang ditetapkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat muncul dalam lingkungan kerja. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan integritas seluruh Insan Perusahaan dan untuk menciptakan kondisi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mencegah terjadinya kerugian Perusahaan. Pedoman Benturan Kepentingan diatur dalam Surat Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi SK No. 003.K/DEKOM-CDB/2020 dan SK No. 064.K/CDB/VI/2020. Conflict of Interest Policy is an internal guideline established by the company to identify, manage and prevent potential conflicts of interest that may arise in the work environment. This policy is designed to improve the integrity of all Company Personnel and to create conditions that are free from corruption, collusion and nepotism in order to prevent losses to the Company. Guidelines for Conflicts of Interest are regulated in a joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors Decree No. 003.K/DEKOM-CDB/2020 and Decree No. 064.K/CDB/VI/2020.
Kebijakan Whistle Blowing System Whistleblowing System Policy	Kebijakan *Whistleblowing System* (Sistem Pelaporan Pelanggaran) adalah pedoman atau panduan teknis bagi internal Perusahaan dalam menangani adanya pelaporan pelanggaran seperti penyimpanan kode etik, hukum, standar prosedur operasional dan kebijakan manajemen di lingkungan Perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Kebijakan WBS di lingkungan PLN Suku Cadang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor Direksi 005.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor Dekom 005.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* di Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Whistleblowing System Policy (Violation Reporting System) is a guideline or technical guide for the Company's internal affairs in handling violations reporting such as maintaining codes of ethics, laws, standard operational procedures and management policies within the Company from both internal and external parties to the Company. The WBS policy within PLN Spare Parts is determined through a Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 005.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 005.K/DK-PLNSC/2020 concerning Guidelines for the Whistleblowing System in Environment of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.
Kebijakan Transparansi Informasi Publik Public Information Transparency Policy	Kebijakan Transparansi Informasi Publik merupakan bagian dari upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dengan tujuan untuk mengatur klasifikasi, pengungkapan, dan pengamanan informasi, data, dan dokumen agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Transparansi disini mempunyai artian keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan, Para Pemegang Saham, Investor, Institusi, Kreditur, serta seluruh Para Pemangku Kepentingan. Kebijakan ini diatur dalam SK No. 031.K/CDB/XI/2015 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PT PLN Suku Cadang. Public Information Transparency Policy is part of efforts to implement Good Corporate Governance (GCG) with the aim of regulating the classification, disclosure and security of information, data and documents so that they comply with GCG principles. Transparency here means openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information regarding the Company, Shareholders, Investors, Institutions, Creditors and all Stakeholders. This policy is regulated in Decree No. 031.K/CDB/XI/2015 concerning Services, Disclosure and Openness of Public Information within PT PLN Suku Cadang.
Kebijakan PLNSC Bersih Clean PLNSC Policy	Kebijakan PLNSC Bersih ditetapkan sebagai Pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang tangguh, unggul, bermartabat, dan memenuhi prinsip-prinsip GCG serta meningkatkan budaya perusahaan yang sehat. Pedoman PLN Suku Cadang bersih diatur dalam Keputusan Direksi No. 059.K/CDB/IX/2019. PLNSC Bersih policy is established as a guideline for the Board of Commissioners, Directors, Employees and other stakeholders in the company environment to create a company that is strong, superior, dignified and fulfills GCG principles and promotes a healthy corporate culture. PLN's clean spare parts guidelines are regulated in Board of Directors' Decree No. 059.K/CDB/IX/2019.

Untuk menjaga efektivitas dan relevansi implementasinya, Perseroan secara berkesinambungan melakukan evaluasi dan pemutakhiran terhadap berbagai kebijakan dan pedoman perusahaan. Langkah ini dilakukan agar perangkat kebijakan yang dimiliki senantiasa selaras dengan perkembangan usaha, perubahan lingkungan bisnis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola yang berlaku.

Pencapaian *Roadmap* GCG

Perseroan telah menetapkan roadmap pengembangan tata kelola perusahaan yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu fase *Good Corporate Governance* (2017–2022), *Good Governed Company* (2023–2028), dan *Good Corporate Citizen* (2029–2034). Roadmap tersebut disusun sebagai arah strategis dalam memperkuat praktik tata kelola secara bertahap dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan bisnis serta meningkatnya ekspektasi para pemangku kepentingan.

Pada fase *Good Corporate Governance* (2017–2022), Perseroan berfokus pada penguatan fondasi tata kelola melalui pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan RUPS, serta penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di seluruh aktivitas usaha. Untuk mendukung implementasi tersebut, Perseroan menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, pedoman, dan mekanisme tata kelola yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan operasional secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui fase ini, Perseroan secara berkesinambungan melakukan perbaikan praktik bisnis guna memastikan terciptanya nilai tambah bagi pemegang saham serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

To maintain the effectiveness and relevance of its implementation, the Company continuously evaluates and updates its various company policies and guidelines. This step is taken so that the policy instruments it has remain aligned with business developments, changes in the business environment, and prevailing laws, regulations, and governance practices.

Achievement of the GCG Roadmap

The Company has established a corporate governance development roadmap consisting of three stages, namely the Good Corporate Governance phase (2017–2022), Good Governed Company (2023–2028), and Good Corporate Citizen (2029–2034). The roadmap was prepared as a strategic direction for strengthening governance practices gradually and sustainably in line with business development and increasing stakeholder expectations.

In the Good Corporate Governance phase (2017–2022), the Company focused on strengthening the foundation of governance through compliance with applicable laws and regulations, GMS directives, and the consistent implementation of GCG principles across all business activities. To support this implementation, the Company formulated and refined various governance policies, guidelines, and mechanisms that serve as a reference for carrying out operational activities effectively, transparently, and accountably. Through this phase, the Company continuously improved its business practices to ensure the creation of added value for shareholders and to support the sustainability of its business in the long term.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur tata kelola Perseroan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan tiga organ utama perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Dalam menjalankan tata kelolanya, Perseroan menerapkan sistem dua badan (*two-tier system*), yang memisahkan fungsi pengawasan dan fungsi pengurusan melalui Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan secara jelas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

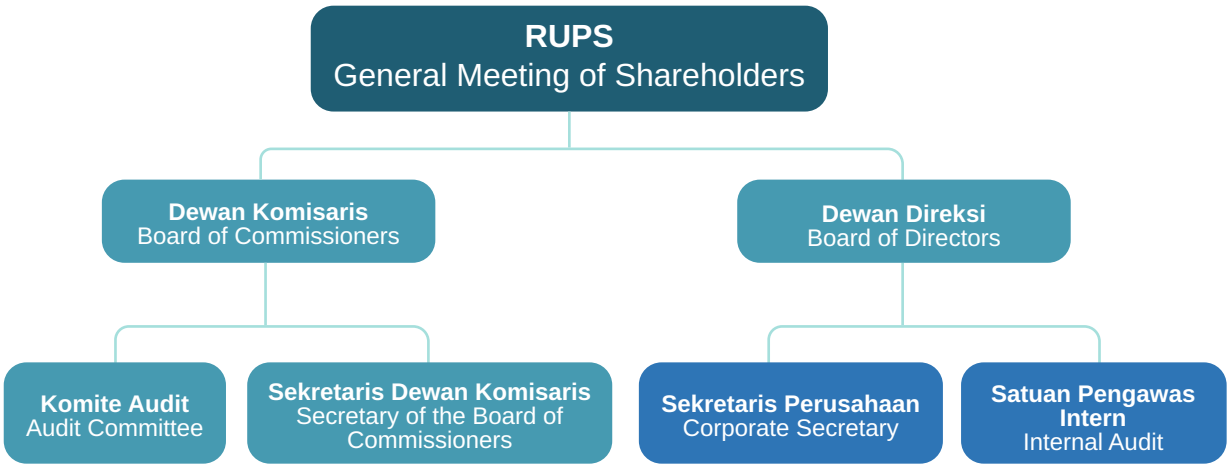
Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa bekerja secara sinergis dalam menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong pencapaian tujuan strategis Perseroan. Keselarasan pandangan terhadap visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta arah pengembangan bisnis menjadi landasan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola, Perseroan telah membentuk berbagai perangkat pendukung di bawah masing-masing organ perusahaan. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sementara itu, Direksi didukung oleh fungsi-fungsi yang berperan dalam penguatan implementasi GCG, yaitu Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern. Struktur tata kelola Perseroan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 14.K/020/DIRPLNSC/2020 dan Nomor 001.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagaimana tergambar pada bagan berikut.

The Company's governance structure refers to Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which establishes three main organs of the company, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In carrying out its governance, the Company implements a two-tier system, which separates the oversight function and the management function through the Board of Commissioners and the Board of Directors. Each organ has clearly defined duties, authorities, and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Despite having different functions, the Board of Commissioners and the Board of Directors always work synergistically in maintaining business continuity and driving the achievement of the Company's strategic objectives. Alignment of views on the company's vision, mission, values, and business development direction is an important foundation in supporting effective decision-making and the creation of sustainable value for stakeholders.

To support the effective implementation of the governance function, the Company has established various supporting instruments under each company organ. The Board of Commissioners is supported by the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners in carrying out its oversight function. Meanwhile, the Board of Directors is supported by functions that play a role in strengthening GCG implementation, namely the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. The Company's governance structure was established based on the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Number 14.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 001.K/DK-PLNSC/2020 concerning Guidelines for Good Corporate Governance, as illustrated in the following chart.



Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten sebagai bagian integral dari pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Implementasi GCG tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga untuk membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat penerapan GCG melalui optimalisasi fungsi organ perusahaan, penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur perusahaan. Berbagai inisiatif tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dijalankan secara efektif, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi GCG guna mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan bisnis, regulasi, serta praktik tata kelola terbaik yang berlaku. Dengan penerapan GCG yang berkesinambungan, Perseroan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

The Company consistently implements GCG principles as an integral part of business management and decision-making at all levels of the organization. The implementation of GCG is not only aimed at ensuring compliance with applicable laws and regulations, but also at building a corporate culture that upholds integrity, professionalism, transparency, and accountability in every business activity.

Throughout 2025, the Company continued to strengthen GCG implementation through the optimization of the functions of the Company's organs, the strengthening of the internal control system and risk management, increased compliance with regulations, and the refinement of company policies and procedures. These various initiatives were carried out to ensure that all operational activities are carried out effectively, responsibly, and in line with the Company's strategic objectives and the interests of stakeholders.

As part of continuous improvement efforts, the Company also periodically evaluates the effectiveness of GCG implementation to identify areas that need improvement and to ensure alignment with business developments, regulations, and applicable best governance practices. Through the sustainable implementation of GCG, the Company is committed to maintaining business sustainability, increasing the company's competitiveness, and creating sustainable added value for shareholders and all stakeholders.

Sosialisasi GCG

Perseroan memandang bahwa keberhasilan implementasi GCG tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan dan perangkat tata kelola, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan komitmen seluruh insan perusahaan dalam menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan program sosialisasi GCG sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola ke dalam budaya kerja dan proses bisnis perusahaan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada seluruh jenjang organisasi melalui melalui forum formal maupun media informasi lain. Sosialisasi secara formal (tatap muka) dilakukan dalam kegiatan Induksi Karyawan baik untuk karyawan baru maupun bagi karyawan lama sebagai *refreshment*. Sedangkan sosialisasi melalui media informasi lain dilakukan dengan cara mengirimkan dokumen mengenai pedoman GCG ter-*update* pada *website* PLNSC.

GCG Socialization

The Company views that the success of GCG implementation is determined not only by the availability of governance policies and instruments, but also by the level of understanding and commitment of all company personnel in implementing them consistently. Therefore, the Company continuously carries out a GCG socialization program as an effort to increase the understanding, awareness, and internalization of governance principles into the company's work culture and business processes.

Socialization activities are carried out at all levels of the organization through formal forums as well as other information media. Formal (face-to-face) socialization is carried out during Employee Induction activities, both for new employees and for existing employees as a refresher. Meanwhile, socialization through other information media is carried out by sending updated documents on GCG guidelines on the PLNSC website.

Penilaian GCG

Pada tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan pemetaan atas implementasi berdasarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dengan rincian sebagai berikut:

GCG Assessment

In 2025, the Company has carried out mapping for the implementation based on the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) with the details as follows:

Prinsip Principles	**Sub Prinsip** Sub Principles	**Rekomendasi** Recommendation	**Status**		**Ketagori** Category	
			APPLY	**EXPLAIN**	**Saran** Advise	**N/A**
Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners	7	31	12	19	15	4
Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	2	11	1	10	5	5
Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners	3	5	4	1	1	0
Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Conduct	3	4	33	1	1	0
Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	4	6	4	2	2	0
Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	3	9	3	6	5	1

Prinsip Principles	Sub Prinsip Sub Principles	Rekomendasi Recommendation	Status		Ketagori Category	
			APPLY	EXPLAIN	Saran Advise	N/A
Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham Protection of Shareholders' Rights	3	11	0	11	8	3
Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Respect for Stakeholders	3	4	0	4	4	0
JUMLAH Total	**28**	**81**	**27**	**54**	**41**	**13**

Berdasarkan pemetaan implementasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun Buku 2025, Perseroan telah menerapkan 8 Prinsip dan 81 Rekomendasi. Dari hasil pemetaan tersebut, sebanyak 27 Rekomendasi berstatus *Apply* dan 54 Rekomendasi berstatus *Explain*. Dari 54 Rekomendasi yang berstatus *Explain*, sebanyak 41 Rekomendasi disertai saran sebagai *area of improvement*, sedangkan 13 Rekomendasi tidak diberikan saran karena dinilai tidak relevan (*Not Applicable*). Hasil pemetaan ini menjadi acuan bagi Perseroan dalam melakukan penyempurnaan penerapan tata kelola secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia.

Based on the mapping of the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) for the Fiscal Year 2025, the Company has implemented 8 Principles and 81 Recommendation. According to results of the mapping, 27 recommendations achieved Apply status and 54 Recommendations achieved Explain status. From 54 Recommendations with Explain status, 41 Recommendations were equipped with suggestions as the areas of improvement, while 13 Recommendations were not provided with suggestions as considered irrelevant (Not Applicable). Results of this mapping are applied as a reference for the Company in taking improvement measures to the sustainable governance practice in accordance with the principles of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance.

Tindak Lanjut Hasil *Assessment* GCG

Sebagai tindak lanjut atas hasil *assessment* GCG, Perseroan terus memperkuat implementasi tata kelola perusahaan melalui penyempurnaan berbagai perangkat, kebijakan, dan mekanisme pendukung yang relevan dengan perkembangan bisnis serta kebutuhan organisasi. Komitmen tersebut diwujudkan antara lain melalui pemutakhiran Pedoman Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2025 sebagai acuan utama dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh lingkungan Perseroan.

Selain itu, Perseroan melakukan penguatan infrastruktur tata kelola melalui penyusunan dan penyempurnaan sejumlah kebijakan strategis, meliputi:

a. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris;
b. Pedoman Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
d. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
e. Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan

Follow-up on GCG Assessment Results

As a follow-up to the GCG assessment results, the Company continues to strengthen the implementation of corporate governance through the refinement of various instruments, policies, and supporting mechanisms relevant to business developments and organizational needs. This commitment is realized, among others, through the updating of the Corporate Governance Guidelines in 2025 as the main reference for the implementation of GCG principles throughout the Company.

In addition, the Company strengthened its governance infrastructure through the preparation and refinement of a number of strategic policies, including:

a. Guidelines for the Board of Directors and Board of Commissioners;
b. Guidelines for the Management of Violation Reporting (Whistleblowing System);
c. Gratification Control Guidelines;
d. Guidelines for the Procurement of Goods and Services;
e. Corporate Social Responsibility (CSR) Policy; and

f. Kebijakan pendukung lainnya yang menunjang penerapan GCG.

Penyempurnaan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Perseroan juga terus memperkuat praktik tata kelola pada tingkat organ perusahaan. Pemenuhan hak-hak Pemegang Saham senantiasa menjadi perhatian utama melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi perusahaan serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan strategis. Di sisi lain, Dewan Komisaris beserta perangkat pendukungnya secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Kompetensi dan pengalaman yang dimiliki anggota Dewan Komisaris turut memberikan nilai tambah melalui pemberian arahan dan masukan strategis kepada manajemen.

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, Direksi terus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan GCG melalui penguatan budaya integritas, etika bisnis, serta penerapan proses bisnis yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut tercermin dalam terciptanya *tone at the top* yang mendukung implementasi tata kelola secara konsisten di seluruh tingkatan organisasi. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan berbagai sarana komunikasi dan publikasi perusahaan, termasuk portal internal, website perusahaan, media publikasi, serta penyusunan Laporan Tahunan yang memenuhi ketentuan dan standar pelaporan yang berlaku.

Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa rekomendasi hasil *assessment* GCG tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan budaya perusahaan guna mendukung terciptanya tata kelola yang semakin efektif, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

f. Other supporting policies that support the implementation of GCG.

The refinement of these policies aims to improve the effectiveness of governance implementation while ensuring that all company activities are carried out in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Company also continues to strengthen governance practices at the level of the company's organs. The fulfillment of Shareholders' rights remains a top priority through the provision of accurate and timely information regarding the condition of the company and the conduct of the General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for strategic decision-making. On the other hand, the Board of Commissioners and its supporting instruments actively carry out the oversight function of company management to ensure that business activities run effectively, efficiently, and in accordance with the interests of stakeholders. The competence and experience of the members of the Board of Commissioners also provide added value through the provision of strategic direction and input to management.

As the organ responsible for the management of the company, the Board of Directors continues to demonstrate a strong commitment to the implementation of GCG through strengthening a culture of integrity, business ethics, and the implementation of transparent and accountable business processes. This commitment is reflected in the creation of a tone at the top that supports the consistent implementation of governance at all levels of the organization. In addition, the Company continues to improve information disclosure by providing various means of company communication and publication, including internal portals, the company website, publication media, and the preparation of an Annual Report that meets applicable reporting requirements and standards.

Through these various improvement measures, the Company strives to ensure that the recommendations resulting from the GCG assessment are not only followed up administratively, but also integrated into business processes and company culture in order to support the creation of governance that is increasingly effective, sustainable, and adds value for all stakeholders.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang memegang kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS juga menjadi forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham. Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Corporate Governance Code*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 001.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, RUPS memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; serta
4. Mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.

Mengacu pada *Corporate Governance Code* tersebut, RUPS juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; serta
4. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company organ holding the highest authority in strategic decision-making in accordance with the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The GMS also serves as the forum for the Board of Commissioners and the Board of Directors to submit reports and be accountable for the performance of their duties and the Company's management performance to the Shareholders. In accordance with the Corporate Governance Code of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang stipulated through the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 014.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 001.K/DK-PLNSC/2020 regarding the Good Corporate Governance Guidelines of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, the GMS has authority including the following:

1. Appointing and dismissing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Making decisions necessary to safeguard the Company's business interests in the long term and short term in accordance with prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association;
3. Approving the annual report, including the ratification of the financial statements as well as the supervisory duties of the Board of Commissioners/Board of Supervisors in accordance with prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association; and
4. Making decisions outside the GMS, provided that all shareholders with voting rights approve in writing by signing the relevant resolution.

Referring to the Corporate Governance Code, the GMS also has the following obligations:

1. To comply with the provisions of the Articles of Association and prevailing laws and regulations;
2. To refrain from carrying out the supervisory and management activities of the Company that are carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Not to utilize the Company for personal, family, Company, or business group interests in a manner and spirit contrary to prevailing laws and regulations; and
4. To evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors through the GMS mechanism.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, PLNSC telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebagai berikut:

Implementation of GMS in 2025

Throughout 2025, PLNSC has conducted 2 (two) Annual GMS, as follows:

Jenis RUPS Type of GMS	Tanggal Date	Lokasi Venue
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 General Meeting of Shareholders on the Approval of the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP)	30 Januari 2025 January 30, 2025	The Dharmawangsa Hotel, Jakarta
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2024 General Meeting of Shareholders on the 2024 Annual Accountability Report	30 Juni 2025 June 30, 2025	PT PLN Nusantara Power UP Muara Karang

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2025

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tanggal 30 Januari 2025 dengan agenda sebagai berikut:

GMS on the Ratification of the 2025 RKAP

The General Meeting of Shareholders (GMS) on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) was held on January 30, 2025, with the following agenda:

Agenda dan Keputusan RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 GMS Agenda and Resolutions Regarding Ratification of the Company's 2025 Work Plan and Budget (RKAP)	
Agenda	**Keputusan** Resolutions
Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Approval and ratification of the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP)	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2025 The GMS decided to approve and ratified the Company's 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP)
Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2025. Approval and ratification of the 2025 Key Performance Indicator (KPI).	RUPS menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicator* Perseroan Tahun 2025 The GMS approved and ratified the Company's Key Performance Indicator for 2025

Realisasi RUPS LPT Tahun Buku 2024

RUPS Tahunan dengan agenda Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 dengan agenda sebagai berikut:

Realization of the 2024 Annual Accountability Report GMS

The Annual GMS with the agenda of Ratification of the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2024 was conducted on June 30, 2025, with the following agenda:

Agenda dan Keputusan RUPS Tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2024 Agenda and Resolutions of the GMS on the 2024 Annual Accountability Report	
Agenda	**Keputusan** Resolutions
Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2024. First Agenda: Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statements for Fiscal Year 2024, including the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024, as well as the full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) granted to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions carried out during Fiscal Year 2024.	• RUPS menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. • RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 sebagaimana tersebut dalam Surat No. 0016/REN.01 .01/PLNSC011000/2025 tanggal 30 Juni 2025. • RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan tindakan dalam bidang masingmasing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan No. No. 01147/2.1457/AU.1/05/1789-2/1NI/2025 tanggal 30 Juni 2025. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggungjawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan. • The GMS approved, accepted, and ratified the Annual Report on the Company's condition and performance for Fiscal Year 2024, comprising the Financial Statements, the Performance Evaluation Report, and the Compliance Report. • The GMS approved and accepted the Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024 as set out in Letter No. 0016/REN.01.01/PLNSC011000/2025 dated 30 June 2025. • The GMS granted full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out within their respective duties and responsibilities during Fiscal Year 2024, insofar as such actions are not contrary to prevailing laws and regulations and are reflected in the Financial Statements that have been audited by Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto and Partners under Report No. 01047/2.1457/AU.1/05/1789-2/1NI/2025 dated 30 June 2025. This ratification and release do not discharge the legal responsibility of the Board of Directors and/or Board of Commissioners should the disclosed Report later be proven to have violated applicable legal provisions and procedures and/or should any deviating action causing loss to the Company later be proven.
Agenda Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 Second Agenda: Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2024	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024. GMS authorized the Majority Shareholder to determine the use of the Company's net profit for Fiscal Year 2024.
Agenda Ketiga: Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2024 dan Remunerasi Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024 Third Agenda: Approval of the Fiscal Year 2024 Tantiem and Fiscal Year 2025 Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the Fiscal Year 2024 Employee Bonus	• RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2024 • RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan gaji bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. • The GMS authorized the Majority Shareholder to determine the tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the employee bonus, for Fiscal Year 2024. • The GMS authorized the Majority Shareholder to determine the salary of the Board of Directors and the honorarium of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025.
Agenda Keempat: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 Fourth Agenda: Appointment of the Public Accounting Firm for the Audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. The GMS authorized the Majority Shareholder to determine the appointment of the Public Accounting Firm to conduct the audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2025

RUPS Sirkuler

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan dengan Agenda sebagai berikut:

Circular GMS

The Circular General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors was conducted with the following Agenda:

Agenda dan Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi
Agenda and Resolutions of the Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors

Agenda	Keputusan Resolutions
Pemberhentian Anggota Direksi Dismissal of Members of the Board of Directors	Memberhentikan dengan segala hormat anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: • Andy Adam sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Enjiniring dan Layanan. • Bahtiar Wibisana sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan. To honorably dismiss the following members of the Company's Board of Directors: • Andy Adam as Acting Director of Engineering and Services. • Bahtiar Wibisana as Director of Business and Finance.
Pengangkatan Anggota Direksi Appointment of Members of the Board of Directors	Mengangkat dan menetapkan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: • Zeta Junisar Muda sebagai Pelaksana Tugas Direktur Enjiniring dan Layanan. • Andreas Arthur sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis dan Keuangan. • Appoint and designate members of the Company's Board of Directors as follows: • Zeta Junisar Muda as Acting Director of Engineering and Services. • Andreas Arthur as Acting Director of Business and Finance.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan rincian sebagai berikut:

Implementation of GMS in 2024

In 2024, the Company conducted 2 (two) General Meetings of Shareholders (GMS), with details as follows:

Jenis RUPS Type of GMS	Tanggal Date	Lokasi Venue
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. General Meeting of Shareholders on the Approval of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP).	31 Januari 2024 January 31, 2024	The Tribata Darmawangsa, Jakarta
Rapat Umum Pemegang Saham tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2023. General Meeting of Shareholders on the 2023 Annual Accountability Report.	28 Juni 2024 June 28, 2024	The Tribata Darmawangsa, Jakarta

Seluruh kedua RUPS tersebut, dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, serta Pemegang Saham dan perwakilan yang telah dikuasakan.

Both GMS meetings were attended by the entire Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as well as the Shareholders and their duly authorized representatives.

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tanggal 31 Januari 2024 dengan agenda sebagai berikut:

GMS on the Ratification of the 2024 RKAP

General Meeting of Shareholders (GMS) on the Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) was held on January 31, 2024, with the following agenda:

Agenda dan Keputusan RUPS Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024
GMS Agenda and Resolutions Regarding Ratification of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP)

Agenda	Keputusan Resolutions
Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Approval and ratification of the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP).	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2024. The GMS decided to approve and ratified the Company's 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP).
Persetujuan dan pengesahan *Key Performance Indicator* (KPI) Tahun 2024. Approval and ratification of the 2024 Key Performance Indicator (KPI).	RUPS menyetujui dan mengesahkan *Key Performance Indicator* Perseroan Tahun 2024. The GMS approved and ratified the Company's Key Performance Indicator for 2024.

Realisasi RUPS LPT Tahun Buku 2023

RUPS Tahunan dengan agenda Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 dengan agenda sebagai berikut:

Realization of the 2023 Annual Accountability Report GMS

The Annual GMS with the agenda of Ratification of the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2023 was conducted on June 28, 2024, with the following agenda:

Agenda dan Keputusan RUPS Tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2023 Agenda and Resolutions of the GMS on the 2023 Annual Accountability Report	
Agenda	**Keputusan** Resolutions
Agenda Pertama: Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023. First Agenda: Approval and ratification of the Company's 2023 Financial Statements, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year, and granting full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2023.	• RUPS menyetujui dan menerima Laporan Keuangan Perseroan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 yang terdiri atas: Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. • RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. • RUPS Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporan No. 00259/2.1457/AU.1/05/1789-1/1/VI/2024. • RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan. • The GMS approved and accepted the Company's Financial Statements regarding the condition and performance of the Company during the 2023 fiscal year, which consist of the Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report. • The GMS approved and accepted the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2023 fiscal year. • The GMS ratified the Company's Financial Statements for the 2023 fiscal year, which include the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Comprehensive Income, Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of Changes in Equity along with their accompanying notes, which have been audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners, and received an "Unqualified Opinion" ("Fairly Presented in All Material Respects") as stated in Report No. 00259/2.1457/AU.1/05/1789-1/1/VI/2024. • The GMS granted full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in accordance with their respective duties and responsibilities during the 2023 fiscal year, insofar as such actions were not in violation of prevailing laws and regulations and are reflected in the Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners. Such ratification and discharge shall not exempt the Board of Directors and/or Board of Commissioners from legal responsibility should the disclosed reports be proven to violate applicable legal provisions or procedures and/or if any actions are later found to have caused loss or harm to the Company.
Agenda Kedua: Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023. Second Agenda: Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 dalam bentuk dividen, cadangan dan laba ditahan. The GMS granted authority to the majority shareholder to determine the allocation of the Company's net profit for the fiscal year 2023 in the form of dividends, reserves, and retained earnings.

Agenda dan Keputusan RUPS Tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan 2023 Agenda and Resolutions of the GMS on the 2023 Annual Accountability Report	
Agenda	**Keputusan** Resolutions
Agenda Ketiga: Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris Perseroan serta Bonus Karyawan Tahun 2023. Third Agenda: Approval of the Fiscal Year 2023 Tantiem and the 2024 Fiscal Year Remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as well as the 2023 Employee Bonus.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2023. The GMS granted authority to the majority Shareholder to determine the tantiem for the 2023 fiscal year and the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 fiscal year, as well as bonuses for employees for the Fiscal Year 2023.
Agenda Keempat: Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Fourth Agenda: Appointment of the Public Accounting Firm for the audit of the Company's 2023 Financial Statements.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan melakukan audit Laporan Keuangan perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024. The GMS granted authority to the majority Shareholder to appoint a Public Accounting Firm as the auditor to conduct the audit of the Company's Financial Statements, Perfor-mance Evaluation Report, and Compliance Report for the Fiscal Year 2024.

RUPS Sirkuler

Selain RUPS Tahunan, tahun 2024, Perseroan juga melaksanakan RUPS Sirkuler mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi. Adapun RUPS Sirkuler disampaikan pada tabel di bawah ini:

Circular GMS

In addition to the Annual GMS, in 2024 the Company also held a Circular GMS regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors. The Circular GMS is presented in the following table:

Agenda dan Keputusan RUPS Sirkuler tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Agenda and Resolutions of the Circular GMS on the Dismissal and Appointment of Board of Commissioners and Board of Directors Members	
Agenda	**Keputusan** Resolutions
Pemberhentian Anggota Direksi Dismissal of Members of the Board of Directors	Memberhentikan dengan segala hormat Thommi Haposan sebagai Direktur Utama dari segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut, serta akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada yang bersangkutan, atas segala Tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan/Perhitungan Tahunan yang disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Thommi Haposan is honorably dismissed from his position as President Director, along with all duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Company. The Company extends its gratitude for his contributions of time, effort, and ideas during his tenure. Full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) will be granted to him for all management actions undertaken, as reflected in the Annual Report/Annual Accounts approved by the General Meeting of Shareholders of the Company.
Pengangkatan Anggota Direksi Appointment of Members of the Board of Directors	Mengangkat dan menetapkan Thommi Haposan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama. Para Pemegang Saham dengan ini menegaskan Kembali Susunan Direksi Perseroan: a. Thommi Haposan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama; b. Andy Adam sebagai Pelaksana Tugas Direktur Enjiniring dan Layanan; c. Bahtiar Wibisana (sirkuler di akhir Desember) sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan. Thommi Haposan is appointed and designated as Acting President Director. The Shareholders hereby reaffirm the composition of the Company's Board of Directors as follows: a. Thommi Haposan as Acting President Director; b. Andy Adam as Acting Director of Engineering and Services; c. Bahtiar Wibisana, (effective by circular resolution at the end of December) as Director of Business and Finance.
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan Approval and Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJP)	RUPS Sirkuler menyetujui dan mengesahkan RJP Perseroan tahun 2024–2028 sebagaimana disampaikan Direksi kepada Pemegang Saham. The Circular GMS approved and ratified the Company's 2024–2028 Long-Term Plan (RJP) as submitted by the Board of Directors to the Shareholders.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas untuk mengawasi penerapan kebijakan yang disusun oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola dan menjalankan pengembangan usaha Perseroan, rencana kerja tahunan serta tugas-tugas yang digariskan dalam anggaran dasar demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

The Board of Commissioners is the Company organ responsible for supervising the implementation of policies formulated by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors in managing and running the Company's business development, annual work plans, and duties as outlined in the Articles of Association, for the benefit of the Company and the shareholders.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pengangkatan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, termasuk melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) guna memastikan calon anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, pengalaman, dan kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui proses pencalonan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, profesionalisme, dan kewajaran. Setiap calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan formal, persyaratan materiil, serta persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners are carried out by the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. The appointment process refers to Minister of SOE Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources, including through a fit and proper test mechanism to ensure that candidates for membership of the Board of Commissioners possess the integrity, competence, experience, and capability required by the Company.

The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out through a nomination process that adheres to prevailing provisions, with due regard to the application of Good Corporate Governance principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, professionalism, and fairness. Every candidate for membership of the Board of Commissioners must fulfill the formal requirements, material requirements, and other requirements as stipulated in prevailing laws and regulations and Company policy.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa Jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Sementara itu, pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Berakhirnya masa jabatan;

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of the Board of Commissioners is set at 3 (three) years and may be extended for 1 (one) further term, without prejudice to the right of the GMS to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time.

Meanwhile, the dismissal of a member of the Board of Commissioners is determined through the GMS. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if any of the following conditions are met:

1. Passed away;
2. End of term of office;

3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dismissal pursuant to the GMS resolution; and/or
4. No longer meeting the requirements to serve as a member of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir. Sampai 31 Desember 2025, susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS for a term commencing on the date of the GMS that appointed them until the close of the third Annual GMS following the date of their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time before the end of that term. In 2025, the composition of the Board of Commissioners was as follows:

Periode 1 Januari 2025 - 1 Desember 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Tri Tjahjonoputro	Komisaris Utama President Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Utama PT PLN Suku Cadang sejak 1 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as President Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of February 1, 2023, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
Muhammad Ramadhansyah	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024, pursuant to the Circular GMS Resolutions.
Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 15 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of August 15, 2022, pursuant to the Circular GMS Resolutions.

Periode 1 Desember 2025 - sekarang

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Suparyanto	Plt. Komisaris Utama Act. President Commissioner	Diangkat sebagai Plt. Komisaris Utama PT PLN Suku Cadang sejak 1 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Appointed as Act. President Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of December 1, 2025 pursuant to the Statement of Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions Deed No. 9 dated March 13, 2026
Hariyanto	Plt. Komisaris Act. Commissioner	Diangkat sebagai Plt. Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 1 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Appointed as Act. Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of December 1, 2025 pursuant to the Statement of Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions Deed No. 9 dated March 13, 2026
Abdan Hanif Satria Budiman	Plt. Komisaris Act. Commissione	Diangkat sebagai Plt. Komisaris PT PLN Suku Cadang sejak 1 Desember 2025 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No. 09 tanggal 13 Maret 2026. Appointed as Act. Commissioner of PT PLN Suku Cadang as of December 1, 2025 pursuant to the Statement of Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions Deed No. 9 dated March 13, 2026

Komisaris Independen

Penetapan Komisaris Independen mengacu pada Permen BUMN 2/2023 Pasal 15 Ayat (3) dimana Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan hubungan keluarga dengan saham, anggota dan/atau Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dengan posisinya yang netral, Komisaris Independen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh manajemen mencerminkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan senantiasa sejalan dengan kepentingan terbaik Perusahaan serta para pemangku kepentingan.

Syarat anggota Komisaris Independen sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/ DIR- PLNSC/2020 Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020 PT PLN Suku Cadang yakni:

1. RUPS menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi di bidang auditing, keuangan dan akuntansi;
2. Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selama tahun 2025, Perseroan belum memiliki Komisaris Independen namun syarat dan ketentuan pada seluruh Dewan Komisaris PLNSC bersifat independensi.

Independensi dan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

PLNSC senantiasa mendorong seluruh anggota Dewan Komisaris untuk menjaga integritas dan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara objektif. Dewan Komisaris diharapkan dapat menghindari segala bentuk benturan kepentingan,

Independent Commissioner

The appointment of an Independent Commissioner refers to Minister of SOE Regulation 2/2023 Article 15 Paragraph (3), whereby an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial relationship, management relationship, share ownership, or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the controlling shareholder, nor any relationship with the Company concerned, that could affect their ability to act independently. Owing to this neutral position, the Independent Commissioner is responsible for ensuring that every policy and strategic decision taken by management reflects the principles of Good Corporate Governance and remains aligned with the best interests of the Company and its stakeholders.

The requirements for members of the Board of Independent Commissioners, in accordance with the Board Manual under the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Number: 003.K/DK-PLNSC/2020 of PT PLN Suku Cadang, are as follows:

1. The GMS shall determine that Independent Commissioners comprise at least 20% of the members of the Board of Commissioners, as explicitly stated in the decision on their appointment. Independent Commissioners possess competence in auditing, finance, and accounting;
2. Members of the Board of Independent Commissioners have no financial relationship, management relationship, share ownership, and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the controlling shareholder, nor any relationship with the Company concerned, that could affect their ability to act independently.

Throughout 2025, the Company did not yet have an Independent Commissioner; however, the terms and conditions applicable to the entire Board of Commissioners of PLNSC are of an independent nature.

Independence and Conflicts of Interest of the Board of Commissioners

PLNSC continually encourages all members of the Board of Commissioners to maintain their integrity and independence in performing their supervisory and advisory functions objectively. The Board of Commissioners is expected to avoid all forms of conflict of interest and to

serta senantiasa bertindak demi kepentingan terbaik Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Sebagai wujud komitmen tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas setiap tahun, yang memuat pernyataan independensi dan komitmen bebas dari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

consistently act in the best interests of the Company and its stakeholders. As a manifestation of this commitment, every member of the Board of Commissioners is required to sign an annual Integrity Pact, which contains a statement of independence and a commitment to being free of conflicts of interest in carrying out their duties and responsibilities.

Berikut status independensi Dewan Komisaris tahun 2025:

The independence status of the Board of Commissioners in 2025 is as follows:

Kriteria Criteria	**Anggota Dewan Komisaris** Member of the Board of Commissioners		
	Tri Tjahjonoputro	**Muhammad Ramadhansyah**	**Sapto Harjono Wahjoe Sedjati**
Bukan Anggota Manajemen PT PLN Suku Cadang. Not a member of the management of PT PLN Suku Cadang.	√	√	√
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Independent from business or other relationships that could affect decision-making.	√	√	√
Bukan Pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. Not an employee, nor previously served as an executive, of the Company or its affiliated entities for at least three (3) years prior to becoming a member of the Board of Commissioners.	√	√	√
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. Not a major supplier or customer of the Company or its affiliates, nor an employee of, or directly or indirectly associated with, a major supplier or customer.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan Perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. Has no contractual relationship with the Company or its affiliates in the capacity of a Director.	√	√	√

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual* sebagai pedoman kerja yang telah disahkan oleh Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 016.K/020/ DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 013.K/DKPLNSC/2020 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Penjelasan mengenai Dewan Komisaris yang tercantum dalam *Board Manual*, antara lain:

1. Persyaratan dan Nominasi Dewan Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris

Work Guidelines of the Board of Commissioners

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners refers to the Board Manual as the work guideline ratified under the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 013.K/DK-PLNSC/2020 concerning the Work Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Matters concerning the Board of Commissioners set out in the Board Manual include, among others:

1. Requirements and Nomination of the Board of Commissioners.
2. Composition of the Board of Commissioners.

3. Anggota Dewan Komisaris Independen
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris.
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
6. Larangan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
7. Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris.
8. Kewenangan dan Kewajiban Dewan Komisaris.
9. Pelaksanaan Kewajiban Dewan Komisaris.
10. Rapat Dewan Komisaris.
11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris.
12. Remunerasi Dewan Komisaris.
13. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi, guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan keputusan RUPS, Anggaran Dasar Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat, arahan, dan pertimbangan strategis kepada Direksi terkait kebijakan dan pengelolaan Perseroan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan antara lain:

1. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP;
4. Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris kepada RUPS untuk disetujui;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

3. Members of the Independent Board of Commissioners.
4. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners.
5. Term of Office of Members of the Board of Commissioners.
6. Prohibition on Concurrent Positions for Members of the Board of Commissioners.
7. Duties and Functions of the Board of Commissioners.
8. Authority and Obligations of the Board of Commissioners.
9. Discharge of Obligations of the Board of Commissioners.
10. 1Board of Commissioners Meeting.
11. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners.
12. Remuneration of the Board of Commissioners.
13. Supporting Organs of the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the principal duty and responsibility of supervising the policies and management of the Company carried out by the Board of Directors, to ensure that all business activities are conducted in accordance with GMS resolutions, the Company's Articles of Association, and prevailing laws and regulations. In addition to performing its supervisory function, the Board of Commissioners also provides advice, direction, and strategic considerations to the Board of Directors regarding the Company's policies and management, in order to support the achievement of the Company's objectives and the interests of its stakeholders.

The duties and responsibilities of the Company's Board of Commissioners include, among others:

1. Supervising and advising the Board of Directors in the management of the Company;
2. Examining, reviewing, and signing the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. Preparing the Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget, which forms an integral part of the RKAP;
4. Proposing the Key Performance Indicators of the Board of Commissioners to the GMS for approval;
5. Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP of the Company, including the reasons for the Board of Commissioners signing the RJPP and RKAP;

6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
8. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
9. Mengusulkan/mengajukan calon auditor eksternal kepada RUPS, serta memastikan efektivitas pelaksanaan audit eksternal.
10. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
11. Memastikan laporan tahunan Perseroan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan;
12. Menilai, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi serta melaporkannya kepada Pemegang Saham;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
15. dan tugas-tugas pengawasan serta pemberian nasihat lainnya sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan UU PT.

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan, jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun).
2. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan badan usaha/pihak lain dengan ketentuan transaksi, pekerjaan, kerja sama, kontrak atau kegiatan tersebut nilai per transaksi sebagaimana diatur dalam Keputusan RUPS.

6. Monitoring developments in the Company's activities and providing opinions and suggestions to the GMS on any matters considered important to the management of the Company;
7. Immediately reporting to the GMS in the event of any indication of a decline in the Company's performance;
8. Monitoring and ensuring that GCG has been implemented effectively and on a sustainable basis;
9. Proposing/nominating candidate external auditors to the GMS, and ensuring the effective implementation of external audits.
10. 1Examining and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, and signing the annual report;
11. Ensuring that the Company's annual report contains information regarding the identity, principal occupations, and other directorships of members of the Board of Commissioners, including the meetings held during the fiscal year (both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors), as well as the honoraria, facilities, and/or other allowances received from the Company;
12. Assessing, monitoring, and evaluating the performance of the Board of Directors and reporting it to the Shareholders;
13. Providing a report on the supervisory duties carried out during the preceding fiscal year to the GMS.
14. Carrying out other obligations in connection with its supervisory and advisory duties, insofar as these do not conflict with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.
15. and other supervisory and advisory duties in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Limited Liability Company Law.

Types of Decisions Requiring Approval of the Board of Commissioners

In line with the Company's Articles of Association, the types of decisions of the Board of Directors that require the written approval of the Board of Commissioners are as follows:

1. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit facilities (up to 1 (one) year).
2. Entering into transactions, contracts, agreements, arrangements and/or cooperation with other business entities/parties, provided that the value per transaction, work, cooperation, contract or activity concerned is as stipulated in the GMS Resolution.

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (lebih dari 1 (satu) tahun), kecuali pinjaman (utang piutang) yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan.
7. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, tidak termasuk pengangkatan pejabatnya.
8. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang berdampak bagi Perseroan.
9. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.

Anggaran Dasar Perseroan

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (24), pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Board Manual Perseroan

Board Manual Perseroan yang disahkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020 terkait pembagian tugas anggota Dewan Komisaris bahwa kebijakan pembagian tugas Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:

3. Obtaining or extending medium/long-term loans (more than 1 (one) year), except for loans (receivables/payables) extended to Subsidiaries, provided that loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners.
4. Writing off bad debts and dead stock from the Company's books.
5. Disposing of movable fixed assets with an economic life generally applicable in the industry of up to 5 (five) years.
6. Establishing and changing the Company's logo.
7. Establishing an organizational structure one level below the Board of Directors, not including the appointment of officials to such positions.
8. Establishing foundations, organizations and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company, that have an impact on the Company.
9. Charging fixed and routine Company expenses for the activities of foundations, organizations and/or associations, whether directly or indirectly related to the Company.

Division of Duties of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has established a policy and carries out the division of duties among its members. The provisions governing the obligation of the Board of Commissioners to divide duties among its members are set out in the Company's Articles of Association and the Board Manual.

Company's Articles of Association

In accordance with Article 14 paragraph (24) of the Company's Articles of Association, the division of work among members of the Board of Commissioners shall be arranged by themselves, and to support the smooth performance of their duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary to the Board of Commissioners and a Committee of the Board of Commissioners appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

The Company's Board Manual

The Company's Board Manual ratified by the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Number: 003.K/DK-PLNSC/2020, concerning the division of duties among members of the Board of Commissioners, the policy on the division of duties of the Board of Commissioners is implemented as follows:

1. Pembagian tugas Dewan Komisaris dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan.
2. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
3. Pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
4. Pembagian tugas mencakup seluruh bidang tugas Direksi, termasuk penugasan Anggota Dewan Komisaris sebagai ketua/wakil/Anggota Komite Dewan Komisaris.
5. Dokumen pembagian tugas diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan masing-masing Anggota Dewan Komisaris menyimpan salinannya.

Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Tanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Materi Program Pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
2. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah- masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Satuan Pengawas Intern dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal- hal yang tidak diperbolehkan.

1. The division of duties of the Board of Commissioners is designed to improve the effectiveness and success of the performance of the supervisory, directing, and advisory functions.
2. The Board of Commissioners carries out a division of duties arranged by its own members, and to support the smooth performance of its duties, the Board of Commissioners may be assisted by a Secretary to the Board of Commissioners and a Committee of the Board of Commissioners appointed and dismissed by the Board of Commissioners at the Company's expense.
3. The division of duties among members of the Board of Commissioners is set out in a Decree of the Board of Commissioners.
4. The division of duties covers the entire scope of duties of the Board of Directors, including the assignment of members of the Board of Commissioners as chairperson/deputy chairperson/member of a Committee of the Board of Commissioners.
5. Documents relating to the division of duties are administered by the Secretary to the Board of Commissioners, and each member of the Board of Commissioners keeps a copy thereof.

Orientation Program for Members of the Board of Commissioners

Orientation Program regarding the Company must be provided to members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time. Responsibility for holding the Orientation Program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of Corporate Secretary. The material of the Orientation Program includes:

1. Implementation of GCG principles by the Company;
2. An overview of the Company relating to its purpose, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters;
3. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as matters that are prohibited.

Selama tahun 2025 Perseroan tidak melaksanakan program orientasi bagi anggota Komisaris baru karena tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris pada periode tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 003.K/DK-PLNSC/2020, rapat Dewan Komisaris merupakan forum resmi yang digunakan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan dan memperkuat koordinasi, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk hadir dalam rapat sesuai dengan agenda dan kebutuhan pembahasan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 14 (empat belas) Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company did not carry out orientation program for new Commissioners, as there was no appointment of a member of the Board of Commissioners during that period.

Board of Commissioners Meeting

In accordance with the Working Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang established through the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 003.K/DK-PLNSC/2020, meetings of the Board of Commissioners are the official forum used by the Board of Commissioners in performing its duties and supervisory functions over the management of the Company.

Board of Commissioners meeting are conducted at least 1 (one) time every month. To support the effectiveness of the supervisory function and strengthen coordination, the Board of Commissioners may invite the Board of Directors to attend meetings in accordance with the agenda and discussion needs.

Throughout 2025, the Board of Commissioners has conducted 14 (fourteen) Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the frequency and attendance rate of each member of the Board of Commissioners as follows:

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase** Percentage
Tri Tjahjonoputro	Komisaris Utama President Commissioner	14	14	100%
Muhammad Ramadhansyah	Komisaris Commissioner	14	13	93%
Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Komisaris Commissioner	14	8	57%

Agenda pembahasan dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The agenda discussed at the Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors in 2025 are as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	10 Januari 2025 January 10, 2025	• Realisasi pencapaian kinerja dan RKAP PLNSC sampai dengan Desember 2024 • Evaluasi Pencapaian dan Lesson Learn tahun 2024 • Usulan program kerja tahun 2025 • Penajaman RKAP dan Kontrak Manajemen tahun 2025 • Issue strategis lainnya • Performance achievements and implementation of the PLNSC Annual Work Plan and Budget (RKAP) as of December 2024 • Evaluation of Achievements and Lessons Learned for 2024 • Proposed work program for 2025 • Refinement of the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAP) and Management Contract • Other Strategic Issues
2	14 Februari 2025 February 14, 2025	• Realisasi pencapaian kinerja dan RKAP PLNSC sampai dengan Desember 2024 • Evaluasi Pencapaian dan Lesson Learn tahun 2024 • Usulan program kerja tahun 2025 • Penajaman RKAP dan Kontrak Manajemen tahun 2025 • Issue strategis lainnya • Performance achievements and implementation of the PLNSC Annual Work Plan and Budget (RKAP) as of December 2024 • Evaluation of Achievements and Lessons Learned for 2024 • Proposed work program for 2025 • Refinement of the 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAP) and Management Contract • Other Strategic Issues
3	27 Februari 2025 February 27, 2025	• Update Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 25 Februari 2025 • Update Program Kerja Tahun 2025 • Rencana dan Progress Surveillance ISO 37001 SMAP • Issue strategis lainnya • Update on Revenue and Sales Orders as of February 25, 2025 • Update on the 2025 Work Program • Plans and Progress on ISO 37001 SMAP Surveillance • Other Strategic Issues
4	14 Maret 2025 March 14, 2025	• Realisasi Pencapaian Kinerja dan RKAP sampai dengan Februari 2025 • Update Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 13 Maret 2025 • Kebijakan Manajemen Risiko untuk Project di atas Rp30 miliar • Update Perubahan Struktur Organisasi • *Issue* strategis lainnya • Performance Achievements and RKAP Realization as of February 2025 • Update on Revenue and Sales Orders as of March 13, 2025 • Risk Management Policy for Projects Exceeding Rp30 Billion • Update on Changes to the Organization Structure • Other Strategic Issues
5	14 April 2025 April 14, 2025	• Realisasi Pencapaian Kinerja dan RKAP PLNSC sampai dengan Maret 2025 • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan sampai dengan 11 April 2025 • Update realisasi program kerja tahun 2025 • Issue strategis lainnya • PLNSC Performance Achievement and RKAP Realization as of March 2025 • Sales Order and Revenue Achievements as of April 11, 2025 • Update on the implementation of the 2025 work program • Other strategic issues

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
6	8 Mei 2025 May 8, 2025	• Realisasi Pencapaian Kinerja dan RKAP PLNSC sampai dengan 30 April 2025 • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan sampai dengan 7 Mei 2025 • Update Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu • Issue strategis lainnya • PLNSC Performance Achievements and RKAP Realization as of April 30, 2025 • Sales Order and Revenue Achievements as of May 7, 2025 • Update on the Integrated Management System Policy • Other strategic issues
7	2 Juni 2025 June 2, 2025	• Pencapaian Sales Order dan Pendapatan sampai dengan 27 Mei 2025 • Update hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 • Update Kebijakan Manajemen risiko untuk Project di atas Rp30 miliar • Update Rencana RUPS LPT 2024 • Issue strategis lainnya • Sales Order and Revenue Achievements as of May 27, 2025 • Update on the audit results of the 2024 Financial Statements • Update on the Risk Management Policy for Projects Exceeding Rp30 Billion • Update on the 2024 LPT Annual General Meeting Plan • Other Strategic Issues
8	16 Juli 2025 July 16, 2025	• Realisasi Pencapaian Kinerja dan RKAP PLNSC sampai dengan 30 Juni 2025 • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan sampai dengan 15 Juli 2025 • Tindak Lanjut RUPS • Review Kebijakan SDM PLNSC • Issue strategis lainnya • PLNSC Performance Achievement and RKAP Realization as of June 30, 2025 • Sales Order and Revenue Achievements as of July 15, 2025 • Follow-up on the General Shareholders' Meeting • Review of PLNSC's HR Policy • Other strategic issues
9	1 Agustus 2025 August 1, 2025	• Realisasi Pendapatan dan Sales Order PLNSC sampai dengan 31 Juli 2025 • Penyampaian Laporan Manajemen TW II 2025 • Review Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya • Issue strategis lainnya • PLNSC's Revenue and Sales Order Realization as of July 31, 2025 • Presentation of the Management Report for the Second Quarter of 2025 • Review of Procurement Policies and Their Implementation • Other Strategic Issues
10	10 September 2025 September 10, 2025	• Realisasi KPI dan RKAP sampai dengan 31 Agustus 2025 dan prognosa • Realisasi Pendapatan dan Sales Order PLNSC sampai dengan 9 September 2024 • Progress tindak lanjut DMR pengadaan di atas Rp30 miliar • Review Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan • Issue strategis lainnya • KPI and Annual Budget Plan (RKAP) Realization as of August 31, 2025, and Forecast • PLNSC Revenue and Sales Order Realization as of September 9, 2024 • Progress on Follow-up Actions for Procurement DMRs Exceeding Rp30 Billion • Review of Accounting Policies and Financial Statements Preparation • Other Strategic Issues
11	30 September 2025 September 30, 2025	• Prognosa Pencapaian KPI sampai dengan September 2025 • Realisasi Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 30 September 2025 • Action Plan Peningkatan Kinerja Collection Period dan Sales Order Non PLN Group • Monitoring Tindak Lanjut RUPS • Issue strategis lainnya • Forecast of KPI Achievement as of September 2025 • Revenue and Sales Order Realization as of September 30, 2025 • Action Plan to Improve Collection Period Performance and Non-PLN Group Sales Orders • Monitoring of Follow-Up Actions to the GMS • Other Strategic Issues

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
12	17 Oktober 2025 October 17, 2025	• Prognosa Pencapaian KPI sampai dengan September 2025 dan Prognosa • Realisasi Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 17 Oktober 2025 • Update Usulan RKAP 2026 • Progress Usulan TMD 2026 • Issue strategis lainnya • Forecast of KPI Achievement as of September 2025 and Forecast • Revenue and Sales Order Realization as of October 17, 2025 • Update on the Proposed 2026 Annual Budget Plan (RKAP) • Progress on the Proposed 2026 TMD • Other Strategic Issues
13	7 November 2025 November 7, 2025	• Prognosa Pencapaian KPI sampai dengan 31 Oktober 2025 dan Prognosa • Realisasi Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 6 November 2025 • Update Final Usulan RKAP 2026 setelah pembahasan dengan Tim Komite • Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi • Issue strategis lainnya • Forecast of KPI Achievement as of October 31, 2025 • Revenue and Sales Order Realization as of November 6, 2025 • Final Update on the Proposed 2026 Annual Budget Plan following discussions with the Committee • Evaluation of Information Technology System Management Policies • Other Strategic Issues
14	5 Desember 2025 December 5, 2025	• Prognosa Pencapaian KPI sampai dengan 30 November 2025 dan Prognosa • Realisasi Pendapatan dan Sales Order sampai dengan 4 Desember 2025 • Rencana RUPS RKAP 2026 • Upaya Peningkatan Kinerja Collection Period dan Pendapatan di Luar PLN Group • Issue strategis lainnya • Forecast of KPI Achievement as of November 30, 2025 • Realization of Revenue and Sales Orders as of December 4, 2025 • Plan for the 2026 GMS on the Annual Budget Plan (RKAP) • Efforts to Improve Collection Period Performance and Revenue Outside the PLN Group • Other Strategic Issues

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai bagian tidak terpisahkan. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris PLNSC selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan Arahan RUPS RKAP 2025;
2. Program Kerja Dewan Komisaris 2025;
3. Laporan Kinerja bulanan;
4. Laporan Manajemen Triwulanan;
5. Laporan Keuangan (*Audited*);
6. Surat Keputusan Pemegang Saham (bila ada);
7. Informasi penting dari *stakeholders* yang berkaitan dengan usaha inti Perusahaan;

Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out monitoring and supervision of the implementation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as an inseparable part thereof. The duties and responsibilities performed by the Board of Commissioners of PLNSC in 2025 were as follows:

1. Decree and Directions of the GMS on the 2025 RKAP;
2. 2025 Work Program of the Board of Commissioners;
3. Monthly Performance Reports;
4. Quarterly Management Reports;
5. Financial Statements (Audited);
6. Shareholders' Resolutions (if any);
7. Important information from stakeholders relating to the Company's core business;

8. Hasil Satuan Pengawas Intern dan Eksternal serta hasil kajian-kajian yang dilakukan Perusahaan;
9. Rapat koordinasi antara manajemen Perseroan dan Komite Dewan Komisaris;
10. Catatan atas hasil rapat dan kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Di tahun 2025, anggota Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris melaksanakan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa Komite Audit menjalankan fungsinya secara efektif, relevan dengan kebutuhan Perseroan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Penilaian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, antara lain tingkat pencapaian terhadap target-target dalam rencana kerja tahunan komite, kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang masing-masing, serta kontribusi strategis komite dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah memberikan dukungan yang optimal dalam melakukan pemantauan atas implementasi sistem manajemen risiko yang menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan Dewan Komisaris.

8. Results of Internal and External Audits and results of studies conducted by the Company;
9. Coordination meetings between Company management and the Committee of the Board of Commissioners;
10. 1Records of the results of meetings and activities of the Board of Commissioners that have been carried out.

Competency Development of the Board of Commissioners

In 2025, members of the Board of Commissioners participated in various competency development activities as disclosed in the Company Profile Chapter of this Integrated Report.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. The Board of Commissioners conducts periodic performance assessments to ensure that the Audit Committee performs its functions effectively, remains relevant to the Company's needs, and is in line with GCG principles.

The performance assessment is conducted based on a number of criteria established by the Board of Commissioners, including the level of achievement of the targets in the committee's annual work plan, the quality of the performance of the supervisory function in its respective field, and the committee's strategic contribution in supporting the overall performance of the Board of Commissioners' duties.

Throughout 2025, the Board of Commissioners assessed that the Audit Committee had provided optimal support in monitoring the implementation of the risk management system, which is one of the main focuses of the Board of Commissioners' duties.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip GCG.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, serta Salinan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 20 Maret 2023 dan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/RUPS. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjaringan atau nominasi calon Anggota Direksi; (b) penilaian bagi calon Anggota Direksi.

Masa Jabatan Direksi

Mengacu pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang yang disahkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020, para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Jabatan anggota Direksi berakhir dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Masa jabatannya berakhir,
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

The Board of Directors is the Company organ authorized and responsible for the management of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors is accountable to the GMS. The accountability of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the Company's management accountability in accordance with the provisions of the Articles of Association and GCG principles.

Appointment and Dismissal of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS with reference to the Company's Articles of Association, as well as a Copy of Minister of SOE of the Republic of Indonesia Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning SOE Organs and Human Resources dated March 20, 2023, and the Guidelines on the appointment and dismissal of the Board of Directors established by the Shareholders/GMS. The guidelines on appointment and dismissal, among other things, govern: (a) the search for or nomination of candidates for membership of the Board of Directors; (b) the assessment of candidates for membership of the Board of Directors.

Term of Office of the Board of Directors

Referring to the Working Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ratified under the Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Number: 003.K/DK-PLNSC/2020, members of the Board of Directors are appointed for a term of office of 3 (three) years and may be reappointed for 1 (one) further term. The term of office of a member of the Board of Directors ends and may be terminated at any time if:

1. Passed away,
2. End of term of office,
3. The member is dismissed based on a GMS resolution, and/or
4. No longer meets the requirements to serve as a member of the Board of Directors under the Articles of Association and other prevailing laws and regulations.

Susunan Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS tersebut. Susunan anggota Direksi PLNSC per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. The GMS resolution regarding the appointment and dismissal of Directors also specifies the effective date of such appointments and dismissals. If the GMS does not specify, the appointment and dismissal take effect from the closing of the GMS. As of December 31, 2025, the composition of the Board of Directors of PLNSC was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Thommi Haposan	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PLN Suku Cadang sejak 1 November 2024 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Acting President Director of PT PLN Suku Cadang as of November 1, 2024, pursuant to the Circular General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions.
Zeta Junisar Muda	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Diangkat sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) Appointed as Acting Director of Engineering and Services of PT PLN Suku Cadang as of February 1, 2025 pursuant to the Circular GMS Resolutions.
Andreas Arthur	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan Act. Director of Business and Finance	Diangkat sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Director of Business and Finance of PT PLN Suku Cadang as of March 1, 2025, pursuant to the Circular GMS Resolutions.
Andy Adam	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Diangkat sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) Appointed as Acting Director of Engineering and Services of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024 until January 31, 2025 pursuant to the Circular GMS Resolutions.
Bahtiar Wibisana	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Diangkat sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan PT PLN Suku Cadang sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler). Appointed as Director of Business and Finance of PT PLN Suku Cadang as of January 1, 2024 until February 28, 2025, pursuant to the Circular GMS Resolutions.

Pernyataan Independensi dan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengurusan Perseroan, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam setiap proses pengambilan keputusan. Direksi berkewajiban menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi mempengaruhi independensi maupun mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penyampaian pernyataan independensi dan benturan kepentingan secara berkala.

Statement of Independence and Conflict of Interest of the Board of Directors

In carrying out the Company's management function, the Board of Directors consistently upholds the principles of independence, objectivity, and professionalism in every decision-making process. The Board of Directors is obliged to avoid any form of conflict of interest that could potentially affect its independence or disrupt the performance of its duties and responsibilities. This commitment is realized through compliance with prevailing provisions and the periodic submission of statements of independence and conflict of interest.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga independensi dan integritas tata kelola perusahaan, Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi maupun pejabat struktural, antara lain:

1. Kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan, meliputi:
   a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
   b. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan;
   c. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun;

2. Kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan, antara lain:
   a. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus;
   b. Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
   c. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.

Pedoman Kerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada *Board Manual* sebagai pedoman kerja yang telah disahkan oleh Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 013.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, antara lain terkait:

As part of its commitment in maintaining the independence and integrity of corporate governance, the Company has established various policies to prevent conflicts of interest and the abuse of authority by the Board of Directors and executive officers, including:

1. Policy regarding mechanisms for the Board of Directors and executive officers to prevent the personal gain of themselves or others resulting from conflicts of interest, including:
   a. Establishing mechanisms to prevent the Board of Directors and the Company's executive officers from deriving personal gain resulting from conflicts of interest;
   b. Disseminating the policy regarding mechanisms to prevent the Board of Directors and the Company's executive officers from deriving personal gain;
   c. Signing a statement by the Board of Directors affirming that they have no conflicts of interest between their personal/family interests, other positions, or affiliations and the Company's interests at the time of appointment, to be renewed at the beginning of each year;

2. Policy to prevent conflicts of interest include, among others:
   a. Submitting reports on shareholdings in other companies to the Company (Corporate Secretary) for recording in a special register;
   b. Signing an Integrity Pact attached to the Board of Directors' Proposed Actions, which must be approved by the Board of Commissioners and/or recommended by the Board of Commissioners and approved by the GMS;
   c. No transactional decisions involving conflicts of interest shall be made.

Work Guidelines of the Board of Directors

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors refers to the Board Manual as the work guideline ratified under Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and Number 013.K/DK-PLNSC/2020 concerning the Work Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, covering, among others:

1. Persyaratan dan Nominasi Anggota Direksi.

2. Komposisi Direksi
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi.

4. Masa Jabatan Anggota Direksi.
5. Larangan Rangkap Jabatan Anggota Direksi.

6. Tugas dan Fungsi Direksi.
7. Kewenangan Direksi.
8. Kewajiban Direksi.
9. Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris.
10. Tindakan Direksi yang Memerlukan Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan RUPS.

11. Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan RUPS.
12. Pelaksanaan Kewajiban Direksi.
13. Rapat Direksi.
14. Pelaporan Berkala.
15. Laporan Tahunan dan Pertanggungjawaban Direksi.

16. Remunerasi Direksi.
17. Organ Pendukung Direksi.

Wewenang dan Kewajiban Direksi

Sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi memiliki wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pedoman Kerja Direksi. Wewenang dan kewajiban tersebut menjadi acuan bagi Direksi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan.

Mengacu pada Pedoman Kerja Direksi PT PLN Suku Cadang yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020, Direksi dalam pelaksanaan tugasnya memiliki wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditujuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun Bersama- sama atau kepada orang lain;

1. Requirements and Nomination of Members of the Board of Directors.
2. Composition of the Board of Directors.
3. Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors.
4. Term of Office of Members of the Board of Directors.
5. Prohibition on Concurrent Positions for Members of the Board of Directors.
6. Duties and Functions of the Board of Directors.
7. Authority of the Board of Directors.
8. Obligations of the Board of Directors.
9. Actions of the Board of Directors Requiring the Written Approval of the Board of Commissioners.
10. Actions of the Board of Directors Requiring a Written Response from the Board of Commissioners and Approval of the GMS.
11. Actions of the Board of Directors Requiring the Approval of the GMS.
12. Discharge of Obligations of the Board of Directors.
13. Meetings of the Board of Directors.
14. Periodic Reporting.
15. Annual Report and Accountability of the Board of Directors.
16. Remuneration of the Board of Directors.
17. Supporting Organs of the Board of Directors.

Authority and Obligations of the Board of Directors

As the organ responsible for the management of the Company, the Board of Directors has the authority and obligations set out in the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and the Working Guidelines of the Board of Directors. This authority and these obligations serve as the reference for the Board of Directors in exercising its leadership and management functions in an optimal, accountable manner oriented toward the achievement of the Company's objectives.

Referring to the Work Guidelines of the Board of Directors of PT PLN Suku Cadang ratified through the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Number: 003.K/DK-PLNSC/2020, in performing its duties the Board of Directors has, among others, the authority to:

1. Establish the Company's management policy;
2. Arrange for the delegation of the Board of Directors' authority to represent the Company in and out of court to one or more members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose, or to one or more Company employees, either individually or jointly, or to other persons;

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3. Regulate provisions concerning the Company's personnel matters, including the determination of salaries, pensions or old-age security, and other income for Company employees, based on prevailing laws and regulations and GMS resolutions;
4. Appoint and dismiss Company employees based on the Company's personnel regulations and prevailing laws and regulations;
5. Appoint and dismiss the Corporate Secretary;
6. Take all other actions and measures relating to the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, and represent the Company in and out of court in all matters and events, subject to the limitations set out in prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

Selain wewenang, Direksi juga berkewajiban melaksanakan sejumlah tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Direksi melaksanakan RJPP dan RKAP secara berkelanjutan;
4. Direksi dapat memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
5. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
6. Melaksanakan dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
7. Menyusun Kontrak Manajemen/KPI Direksi (Individual-Kolegial) yang berjenjang dan menyeluruh terhadap struktur di bawah Direksi;
8. Melaksanakan manajemen risiko Perseroan;
9. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan Perseroan;
10. Melaksanakan manajemen karir dan pengelolaan SDM Perseroan;
11. Melaksanakan kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal dan memastikan kepatuhan pengendalian internal secara berkelanjutan;

In addition to its authority, the Board of Directors is also obliged to carry out a number of responsibilities in accordance with prevailing provisions, namely:

1. Pursue and ensure the implementation of the Company's business and activities in accordance with its purposes, objectives, and business activities;
2. Prepare the RJPP, RKAP, and their amendments in a timely manner and submit them to the Board of Commissioners and the Shareholders for GMS ratification;
3. Board of Directors implements the RJPP and RKAP on an ongoing basis;
4. Board of Directors may provide explanations to the GMS regarding the RJPP and RKAP;
5. Prepare the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, and Minutes of Meetings of the Board of Directors;
6. Implement and ensure that GCG has been applied effectively and on a sustainable basis;
7. Formulate Management Contract/KPIs for the Board of Directors (Individual-Collegial) that is tiered and comprehensive with respect to the structure below the Board of Directors;
8. Implement the Company's risk management;
9. Review the development and utilization of information technology for the Company's benefit;
10. Carry out career management and the management of the Company's HR;
11. Implement internal control policies/systems and ensure ongoing compliance with internal controls;

12. Menindaklanjuti temuan-temuan audit Satuan Pengawas/Satuan Pengawas Intern dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
13. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
14. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS;
15. Memperhatikan kepentingan Stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
17. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
18. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
19. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
20. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
22. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan dimaksud diatas dan dokumen Perseroan lainnya;
23. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
24. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
25. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
26. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

12. Follow up on audit findings of the Internal Audit Unit Unit and External Auditor and report them to the Board of Commissioners;
13. Report relevant information to the Board of Commissioners, Shareholders, and Stakeholders;
14. Conduct General Meeting of Shareholders (GMS) and prepare the minutes of the GMS;
15. Consider the interests of Stakeholders in accordance with prevailing ethical values and laws and regulations;
16. Prepare the Annual Report as a form of accountability for the management of the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Company Documents;
17. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit;
18. Submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification;
19. Provide explanations to the GMS regarding the Annual Report;
20. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Statement ratified by the GMS to the Minister responsible for Law and Human Rights in accordance with prevailing laws and regulations;
21. Maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners, and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Report, and the Company's financial documents as well as other Company documents;
22. To keep at the Company's domicile: the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of the GMS, Minutes of Meetings of the Board of Commissioners, and Minutes of Meetings of the Board of Directors, Annual Report, and the Company's financial documents referred to above and other Company documents;
23. Establish an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal control principles, particularly the functions of management, recording, custody, and supervision;
24. Submit periodic reports in the manner and at the times specified by prevailing provisions, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or the Shareholders;
25. Prepare the Company's organizational structure complete with details and duties;
26. Provide explanations on any matter raised or requested by the Board of Commissioners and the Shareholders;

27. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Pembagian tugas Direksi disusun dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan pengalaman masing-masing anggota untuk mendukung efektivitas pengelolaan Perseroan serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas bidang pengelolaan yang menjadi lingkup tugasnya sesuai dengan pembagian fungsi yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengurusan Perseroan tetap merupakan tanggung jawab kolektif Direksi sebagai satu kesatuan organ perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi selama tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

27. Perform other obligations in accordance with the provisions set out in the Articles of Association and established by the GMS under prevailing laws and regulations.

Division of Duties of Members of the Board of Directors

The division of duties of the Board of Directors is arranged taking into account the competence, expertise, and experience of each member in order to support the effectiveness of the Company's management and accelerate decision-making processes. Each member of the Board of Directors is responsible for the area of management within the scope of their duties in accordance with the established division of functions. Nevertheless, the management of the Company remains the collective responsibility of the Board of Directors as a single organ of the Company in accordance with prevailing provisions.

The details of the division of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors during the reporting year are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
Thommi Haposan	Plt. Direktur Utama Act. President Director	a. Memimpin, membina dan memastikan arah, kebijakan dan strategi Perusahaan sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). b. Memimpin, membina dan memastikan kinerja Perusahaan dan Direktorat sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. c. Menyelaraskan seluruh inisiatif internal Perusahaan dan memastikan peningkatan kemampuan bersaing Perusahaan. d. Memastikan bahwa Perusahaan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi *shareholders*. e. Melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perusahaan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perusahaan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan. f. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategis dan operasional Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern. g. Memastikan implementasi budaya Perusahaan, kepatuhan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3KL) serta sistem manajemen yang diterapkan perusahaan sesuai visi dan misi Perusahaan. h. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko Perusahaan. a. Lead, guide, and ensure the Company's direction, policies, and strategies align with the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Work Plan and Budget (RKAP). b. Lead, guide, and ensure the performance of the Company and all Directorates is in accordance with the established vision, mission, business objectives, strategies, policies, and work programs. c. Align all internal initiatives to strengthen the Company's competitive capabilities. d. Ensure sustainable Company growth and continuous value creation for shareholders. e. Act as the corporate leader to foster engagement across all levels of the Company and serve as an inspirer and motivator, steering all resources toward achieving the Company's vision, mission, and goals. f. Coordinate the strategic and operational implementation of the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. g. Ensure the implementation of corporate culture, compliance, Occupational Health and Safety, Security and Environment (K3KL), and management systems aligned with the Company's vision and mission. h. Ensure the implementation of risk identification and mitigation throughout the Company.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Tugas dan Tanggung Jawab** Duties and Responsibilities
Zeta Junisar Muda	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	a. Memastikan berjalannya pengelolaan perencanaan *marketing* dan *technical services*. b. Memastikan standar kualitas dilakukan terhadap penyediaan barang dan atau jasa. c. Mengidentifikasi dan menentukan solusi atas permasalahan teknis spesifikasi. d. Memastikan spesifikasi, kualitas, *delivery*, dan harga yang tersedia dari penyedia barang dan atau jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan/*user* serta memenuhi standar. e. Memastikan terselenggaranya kegiatan *marketing* dan *technical services* sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perusahaan dan pasar. f. Menjalin kerjasama dengan PLN Group, pusat-pusat penelitian serta Perguruan Tinggi untuk pengembangan bidang Teknik. g. Memastikan kegiatan penyediaan barang dan atau jasa penunjang bisnis untuk kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. h. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Enjiniring dan Layanan. a. Ensure the implementation of marketing and technical services planning. b. Ensure that quality standards are applied to the provision of goods and/or services. c. Identify and define solutions to technical specification issues. d. Ensure that the specifications, quality, delivery, and pricing provided by goods and/or service providers align with customer/user needs and meet standards. e. Ensure the implementation of marketing and technical services activities in accordance with the Company's and market's development needs. f. Establish partnerships with PLN Group, research centers, and universities for the development of the engineering field. g. Ensure that the provision of goods and/or business support services for the company's operational needs is complied with the prevailing regulations. h. Ensure the implementation of risk identification and mitigation within the Directorate of Engineering and Services.
Andreas Arthur	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan Act. Director of Business and Finance	a. Mengembangkan, mengevaluasi, dan memastikan penetapan perencanaan dan target Perusahaan jangka panjang/menengah dalam bentuk dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). b. Memastikan penyusunan dan pengelolaan anggaran Perusahaan secara optimal sesuai strategi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). c. Memastikan penyusunan, koordinasi, dan evaluasi anggaran biaya operasi, kepegawaian, pemeliharaan, dan administrasi. d. Memastikan pengelolaan keuangan secara optimal guna menjamin likuiditas dan mendukung kelancaran kegiatan Perusahaan. e. Memastikan perencanaan dan *monitoring* realisasi program kerja serta anggaran secara *prudent* dengan mempertimbangkan kelayakan dan risiko untuk mendukung optimasi finansial Perusahaan. f. Memastikan pengelolaan manajemen risiko Perusahaan. g. Mengembangkan sistem teknologi informasi terintegrasi dalam mendukung proses bisnis Perusahaan. h. Memastikan pengelolaan kegiatan pengembangan bisnis dalam rangka mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan Perusahaan. i. Memastikan pengelolaan data penyedia barang/jasa dan katalog barang/jasa. j. Memastikan pengelolaan negosiasi *terms and conditions*, kontrak payung, dan perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. k. Memastikan koordinasi, negosiasi, dan proses kontrak dengan penyedia barang/jasa berjalan sesuai peraturan dan kebijakan Perusahaan dengan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). l. Memastikan pelaksanaan *review* dan audit pabrikan/*workshop* penyedia barang/jasa sesuai standar Perusahaan. m. Menetapkan, mengembangkan, mengevaluasi, dan memastikan strategi penyusunan, evaluasi, serta pengendalian kebijakan, anggaran, dan kebutuhan kapasitas–kapabilitas *human capital*, termasuk strategi organisasi dan formasi tenaga kerja. n. Memastikan pengelolaan administrasi karyawan dan fasilitas kesejahteraan karyawan. o. Memastikan pelaksanaan identifikasi dan mitigasi risiko pada Direktorat Bisnis dan Keuangan. p. Memastikan pengelolaan kegiatan akuntansi Perusahaan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku. q. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan Divisi di bawah Direktorat Bisnis dan Keuangan.

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
		a. Develop, evaluate, and ensure the establishment of the Company's long-term and medium-term plans and targets in the form of the Company's Long-Term Plan (RJPP). b. Ensure the optimal formulation and management of the Company's budget in accordance with the strategies and programs established in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). c. Ensure the preparation, coordination, and evaluation of budgets for operating expenses, personnel, maintenance, and administration. d. Ensure optimal financial management to guarantee liquidity and support the smooth operation of the Company's activities. e. Ensure prudent planning and monitoring of the implementation of work programs and budgets, taking into account feasibility and risks to support the Company's financial optimization. f. Ensure the management of the Company's risk management. g. Develop an integrated information technology system to support the Company's business processes. h. Ensure the management of business development activities to support the Company's sustainability and growth. i. Ensure the management of goods/services provider data and the goods/services catalog. j. Ensure the management of negotiations regarding terms and conditions, master contracts, and procurement agreements for goods and services in accordance with prevailing regulations. k. Ensure that coordination, negotiations, and contract processes with goods and service providers proceed in accordance with the Company's regulations and policies, prioritizing the principles of Good Corporate Governance (GCG). l. Ensure the review and audit of manufacturers/workshops of goods and service providers are conducted in accordance with Company standards. m. Establish, develop, evaluate, and ensure strategies for the formulation, evaluation, and control of policies, budgets, and human capital capacity and capability needs, including organizational strategies and workforce composition. n. Ensure the management of employee administration and employee welfare facilities. o. Ensure the implementation of risk identification and mitigation within the Directorate of Business and Finance. p. Ensure the management of the Company's accounting activities in accordance with generally accepted accounting principles. q. Evaluate and develop policies for Divisions under the Directorate of Business and Finance.

Program Pengenalan Anggota Direksi

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang yang disahkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020, Perseroan wajib melaksanakan program pengenalan anggota Direksi baru yakni:

1. Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan;
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahan;
3. Materi Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan

Orientation Program for Members of the Board of Directors

In accordance with the Work Guidelines of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Board Manual) of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ratified under the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Number: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 Number: 003.K/DK-PLNSC/2020, the Company is required to conduct an orientation program for new members of the Board of Directors, namely:

1. Members of the Board of Directors appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company;
2. Responsibility for holding the orientation program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of Corporate Secretary;
3. The material of the Orientation Program covers:
   a. Implementation of GCG principles;
   b. An overview of the Company relating to its purpose, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and

dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Satuan Pengawas Intern dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;

4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.
5. Tingkat kehadiran/keefektifan Anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan Perseroan.

Selama tahun 2025, terdapat pengangkatan Anggota Direksi yaitu Bapak Zeta Junisar Muda sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Enjiniring dan Layanan dan Bapak Andreas Arthur ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Bisnis dan Keuangan.

Rapat Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, Direksi wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Direksi juga menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perseroan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang- undangan dan tepat waktu.

Sepanjang tahun 2025, Direksi telah melaksanakan 22 (dua puluh dua) Rapat Direksi dengan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagai berikut:

long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic matters;

c. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee;

d. d.Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors and the Board of Directors as well as matters that are prohibited;

4. The Company's orientation program may take the form of presentations, meetings, company visits, and document reviews, or other programs deemed appropriate to the Company where such program is carried out.
5. The attendance/effectiveness level of members of the Board of Directors in participating in the series of the Company's orientation program.

In 2025, the following members of the Board of Directors were appointed, namely Mr. Zeta Junisar Muda as Act. Director of Engineering and Services and Mr. Andreas Arthur as Act. Director of Business and Finance.

Board of Directors Meetings

As part of the performance of its duties, the Board of Directors is required to conduct meetings at least 1 (one) time every month, and the Board of Directors may invite the Board of Commissioners to such meetings. The Board of Directors also establishes a mechanism for making decisions on corporate actions in accordance with prevailing laws and regulations and in a timely manner.

Throughout 2025, the Board of Directors conducted 22 (twenty two) Board of Directors Meering, with the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors as follows:

Rapat Direksi Board of Directors Meeting				
Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Persentase** Percentage
Thommi Haposan	Plt. Direktur Utama Act. President Director	22	22	100%
Zeta Junisar Muda	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	22	21	95,45%
Andreas Arthur	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan Act. Director of Business and Finance	18	17	94,44%
Bahtiar Wibisana*	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	4	4	100%

* Masa jabatan Bapak Bahtiar Wibisana sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025
* Mr. Bahtiar Wibisana's term of office as Director of Business and Finance ended on February 28, 2025

Adapun agenda Rapat Internal Dewan Direksi dijabarkan sebagai berikut:

The agenda of the Internal Meetings of the Board of Directors is described as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	2 Februari 2025 February 2, 2025	• Monitoring Pre DO-IH-USDO-DO-PO-BAST s.d. 3 Februari 2025 • Rencana IH/USDO • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan s.d. 3 Februari 2025 • Lain-lain: Co-Firing Bio CNG UP Belawan • Lain-lain: Perhitungan LTPMSPA Kendari, Ternate, Bau-Bau, Flores • Lain-lain: Penyampaian Laporan Keuangan s.d. Januari 2025 dan Rencana SHL • Monitoring of Pre-DO-IH-USDO-DO-PO-BAST up to February 3, 2025 • IH/USDO Plan • Achievement of Sales Order and Revenue up to February 3, 2025 • Other matters: Bio CNG Co-Firing at UP Belawan • Other matters: Calculation of LTPMSPA for Kendari, Ternate, Bau-Bau, and Flores • Other matters: Submission of Financial Statements up to January 2025 and SHL Plan
2	12 Februari 2025 February 12, 2025	• Monitoring Pre DO-IH-USDO-DO-PO-BAST • Rencana IH/USDO • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan • Monitoring of Pre-DO-IH-USDO-DO-PO-BAST • IH/USDO Plan • Achievement of Sales Order and Revenue
3	19 Februari 2025 February 19, 2025	• Monitoring Pre DO-IH-USDO-DO-PO-BAST • Rencana IH/USDO • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan • Monitoring of Pre-DO-IH-USDO-DO-PO-BAST • IH/USDO Plan • Achievement of Sales Order and Revenue
4	26 Februari 2025 February 26, 2025	• Monitoring Pre DO-IH-USDO-DO-PO-BAST s.d. 25 Februari 2025 • Rencana IH/USDO • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan s.d. 25 Februari 2025 • Monitoring of Pre-DO-IH-USDO-DO-PO-BAST up to February 25, 2025 • IH/USDO Plan • Achievement of Sales Order and Revenue up to February 25, 2025
5	4 Maret 2025 March 4, 2025	• Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak • Penguatan Divisi Marketing & Technical Services • Rencana IH/USDO • List of Tax Audit Findings • Strengthening of the Marketing & Technical Services Division • IH/USDO Plan
6	11 Maret 2025 March 11, 2025	• Monitoring IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST s.d 10 Maret 2025 • Persetujuan Kontrak Baru/Rencana LoI Procurement • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan s.d 10 Maret 2025 • Update Laporan Keuangan s.d. 10 Maret 2025 • Update Pencapaian KPI s.d. 10 Maret 2025 • Update Rencana Perubahan Organisasi • Update Persiapan Launching Acumatica • Monitoring of IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST up to March 10, 2025 • Approval of New Contracts/Procurement LoI Plan • Achievement of Sales Order and Revenue up to March 10, 2025 • Update on Financial Statements up to March 10, 2025 • Update on KPI Achievement up to March 10, 2025 • Update on the Organizational Change Plan • Update on Preparations for the Acumatica Launch

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
7	22 April 2025 April 22, 2025	• Monitoring IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST s.d 21 April 2025 • Persetujuan Kontrak Baru/Rencana LoI Procurement • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan s.d 21 April 2025 • Update Laporan Keuangan s.d. 21 April 2025 • Update Pencapaian KPI s.d. 21 April 2025 • Lain-lain • Monitoring of IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST up to April 21, 2025 • Approval of New Contracts/Procurement LoI Plan • Achievement of Sales Order and Revenue up to April 21, 2025 • Update on Financial Statements up to April 21, 2025 • Update on KPI Achievement up to April 21, 2025 • Other matters
8	6 Mei 2025 May 6, 2025	• Monitoring IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST s.d 21 April 2025 • Persetujuan Kontrak Baru/Rencana LoI Procurement • Pencapaian Sales Order dan Pendapatan s.d 21 April 2025 • Update Laporan Keuangan s.d. 21 April 2025 • Update Pencapaian KPI s.d. 21 April 2025 • Lain-lain • Monitoring of IH-Pre DO-USDO-DO-PO-BAST up to April 21, 2025 • Approval of New Contracts/Procurement LoI Plan • Achievement of Sales Order and Revenue up to April 21, 2025 • Update on Financial Statements up to April 21, 2025 • Update on KPI Achievement up to April 21, 2025 • Other matters
9	15 Juli 2025 July 15, 2025	• Update Sales Order & Pendapatan s.d. 13 Juli 2025 • Pencapaian KPI s.d. 13 Juli 2025 • Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan • Update Laporan Keuangan 15 Juli 2025 • Pengajuan Tambahan Modal Disetor • Update on Sales Order & Revenue up to July 13, 2025 • KPI Achievement up to July 13, 2025 • Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner • Update on Financial Statements as of July 15, 2025 • Proposal for Additional Paid-in Capital
10	22 Juli 2025 July 22, 2025	• Update Sales Order & Pendapatan s.d. 21 Juli 2025 • Pencapaian KPI s.d. 21 Juli 2025 • Update Laporan Keuangan s.d. 21 Juli 2025 • Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan • Isu Strategis Lainnya • Update on Sales Order & Revenue up to July 21, 2025 • KPI Achievement up to July 21, 2025 • Update on Financial Statements up to July 21, 2025 • Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner • Other Strategic Issues
11	30 Juli 2025 July 30, 2025	• Update Sales Order & Pendapatan s.d. 29 Juli 2025 • Update PO Late & PO Potential Late Beserta Penyelesaiannya • Update Permintaan Customer Belum USDO & DO Belum Terbit PO Beserta Penyelesaiannya • Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan • Isu Strategis Lainnya • Update on Sales Order & Revenue up to July 29, 2025 • Update on Late PO & Potentially Late PO along with Resolutions • Update on Customer Requests Not Yet USDO & DO Not Yet Issued PO along with Resolutions • Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner • Other Strategic Issues
12	5 Agustus 2025 August 5, 2025	• Update laporan Keuangan Juli 2025 • Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan Beserta Perhitungan HPP • Update on the July 2025 Financial Statements • Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner along with the Cost of Goods Sold (COGS) Calculation

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
13	12 Agustus 2025 August 12, 2025	• Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan • Isu Strategis Lainnya • Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner • Other Strategic Issues
14	9 September 2025 September 9, 2025	• Update Pencapaian KPI per Agustus 2025 beserta Metode Pencapaiannya • Update Permintaan Belum Terbit IH/USDO > 14 Hari Kalender • IH/USDO Belum Terbit DO > 14 Hari Kalender • DO Belum Terbit PO > 7 Hari Kalender • Pekerjaan Selesai Belum Terbit BA • Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan • Update on KPI Achievement as of August 2025 along with the Achievement Method • Update on Requests Not Yet Issued IH/USDO > 14 Calendar Days • IH/USDO Not Yet Issued DO > 14 Calendar Days • DO Not Yet Issued PO > 7 Calendar Days • Completed Work Not Yet Issued BA (Minutes of Handover) • Approval of the Procurement Implementation Partner
15	23 September 2025 September 2025	• Update Pencapaian KPI per 22 September 2025 beserta Metode Pencapaiannya • Update Laporan Keuangan per 22 September 2025 • Update Permintaan Belum Terbit IH/USDO > 14 Hari Kalender dan • IH/USDO Belum Terbit DO > 14 Hari Kalender • Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan • Usulan Pemenuhan Kebutuhan Modal Kerja Melalui TMD • Update on KPI Achievement as of September 22, 2025 along with the Achievement Method • Update on Financial Statements as of September 22, 2025 • Update on Requests Not Yet Issued IH/USDO > 14 Calendar Days, and • IH/USDO Not Yet Issued DO > 14 Calendar Days • Approval of the Procurement Implementation Partner • Proposal to Meet Working Capital Needs through TMD (Additional Paid-in Capital)
16	7 Oktober 2025 October 7, 2025	Persetujuan Usulan Mitra Pelaksana Pengadaan Approval of the Proposed Procurement Implementation Partner

17	14 Oktober 2025
	October 14, 2025
		• Update Sales Order & Pendapatan (PLN Group & Non-PLN Group) s.d. 13 Oktober 2025
		• Update Pencapaian KPI s.d. 14 Oktober 2025
		• Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan
		• Isu Strategis Lainnya:
		  • Progress Project Nias;
		  • Pemenuhan Penyesuaian Laporan Keuangan Audited Accumatica (Jan s.d. Juni 2025).
		
		• Update on Sales Order & Revenue (PLN Group & Non-PLN Group) up to October 13, 2025
		• Update on KPI Achievement up to October 14, 2025
		• Approval of the Procurement Implementation Partner
		• Other Strategic Issues:
		  • Progress of the Nias Project;
		  • Fulfillment of Adjustments to the Audited Acumatica Financial Statements (January to June 2025).

18	21 Oktober 2025 October 21, 2025	• Update Pencapaian KPI s.d. 20 Oktober 2025 • Update Sales Order & Pendapatan (PLN Group & Non-PLN Group) s.d. 20 Oktober 2025 • Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan • Update Progres Audit PwC • Update Persiapan Workshop Accumatica PT PLN Suku Cadang • Isu Strategis Lainnya • Update on KPI Achievement up to October 20, 2025 • Update on Sales Order & Revenue (PLN Group & Non-PLN Group) up to October 20, 2025 • Approval of the Procurement Implementation Partner • Update on PwC Audit Progress • Update on Preparations for the PT PLN Suku Cadang Acumatica Workshop • Other Strategic Issues

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
19	28 Oktober 2025 October 28, 2025	• Update Laporan Keuangan per 27 Oktober 2025, Kendala dan Usulan Penyelesaian • Update Pencapaian KPI per 27 Oktober 2025 • Update Sales Order & Pendapatan (PLN Group & Non-PLN Group) s.d. 27 Oktober 2025 • Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan • Update Proses Audit PwC • Isu Strategis Lainnya • Update on Financial Statements as of October 27, 2025, Constraints and Proposed Solutions • Update on KPI Achievement as of October 27, 2025 • Update on Sales Order & Revenue (PLN Group & Non-PLN Group) up to October 27, 2025 • Approval of the Procurement Implementation Partner • Update on the PwC Audit Process • Other Strategic Issues

20	4 November 2025
	November 4, 2025
		• Update Figur Laporan Keuangan Bulan Oktober 2025
		• Update KPI Bulan Oktober 2025
		• Update Sales Order & Pendapatan (PLN Group & Non-PLN Group) per 03 November 2025
		• Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan
		• Isu Strategis Lainnya:
		  • Penyelesaian Data Acumatica;
		  • Training dan Kebijakan SDM Perusahaan.
		
		• Update on the October 2025 Financial Statement Figures
		• Update on October 2025 KPI
		• Update on Sales Order & Revenue (PLN Group & Non-PLN Group) as of November 3, 2025
		• Approval of the Procurement Implementation Partner
		• Other Strategic Issues:
		  • Completion of Acumatica Data;
		  • Company Human Resources Training and Policy.

21	2 Desember 2025
	December 2, 2025
		• Update Pendapatan dan Sales Order s.d. 01 Desember 2025;
		• Update KPI 2025 s.d. 01 Desember 2025;
		• Update Figure Laporan Keuangan 30 November 2025;
		• Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan;
		• Isu Strategis Lainnya:
		  • Pengiriman Nias.
		
		• Update on Revenue and Sales Order up to December 1, 2025;
		• Update on 2025 KPI up to December 1, 2025;
		• Update on Financial Statement Figures as of November 30, 2025;
		• Approval of the Procurement Implementation Partner;
		• Other Strategic Issues:
		  • Nias Delivery.

22	10 Desember 2025 December 10, 2025	• Update Pendapatan dan Sales Order s.d. 09 Desember 2025; • Update KPI 2025 s.d. 09 Desember 2025; • Laporan Keuangan Bulan November 2025; • Persetujuan Mitra Pelaksana Pengadaan. • Update on Revenue and Sales Order up to December 9, 2025; • Update on 2025 KPI up to December 9, 2025; • November 2025 Financial Statements; • Approval of the Procurement Implementation Partner.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2025, anggota Direksi telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana diungkapkan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Competency Development of the Board of Directors

Throughout 2025, members of the Board of Directors participated in various competency development activities as disclosed in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pencapaian sasaran strategis Perseroan. Pada tahun 2025, penilaian dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* serta evaluasi oleh organ yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mengacu pada Laporan Keuangan, realisasi RKAP, Laporan Tahunan, pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI), dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sejalan dengan prinsip kolegialitas, penilaian dilakukan terhadap kinerja masing-masing organ sebagai satu kesatuan, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris maupun pengurusan Perseroan oleh Direksi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggotanya.

The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted periodically as part of the application of the principle of accountability and the evaluation of the effectiveness of the performance of duties, responsibilities, and the achievement of the Company's strategic targets. In 2025, the assessment was carried out through a self-assessment mechanism as well as an evaluation by the authorized organ in accordance with prevailing provisions, with reference to the Financial Statements, RKAP realization, Annual Report, achievement of Key Performance Indicators (KPI), and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles. In line with the principle of collegiality, the assessment is conducted on the performance of each organ as a single unit, such that the performance of the supervisory function by the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors is the shared responsibility of all their respective members.

Selain mekanisme yang disebutkan di atas, untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses evaluasi, Perseroan menerapkan mekanisme penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan penilaian oleh RUPS menjadi salah satu instrumen dalam mengevaluasi pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja Perseroan secara menyeluruh.

In addition to the mechanism mentioned above, to ensure the objectivity and accountability of the evaluation process, the Company applies a performance assessment mechanism carried out in accordance with prevailing provisions. The assessment procedure carried out by the GMS serves as one of the instruments for evaluating the performance of the functions of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the Company's overall performance achievement.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi oleh RUPS

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan berdasarkan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan pelaksanaan tugas pengurusan Direksi yang disampaikan dalam Laporan Tahunan Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan tersebut, RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja kedua organ Perseroan serta memutuskan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Performance Assessment Procedure for the Board of Commissioners and the Board of Directors by the GMS

The procedure for assessing the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by the Shareholders through the Annual GMS based on the report on the performance of the supervisory duties of the Board of Commissioners and the report on the performance of the management duties of the Board of Directors submitted in the Company's Annual Report. Based on the results of the evaluation of such reports, the GMS assesses the performance of both Company organs and decides on the granting of full and final discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervisory and management actions carried out during the Fiscal Year, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and do not constitute a criminal act or a violation of prevailing laws and regulations.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi oleh RUPS

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi pengurusan oleh Direksi sepanjang tahun 2025 dinilai berdasarkan capaian Program Kerja/Rencana Kerja Tahunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut akan mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas kedua organ Perseroan dalam mendukung keberlangsungan usaha serta pencapaian sasaran strategis perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi oleh RUPS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta Direksi selama tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta Program Kerja Tahunan yang telah disusun sesuai dengan fungsi, wewenang, dan kewajiban masing-masing organ Perseroan. Penyusunan program kerja tersebut merupakan implementasi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang mewajibkan Dewan Komisaris untuk menyusun program kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP yang disusun oleh Direksi.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, RKAP dan Program Kerja Tahunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan fungsi pengurusan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan program kerja yang ditetapkan serta berhasil merealisasikan target-target utama yang tercantum dalam RKAP. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kedua organ Perseroan dalam mengawal implementasi strategi perusahaan dan mendukung terwujudnya sasaran bisnis yang telah ditetapkan.

Criteria for the Performance Evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the GMS

The performance of the supervisory function by the Board of Commissioners and the management function by the Board of Directors throughout 2025 is assessed based on the achievement of the Work Program/Annual Work Plan and the established performance targets. Such achievement reflects the effectiveness of the performance of the duties of both Company organs in supporting business continuity and the achievement of the Company's strategic targets.

Party Conducting the Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Performance Assessment Results of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the GMS

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors during 2025 refers to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) together with the Annual Work Program prepared in accordance with the functions, authority, and obligations of each Company organ. The preparation of the work program is an implementation of the provisions of the Company's Articles of Association, which require the Board of Commissioners to prepare a work program as an integral part of the RKAP prepared by the Board of Directors.

In line with the provisions of Minister of SOE Regulation Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Amendment to Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises, the RKAP and Annual Work Program serve as the guidelines for the performance of the supervisory function by the Board of Commissioners and the management function by the Board of Directors. Throughout 2025, the Board of Commissioners and the Board of Directors carried out the established work program and succeeded in achieving the main targets set out in the RKAP. This achievement reflects the effectiveness of the performance of both Company organs in overseeing the implementation of the Company's strategy and supporting the realization of the established business targets.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliation Relationship of the Board of Commissioners and Directors

Komitmen Perusahaan dalam mencegah potensi benturan kepentingan serta menjaga independensi, integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan strategis dilakukan dengan memastikan hubungan afiliasi yang dimiliki oleh anggota Direksi. Hubungan afiliasi dimaksud mencakup hubungan keluarga dan/atau hubungan keuangan yang terjadi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris; anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi; serta anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. Seluruh anggota Direksi Perusahaan yang menjabat sepanjang tahun 2025 tidak memiliki hubungan afiliasi di perusahaan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

The Company's commitment to preventing potential conflicts of interest and maintaining independence, integrity, transparency, and accountability in strategic decision-making is implemented by ensuring that the affiliated relationships of members of the Board of Directors are identified. Such affiliated relationships include family relationships and/or financial relationships between a member of the Board of Directors and a member of the Board of Commissioners; a member of the Board of Directors with another member of the Board of Directors; and a member of the Board of Directors with the Company's Majority Shareholder and/or Controlling Shareholder. All members of the Company's Board of Directors who served throughout 2025 had no affiliated relationships with other companies that are prohibited under the Company's internal provisions and prevailing laws and regulations. The affiliated relationships between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholder can be seen in the table as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keluarga dengan** Familial Affiliations with		
		Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham** Shareholders
Tri Tjahjonoputro	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Muhammad Ramadhansyah	Komisaris Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Komisaris Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Thommi Haposan	Plt. Direktur Utama Act. President Director	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Zeta Junisar Muda	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Andreas Arthur	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan Act. Director of Business and Finance	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Andy Adam*	Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan Act. Director of Engineering and Services	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Bahtiar Wibisana**	Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

*Masa jabatan Bapak Andy Adam sebagai Plt. Direktur Enjiniring dan Layanan berakhir pada tanggal 31 Januari 2025
** Masa jabatan Bapak Bahtiar Wibisana sebagai Direktur Bisnis dan Keuangan berakhir pada tanggal 28 Februari 2025
*Mr. Andy Adam's term of office as Acting Director of Engineering and Services ended on January 31, 2025
** Mr. Bahtiar Wibisana's term of office as Director of Business and Finance ended on February 28, 2025

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

All members of the Company's Board of Commissioners have no family relationships or financial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Controlling Shareholder.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy and Procedure of the Board of Commissioners' Remuneration

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Suku Cadang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang berlaku serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perseroan.

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT PLN Suku Cadang is carried out in accordance with applicable corporate governance mechanisms and in accordance with the provisions of laws and regulations and the Company's internal policies.

Rencana remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan melalui proses endorsement Biaya Honorarium dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yang ditetapkan melalui Berita Acara Endorsement Biaya Kepegawaian dan Honorarium bersama Divisi terkait di PT PLN Nusantara Power. Selanjutnya, Perseroan menyampaikan usulan penetapan tantiem dan remunerasi kepada pemegang saham melalui surat Direksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Persetujuan atas besaran tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh PT PLN Nusantara Power berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Utama PT PLN Nusantara Power.

The remuneration plan for the Board of Commissioners and the Board of Directors is submitted through the endorsement process for Honorarium Expenses in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which is established through the Minutes of Endorsement for Personnel and Honorarium Expenses in collaboration with the relevant division at PT PLN Nusantara Power. Furthermore, the Company submits proposals for the determination of bonuses and remuneration to shareholders via a letter from the Board of Directors in accordance with applicable procedures. Approval of the bonus amounts for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by PT PLN Nusantara Power based on a letter of approval issued by the President Director of PT PLN Nusantara Power.

Struktur remunerasi dan komponen fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 001.K/010/DIR-PLNSC/2022 tentang Remunerasi dan Perjalanan Dinas bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Suku Cadang. Remunerasi diberikan berdasarkan prinsip kewajaran, daya saing, akuntabilitas, dan keselarasan dengan pencapaian kinerja Perseroan.

The remuneration structure and benefit components for the Board of Commissioners and the Board of Directors are based on Board of Directors Decision No. 001.K/010/DIR-PLNSC/2022 regarding Remuneration and Business Travel for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PLN Suku Cadang. Remuneration is provided based on the principles of fairness, competitiveness, accountability, and alignment with the Company's performance achievements.

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual), remunerasi Dewan Komisaris terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas, santunan purna jabatan, serta tantiem atau insentif kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium dan komponen remunerasi lainnya ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

In accordance with the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual), the remuneration of the Board of Commissioners consists of honoraria, allowances, benefits, post-retirement benefits, as well as performance bonuses or incentives in accordance with applicable regulations. The amount of honoraria and other remuneration components is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with applicable laws and regulations.

Sementara itu, remunerasi Direksi terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas, santunan purna jabatan, serta tantiem atau insentif kinerja. Penetapan gaji dan komponen remunerasi Direksi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemegang saham.

Pemberian tantiem atau insentif kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/ KPI), tingkat kesehatan Perseroan, serta indikator kinerja lainnya sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/05/2019.

Meanwhile, the remuneration for the Board of Directors consists of salaries, allowances, benefits, post-retirement benefits, and performance bonuses or incentives. The determination of salaries and other remuneration components for the Board of Directors is based on a resolution of the GMS in accordance with the authority granted by the shareholders.

The provision of performance bonuses or incentives for the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on applicable regulations, taking into account the achievement of Key Performance Indicators (KPIs), the Company's financial health, and other performance indicators as stipulated in the Company's remuneration policy and prevailing regulations.

The determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Compensation of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, as amended several times, most recently by Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019.

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners

Komite Audit
Audit Committee

Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagai organ pendukung yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01.K/DEKOMPLNSC/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 4 September 2017. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

To support the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions, the Company has established an Audit Committee as a supporting body tasked with assisting the Board of Commissioners in fulfilling its duties and responsibilities. The Audit Committee was first established pursuant to Board of Commissioners Decree No. 01.K/DEKOMPLNSC/2017 regarding the Establishment of the Audit Committee dated September 4, 2017. In carrying out its functions, the Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Komite Audit Perseroan mengacu pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) selaku Organ Pendukung Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Mengacu pada Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) selaku Organ Pendukung Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIRPLNSC/2020 dan Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020, tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertugas untuk:
   a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
   b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal;
   c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
   d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
   e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
4. Selain tugas tersebut, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.
5. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Company's Audit Committee refers to the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) as a supporting body of the Board of Commissioners, which was established through Joint Decisions of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 003.K/DK-PLNSC/2020.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Pursuant to the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) as a Supporting Body to the Board of Commissioners, established through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 016.K/020/DIRPLNSC/2020 and No. 003.K/DK-PLNSC/2020, the duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows:

1. 1The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.
2. 2The Audit Committee is independent both in the performance of its duties and in its reporting, and is directly accountable to the Board of Commissioners.
3. 3The Audit Committee is tasked with:
   a. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the work performed by external and internal auditors;
   b. Evaluating the conduct and results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors;
   c. Providing recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation;
   d. d.Ensure that satisfactory evaluation procedures are in place for all information released by the Company;
   e. e.Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners, as well as other duties of the Board of Commissioners.
4. In addition to these duties, the Board of Commissioners may assign other tasks to the Audit Committee as set forth in the Audit Committee Charter.
5. Based on a written assignment letter from the Board of Commissioners, the Committee may access records or information regarding the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the performance of its duties and is required to report the results of such assignments in writing to the Board of Commissioners.

6. Komite wajib menjaga kerahasian dokumen, data, dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 016.K/020/DIRPLNSC/2020 dan Nomor: 003.K/DK-PLNSC/2020, masa jabatan anggota Komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

Komposisi Keanggotan dan Profil Singkat Anggota Komite Audit

Komposisi Komite Audit terdiri dari Ketua dan anggota. Ketua Komite Audit dijabat oleh Anggota Dewan Komisaris sedangkan anggota lainnya diangkat oleh Dewan Komisaris dan bukan berasal dari karyawan Perseroan. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Saat ini, anggota Komite Audit telah mengalami beberapa perubahan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002.K/DK-PLNSC/2024 tentang Perubahan Susunan Tim Komite Audit tanggal 18 Maret 2024.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, komposisi anggota Komite Audit berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Anggota Komite. Seluruh anggota Komite Audit telah memiliki pengetahuan dan pengalaman profesional dalam bidang keuangan, teknik, manajemen, hukum/peraturan, mempunyai pengalaman dalam hal audit dari suatu Perseroan. Berikut adalah profil singkat anggota Komite Audit tahun 2025:

6. The Committee must maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information, both from internal and external parties, and use them solely for the purpose of carrying out its duties.

Term of Office for Audit Committee Members

In accordance with the Board of Directors and Board of Commissioners Operating Guidelines (Board Manual) approved by Joint Resolution of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 016.K/020/DIRPLNSC/2020 and No. 003. K/DK-PLNSC/2020, the term of office for Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners shall be a maximum of 3 (three) years and may be extended once for a term of 2 (two) years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.

Composition and Brief Profiles of Audit Committee Members

The Audit Committee consists of a Chair and members. The Chair of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners, while the other members are appointed by the Board of Commissioners and are not employees of the Company. The Chair and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Currently, the composition of the Audit Committee has undergone several recent changes in accordance with Board of Commissioners Decree No. 002.K/DK-PLNSC/2024 regarding Changes to the Composition of the Audit Committee dated March 18, 2024.

As of December 31, 2025, the Audit Committee consists of 2 (two) members, comprising 1 (one) Chairperson and 1 (one) Committee Member. All members of the Audit Committee possess professional knowledge and experience in the fields of finance, engineering, management, and law/regulation, as well as experience in auditing a corporation. The following are brief profiles of the members of the Audit Committee for 2025:

Profil Singkat Anggota Komite Audit

Brief Profiles of Audit Committee Members

Muhammad Ramadhansyah

Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman

Profil Ketua Komite Audit terkait jabatan, riwayat pendidikan (bidang studi dan lembaga pendidikan) dan pengalaman kerja (jabatan, instansi dan periode menjabat) telah diuraikan pada bagian profil dewan komisaris dalam laporan tahunan ini.
The profile of the Audit Committee Chairman, including position, educational background (field of study and educational institution), and work experience (position, organization, and period of service), has been detailed in the Board of Commissioners' profile section of this annual report.

Made Pramudita

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Tangerang Selatan** South Tangerang
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	**Manokwari, 3 Maret 1967** Manokwari, March 3, 1967
Masa Jabatan Term of Office	**31 Januari 2022 – saat ini** January 31, 2022 – present
Riwayat Pendidikan Educational Background	• **Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 1991;** • **Magister Manajemen Enjiniring dari Curtin University of Technology Tahun 2009.** • Bachelor of Mechanical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology in 1991; • Master of Engineering Management from Curtin University of Technology in 2009.

Weka Adhi Setiana

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Bekasi**
Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	**Sleman, 6 April 1984** Sleman, April 6, 1984
Masa Jabatan Term of Office	**22 Februari 2024 – saat ini** February 22, 2024 – present
Riwayat Pendidikan Educational Background	**Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2008** Bachelor of Mechanical Engineering from Gadjah Mada University in 2008

Independensi Komite Audit

Ketua dan Anggota Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, objektif, dan profesional. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan dengan Perseroan selain remunerasi yang diterima atas pelaksanaan tugasnya sebagai anggota Komite Audit atau Dewan Komisaris. Selain itu, Ketua dan Anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan usaha dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham pengendali yang dapat mempengaruhi independensi dalam pelaksanaan tugasnya. Status independensi anggota Komite Audit tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Independence of the Audit Committee

The Chair and members of the Audit Committee perform their duties and responsibilities independently, objectively, and professionally. None of the members of the Audit Committee has any financial relationship with the Company other than the remuneration received for performing their duties as members of the Audit Committee or the Board of Commissioners. Furthermore, the Chair and members of the Audit Committee have no family or business relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or controlling shareholders that could affect their independence in performing their duties. The independence status of Audit Committee members for 2025 is presented in the following table.

Kriteria *Criteria*	**Anggota Komite Audit** *Audit Committee Member*		
	Muhammad Ramadhansyah	**Made Pramudita**	**Weka Adhi Setiana**
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Not a person affiliated with a public accounting firm, law firm, or any other party providing audit, non-audit, or other consulting services to the Company within the past six months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Does not own, either directly or indirectly, any shares in the Company.	✓	✓	✓
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir. Not a person who has had authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the past six months.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham utama Perusahaan. Has no familial affiliations by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with any member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Company's major shareholders.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. Is not affiliated with any institution whose business activities provide services to the Company.	✓	✓	✓

Seluruh anggota Komite Audit juga diwajibkan tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *Conflict of Interest* ataupun dampak negatif dan mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran saran yang konstruktif.

All members of the Audit Committee are also required to have no personal interests or affiliations that could give rise to a conflict of interest or have a negative impact, and to be able to communicate effectively, particularly in assessing various issues and providing constructive suggestions.

Rapat Komite Audit 2025

Sesuai dengan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 003.K/DK-PLNSC/2020, Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota, sedangkan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Seluruh keputusan rapat didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat bersama Direksi maupun Dewan Komisaris dengan agenda sebagai berikut.

2025 Audit Committee Meeting

In accordance with the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) established through Joint Decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 003.K/DK-PLNSC/2020, the Audit Committee is required to hold regular meetings at least once every three months. A meeting is considered valid if attended by more than ½ (one-half) of the members, while decisions are made by consensus.

All meeting decisions are documented in meeting minutes signed by the members present and submitted in writing to the Board of Commissioners. Throughout 2025, the Audit Committee held meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners with the following agenda.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda

1	14 Januari 2025
	January 14, 2025
		• Penyampaian realisasi Audit Tahun 2024 yang terdiri dari 454 Hari Orang (HO). Berdasarkan rencana Tahun 2024, realisasi atas program non-audit lebih mendominasi dibandingkan dengan program risk based audit.
		• Penyampaian area of improvement yang signifikan yaitu:
		  • Monitoring KPI pengendalian Anggaran Investasi (AI) yang belum optimal
		  • Proses pengelolaan kontrak payung belum diatur pada aturan pengadaan PLN SC
		• Penyampaian rencana Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2025 yang terdiri dari 452 HO yang terdiri dari program risk based audit dan non-audit.
		• Penyampaian draft usulan kontrak manajemen tahun 2025 yang terdiri dari 19 KPI.
		
		• Report on the implementation of the 2024 Audit, consisting of 454 person-days (PD). Based on the 2024 plan, the implementation of non-audit programs was more prominent than that of risk-based audit programs.
		• Report on significant areas for improvement, namely:
		  • Monitoring of Investment Budget (AI) control KPIs, which is not yet optimal
		  • The process for managing umbrella contracts has not yet been regulated in PLNSC's procurement rules
		• Presentation of the 2025 Annual Audit Work Plan (PKAT), consisting of 452 Person-Days (PD) and comprising both risk-based audit and non-audit programs.
		• Presentation of the draft proposal for the 2025 management contract, consisting of 19 KPIs.

2	28 Mei 2025 May 28, 2025	• Update hasil Audit Laporan Keuangan tahun 2024 • Update Kebijakan Manajemen Risiko untuk Project di atas >Rp30 miliar • Update Pendapatan & Sales Order s.d. 27 Mei 2025 • Update *Self Assessment* GCG • Update on the results of the 2024 Financial Statement Audit • Update on the Risk Management Policy for projects exceeding >Rp30 billion • Update on Revenue & Sales Orders as of May 27, 2025 • Update on the GCG Self-Assessment

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
3	8 Agustus 2025 August 8, 2025	• Realisasi Pelaksanaan PKAT s.d. TW II 2025 • Laporan Pelaksanaan Fungsi *Assurance* • Rencana Pengawasan Intern SMT II 2025 • Pencapaian KPI dan RKAP s.d. Juli 2025 • Lain-lain • Implementation progress of the PKAT through Q2 2025 • Report on the Implementation of Assurance Functions • Internal Oversight Plan for the Second Half of 2025 • Achievement of KPIs and the 2026 Budget Plan through July 2025 • Others
4	30 Oktober 2025 October 30, 2025	Pembahasan *draft* RKAP 2026 Discussion of the draft 2026 Budget Plan
5	24 Desember 2025 December 24, 2025	Realisasi Pelaksanaan PKAT s.d. Triwulan III 2025 dan Tindak Lanjut Progress on the Implementation of the PKAT through the Q3 of 2025 and Follow-Up Actions

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang di antaranya:

- Penelaahan atas Laporan Manajemen Bulanan.
- Penelaahan atas Laporan Manajemen Triwulanan
- Penelaahan atas Laporan Manajemen Tahunan
- Memberikan penilaian atas Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.

Berdasarkan kegiatan tersebut, selanjutnya Komite Audit merekomendasikan kepada manajemen sebagai berikut:

- Penyusunan dan penyampaian Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, harus tepat waktu.
- Direksi dan manajemen wajib menyampaikan upaya perbaikan kinerja baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Kinerja Komite Audit dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk penelaahan atas laporan kegiatan, tingkat kehadiran, serta efektivitas penyelenggaraan rapat selama tahun berjalan. Selain itu, efektivitas pelaksanaan fungsi Komite Audit turut menjadi bagian dari penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh pihak independen eksternal.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kinerja Komite Audit Perseroan pada tahun 2025 memperoleh predikat **"Baik"**, yang menunjukkan bahwa Komite Audit telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif serta mendukung penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Report on the Audit Committee's Activities in 2025

Throughout 2025, the Audit Committee carried out the following activities, among others:

- Review of the Monthly Management Report.
- Review of the Quarterly Management Report.
- Review of the Annual Management Report.
- Providing an assessment of the Monthly, Quarterly, and Annual Management Reports.

Based on these activities, the Audit Committee further recommends the following to management:

- The preparation and submission of Management Reports to the Board of Commissioners and Shareholders must be timely.
- The Board of Directors and management are required to present performance improvement efforts for both the short and long term.

Performance Assessment of the Audit Committee

The Audit Committee's performance is periodically evaluated by the Board of Commissioners based on the performance of its duties and responsibilities, including a review of its activity reports, attendance rates, and the effectiveness of its meetings during the current year. In addition, the effectiveness of the Audit Committee's functions is also part of the assessment of Good Corporate Governance (GCG) implementation conducted by an independent external party.

Based on the results of this evaluation, the Company's Audit Committee received a "Good" rating for its performance in 2025, indicating that the Audit Committee has effectively carried out its functions and responsibilities and supported the strengthening of good corporate governance in accordance with prevailing regulations.

Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Executive in Charge of the Nomination and Remuneration Function

Hingga tahun 2025, pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi di Perseroan telah berjalan secara efektif melalui mekanisme yang melibatkan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini memastikan bahwa proses nominasi dan penetapan remunerasi dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

As of 2025, the Company's nomination and remuneration functions have been carried out effectively through mechanisms involving shareholders and the Board of Commissioners in accordance with their respective authorities and applicable regulations. This mechanism ensures that the nomination and remuneration processes are carried out objectively, accountably, and in line with the principles of good corporate governance.

Dalam pelaksanaan fungsi remunerasi, Pemegang Saham menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan hasil penilaian kinerja, sedangkan Dewan Komisaris memberikan usulan remunerasi Direksi berdasarkan evaluasi kinerja Direksi.

In carrying out the remuneration function, Shareholders determine the remuneration of the Board of Commissioners by taking into account applicable regulations and performance evaluation results, while the Board of Commissioners proposes the remuneration of the Board of Directors based on an evaluation of the Board of Directors' performance.

Sementara itu, fungsi nominasi Direksi dilaksanakan melalui pengusulan calon oleh Pemegang Saham untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga proses pengangkatan Direksi tetap berjalan sesuai dengan mekanisme tata kelola yang berlaku.

Meanwhile, the nomination function for the Board of Directors is carried out through the submission of candidates by Shareholders, who are subsequently appointed at the General Meeting of Shareholders (GMS), ensuring that the appointment process for the Board of Directors proceeds in accordance with applicable corporate governance mechanisms.

Nominasi Dewan Komisaris

Perseroan menerapkan mekanisme nominasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan proses pencalonan dan pengangkatan Dewan Komisaris berlangsung secara objektif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris

Nomination of the Board of Commissioners

The Company implements a nomination mechanism for the Board of Commissioners in accordance with the provisions set forth in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) as part of the implementation of Good Corporate Governance. This mechanism aims to ensure that the nomination and appointment process for the Board of Commissioners is conducted objectively, transparently, and in line with the Company's needs.

The nomination process for members of the Board of Commissioners is carried out through a mechanism involving Shareholders and is determined at the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with applicable regulations. The composition and number of

ditetapkan berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Dalam proses pencalonan, setiap calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam *Board Manual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tersebut mencakup integritas dan moral yang baik, kompetensi dan pengalaman yang relevan, dedikasi, pemahaman terhadap tata kelola dan manajemen perusahaan, serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris juga wajib memenuhi persyaratan independensi dan tidak memiliki kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Nominasi Direksi

Perseroan menerapkan mekanisme nominasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai bagian dari upaya memastikan tersedianya jajaran Direksi yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Mekanisme tersebut diselenggarakan secara objektif dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan strategis Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses nominasi anggota Direksi dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Perseroan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengurusan dan pencapaian sasaran strategis perusahaan.

Dalam proses pencalonan, setiap calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur dalam *Board Manual* dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut mencakup integritas dan rekam jejak yang baik, kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, kemampuan kepemimpinan dan manajerial, serta komitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggung jawab. Selain itu, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan independensi dan tidak memiliki kondisi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas maupun menimbulkan benturan kepentingan.

members of the Board of Commissioners are determined based on the Company's needs while adhering to the provisions of the Articles of Association and the Board Manual.

During the nomination process, each candidate for the Board of Commissioners must meet the formal and material requirements as stipulated in the Board Manual and prevailing laws and regulations. These requirements include integrity and good moral character, relevant competence and experience, dedication, an understanding of corporate governance and management, and the ability to perform duties and responsibilities optimally. In addition, candidates for the Board of Commissioners must also meet independence requirements and must not be in any situation that could give rise to a conflict of interest or interfere with the performance of their duties.

Nomination of the Board of Directors

The Company implements a Board of Directors nomination mechanism in accordance with the provisions set forth in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines (Board Manual) as part of its efforts to ensure a Board of Directors that is competent, professional, and of high integrity. This mechanism is conducted objectively and transparently, taking into account the Company's strategic needs and prevailing laws and regulations.

The nomination process for Board members is carried out through a mechanism involving Shareholders and is finalized at the General Meeting of Shareholders (GMS). The composition and number of Board members are determined based on the Company's needs to support the effective execution of management functions and the achievement of the Company's strategic objectives.

During the nomination process, each candidate for the Board of Directors must meet the formal and material requirements as stipulated in the Board Manual and applicable laws and regulations. These requirements include integrity and a good track record, competencies and experience relevant to the Company's business, leadership and managerial skills, as well as a commitment to performing duties professionally and with full responsibility. In addition, candidates for the Board of Directors must also meet independence requirements and must not have any circumstances that could hinder the performance of their duties or give rise to conflicts of interest.

Organ Pendukung Direksi
Supporting Organ of the Board of Directors

Sekretaris Perusahaan
Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan pada tahun buku 2025 mengacu pada Peraturan Direksi Nomor 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Suku Cadang. Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dan *stakeholders*, sekaligus mendukung pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam seluruh kegiatan Perseroan.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Perseroan menempatkan seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta pelayanan pemberian informasi yang dibutuhkan mengenai data atau kinerja Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu.

Dasar hukum pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Perseroan juga telah mengangkat fungsi Sekretaris Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi. Untuk pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Fungsi Utama dan Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLNSC, fungsi utama dan tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary
The implementation of the Corporate Secretary's functions in fiscal year 2025 is governed by Board of Directors Decree No. 003.P/010/DIR-PLNSC/2025regarding the Organization and Work Procedures of PT PLN Suku Cadang. In carrying out its role, the Corporate Secretary acts as a liaison between the Company and its stakeholders, while also supporting compliance with laws and regulations and ensuring the consistent application of GCG principles in all of the Company's activities.

Organization Structure of the Corporate Secretary
The Company appoints a Corporate Secretary who reports directly to the President Director. The Corporate Secretary is in charge of providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners on a regular basis and/or from time to time upon request, as well as providing necessary information regarding the Company's data or performance within the limits set forth in the Company's Policy on Information, Data, and Document Management, and ensuring that other reports required by law are submitted to other stakeholders in a timely manner.

The legal basis for the appointment of the Corporate Secretary is Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The Company has also established the position of Corporate Secretary to assist the Board of Directors in carrying out its duties. The appointment and dismissal of the Corporate Secretary are carried out by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

Main Functions and Main Duties of the Corporate Secretary
In accordance with Board of Directors Regulation No. 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLNSC, the key functions and main duties of the Corporate Secretary are as follows:

Fungsi Utama

Memastikan strategi kebijakan dan pelaksanaan operasional *stakeholder management*, pengelolaan informasi publik, hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan lingkungan, pengelolaan untuk mewujudkan citra Perusahaan yang positif dalam mendukung strategi Perusahaan dan memastikan pengelolaan legal dan kepatuhan korporat.

Tugas Pokok:

a. Memastikan pengelolaan *Corporate Image* dan *Corporate Branding* dapat berjalan secara optimal, sinergis dan terintegrasi dengan program-program pengembangan korporasi untuk mendukung arah pengembangan bisnis dan hubungan dengan stakeholder.
b. Menjamin bahwa kebijakan, program, sasaran maupun proses-proses selalu mutakhir (*up-to-date*) sesuai kebutuhan Perusahaan terkait pemenuhan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
c. Memastikan bahwa persyaratan standar sistem manajemen ditetapkan, diimplementasikan dan dikelola sesuai standar terbaru guna pemenuhan terhadap persyaratan proses-proses terkait standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan.
d. Memastikan terselenggaranya kegiatan protokoler dan program kehumasan, baik internal maupun eksternal Perseroan.
e. Menjalankan fungsi mediator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Perseroan, memastikan pengelolaan komunikasi korporasi serta menginventarisasi dan mengatur kanal-kanal komunikasi yang ada di Perseroan.
f. Menjalankan fungsi seleksi (penyortiran, perumusan, klasifikasi, daftar prioritas, pemilihan kanal komunikasi dan persetujuan publikasi) atas seluruh materi informasi yang akan dipublikasikan.
g. Memastikan pengelolaan *Board Manual* dan penyelenggaraan *committee meeting*, rapat tinjauan manajemen, rapat rutin skala korporat lainnya dan kunjungan manajemen, termasuk pengelolaan pendokumentasian kegiatan.
h. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengarsipan dokumen korporat, sistem otomatisasi kesekretariatan kantor serta tata laksana surat dan kearsipan (TLSK).
i. Memastikan perencanaan, penyediaan dan pengelolaan pemeliharaan kantor/gedung, keamanan, kegiatan kesekretariatan, administrasi perkantoran, fasilitas kerja, kebersihan lingkungan kerja, untuk mendukung kelancaran aktivitas kerja serta proses bisnis.

Key Functions

Ensuring policy strategies and operational implementation in stakeholder management, public information management, harmonious relations between the Company and its stakeholders, management efforts to foster a positive corporate image in support of the Company's strategy, and ensuring legal and corporate compliance management.

Main Duties:

a. Ensure that corporate image and corporate branding management operate optimally, synergistically, and in an integrated manner with corporate development programs to support the direction of business development and stakeholder relations.
b. Ensure that policies, programs, objectives, and processes are always up-to-date in accordance with the Company's needs regarding compliance with the implemented Good Corporate Governance (GCG) standards.
c. Ensure that management system requirements are established, implemented, and managed in accordance with the latest standards to meet the requirements of processes related to the implemented Good Corporate Governance (GCG) standards.
d. Ensure the implementation of protocol activities and public relations programs, both internal and external to the Company.
e. Act as a mediator in resolving issues faced by the Company, ensuring the management of corporate communications, and inventorying and managing the Company's existing communication channels.
f. Carry out the selection process (screening, formulation, classification, prioritization, selection of communication channels, and approval of publication) for all information materials to be published.
g. Ensure the management of the Board Manual and the organization of committee meetings, management review meetings, other regular corporate-level meetings, and management visits, including the documentation of these activities.
h. Responsible for managing corporate document filing, the office secretarial automation system, and mail and records management (TLSK).
i. Ensure the planning, provision, and management of office/building maintenance, security, secretarial activities, office administration, work facilities, and workplace cleanliness to support the smooth operation of work activities and business processes.

j. Melakukan *legal review* terkait produk hukum yang diterbitkan oleh Perusahaan.
k. Memastikan bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan proteksi hukum yang optimal bagi Perseroan dan seluruh insan Perusahaan.
l. Memastikan proses advokasi hukum terkait masalah-masalah hukum yang dihadapi Perseroan baik melalui proses di Pengadilan/Litigasi maupun forum Alternative Dispute Resolution, untuk memastikan agar kepentingan hukum Perseroan terlindungi dan terhindar dari kerugian-kerugian finansial.
m. Memastikan pengelolaan dan pengembangan strategi, serta mengatur dan menjalankan sistem pengadaan barang dan atau jasa umum untuk mendukung aktivitas operasional Perseroan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
n. Menandatangani perjanjian, menetapkan pemenang pengadaan barang dan atau jasa umum sesuai dengan kewenangannya.
o. Membangun dan mengevaluasi kemitraan/kerjasama bisnis dengan penyedia barang dan atau jasa umum.
p. Melayani pelanggan internal dan eksternal Perusahaan, mitra dan memenuhi kebutuhan Perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan dan Sistem Manajemen yang diterapkan Perusahaan sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan.
q. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada internal Divisi secara *prudent* dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kajian kelayakan risiko.
r. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan internal Divisi.
s. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal Divisi.
t. Melakukan tindak lanjut atas evaluasi audit eksternal dan internal sesuai dengan kewenangan divisi.
u. Melakukan aktivitas dengan selalu menjaga Standar Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan.
v. Menjalankan kegiatan operasional internal Divisi sesuai dengan standar prosedur dan kebijakan perusahaan yang berlandaskan pada *Good Corporate Governance* (GCG).
w. Menyusun Laporan Manajemen Triwulan yang menjadi tanggung jawab internal Divisi.

j. Conduct legal reviews of legal instruments issued by the Company.
k. Ensure that the Company's legal actions do not conflict with applicable laws and regulations and provide optimal legal protection for the Company and all its employees.
l. Ensure the legal advocacy process regarding legal issues faced by the Company, whether through court proceedings/litigation or Alternative Dispute Resolution forums, to ensure that the Company's legal interests are protected and financial losses are avoided.
m. Ensure the management and development of strategies, as well as the regulation and implementation of the general goods and/or services procurement system to support the Company's operational activities in accordance with applicable regulations.
n. Sign agreements and determine the winning bidder for general goods and/or services procurement in accordance with its authority.
o. Establish and evaluate business partnerships/collaborations with general goods and/or services providers.
p. Serve the Company's internal and external customers and partners, and meet the needs of the Company and its shareholders by supporting the implementation of the Company's culture and management systems in line with the Company's Vision and Mission.
q. Assume full responsibility for planning work programs and budgets, and for prudently monitoring the implementation of work programs and budgets within the Division, taking into account the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as risk feasibility studies.
r. Identify and mitigate risks related to programs falling under the Division's internal authority.
s. Evaluate and develop the Division's internal policies.
t. Follow up on the results of external and internal audits in accordance with the Division's authority.
u. Conduct activities while consistently maintaining standards for Quality Management, Occupational Safety and Health (OSH), and the Environment.
v. Carry out the Division's internal operational activities in accordance with standard procedures and company policies based on Good Corporate Governance (GCG).
w. Prepare Quarterly Management Reports for which the Division is internally responsible.

Profil Singkat Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Catur Ruwahyunita Minardhany berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLNSC Nomor: P005/440/DIR-PLNSC/2022 yang berlaku efektif sejak 1 September 2022. Berikut profil singkat Sekretaris Perusahaan:

Brief Profile of the Corporate Secretary

As of 2025, Catur Ruwahyunita Minardhany serves as Corporate Secretary pursuant to PLNSC Board of Directors Decree No. P005/440/DIR-PLNSC/2022, effective as of September 1, 2022. The following is a brief profile of the Corporate Secretary:

Catur Ruwahyunita Minardhany

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tanggal Lahir Date of Birth	**12 Juni 1981** June 12, 1981
Masa Jabatan Term of Office	**31 Januari 2022 – saat ini** January 31, 2022 – present
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga tahun 2006; • Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga tahun 2012. • Bachelor of Law from Airlangga University in 2006; • Master of Business Law from Airlangga University in 2012.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan [POJK 51-E.2]

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan mengikuti berbagai pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Informasi mengenai pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan telah disampaikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Competency Development of the Corporate Secretary [POJK 51-E.2]

Throughout 2025, the Corporate Secretary participated in various competency development programs through training and certification. Information regarding the Corporate Secretary's competency development is provided in the Company Profile Chapter of this Integrated Report.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan terkait dengan tugas dan kewajibannya, antara lain:

a. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat, andal, serta penyampaian rekapitulasinya kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
b. Mengelola dan memperbarui informasi yang disajikan melalui media komunikasi Perseroan secara berkala, termasuk pemutakhiran kebijakan dan informasi korporasi.
c. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan materi press release atas setiap pernyataan resmi Direksi.

Implementation of the Corporate Secretary's Duties in 2025

Throughout 2025, the Corporate Secretary carried out activities related to their duties and responsibilities, including:

a. Coordinate the preparation of accurate and reliable Quarterly and Annual Management Reports, as well as the submission of their summaries to the Board of Commissioners and the GMS;
b. Manage and update information presented through the Company's communication channels on a regular basis, including updates to policies and corporate information.
c. Coordinate the preparation and provision of press release materials for every official statement by the Board of Directors.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan.
e. Memberikan layanan keterbukaan informasi dan penyampaian laporan kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan Protokol Informasi Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Bertindak sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.
g. Mengoordinasikan pengadaan barang dan jasa yang mendukung kegiatan operasional dan kebutuhan internal Perseroan.
h. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap keputusan RUPS, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian yang berlaku, serta mengoordinasikan penanganan perkara hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

d. Coordinate the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility (SER) programs.
e. Provide information disclosure services and submit reports to stakeholders in accordance with the Company's Information Protocol and applicable laws and regulations.
f. Serve as the coordinator for the organization of both the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS).
g. Coordinate the procurement of goods and services that support the Company's operational activities and internal needs.
h. Ensure the Company's compliance with GMS resolutions, the Articles of Association, applicable laws and regulations, and agreements, and coordinate the handling of legal matters, both litigation and non-litigation.

Satuan Pengawas Intern
Internal Audit Unit

Satuan Pengawas Intern melakukan fungsi pengawasan atas pengendalian internal Perseroan secara independen, objektif dan menghindari perbuatan yang dapat dianggap sebagai benturan kepentingan. Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab dan melapor secara langsung kepada Direktur Utama. Hasil penilaian Internal Audit Satuan Pengawas Intern dan rekomendasi disampaikan kepada Direksi melalui Direktur Utama.

The Internal Audit Unit performs supervisory functions over the Company's internal controls Independently, objectively, and while avoiding any actions that could be considered a conflict of interest. The Internal Audit Unit is accountable to and reports directly to the President Director. The results of the Internal Audit Unit's assessments and recommendations are submitted to the Board of Directors through the President Director.

Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawas Intern

Dalam struktur tata kelola Perusahaan, Satuan Pengawas Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta berkoordinasi dengan Komite Audit Perseroan. Sesuai Piagam Internal Audit tanggal 2 Januari 2024, struktur dan kedudukan Satuan Pengawas Intern, sebagai berikut:

- Satuan Pengawas Intern PT PLNSC adalah organisasi yang bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, agar pengelolaan Perseroan berjalan sesuai kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);

Structure and Position of the Internal Audit Unit

Within the Company's governance structure, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director and coordinates with the Company's Audit Committee. In accordance with the Internal Audit Charter dated January 2, 2024, the structure and position of the Internal Audit Unit are as follows:

- The Internal Audit Unit of PT PLNSC is an organization responsible for assisting the President Director in carrying out internal audit functions, to ensure that the Company's management operates in accordance with the principles of Good Corporate Governance;

- Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawas Intern yang secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Kepala Satuan Pengawas Intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit; serta
- Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya independensi Satuan Pengawas Intern dan wajib menjaga serta mengevaluasi fungsi Satuan Pengawas Intern.

Piagam Satuan Pengawas Intern

Perseroan telah menetapkan Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang tanggal 2 Januari 2024 sebagai landasan pelaksanaan fungsi pengawasan internal Perseroan. Piagam ini mengatur peran, kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup Satuan Pengawas Intern dalam mendukung efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Sebagai pedoman resmi bagi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Piagam ini menjadi acuan bagi Satuan Pengawas Intern dalam menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional, serta menjadi referensi bagi seluruh unit kerja dalam membangun sinergi dan pemahaman yang selaras terhadap proses pengawasan. Melalui penerapan piagam ini, Perseroan memperkuat komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Ruang Lingkup Satuan Pengawas Intern

Ruang lingkup Satuan Pengawas Intern meliputi kegiatan assurance dan konsultasi, melalui evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola (*governance*) di lingkungan Perseroan. Ruang lingkup yakni fokus audit, pengujian dan evaluasi dari Satuan Pengawas Intern dilakukan secara wajar, proporsional dan berbasis risiko baik yang bersifat strategis maupun operasional Perseroan.

- The Internal Audit Unit is led by the Head of the Internal Audit Unit, who reports structurally to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee;
- The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
- The Head of the Internal Audit Unit may communicate directly with the Board of Commissioners through the Audit Committee; and
- The President Director provides full support to ensure the independence of the Internal Audit Unit and is obligated to maintain and evaluate the functions of the Internal Audit Unit.

Internal Audit Charter

The Company has established the Internal Audit Charter of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, dated January 2, 2024, as the foundation for the implementation of the Company's internal control function. This Charter governs the role, authority, responsibilities, and scope of the Internal Audit Unit in supporting the effectiveness of internal controls, risk management, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

As the official guideline for the performance of the internal control function, the Charter serves as a reference for the Internal Audit Unit in carrying out its duties independently, objectively, and professionally, and as a reference for all work units in building synergy and a shared understanding of the monitoring process. Through the implementation of this charter, the Company strengthens its commitment to support the achievement of strategic objectives and create sustainable added value for the company.

Scope of the Internal Audit Unit

The scope of the Internal Audit Unit includes assurance and consulting activities, through the evaluation of the adequacy and effectiveness of risk management, internal controls, and governance processes within the Company. The scope, namely the focus of audits, testing, and evaluations conducted by the Internal Audit Unit, is carried out in a reasonable, proportionate, and risk-based manner, addressing both the Company's strategic and operational aspects.

Fungsi Utama dan Tugas Pokok Satuan Pengawas Intern Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLNSC, fungsi utama dan tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah sebagai berikut:

Fungsi Utama

Melaksanakan aktivitas berupa pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola perusahaan dengan berbagai metode dan pemodelan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Tugas Pokok

1. Memastikan penyusunan, evaluasi, pengembangan kebijakan dan prosedur .
2. Memastikan Perusahaan dikelola dengan prinsip niaga yang sehat dan berdasarkan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pelaksanaan audit dan menjadi counterpart dari auditor eksternal.
3. Memastikan tersedianya perencanaan tindak lanjut perbaikan temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan persyaratan standar *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan, terkait proses audit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan perusahaan berdasarkan hasil audit yang dilakukan dan melakukan monitoring atas hasil tindak lanjut rekomendasi.
5. Melakukan kegiatan pelaporan kepada eksternal auditor/pihak regulator/internal manajemen Perusahaan.
6. Melaporkan kepada Direksi terkait kinerja *Good Corporate Governance* (GCG) yang diimplementasikan dan berbagai kebutuhan perbaikan serta sosialisasi awareness atas persyaratan stakeholders di seluruh organisasi.
7. Memastikan kesiapan penyusunan kebijakan, pedoman dan sistem pemeriksaan pengelolaan proses bisnis baik secara manual maupun sistem teknologi informasi.

Main Functions and Main Duties of the Internal Audit Unit Pursuant to Board of Directors Regulation No. 003.P/010/DIR-PLNSC/2025 concerning the Organization and Work Procedures of PT PLNSC, the main functions and main duties of the Internal Audit Unit are as follows:

Main Functions

To carry out activities involving the provision of independent and objective assurance and consultation with the aim of enhancing value and improving the company's operations through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal controls, and corporate governance processes using various methods and modeling to realize the company's vision and mission.

Main Duties

1. Ensure the formulation, evaluation, and development of policies and procedures.
2. Ensure the Company is managed in accordance with sound business principles and based on Good Corporate Governance (GCG) through the conduct of audits and by serving as the counterpart to the external auditor.
3. Ensure the availability of follow-up action plans to address non-compliance findings regarding the fulfillment of Good Corporate Governance (GCG) standards implemented in connection with the audit process.
4. Provide recommendations for improving corporate management based on the results of the audits conducted and monitor the follow-up on these recommendations.
5. Conduct reporting activities to external auditors, regulatory authorities, and the Company's internal management.
6. Report to the Board of Directors regarding the performance of the implemented Good Corporate Governance (GCG) framework, various improvement needs, and awareness-raising efforts regarding stakeholder requirements throughout the organization.
7. Ensure the readiness of policies, guidelines, and audit systems for managing business processes, both manual and information technology-based.

8. Melakukan pengelolaan dan evaluasi atas kinerja Perusahaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Perusahaan, RKAP dan RJPP dalam rangka mendorong pencapaian tujuan kinerja dan upaya perbaikan berkelanjutan.

9. 9Melayani pelanggan internal dan eksternal Perusahaan, Mitra dan memenuhi kebutuhan Perusahaan dan pemegang saham, melalui dukungan terhadap implementasi Budaya Perusahaan dan Sistem Manajemen yang diterapkan Perusahaan sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan.
10. Memberikan kontribusi dalam mendukung pengembangan bisnis korporat sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
11. Bertanggung jawab penuh atas perencanaan program kerja, anggaran dan monitoring realisasi program kerja dan anggaran pada internal Divisi secara prudent dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kajian kelayakan risiko.
12. Melakukan identifikasi risiko dan mitigasi risiko terkait program-program yang menjadi kewenangan internal Divisi.
13. Mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan internal Divisi.
14. Melakukan tindak lanjut atas evaluasi audit eksternal dan internal sesuai dengan kewenangan divisi.
15. Melakukan aktivitas dengan selalu menjaga Standar Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan.
16. Menjalankan kegiatan operasional internal Divisi sesuai dengan standar prosedur dan kebijakan perusahaan yang berlandaskan pada Good Corporate Governance (GCG).
17. Menyusun Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan yang menjadi tanggung jawab internal Divisi.

8. Manage and evaluate the Company's performance in accordance with the provisions of the Company's Performance Contract, Annual Business Plan (RKAP), and Medium-Term Business Plan (RJPP) to drive the achievement of performance goals and foster continuous improvement.
9. Serve the Company's internal and external customers and partners, and meet the needs of the Company and its shareholders by supporting the implementation of the Company's culture and management systems in line with the Company's Vision and Mission.
10. Contribute to supporting corporate business development in accordance with one's duties and responsibilities.
11. Take full responsibility for planning work programs and budgets, and for prudently monitoring the implementation of these programs and budgets within the Division, taking into account the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (RKAP), as well as risk feasibility studies.
12. Identify and mitigate risks related to programs falling under the Division's internal authority.
13. Evaluate and develop the Division's internal policies.
14. Follow up on the results of external and internal audits in accordance with the Division's authority.
15. Conduct activities while consistently maintaining Quality Management, Occupational Safety and Health (OSH), and Environmental Standards.
16. Carry out the Division's internal operational activities in accordance with standard procedures and company policies based on Good Corporate Governance (GCG).
17. Prepare Monthly, Quarterly, Semiannual, and Annual Management Reports that fall under the Division's internal responsibility.

Profil Singkat Kepala Satuan Pengawas Intern

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sepanjang tahun 2025, fungsi pengawasan internal dijalankan oleh Sudiyono yang menjabat sebagai Kepala Internal Audit berdasarkan Keputusan Direksi Nomor P002/440/DIR-PLNSC/2024 yang berlaku efektif per 1 Februari 2024. Sehubungan dengan penyesuaian nomenklatur jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor P023/440/DIR-PLNSC/2025, terhitung per 31 Desember 2025 beliau diberhentikan dari jabatan Kepala Internal Audit dan selanjutnya diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern dengan masa jabatan efektif mulai 1 Januari 2026.

Profil pejabat Kepala Satuan Pengawas Intern adalah sebagai berikut:

Brief Profile of the Head of Internal Audit Unit

The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director and reports directly to the President Director. Throughout 2025, internal audit functions were carried out by Sudiyono, who served as Head of Internal Audit pursuant to Board of Directors Decree No. P002/440/DIR-PLNSC/2024, effective as of February 1, 2024. In connection with adjustments to position nomenclature in accordance with prevailing regulations, based on Board of Directors Decree No. P023/440/DIR-PLNSC/2025, effective as of December 31, 2025, he was dismissed from the Head of Internal Audit position and subsequently appointed as Head of the Internal Audit Unit, with his term of office effective as of January 1, 2026.

The profile of the Head of the Internal Audit Unit is as follows:

Sudiyono

Kepala Satuan Pengawas Intern
Head of Internal Audit

Kewarganegaraan Citizenship	**Indonesia**
Domisili Domicile	**Jakarta**
Tanggal Lahir Date of Birth	**17 Januari 1972** January 17, 1972
Riwayat Pendidikan Educational Background	• **Sarjana Teknik Elektro dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2011;** • **Magister Teknik jurusan Teknik Industri di Universitas Mercu Buana Jakarta tahun 2019.** • Bachelor of Electrical Engineering from the University of August 17, 1945, Jakarta, in 2011; • Master of Engineering majoring in Industrial Engineering from Mercu Buana University, Jakarta, in 2019.
Pelatihan dan Sertifikasi Training and Certification	**Beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan maupun sertifikasi antara lain: Audit Management System 2.0, Manajemen Resiko, Pelatihan ISO 9001, 14001 dan 45001, Qualified Internal Auditor (QIA) tingkat Manajerial hingga Certified Risk Governance Professional (CRGP).** Actively participated in various training programs and certifications, including Audit Management System 2.0, Risk Management, ISO 9001, 14001, and 45001 training, Advanced Qualified Internal Auditor (QIA), and Certified Risk Governance Professional (CRGP).
Riwayat Jabatan Professional Background	**Sebelumnya, Beliau mengawali karir di PT Pembangkitan Jawa Bali (sekarang PT PLN Nusantara Power) pada tahun 1992 sebagai Operator Pembangkit hingga. Selanjutnya, beliau menduduki posisi sebagai Auditor Internal di PT Prima Layanan Niaga Suku (PT PLN Suku Cadang) sejak tahun 2024.** Began his career at PT Pembangkitan Jawa Bali (now PT PLN Nusantara Power) in 1992 as a Power Plant Operator. Subsequently, he has held the position of Internal Auditor at PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PT PLN Suku Cadang) since 2024.

Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawas Intern

Pada tahun 2025, Satuan Pengawas Intern mengikuti berbagai pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Informasi mengenai pengembangan kompetensi telah disampaikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawas Intern

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2025 telah disahkan oleh Direktur Utama pada 14 Januari 2025. PKAT 2025 mencakup program *risk-based* audit, bidang mutu, lingkungan, dan K3 berdasarkan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018, serta program non-audit yang meliputi pelaksanaan e-LHKPN, pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, dan penyusunan tata kelola. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan proses bisnis sesuai prinsip GCG, sekaligus memperkuat peran Satuan Satuan Pengawas Intern sebagai strategic business partner yang independen dan objektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan.

Laporan Hasil Audit (LHA) Internal yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PLNSC sejak tahun 2021 hingga 2025 disampaikan pada tabel di bawah ini:

Competency Development for the Internal Audit Unit

In 2025, the Internal Audit Unit participated in various competency development programs through training and certification. Information regarding competency development has been provided in the Company Profile section of this Integrated Report.

Implementation of the Internal Audit Unit's Duties

The 2025 Annual Audit Work Program (PKAT) was approved by the President Director on January 14, 2025. The 2025 PKAT includes risk-based audit programs covering quality, environment, and OHS in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards, as well as non-audit programs covering the implementation of e -LHKPN, control of gratuities, the Whistleblowing System, and the development of corporate governance. The implementation of these programs aims to ensure the effectiveness, efficiency, and compliance of business processes in accordance with the principles of GCG, while strengthening the role of the Internal Audit Unit as an independent and objective strategic business partner in supporting the achievement of the Company's vision and mission.

The Internal Audit Reports (LHA) conducted by PLNSC's Internal Audit Unit from 2021 to 2025 are presented in the following table:

Tahun Audit Audit Period	**Rekomendasi** Recommendation	**Closed**	**Monitor**
2025	20	8	14
2024	5	4	1
2023	43	43	0
2022	21	21	0
2021	52	52	0
Temuan Audit Audit Findings	**141**	**128**	**15**

Auditor Eksternal
External Auditor

Auditor Eksternal bertugas memberikan penilaian independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan disusun secara wajar, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perseroan memberikan hak kepada Auditor Eksternal untuk mengakses seluruh informasi dan dokumen yang diperlukan, termasuk data keuangan maupun data pendukung lainnya, guna mendukung proses audit sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

ensure that the Company's financial statements are prepared fairly, accurately, and in accordance with applicable Financial Accounting Standards (SAK). In carrying out this duty, the Company grants the External Auditor the right to access all necessary information and documents, including financial data and other supporting data, to facilitate the audit process in accordance with applicable professional standards.

Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2025 ditetapkan melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 30 Juni 2025. RUPS Tahunan juga memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk memutuskan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan akan diputuskan secara sirkuler.

The External Auditor responsible for auditing the Company's financial statements for the 2025 fiscal year was appointed at the Annual General Meeting of Shareholders held on June 30, 2025. The Annual General Meeting of Shareholders also granted the Majority Shareholder the authority to select the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025, as determined by circular resolution.

Kantor Akuntan Publik dan Jasa Audit

Dalam pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja, dan Kepatuhan Tahun 2025, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi, independensi, dan kredibilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan audit. Auditor Eksternal melaksanakan penugasannya berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam memberikan opini atas laporan yang diaudit.

Public Accounting Firm and Audit Services

In conducting the audit of the 2025 Financial Statements, Performance Evaluation, and Compliance, the Company appoints a public accounting firm that possesses the necessary competence, independence, and credibility in accordance with applicable regulations, taking into account the effectiveness and quality of the audit process. The External Auditor performs its duties in accordance with the Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and upholds the principles of independence, objectivity, and professionalism in issuing an opinion on the audited reports.

Auditor Eksternal yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja, dan Kepatuhan Perseroan selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The External Auditor that has conducted audits of the Company's Financial Statements, Performance Evaluation, and Compliance for the past 4 (four) years is as follows:

Tahun Year	**Nama KAP** Name of Public Accountant	**Jasa Audit Lain** Other Audit Services
2025	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PricewaterhouseCoopers)	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit
	Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Adhi Public Accounting Firm Cahyadi and Adhi	• Audit Laporan Kinerja • Audit Laporan Kepatuhan • Performance Report Audit • Compliance Report Audit

Tahun Year	Nama KAP Name of Public Accountant	Jasa Audit Lain Other Audit Services
2024	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PricewaterhouseCoopers)	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit
	Kantor Akuntan Publik Joachim, Adhi, Piter, Poltak & Rekan (LEA Indonesia) Public Accounting Firm Joachim, Adhi, Piter, Poltak & Partner (LEA Indonesia)	• Audit Laporan Kinerja • Audit Laporan Kepatuhan • Performance Report Audit • Compliance Report Audit
2023	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PricewaterhouseCoopers)	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit
	Kantor Akuntan Publik Joachim, Adhi, Piter, Poltak & Rekan (LEA Indonesia) Public Accounting Firm Joachim, Adhi, Piter, Poltak & Partner (LEA Indonesia)	• Audit Laporan Kinerja • Audit Laporan Kepatuhan • Performance Report Audit • Compliance Report Audit
2022	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner (PricewaterhouseCoopers)	• Audit Laporan Keuangan • Audit Laporan Kinerja • Audit Laporan Kepatuhan • Financial Statement Audit • Performance Report Audit • Compliance Report Audit

Jasa Lain yang Diberikan

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk juga ditugaskan, tidak hanya melakukan audit Laporan Keuangan namun juga melakukan jasa audit lainnya seperti Audit Laporan Kinerja dan Audit Laporan Kepatuhan sejak tahun 2022 hingga Laporan Terintegrasi ini diterbitkan.

Other Services Provided

The appointed public accounting firm has also been tasked not only with auditing the Financial Statements but also with performing other audit services, such as Performance Statement Audits and Compliance Statement Audits, from 2022 until the publication of this Integrated Report.

Audit Pemegang Saham Mayoritas

Sebagai pemegang saham mayoritas PT PLN Suku Cadang, PLN Nusantara Power melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) juga melakukan audit kepada Perseroan untuk menjamin proses bisnis berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Adapun rekapitulasi terhadap laporan hasil audit eksternal yang dilakukan oleh PLN Nusantara Power dan Kantor Akuntan Publik selama 5 (lima) tahun terakhir yakni sebagai berikut:

Audit of the Majority Shareholder

As the majority shareholder of PT PLN Suku Cadang, PLN Nusantara Power, through its Internal Audit Unit (SPI), also conducts audits of the Company to ensure that business processes are carried out effectively, efficiently, and economically. The summary of the external audit reports conducted by PLN Nusantara Power and the Public Accounting Firm over the past 5 (five) years is as follows:

Tahun Audit Audit Period	SPI PLN NP			KAP		
	Rekomendasi Recommendation	Closed	Open	Rekomendasi Recommendation	Closed	Open
2025	-	-	-	-	-	1
2024	-	-	-	-	-	-
2023	17	17	-	1	1	-
2022	16	16	-	2	2	-
2021	22	22	-	2	2	-
Temuan Audit Audit Findings						

Efektivitas Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

Komite Audit berkoordinasi dengan Satuan Satuan Pengawas Intern dalam melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal guna memastikan bahwa setiap temuan audit ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan dan operasional secara berkelanjutan. Melalui implementasi rekomendasi hasil audit secara konsisten, Perseroan berkomitmen untuk meminimalkan potensi temuan serupa pada periode audit berikutnya.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan Auditor Eksternal disampaikan melalui opini atas Laporan Keuangan Perseroan sebagai bentuk penilaian independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk tahun buku 2025, Perseroan memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan, memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan.

Effectiveness of Audits Conducted by Public Accountants

The Audit Committee coordinates with the Internal Audit Unit in evaluating the effectiveness of external audits to ensure that all audit findings are properly addressed in accordance with applicable authority. Such follow-up is part of the Company's efforts to strengthen internal controls, improve the quality of corporate governance, and drive sustainable improvements in financial and operational performance. Through the consistent implementation of audit recommendations, the Company is committed to minimize the potential for similar findings in subsequent audit periods.

Audit Results

The results of the External Auditor's examination are presented through an opinion on the Company's Financial Statements as an independent assessment of the fairness of the financial statements' presentation. For the fiscal year 2025, the Company received an Unqualified Opinion (WTP), indicating that the financial statements have been prepared and presented fairly in all material respects in accordance with applicable Financial Accounting Standards (SAK). This achievement reflects the Company's commitment to maintaining the quality of financial reporting, strengthening good corporate governance, and enhancing stakeholders' confidence in the financial information presented.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai bagian integral dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kegiatan Strategis BUMN. Implementasi SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas operasional, keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta perlindungan terhadap aset dan investasi Perseroan melalui penerapan empat komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

The Company implements an Internal Control System (ICS) as an integral part of its commitment to good corporate governance in accordance with Minister of SOEs Regulation No. PER-2 of 2023 on Corporate Governance and Strategic Activities of State-Owned Enterprises. The implementation of the ICS aims to provide reasonable assurance regarding operational effectiveness, the reliability of reporting, compliance with laws and regulations, and the protection of the Company's assets and investments through the application of four key components: the control environment, control activities, information and communication systems, and monitoring activities.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perseroan diimplementasikan sejalan dengan prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mencakup lima komponen penunjang efektivitas pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Perseroan membangun sikap dan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal yang diimplementasikan melalui:

a. Budaya Perusahaan;
b. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), melalui pemberian buku saku Code of Conduct yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, serta semua Insan Perseroan;
c. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi pada lingkungan pengendalian;
d. Penandatanganan Pakta Integritas; dan
e. Kompetensi karyawan, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Penilaian Risiko

Satuan Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai serta mengelola risiko usaha yang relevan.

Internal Control Framework

The Company's Internal Control System is implemented in accordance with the principles of the Internal Control—Integrated Framework established by COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), which encompasses the following five components that support the effectiveness of internal control:

1. Control Environment

The Company fosters an attitude and awareness of the importance of internal controls, which are implemented through:

a. Corporate Culture;
b. The implementation of Good Corporate Governance (GCG), through the distribution of a Code of Conduct pocket guide that has been disseminated and shared with the Board of Commissioners, committees, the Board of Directors, and all Company personnel;
c. The Board of Directors' attention to and guidance on the control environment;
d. The signing of Integrity Pacts; and
e. e.Employee competence, organization, and human resource development.

2. Risk Assessment

The Risk Management and Compliance Unit conducts a review of business risk management, which involves identifying, analyzing, evaluating, assessing, and managing relevant business risks.

3. Prosedur Pengendalian

Perseroan menetapkan standarisasi proses kerja yang mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan. Terkait dengan aktivitas pengendalian, Perseroan telah diterapkan diantaranya:

a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan;
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait;
c. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan); dan
d. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

Pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan *Audited* Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Internal Audit Unit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik).

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan elemen- elemen yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Perseroan. Terkait informasi dan komunikasi, Perseroan telah menyediakan media diantaranya melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, mail moderator, Website Perseroan, intranet, Portal dan media lain lainnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dilakukan secara berkala melalui performance check oleh Pembina Teknis, Satuan Pengawas Intern oleh Divisi Pengawasan Internal & Quality Assurance dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).

3. Control Procedures

The Company has established standardized work processes that encompass the actions taken within a control process for the Company's activities at every level and in every work unit within the Company's organizational structure. Regarding control activities, the Company has implemented, among other things:

a. The proper exercise of authority to carry out an activity;
b. The division of duties and responsibilities for related activities;
c. The separation of operational and custodial functions from accounting (bookkeeping) functions; and
d. The preparation and use of adequate documents and records.

Documentation and recording of the Annual Audited Financial Statements have been subject to physical controls over assets and records, as well as independent performance reviews conducted by both Internal Audit and External Audit (Public Accounting Firm).

4. Information and Communication

Information and communication are critical elements of a company's internal control system. Information regarding the control environment, risk assessment, control procedures, and monitoring is required by management to establish operational guidelines and ensure compliance with applicable laws and regulations governing the Company. Regarding information and communication, the Company has provided various channels, including through Work Meetings, Coordination Meetings, awareness sessions, moderated email lists, the Company's website, intranet, portal, and other media.

5. Monitoring

Monitoring is conducted periodically through performance checks by Technical Advisors, internal audits by the Internal Oversight & Quality Assurance Division, and external audits (BPK, BPKP, KAP).

Dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal, Perseroan menetapkan pemisahan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas antarpegawai dengan tetap mendorong koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Struktur organisasi dirancang untuk memastikan adanya mekanisme *checks and balances* yang efektif, sehingga setiap fungsi pengendalian dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui penerapan pemisahan fungsi yang memadai, Perseroan berupaya meminimalkan risiko penyimpangan serta memperkuat efektivitas pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Perseroan telah mengimplementasikan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) yang berada di bawah pengawasan Direksi dan unit kerja terkait. Penerapan ICoFR dilaksanakan secara berjenjang oleh Direksi, manajemen, dan seluruh personel yang berwenang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan serta memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain mengacu pada kerangka SPI, Perseroan juga menerapkan empat tahapan utama dalam proses implementasi dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, yaitu:

1. Penetapan kebijakan dan memberikan pemahaman atas penerapannya;
2. Membuat desain sistem pengendalian internal;
3. Penerapan atas desain sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dan melaksanakan reviu secara berkala; dan
4. Peningkatan keandalan sistem pengendalian internal.

Untuk meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), Perseroan melakukan analisis tahunan atas hasil audit dengan mengelompokkan temuan berdasarkan sasaran dan komponen dalam kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi Perseroan dalam melakukan perbaikan secara terarah serta mengevaluasi efektivitas pengendalian internal terhadap aspek operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

In implementing the Internal Control System, the Company establishes a distinct separation of duties, functions, and responsibilities among employees while continuing to encourage coordination and synergy among work units. The organizational structure is designed to ensure effective checks and balances, so that each control function can operate optimally and sustainably. Through the implementation of adequate segregation of duties, the Company strives to minimize the risk of irregularities and strengthen the effectiveness of oversight in support of achieving the Company's objectives.

Financial and Operational Controls

As part of strengthening the Internal Control System (ICS), the Company has implemented Internal Control over Financial Reporting (ICoFR), which is under the supervision of the Board of Directors and relevant work units. The implementation of ICoFR is carried out in a tiered manner by the Board of Directors, management, and all authorized personnel to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and to ensure that the preparation of financial statements for external parties complies with Financial Accounting Standards and generally accepted accounting principles.

In addition to reference to the SPI framework, the Company also applies four main stages in the process of implementing and developing the Internal Control System as part of its efforts to continuously improve the effectiveness of controls and risk management, namely:

1. Establishing policies and ensuring understanding of their application;
2. Designing the internal control system;
3. Implementing the established internal control system design and conducting periodic reviews; and
4. Enhancing the reliability of the internal control system.

To improve the effectiveness of the Internal Control System (ICS), the Company conducts an annual analysis of audit results by categorizing findings based on objectives and components within the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) framework. The results of this analysis serve as the basis for the Company to implement targeted improvements and evaluate the effectiveness of internal controls regarding operational aspects, the reliability of reporting, and compliance with prevailing regulations.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fondasi utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui pengelolaan operasional yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi, di mana Direksi, manajemen, dan seluruh insan Perseroan wajib memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal dalam setiap pelaksanaan tugas dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Perseroan dapat memitigasi risiko kepatuhan sekaligus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Proses evaluasi tersebut didukung oleh pelaksanaan penilaian risiko oleh Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis serta pengujian efektivitas pengendalian oleh Satuan Satuan Pengawas Intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kecukupan sistem pengendalian yang diterapkan.

Sepanjang tahun 2025, Satuan Satuan Pengawas Intern melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal di seluruh jenjang organisasi, sementara implementasi Sistem Pengendalian Internal dijalankan secara konsisten oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh insan Perseroan melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya proses operasional yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Compliance with Laws and Regulations

Compliance with laws and regulations is one of the key foundations for implementing good corporate governance at the Company. Therefore, the Company is committed to ensure that all business activities are conducted in accordance with prevailing laws and regulations through professional, transparent, accountable, and ethical operational management, thereby supporting business sustainability and growth.

This commitment is realized through the implementation of a culture of compliance at all levels of the organization, where the Board of Directors, management, and all employees of the Company are required to understand and comply with laws and regulations as well as internal policies in the performance of their duties and decision-making processes. In this way, the Company can mitigate compliance risks while maintaining the trust of its stakeholders.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company periodically evaluates the effectiveness of its Internal Control System as part of its efforts to strengthen corporate governance and risk management. This evaluation process is supported by risk assessments conducted by the Business Planning and Development Division and tests of control effectiveness performed by the Internal Audit Unit, thereby providing reasonable assurance regarding the adequacy of the implemented control system.

Throughout 2025, the Internal Audit Unit conducted evaluations of the effectiveness of internal controls at all levels of the organization, while the implementation of the Internal Control System was consistently carried out by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Company through the application of applicable policies and procedures. The results of this evaluation serve as the basis for management to make continuous improvements and refinements to support the creation of operational processes that are effective, efficient, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Manajemen Risiko
Risk Management

Perseroan menyadari bahwa setiap aktivitas bisnis memiliki potensi risiko yang dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan pengelolaan Manajemen Risiko yang terstruktur dan sistematis sebagai bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan strategis Perusahaan.

The Company recognizes that every business activity carries potential risks that may stem from both internal and external factors. Therefore, the Company implements a structured and systematic risk management framework as part of its efforts to mitigate various potential risks that could affect the Company's business continuity and the achievement of its strategic objectives.

Melalui penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional melalui proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkesinambungan. Perseroan juga terus memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan risiko guna meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang dinamis. Dengan demikian, penerapan Manajemen Risiko diharapkan dapat mendukung terciptanya operasional yang sehat, memperkuat ketahanan usaha, serta meningkatkan kemampuan Perseroan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis secara berkelanjutan.

Through the implementation of effective Risk Management, the Company ensures that every operational activity undergoes a continuous process of risk identification, assessment, control, and monitoring. The Company also continues to strengthen its risk oversight and management systems to enhance its readiness to face various dynamic business challenges. Thus, the implementation of Risk Management is expected to support sound operations, strengthen business resilience, and enhance the Company's ability to sustainably realize its vision, mission, and strategic objectives.

Komitmen Manajemen Perseroan

Perseroan senantiasa mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis agar tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*). Penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan ketahanan Perseroan dalam menghadapi dinamika bisnis.

Untuk mendukung efektivitas implementasinya, Perseroan memperkuat fungsi Manajemen Risiko melalui keterlibatan seluruh jajaran manajemen dan unit kerja sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Perseroan juga meyakini bahwa keberhasilan penerapan Manajemen Risiko bergantung pada komitmen yang kuat dari seluruh insan Perusahaan, mulai dari manajemen hingga karyawan, dalam membangun budaya sadar risiko di setiap aktivitas operasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mekanisme, dan langkah strategis dalam pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi: [GRI 102-11]

Commitment of the Company's Management

The Company continuously identifies, analyzes, and manages risks that could affect the achievement of its strategic goals and objectives to ensure they remain within an acceptable risk level (risk appetite). Risk management is implemented on an ongoing basis as part of efforts to maintain business continuity and enhance the Company's resilience in the face of business dynamics.

To support the effectiveness of its implementation, the Company strengthens its Risk Management function through the involvement of all levels of management and business units, in accordance with their respective roles and authorities in identifying and managing risks. The Company also believes that the success of Risk Management implementation depends on a strong commitment from everyone in the Company, from management to employees, to foster a risk-aware culture in every operational activity. This commitment is realized through various policies, mechanisms, and strategic measures in risk management, which include, among others: [GRI 102-11]

- Memastikan bahwa implementasi penerapan Manajemen Risiko di Perseroan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
- Memastikan bahwa Perseroan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani Manajemen Risiko;
- Memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh semua kegiatan;
- Memastikan bahwa kinerja sistem Manajemen Risiko tersosialisasi di seluruh jenjang organisasi dan secara berkesinambungan;
- Melakukan pemantauan serta kaji ulang terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko; serta
- Memastikan bahwa pelaksanaan Manajemen Risiko searah dengan kebijakan perusahaan serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*), Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan tindakan manajemen. Penerapan Manajemen Risiko telah terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian sasaran strategis maupun operasional di seluruh proses bisnis Perseroan, termasuk dalam mekanisme pelaporan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka Kerja Manajemen Risiko merupakan landasan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di lingkungan Perseroan. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi Perseroan serta dilaksanakan berdasarkan prinsip *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) yang terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional guna mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan. Sejalan dengan perkembangan lingkungan usaha, Perseroan secara berkala melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan, proses, dan praktik Manajemen Risiko agar penerapannya tetap efektif, relevan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 012.P/010/DIR-PLNSC/2025 tentang Kebijakan Pelaksana Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Perseroan meliputi:

- Ensuring that the implementation of Risk Management within the Company is carried out consistently and continuously;
- Ensuring that the Company has adequate human resources to handle Risk Management;
- Ensuring that the implementation of Risk Management minimizes the potential for losses arising from all activities;
- Ensuring that the performance of the Risk Management system is communicated throughout all levels of the organization on an ongoing basis;
- Monitoring and reviewing the implementation of Risk Management; and
- Ensuring that the implementation of Risk Management aligns with company policies and complies with applicable laws and regulations.

In accordance with the Corporate Governance Code (GCG Code), the Company consistently considers risk factors in every decision-making process and management action. The implementation of Risk Management has been integrated into the planning, execution, and achievement of strategic and operational objectives across all of the Company's business processes, including in reporting mechanisms as part of efforts toward continuous improvement and performance enhancement.

Risk Management Framework

The Risk Management Framework serves as the foundation for the implementation of Integrated Risk Management throughout the Company. The implementation of Integrated Risk Management is intended to protect and create value for the Company and is carried out based on the principles of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), which are integrated into all business and operational activities to support the achievement of the Company's strategic objectives. In line with developments in the business environment, the Company periodically enhances its Risk Management policies, processes, and practices to ensure that their implementation remains effective, relevant, and in accordance with the prevailing regulations.

Pursuant to the Board of Directors Regulation No. 012.P/010/DIR-PLNSC/2025 concerning the Implementing Policy for the General Guidelines on Integrated Risk Management, the Company's Risk Management Framework comprises:

1. Organisasi
   Mengatur struktur, peran, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang membawahi fungsi Keuangan dan Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Unit Kerja Pemilik Risiko, serta Satuan Pengawasan Intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

2. Penetapan Strategi dan Perencanaan Manajemen Risiko
   Mengintegrasikan strategi Manajemen Risiko ke dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) melalui penetapan tujuan, ruang lingkup risiko, Risk Appetite Statement yang meliputi kapasitas risiko, selera risiko, toleransi risiko, dan batasan risiko, serta penetapan kriteria risiko.
3. Proses Manajemen Risiko
   Menerapkan proses Manajemen Risiko secara terstruktur melalui tahapan penilaian risiko (*risk assessment*), perlakuan risiko, pemantauan dan evaluasi risiko, serta pelaporan risiko, yang didukung dengan mekanisme umpan balik, perbaikan berkelanjutan, dan audit internal.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Menyediakan sistem informasi yang mendukung penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Manajemen Risiko secara terintegrasi serta menyediakan informasi risiko yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan.
5. Budaya Risiko
   Membangun budaya risiko melalui komunikasi, sosialisasi, dan penerapan Sistem Pengendalian Internal guna meningkatkan kesadaran risiko di seluruh jenjang organisasi.
6. Pengelolaan Risiko Terintegrasi Perusahaan
   Mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di seluruh organisasi dengan melibatkan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam pengelolaan risiko Perseroan.
7. Indeks Kematangan Pengelolaan Risiko
   Mengukur tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko secara berkala melalui *Risk Maturity Index* (RMI) sebagai dasar evaluasi dan peningkatan pengelolaan risiko.

1. Organization
   Regulates the structure, roles, authorities, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Director overseeing the Finance and Risk Management function, the Risk Monitoring Committee, the Risk Management and Compliance function, Risk Owner Work Units, and the Internal Audit Unit in the implementation of Integrated Risk Management.
2. Risk Management Strategy and Planning
   Integrates the Risk Management strategy into the preparation of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company Work Plan and Budget (RKAP) through the establishment of objectives, risk scope, the Risk Appetite Statement, including risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limits, as well as the determination of risk criteria.
3. Risk Management Process
   Implements a structured Risk Management process through the stages of risk assessment, risk treatment, risk monitoring and evaluation, and risk reporting, supported by feedback mechanisms, continuous improvement, and internal audit.

4. Risk Management Information System
   Provides an information system that supports the integrated preparation, monitoring, evaluation, and reporting of Risk Management, while providing reliable risk information to support decision-making.

5. Risk Culture
   Develops a risk culture through communication, socialization, and the implementation of the Internal Control System to enhance risk awareness at all levels of the organization.
6. Enterprise Integrated Risk Management
   Coordinates the implementation of Integrated Risk Management throughout the organization by involving the Risk Management and Compliance function in the management of the Company's risks.
7. Risk Management Maturity Index
   Measures the maturity level of Risk Management implementation periodically through the Risk Management Maturity Index (RMI) as the basis for evaluating and improving risk management practices.

8. Dokumentasi dan Pelaporan
   Mendokumentasikan kejadian kerugian (*loss event database*), menyusun pelaporan early warning, serta menyampaikan laporan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai bagian dari pengelolaan dan pengendalian risiko Perseroan.

Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, dan menangani risiko secara berkala guna mendukung pencapaian sasaran strategis Perseroan. Proses Manajemen Risiko diawali dengan identifikasi risiko yang dikaitkan dengan sasaran strategis Perseroan untuk memastikan risiko-risiko utama telah diidentifikasi, dipahami, dan dikelola sesuai dengan strategi pengelolaan risiko yang ditetapkan.

Implementasi Proses Manajemen Risiko di Perseroan meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian Risiko
   Penilaian risiko merupakan rangkaian proses yang meliputi identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, dan prioritisasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali sumber, kejadian, serta dampak risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis. Selanjutnya, risiko diukur berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya, kemudian diprioritaskan melalui pemetaan tingkat risiko untuk menentukan risiko utama yang menjadi fokus pengelolaan Perseroan.
2. Perlakuan Risiko
   Berdasarkan hasil penilaian risiko, Perseroan menetapkan langkah-langkah perlakuan risiko sesuai dengan tingkat prioritas dan karakteristik masing-masing risiko. Perlakuan risiko dilakukan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana mitigasi untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak risiko, serta memastikan risiko berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan dan Evaluasi Risiko
   Perseroan melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko, efektivitas pelaksanaan rencana mitigasi, serta perubahan profil risiko. Tahap ini bertujuan untuk memastikan pengendalian risiko tetap memadai dan responsif terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

8. Documentation and Reporting
   Documents loss events through a loss event database, prepares early warning reports, and submits Integrated Risk Management reports as part of the Company's risk management and control process.

Risk Management Process

Risk Management Process is a structured and systematic process for identifying, assessing, reporting, and managing risks periodically to support the achievement of the Company's strategic objectives. Risk Management Process begins with risk identification linked to the Company's strategic objectives to ensure that key risks are identified, understood, and managed in accordance with the established risk management strategy.

The implementation of Risk Management Process within the Company is carried out through the following stages:

1. Risk Assessment
   Risk assessment consists of a series of processes that include risk identification, risk quantification, and risk prioritization. Risk identification is carried out to identify the sources, events, and impacts of risks that may affect the achievement of the Company's strategic objectives. Subsequently, risks are assessed based on their likelihood and impact, and then prioritized through risk mapping to determine the key risks that become the focus of the Company's risk management.
2. Risk Treatment
   Based on the results of the risk assessment, the Company determines appropriate risk treatment measures in accordance with the priority level and characteristics of each risk. Risk treatment is carried out through the development and implementation of mitigation plans to reduce both the likelihood and impact of risks, while ensuring that risks remain within the established risk tolerance.
3. Risk Monitoring and Evaluation
   The Company conducts periodic monitoring and evaluation of risk developments, the effectiveness of mitigation plan implementation, and changes in the risk profile. This stage is intended to ensure that risk controls remain adequate and responsive to changes in both the internal and external environment.

4. Pelaporan Risiko
   Hasil pelaksanaan Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang sebagai dasar pengambilan keputusan, pemantauan kinerja pengelolaan risiko, serta penyempurnaan implementasi Manajemen Risiko.

Seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko didukung oleh mekanisme umpan balik (feedback), perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), serta Satuan Pengawas Intern terhadap implementasi Manajemen Risiko untuk memastikan proses pengelolaan risiko berjalan secara efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan Perseroan.

Struktur dan Peran Manajemen Risiko

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Perseroan dibentuk melalui Tim Implementasi Enterprise Risk Management (ERM) untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif di seluruh unit kerja. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 008.K/020/DIR-PLNSC/2025 tentang Pembentukan Tim Implementasi Enterprise Risk Management (ERM), struktur dan pembagian tugas Manajemen Risiko Perseroan terdiri atas:

1. Ketua Tim Implementasi ERM
   Bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Implementasi ERM, memastikan penyusunan dan pelaksanaan Risk Management Plan, serta memastikan proses Manajemen Risiko dijalankan oleh masing-masing Risk Leader.

2. Sekretaris Tim Implementasi ERM
   Bertugas mengoordinasikan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, memastikan penyusunan dokumen dan pelaporan Manajemen Risiko sesuai ketentuan, menyiapkan dokumen untuk keperluan audit, serta mengoordinasikan usulan peserta pelatihan Manajemen Risiko.

3. Risk Leader/Risk Champion
   Bertugas menyusun dokumen Manajemen Risiko sesuai lingkup kewenangannya, melaksanakan pengelolaan risiko secara berkelanjutan, memantau Key Risk Indicator (KRI) dan efektivitas mitigasi risiko, mendokumentasikan proses bisnis beserta risiko dan pengendaliannya, menyiapkan sumber daya yang diperlukan, serta memastikan penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Risk Reporting
   The implementation of Risk Management is documented and reported periodically to the authorized parties as the basis for decision-making, monitoring the effectiveness of risk management, and continuously improving the implementation of Risk Management.

All stages of the Risk Management Process are supported by feedback mechanisms, continuous improvement, and oversight by the Internal Audit Unit over the implementation of Risk Management to ensure that the risk management process is carried out effectively, efficiently, and in accordance with the Company's needs.

Structure and Roles of Risk Management

The Company's Risk Management organization structure has been established through the Enterprise Risk Management (ERM) Implementation Team to support the effective implementation of Risk Management across all work units. Pursuant to the Board of Directors' Decree No. 008.K/020/DIR-PLNSC/2025 concerning the Establishment of the Enterprise Risk Management (ERM) Implementation Team, the Company's Risk Management structure and roles are as follows:

1. Head of the ERM Implementation Team
   Responsible for coordinating the implementation of the ERM Implementation Team's duties, ensuring the preparation and implementation of the Risk Management Plan, and ensuring that the Risk Management process is carried out by each Risk Leader.
2. Secretary of the ERM Implementation Team
   Responsible for coordinating communication and consultation with stakeholders, ensuring the preparation of Risk Management documentation and reporting in accordance with the applicable requirements, preparing documentation for audit purposes, and coordinating the nomination of participants for Risk Management training.
3. Risk Leader/Risk Champion
   Responsible for preparing Risk Management documentation within the scope of their authority, implementing ongoing risk management, monitoring Key Risk Indicators (KRIs) and the effectiveness of risk mitigation measures, documenting business processes together with the associated risks and controls, preparing the necessary resources, and ensuring the implementation of Risk Management within their respective work units.

4. Risk Officer
   Bertugas melaksanakan risk assessment pada bidang kerjanya, menyiapkan penanganan risiko dan risk management plan, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan risiko, melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko, mengoordinasikan pengumpulan data pendukung, mengelola risk register, serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan peningkatan kesadaran risiko (risk awareness) pada unit kerja masing-masing.

Profil dan Mitigasi Risiko Tahun 2025
[POJK 51-E.3]

Profil Risiko menggambarkan risiko-risiko yang teridentifikasi dalam aktivitas usaha Perseroan beserta tingkat prioritas penanganannya sebagai dasar pengendalian risiko dan pengambilan keputusan. Perseroan memprioritaskan pengelolaan risiko dengan tingkat ekstrim dan tinggi, tanpa mengabaikan risiko pada tingkat rendah dan menengah agar tidak meningkat. Pengelolaan risiko dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai kewenangannya. Berikut Profil Risiko Perseroan:

1. Risiko Finansial
   Risiko yang berkaitan dengan volatilitas target keuangan atau ukuran moneter perusahaan. Termasuk didalamnya adalah *construction delay*, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko modal, risiko obligasi perusahaan, risiko likuiditas, *counterparty risk, maintenance risk*, risiko pajak, *reinvestment risk* dan *country risk*.
2. Risiko Operasional
   Risiko kerugian yang disebabkan kurang sempurnanya atau gagalnya proses-proses internal, sikap manusia dan sistem atau karena disebabkan kejadian eksternal.
3. Risiko Hukum
   Risiko yang berkaitan dengan legal affair perusahaan, meliputi tuntutan hukum, tidak adanya kerangka hukum dan kelemahan perjanjian.
4. Risiko Reputasi
   Risiko yang dapat mempengaruhi nama baik dan publikasi perusahaan pada lingkungan eksternal.
5. Risiko Strategi
   Risiko yang dapat mempengaruhi korporat dan strategis seperti lemahnya penentuan dan penerapan strategi perusahaan seperti lemahnya pengambilan keputusan dalam dunia bisnis atau keterlambatan reaksi dalam menghadapi perubahan.

6. Risiko Kepatuhan
   Risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan tindakan menyimpang dari kebijakan yang ada.

4. Risk Officer
   Responsible for conducting risk assessments within their respective areas of responsibility, preparing risk responses and the Risk Management Plan, monitoring the implementation of risk management plans, reporting on Risk Management implementation, coordinating the collection of supporting data, maintaining the risk register, and facilitating risk awareness and socialization activities within their respective work units.

2025 Risk Profile and Mitigation
[POJK 51-E.3]

The Risk Profile describes the risks identified in the Company's business activities, along with their priority levels for management, as a basis for risk control and decision-making. The Company prioritizes the management of extreme and high-level risks, without neglecting low- and medium-level risks to prevent them from escalating. Risk management is carried out by each business unit in accordance with its respective authority. The following is the Company's Risk Profile:

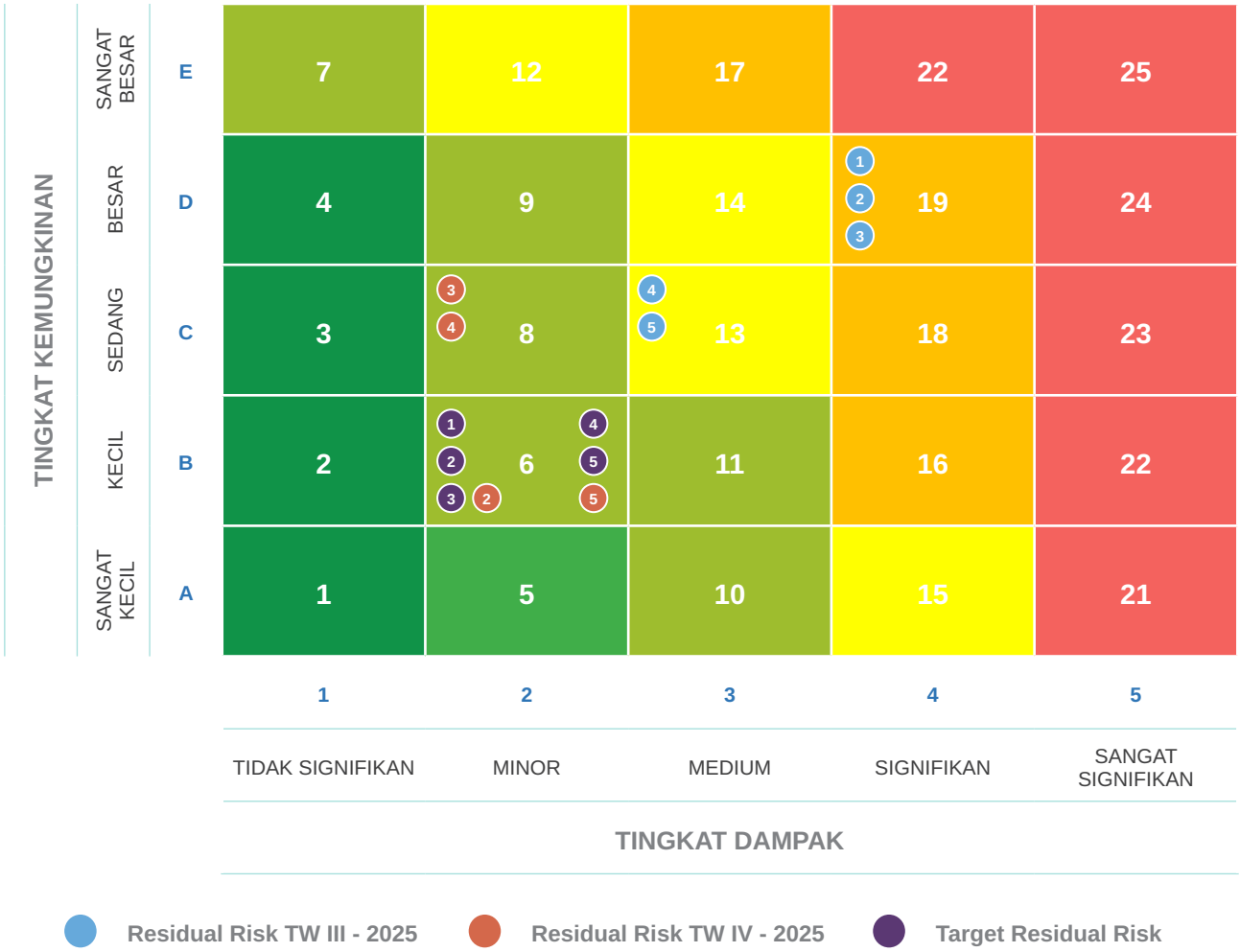
1. Financial Risk
   Risks related to the volatility of the Company's financial targets or monetary measures. These include construction delays, foreign exchange risk, interest rate risk, capital risk, corporate bond risk, liquidity risk, counterparty risk, maintenance risk, tax risk, reinvestment risk, and country risk.

2. Operational Risk
   The risk of loss caused by imperfections or failures in internal processes, human behavior, and systems, or due to external events.
3. Legal Risk
   Risks related to the company's legal affairs, including lawsuits, the absence of a legal framework, and contractual weaknesses.
4. Reputational Risk
   Risks that can affect the company's reputation and public image in the external environment.

5. Strategic Risk
   Risks that can affect corporate and strategic matters, such as weaknesses in the formulation and implementation of corporate strategy, poor decision-making in the business world, or delayed responses to change.
6. Compliance Risk
   Risks faced by a company related to deviations from existing policies.

Tabel Matriks Risiko Jangka Pendek RKAP Triwulan IV Tahun 2025

Table of Short-Term Risk Matrix of RKAP – Q4 2025



Untuk memberikan gambaran secara utuh hasil identifikasi risiko korporat maka dilakukan pemetaan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan risiko tersebut terjadi. Untuk pengambilan keputusan kerjasama bisnis di Perseroan dibutuhkan identifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dan mitigasi agar tidak mengganggu/ menghambat kerjasama. Selama tahun 2025, kajian risiko insidentil/proyek yang akan berdampak pada operasional Perseroan disampaikan pada matriks Risiko Jangka Pendek RKAP.

To provide a comprehensive overview of the results of corporate risk identification, risk mapping is conducted based on the impact and likelihood of those risks occurring. For decision-making regarding business partnerships at the Company, it is necessary to identify potential risks and implement mitigation measures to ensure they do not disrupt or hinder the partnership. Throughout 2025, assessments of incidental and project risks that will impact the Company's operations were presented in the Short-Term Risk Matrix of the Annual Work and Budget Plan (RKAP).

Jenis Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Dari hasil identifikasi risiko, Perseroan telah melaksanakan pengelolaan risiko-risiko tersebut termasuk melakukan mitigasi risiko, risiko tahun 2025 dan mitigasinya adalah sebagai berikut:

Types of Risks Faced by the Company and Their Mitigation

Based on the results of the risk identification process, the Company has implemented measures to manage these risks, including risk mitigation. The risks for 2025 and their mitigation strategies are as follows:

Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
Ketidakoptimalan pemasaran Non-PLN Group dalam memenuhi target pendapatan Inadequate marketing efforts by the Non-PLN Group in meeting revenue targets	• Realisasi Pendapatan Non PLN Group TW IV 2025 Rp45,32 miliar • Realisasi SO Non PLN Group TW IV 2025 Rp102,95 miliar • Kontrak Payung dengan Pabrikan TW IV 2025 sebanyak 22 Kontrak • Non-PLN Group Revenue for Q4 2025: Rp45.32 billion • Non-PLN Group SO for Q4 2025: Rp102.95 billion • 22 Master Contracts with Manufacturers in Q4 2025
Keterbatasan kebutuhan Working Capital dalam mendukung Bisnis Baru Limited working capital to support new business initiatives	• Nilai Penggunaan SHL per 31 Desember 2025 sebesar Rp270.000.000.000, - • Pengembalian SHL ke Pemegang Saham per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.000.000.000,- • Penggunaan Notpol per 31 Desember 2025 sebesar Rp278.895.139.203,- (masih sama per Sept 2025 karena tidak ada pengajuan Notpol lagi TW IV 2025) • Nilai Penggunaan NCL yang disetujui PLN per 31 Desember 2025 adalah Rp402.668.595.445,- • Value of SHL Utilization as of December 31, 2025: Rp270,000,000,000 • SHL Repayment to Shareholders as of December 31, 2025: Rp100,000,000,000 • Notpol utilization as of December 31, 2025, is Rp278,895,139,203 (unchanged from September 2025, as no further Notpol applications were submitted in Q4 2025) • The value of NCL usage approved by PLN as of December 31, 2025, is Rp402,668,595,445.-
Ketidakoptimalan resource SDM dalam mendukung competitiveness Perusahaan Inadequate HR resources to support the Company's competitiveness	• Evaluasi tata kelola proses bisnis • Penerapan Struktur Organisasi baru • Perencanaan dan pelaksanaan training dan sertifikasi karyawan sesuai bidang • Penjajakan dengan mitra workload analysis • Evaluation of business process governance • Implementation of a new Organization Structure • Planning and conducting employee training and certification according to their fields • Exploratory discussions with workload analysis partners
Ketidakoptimalan Pelayanan Pelanggan dalam mempengaruhi citra atau reputasi Perusahaan Inadequate customer service affecting the Company's image or reputation	• Pembuatan Kebijakan DPT (Daftar Penyedia Terseleksi) untuk menyaring penyedia yang kompeten dan full support Pembuatan checklist dokumen • Evaluasi Kinerja Mitra Penyedia alas Project dengan SLA <100% • Development of a DPT (List of Selected Providers) Policy to screen competent providers and provide full support for the creation of document checklists • Performance evaluation of project supplier partners with SLAs below 100%
Kegagalan Pengembangan Bisnis Baru Failure to develop new business	• Proses perencanaan demand planning dan implementasi stockist material PMS PLTMG • Pilot Project Stokist Material Tube Boiler telah selesai dilakukan • Pemasaran product EBT, Material Distribusi Utama (MDU) dan Material Transmisi Utama (MTU) • Kontrak Payung dengan Mitra Manufaktur Material PMS PLTMG (Wartsila & Everllence) • Implementasi stockist taterial PMS PLTMG • Demand planning and implementation of PMS PLTMG material stockist processes • The Tube Boiler Material Stockist Pilot Project has been completed • Marketing of EBT products, Primary Distribution Materials (MDU), and Primary Transmission Materials (MTU) • Master contracts with PMS PLTMG material manufacturing partners (Wartsila & Everllence)

Strategi Risiko

Strategi risiko secara garis besar adalah penentuan kapasitas, selera, toleransi dan limit risiko perusahaan. PLN SC mengklasifikasikan kapasitas risiko (*risk capacity*) menjadi 2 tier, tier 1 menggunakan pendekatan rerata free cash dijumlahkan dengan *stand by loan*, yaitu bersumber dari *notional pooling* PLN, sedangkan untuk tier 2 menggunakan pendekatan piutang komponen A. *Free cash* adalah jumlah arus kas yang tersedia setelah perusahaan memenuhi semua kebutuhan operasi,

Risk Strategy

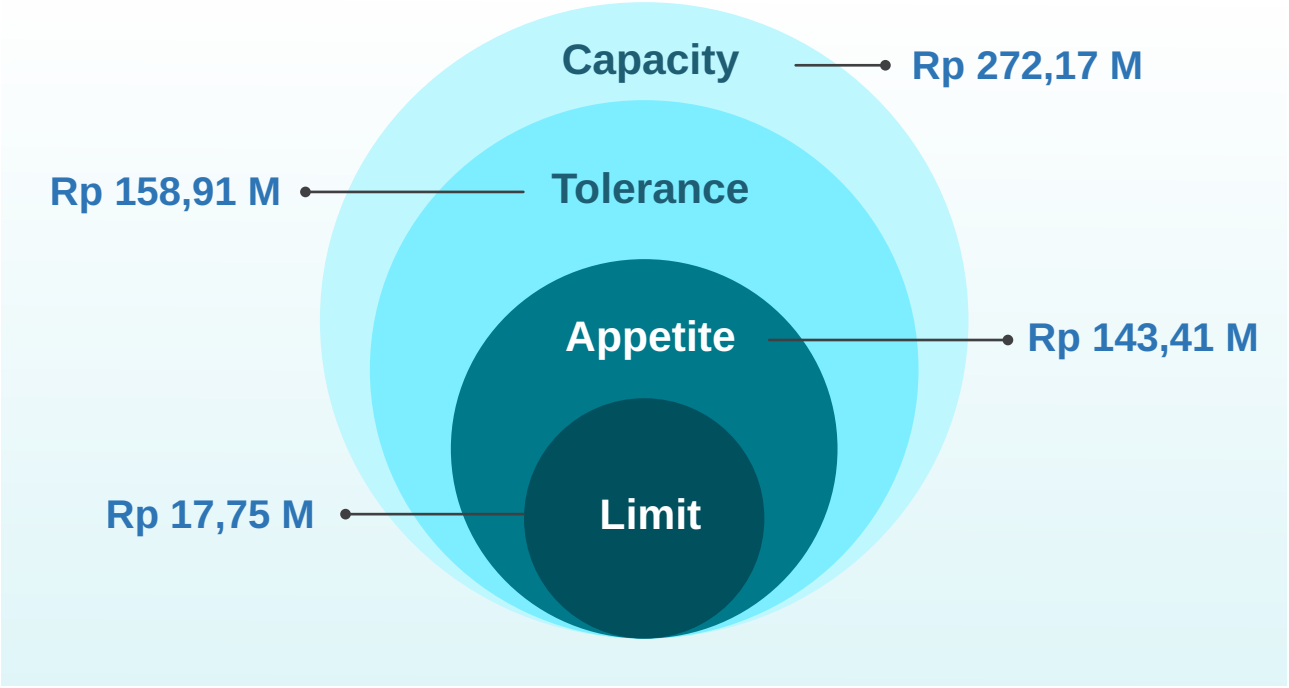
Risk strategy primarily involves determining its risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limits. PLN SC classifies its risk capacity into two tiers. Tier 1 is determined using the average free cash approach combined with the standby loan facility sourced from PLN's notional pooling. Tier 2 is determined using the Component A receivables approach. Free cash represents the amount of cash flow available after the Company has met all of its operational requirements. Based on the Company's

berdasarkan data rerata *free cash* yang dimiliki oleh PLN SC sebesar Rp 135,32 M jumlah tersebut ditambah dengan *stand by loan* yang dimiliki PLN SC, berasal dari *notional pooling* PLN, dengan pagu sebesar Rp 100 M. Berdasarkan data tersebut didapatkan *risk capacity* pada *tier* 1 PLN SC sebesar 238,32 M sedangkan tier 2 PLN NP menggunakan piutang komponen A sebesar 33,84 M. Angka ini merupakan piutang komponen A yang terendah selama 5 tahun terakhir.

average free cash position of Rp135.32 billion, combined with the standby loan facility obtained through PLN's notional pooling with a credit limit of Rp100 billion, PLN SC's Tier 1 risk capacity amounted to Rp238.32 billion. Meanwhile, Tier 2 risk capacity was determined based on Component A receivables amounting to Rp33.84 billion, representing the lowest Component A receivables balance recorded over the past five years.

Dengan demikian, nilai kapasitas risiko PLN SC sebesar Rp 272,17 M. Selanjutnya, dari nilai kapasitas risiko tersebut, ditetapkan nilai masing-masing dari *risk tolerance, risk appetite* dan *risk limit* sebagai berikut:

Therefore, PLN SC's total risk capacity amounted to Rp272.17 billion. Based on this risk capacity, the Company's risk tolerance, risk appetite, and risk limits were established as follows:



Kapasitas risiko yang sudah ditetapkan, kemudian didistribusikan kepada setiap unit/SH/AP menggunakan pendekatan proyeksi *revenue* atau *value creation* yang akan diterjemahkan dalam kriteria dampak berdasarkan selera risiko (*risk appetite*) perusahaan. Selera risiko PLN ditentukan berdasarkan 4 postur yang selaras dengan postur KBUMN, yaitu Tidak Toleran, Konservatif, Moderat dan Strategis. Penjelasan mengenai postur risiko PLN dapat dilihat pada tabel berikut:

The established risk capacity is subsequently allocated to each Unit/SH/AP using a projected revenue or value creation approach, which is translated into impact criteria based on the Company's risk appetite. PLN SC's risk appetite is determined based on four risk postures that are aligned with the Ministry of State-Owned Enterprises' (SOE) risk postures, namely Intolerant, Conservative, Moderate, and Strategic. A description of each PLN SC risk posture is presented in the following table.

Postur Terhadap Risiko Risk Posture	Penjelasan Description
Tidak Toleran Intolerant	a. Perusahaan sangat berhati-hati dalam mengambil risiko, cenderung menghindari risiko yang signifikan dan lebih memilih untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis. b. Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal. a. The Company exercises a very high degree of caution in taking risks, tending to avoid significant risks and prioritizing stability and consistency in its business operations. b. Business decisions are based on capital preservation.
Konservatif Conservative	a. Perusahaan berhati-hati dalam menghadapi risiko, dengan mengambil beberapa risiko yang terkendali, tetapi tetap memprioritaskan kemanan modal dan kestabilan. b. Keputusan bisnis didasarkan pada upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk di dalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil. a. The Company exercises caution in managing risks by taking limited and controlled risks while continuing to prioritize capital security and business stability. b. Business decisions are based on protecting value from significant unforeseen risks, including avoiding exposure to substantial market fluctuations, while maintaining the capacity to absorb minor losses.
Moderat Moderate	a. Perusahaan bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terjadap kerugian besar. b. Keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang. a. The Company is willing to assume risks within defined limits to achieve growth and returns, while continuing to safeguard against significant losses. b. Business decisions are made by taking into account both growth opportunities and risk impacts, while maintaining the capacity to absorb moderate losses.
Strategis Strategic	a. Perusahaan secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai tujuan pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar. b. Keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar. a. The Company actively implements strategies that incorporate risk management as an integral part of its business plans, assuming higher levels of risk to achieve greater growth and innovation objectives. b. Business decisions are based on risk analysis and long-term investment return potential, while maintaining the capacity to absorb substantial losses.

Dalam mendukung keberlanjutan bisnis dan pencapaian sasaran utama PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, maka disusun dan ditetapkan pernyataan selera risiko (*Risk Appetite Statement*) sebagai berikut:

To support the sustainability of the Company's business and the achievement of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang's key objectives, the following Risk Appetite Statement has been established:

Risk Appetite Statement	Penjelasan Description
Proses Bisnis Business Processes	PT PLN Suku Cadang memiliki zero appetite terhadap risiko terjadinya kecelakaan kerja diseluruh proses bisnis Perusahaan. PT PLN Suku Cadang has zero appetite for occupational accidents across all of the Company's business processes.
Lingkungan Environment	PT PLN Suku Cadang memiliki zero appretite terhadap perusakan Lingkungan dan senantiasa berupaya untuk melakukan transisi energi dari fossil ke green energy. PT PLN Suku Cadang has zero appetite for environmental damage and continuously strives to support the energy transition from fossil-based energy to green energy.
Kepatuhan dan Good Corporate Governance Compliance and Good Corporate Governance	PT PLN Suku Cadang memiliki zero appretite terhadap seluruh pelanggaran terkait Good Corporate Governance dan peraturan perundang-undangan di seluruh proses bisnis Perusahaan. PT PLN Suku Cadang has zero appetite for any violations of Good Corporate Governance principles and applicable laws and regulations across all of the Company's business processes.

Risk Appetite Statement	Penjelasan Description
Finansial dan Bisnis Perusahaan Financial and Corporate Business	PT PLN Suku Cadang memiliki open appretite dalam pengembangan bisnis Perusahaan dalam rangka memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan (Business Continuity and Sustainability), dengan memastikan seluruh kajian operasional, hukum,risiko dan khususnya finansial layak dan dapat dipertanggungjawabkan. PT PLN Suku Cadang has open appetite for business development to ensure the Company's business continuity and sustainability, while ensuring that all operational, legal, risk, and, in particular, financial assessments are feasible and can be duly justified.
Proyek Projects	PT PLN Suku Cadang memiliki low appretite terhadap permasalahan proyek pengembangan bisnis, seperti waktu keterlambatan proyek, kualitas pekerjaan,penambahan biaya anggaran dan lain lain. PT PLN Suku Cadang has low appetite for issues related to business development projects, including project delays, work quality, budget overruns, and other project-related issues.
Teknologi Informasi Information Technology	a. PT PLN Suku Cadang memiliki zero appretite terhadap seluruh kebocoran data Perusahaan. b. PT PLN Suku Cadang memiliki zero appretite terhadap ancaman Cyber Security System yang dapat menggangu kelangsungan bisnis Perusahaan. a. PT PLN Suku Cadang has zero appetite for any leakage of the Company's data. b. PT PLN Suku Cadang has zero appetite for Cyber Security System threats that may disrupt the continuity of the Company's business operations.
Strategi Perusahaan Corporate Strategy	PT PLN Suku Cadang secara aktif menjalankan strategic initiative dengan memiliki Countious Appetite yang diperlukan untuk menjaga sustainability Perusahaan. PT PLN Suku Cadang actively implements strategic initiatives while maintaining the continuous appetite required to support the Company's sustainability.

Evaluasi Atas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh Tim Implementasi *Enterprise Risk Management* melalui pemantauan berkala terhadap pelaksanaan mitigasi dan tingkat penurunan risiko yang dicapai. Setiap triwulan, Tim Implementasi *Enterprise Risk Management* melakukan pengumpulan dan analisis hasil evaluasi untuk memantau perkembangan profil risiko Perseroan serta mengidentifikasi potensi risiko yang perlu mendapat perhatian.

Evaluation of the Risk Management System

The Enterprise Risk Management Implementation evaluates the effectiveness of risk management implementation through periodic monitoring of mitigation efforts and the degree of risk reduction achieved. Each quarter, the Enterprise Risk Management Implementation collects and analyzes evaluation results to monitor developments in the Company's risk profile and identify potential risks that require attention.

Selain itu, praktik mitigasi yang terbukti efektif didokumentasikan sebagai basis pengetahuan (*risk knowledge base*) dan referensi bagi *risk owner* dalam penyusunan profil risiko berikutnya. Untuk menilai tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh, Divisi Manajemen Risiko juga melaksanakan *maturity assessment* yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi area perbaikan dan menyusun strategi peningkatan penerapan Manajemen Risiko secara berkelanjutan.

In addition, mitigation practices proven to be effective are documented as a risk knowledge base and serve as a reference for risk owners in preparing subsequent risk profiles. To assess the overall maturity level of Risk Management implementation, the Risk Management Division also conducts maturity assessments, which serve as the basis for identifying areas for improvement and formulating strategies to continuously enhance Risk Management implementation.

Kode Etik
Code of Ethics

Perseroan menetapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perseroan dalam menerapkan etika kerja dan etika bisnis yang berlandaskan integritas, profesionalisme, serta prinsip GCG. Kode Etik menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan, dengan komitmen penerapannya dituangkan dalam Komitmen Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Perseroan yang ditinjau serta diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan lingkungan bisnis.

The Company has established a Code of Ethics as a code of conduct for all Company personnel in upholding work ethics and business ethics grounded in integrity, professionalism, and the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Code of Ethics serves as the foundation for building a work culture that supports the achievement of the Company's vision and mission, with a commitment to its implementation set forth in the Joint Commitment of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company personnel, which is reviewed and updated periodically in accordance with the evolving needs of the organization and the business environment.

Ruang Lingkup Kode Etik

Kode Etik Perseroan merupakan wujud komitmen dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta menjadi pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perseroan dalam menjalankan etika bisnis dan etika kerja. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan No. 002.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Kode Etik mengatur standar perilaku dan hubungan Perseroan dengan para pemangku kepentingan, yang meliputi hubungan dengan Pemegang Saham, Pemerintah dan Regulator, Karyawan, Mitra Kerja, Pelanggan, Pesaing, serta Masyarakat. Selain berpedoman pada *Code of Conduct*, Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas bisnis sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik usaha yang etis dan berkelanjutan.

Scope of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics embodies its commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) and serves as a code of conduct for all Company personnel in upholding business ethics and work ethics. These provisions are set forth in the Joint Resolution of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 015.K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 002.K/DK-PLNSC/2020 regarding the Code of Conduct of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

The Code of Ethics sets standards for behavior and the Company's relationships with stakeholders, including shareholders, the government and regulators, employees, business partners, customers, competitors, and the community. In addition to adhering to the Code of Ethics, the Company consistently conducts its business activities in accordance with applicable laws and regulations and upholds integrity in every business activity as part of its commitment to ethical and sustainable business practices.

Sosialisasi Kode Etik

Perseroan secara konsisten melakukan sosialisasi Kode Etik kepada seluruh Insan Perseroan dan pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan kepatuhan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi kepada jajaran manajemen, program orientasi bagi pegawai baru, serta penyegaran secara berkala bagi seluruh karyawan.

Selain itu, Direksi berkomitmen untuk memastikan penerapan etika bisnis dan etika kerja melalui keteladanan, komunikasi yang berkelanjutan, serta penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku bagi seluruh organ Perseroan dan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, serta menjadi pedoman perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Perseroan dalam berinteraksi berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, integritas, dan etika bisnis.

Penerapan etika bisnis dan etika kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kerja dan sistem penilaian kinerja Perseroan. Oleh karena itu, seluruh Insan Perseroan wajib mematuhi Kode Etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sementara Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *Code of Conduct* dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan secara konsisten di seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan Implementasi Kode Etik

Pengawasan implementasi Kode Etik Perusahaan dilakukan oleh Departemen SDM, yang salah satu fungsinya adalah memantau implementasi Kode Etik untuk memastikan telah dipenuhinya kepatuhan dan kewajiban terhadap Kode Etik perusahaan, serta proses penegakan kepatuhan terhadap kasus-kasus pelanggaran Kode Etik perusahaan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Mengacu pada Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, Perseroan menerapkan mekanisme penanganan pelanggaran melalui Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK) dan/atau mekanisme lain sesuai ketentuan yang

Code of Ethics Socialization

The Company consistently conducts Code of Ethics socialization for all Company personnel and stakeholders as part of its efforts to strengthen a culture of integrity and compliance. These activities are carried out through socialization sessions for management, orientation programs for new employees, and periodic refresher sessions for all employees.

In addition, the Board of Directors is committed to ensuring the application of business and work ethics through leading by example, ongoing communication, and the enforcement of disciplinary measures for any violations of the Code of Ethics in accordance with applicable regulations.

Implementation of the Code of Ethics

The Company's Code of Ethics applies to all Company bodies and stakeholders, both internal and external, and serves as a guide for the conduct of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company personnel in their interactions, based on the principles of good corporate governance, integrity, and business ethics.

The implementation of business ethics and work ethics is an integral part of the Company's work culture and performance evaluation system. Therefore, all Company personnel are required to comply with the Code of Conduct in carrying out their duties and responsibilities, while the Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for ensuring that the Code of Conduct is communicated, understood, and consistently applied at all levels of the organization.

Code of Ethics Implementation Control

The Human Resources Department monitors the implementation of the Company's Code of Ethics; one of its functions is to ensure compliance with and fulfillment of obligations under the Code of Ethics, as well as to enforce compliance in cases of violations of the Company's Code of Ethics.

Sanctions for Code of Ethics Violations

In accordance with the Code of Conduct of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, the Company implements a mechanism for handling violations through the Employee Disciplinary Violation Investigation Team (TP2DK) and/or other mechanisms in accordance with applicable

berlaku. Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, Peraturan Disiplin, maupun ketentuan internal Perseroan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang objektif berdasarkan kesaksian, keterangan, pengakuan, dan bukti pendukung lainnya dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan maupun memberatkan.

Pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perseroan sebagai bentuk penegakan disiplin dan komitmen terhadap budaya integritas. Adapun jenis sanksi yang diterapkan diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat pelanggaran, yaitu:

regulations. Any alleged violation of the Code of Ethics, Disciplinary Regulations, or the Company's internal provisions is investigated through an objective review process based on testimony, statements, admissions, and other supporting evidence, taking into account both mitigating and aggravating factors.

Sanctions for violations of the Code of Ethics are imposed in accordance with the Company's regulations as a form of disciplinary enforcement and a commitment to a culture of integrity. The types of sanctions applied are classified into four categories based on the severity of the violation, namely:

Jenis Sanksi Type of Sanctions	**Keterangan** Description
Surat Peringatan A Warning Letter A	Surat Peringatan kepada jenis pelanggaran ringan Warning Letter for minor types of violations
Surat Peringatan B Warning Letter B	Surat Peringatan kepada jenis pelanggaran Menengah Warning Letter for Medium type violations
Surat Peringatan C Warning Letter C	Surat Peringatan kepada jenis pelanggaran Berat Warning Letter for major types of violations
Surat Peringatan D Warning Letter D	Surat Peringatan kepada jenis pelanggaran sangat berat yang sangat merugikan perusahaan baik secara materiil maupun lainnya. Warning Letter for very serious types of violations that are very detrimental to the company, both materially and otherwise.

Pelanggaran Kode Etik

Pada tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan.

Code of Ethics Violations

In 2025, there were no violations of the Code of Ethics by employees.

Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Kode Etik

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Kode Etik untuk mengukur implementasi budaya kerja dalam seluruh aktivitas operasional. Evaluasi tersebut bertujuan memperkuat budaya integritas, meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*), serta mendorong pengembangan kompetensi seluruh Insan Perseroan secara berkelanjutan.

Sebagai pedoman yang dinamis, Kode Etik juga ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan organisasi. Dalam setiap proses penyempurnaannya, Perseroan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan prinsip integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan.

Evaluation of the Code of Ethics' Effectiveness

The Company periodically evaluates the effectiveness of the Code of Ethics' implementation to measure the integration of the work culture across all operational activities. This evaluation aims to strengthen a culture of integrity, foster a sense of ownership, and promote the continuous development of competencies among all Company personnel.

As a dynamic guideline, the Code of Ethics is also periodically reviewed and updated to ensure it remains relevant to developments in the business environment and the organization's needs. In every refinement process, the Company remains firmly committed to its core values and principles of integrity as the primary foundation for conducting sustainable business activities.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

Untuk memastikan bahwa segenap Insan Perseroan bekerja dengan standar etika yang tinggi, Perseroan telah menetapkan tata nilai yang bertujuan untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan (*sustainable*), serta memiliki keunggulan daya saing untuk meningkatkan nilai tambah Perseroan.

To ensure that all Company employees work to high ethical standards, the Company has established a set of values aimed at conducting sustainable business and maintaining a competitive edge to increase the Company's value.

Nilai Utama "AKHLAK"

Selain tata nilai Perseroan, PT PLN Suku Cadang juga mengimplementasikan Nilai Utama AKHLAK sebagai budaya kerja (*core values*) Grup PLN sesuai dengan Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia BUMN. Nilai AKHLAK yang terdiri atas Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi pedoman perilaku bagi seluruh Insan Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Uraian mengenai implementasi Nilai Utama AKHLAK disajikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Core Values "AKHLAK"

In addition to the Company's own values, PT PLN Suku Cadang also implements the AKHLAK Core Values as the work culture of the PLN Group, in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 regarding the Core Values of Human Resources in State-Owned Enterprises. The AKHLAK values, which consist of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative, serve as a code of conduct for all Company employees in carrying out their duties and responsibilities. A detailed description of the implementation of the Core Values of AKHLAK is presented in the Company Profile section of this Annual Report.



Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Kebijakan dan Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG, Perseroan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan *Code of Conduct* serta budaya kerja yang berlaku. Sebagai wujud komitmen tersebut, Perseroan menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) berdasarkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 005.K/020/DIR-PLNSC/2021 dan Nomor 004.K/DK-PLNSC/2021 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Tujuan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System (WBS) merupakan mekanisme pelaporan yang disediakan Perseroan bagi seluruh pihak untuk menyampaikan dugaan kecurangan, pelanggaran hukum, pelanggaran Kode Etik, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh Insan Perseroan. Penerapan WBS disertai dengan perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi WBS bertujuan untuk mendukung deteksi dini atas potensi pelanggaran, memfasilitasi penanganan laporan secara efektif, serta meminimalkan risiko kerugian finansial maupun nonfinansial yang dapat mempengaruhi Perseroan. Selain itu, WBS menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di Perseroan dilaksanakan secara profesional oleh Tim Pengelola Pengaduan dan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK). Tugas pokok masing-masing tim adalah sebagai berikut:

- Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*)
  Dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PLNSC dengan beranggotakan minimal fungsi Satuan Pengawas Intern, fungsi legal dan risiko atau kepatuhan.

Policy and Scope of Whistleblowing

To enhance the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) implementation, the Company is committed to conducting business activities professionally, with integrity, and in accordance with the Code of Conduct and prevailing work culture. As a manifestation of this commitment, the Company has implemented a Whistleblowing System (WBS) based on Joint Resolution of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 005. K/020/DIR-PLNSC/2021 and No. 004.K/DK-PLNSC/2021 regarding Guidelines for the Whistleblowing System at PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang.

Purpose of the Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting mechanism provided by the Company for all parties to report suspected fraud, legal violations, violations of the Code of Ethics, or other forms of misconduct committed by Company personnel. The implementation of the WBS is accompanied by protection of the reporter's identity in accordance with applicable regulations.

The implementation of the WBS aims to support the early detection of potential violations, facilitate the effective handling of reports, and minimize the risk of financial and non-financial losses that could affect the Company. Additionally, the WBS serves as an instrument to strengthen the internal control system, enhance accountability and compliance, and maintain stakeholder confidence in the implementation of Good Corporate Governance.

Parties Managing Complaints

The management of the Whistleblowing System (WBS) at the Company is carried out professionally by the Complaint Management Team and the Employee Disciplinary Violation Investigation Team (TP2DK). The primary duties of each team are as follows:

- Complaint Management Team (Whistleblowing)
  Formed pursuant to a PLNSC Board of Directors' Decision, this team consists of members from at least the internal audit, legal, and risk or compliance

Bertugas melakukan penelaahan terhadap pengaduan/ penyikapan pelanggaran untuk menemukan atau verifikasi indikasi awal dari laporan yang masuk. Tim tersebut juga memperoleh akses pelaporan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- Tim Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK)
  Bertugas melakukan tindak lanjut atas penerimaan pelaporan dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.

Ruang Lingkup Pelaporan

Mengacu pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, baik yang dapat merugikan keuangan Perusahaan maupun yang dapat menimbulkan reputasi negatif bagi Perusahaan. Setiap pihak internal maupun pihak eksternal dapat melaporkan adanya pelanggaran, yaitu Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan.
2. Laporan tindak pelanggaran yang meliputi perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Etika Perusahaan.

Kriteria pengaduan yang dapat diproses melalui WBS adalah sebagai berikut:

1. Ada penyimpangan kasus yang dilaporkan
2. Menjelaskan Dimana, Kapan kasus tersebut dilakukan
3. Siapa pejabat/pegawai yang melakukan atau terlibat
4. Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan
5. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Pengaduan yang disampaikan melalui WBS dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

functions. It is responsible for reviewing complaints and reports of violations to identify or verify initial indications from incoming reports. The team also has direct reporting access to the President Director and the Board of Commissioners.

- Employee Disciplinary Violation Investigation Team (TP2DK)
  Responsible for following up on received reports by conducting further investigations into the substance of violations committed by Company personnel.

Scope of Reporting

In accordance with the Whistleblowing System Guidelines, the following violations may be reported through the WBS:

1. Violations of the Code of Conduct, whether they may cause financial harm to the Company or result in negative reputational consequences for the Company. Any internal or external party may report a violation, including the Board of Commissioners, the Board of Commissioners' Committee, the Board of Directors, all Employees, and other stakeholders who have a working relationship with the Company.
2. Reports of violations involving unethical or immoral conduct, or other actions that may harm the Company or its stakeholders, committed by employees, the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Board of Commissioners' Committee, in accordance with the Company's Code of Ethics.

The criteria for complaints that can be processed through the WBS are as follows:

1. There is a reported case of misconduct
2. Explain where and when the incident occurred
3. Identify the officer or employee who committed or was involved in the act
4. Describe how the act was committed
5. Include preliminary evidence (data, documents, images, and recordings) that supports or explains the alleged act of corruption

Complaints submitted through the WBS may be followed up if they meet the following criteria:

***What*/Bentuk Pelanggaran** What/Type of violation	Perbuatan terindikasi pelanggaran yang diketahui dengan menyebutkan apa pokok permasalahan atau jenis pelanggaran yang dilakukan. Actions indicating a known violation by stating the main problem or type of violation committed.
***Where*/Dimana Kejadian Pelanggaran** Where/Location of the violation	Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyebutkan spesifik nama tempat kejadian. Where the act is carried out by specifically mentioning the name of the place where the incident occurred.
***Who*/Siapa Pihak yang Terlibat** Who/Who involved in the violation	Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dengan menyebutkan nama orang atau pihak yang dilaporkan (dapat mengikutsertakan nama orang atau pihak yang dirugikan). Parties involved in the violation by stating the name of the person or party being reported (can include the name of the person or party who was harmed).
***How*/Bagaimana Pelanggaran Terjadi** How/How the act was carried out	Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggambarkan kronologi pelanggaran (modus, cara, dsb.) How the act was carried out by describing the chronology of the violation (modus, method, etc.)

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perseroan memiliki saluran pelaporan yang tersedia untuk pelaporan WBS melalui laporan tertulis yang ditujukan kepada:

Tim Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing*) PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang

Alamat

Gedung Recapital Lantai 3, Jl. Adityawarman No.55, Jakarta Selatan 12160, Indonesia.

Email

wbsplnsc@plnsc.co.id

Whistleblowing Channel

The Company has a reporting channel available for reporting WBS violations via written reports addressed to:

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Whistleblowing Management Team

Address

Recapital Building, 3rd Floor, Jl. Adityawarman No. 55, South Jakarta 12160, Indonesia.

Email

wbsplnsc@plnsc.co.id

Penanganan Pengaduan Pelanggaran

Proses tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang diterima melalui WBS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Laporan pelanggaran ditujukan kepada Tim Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing*) melalui saluran pelaporan yang tersedia;
2. Tim Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing*) melakukan verifikasi untuk selanjutnya memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan pelanggaran tidak benar (tidak sesuai fakta) dan tidak ada bukti permulaan yang cukup, maka tidak akan diproses lebih lanjut setelah berkonsultasi dengan Divisi Satuan Pengawas Intern;
4. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran (sesuai fakta) yang disertai bukti permulaan yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi;

Whistleblowing Handling

The follow-up process for whistleblowing reports received through the WBS is carried out through the following stages:

1. Whistleblowing reports are submitted to the Whistleblowing Management Team through the available reporting channels;
2. The Complaints Management (Whistleblowing) Team conducts verification to determine whether further investigation of the violation report is necessary within 45 (forty-five) days, which may be extended by a maximum of 30 (thirty) days;
3. If the verification results indicate that the violation report is unfounded (not supported by facts) and there is insufficient preliminary evidence, the report will not be processed further after consultation with the Internal Audit Division;
4. If the verification results indicate a violation (supported by facts) accompanied by sufficient preliminary evidence, the complaint may proceed to the investigation stage;

5. Perusahaan melalui Tim Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing*) dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya;
6. Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas (anonim), tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan kepada Pelapor, namun tetap melakukan tindak lanjut apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran yang disertai bukti permulaan yang cukup.

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Perseroan berkomitmen memberikan perlindungan kepada pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik tata kelola yang berlaku. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mendorong budaya pelaporan serta menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor selama proses penanganan laporan.

Seluruh laporan yang diterima melalui WBS dijaga kerahasiaannya, termasuk identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan identitas diperlukan dalam proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga kerahasiaan tersebut, pelapor diimbau untuk:

- Tidak mencantumkan identitas pribadi atau informasi yang dapat mengungkap identitas pelapor, apabila memilih untuk tetap anonim.
- Tidak menyampaikan informasi yang memungkinkan pihak lain melakukan pelacakan terhadap identitas pelapor.
- Menjaga kerahasiaan nama pengguna (*username*), kata sandi (*password*), dan nomor registrasi pelaporan.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*, Perseroan memberikan hak-hak sebagai berikut:

- Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
- Kesempatan memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi.
- Perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan serta jaminan atas hak-hak kepegawaian.
- Akses terhadap nasihat hukum sesuai kebutuhan.
- Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. The Company, through the Whistleblowing Management Team, may inform and/or provide a response regarding the status of the resolution process for the violation complaint to the Reporter who requests an explanation from the Company regarding the violation complaint they have filed;
6. For anonymous violation complaints, the Company is under no obligation to provide a response to the complainant; however, it will still take follow-up action if the verification results indicate a violation supported by sufficient preliminary evidence.

Protection for Whistleblowers

The Company is committed to protect whistleblowers who submit reports in good faith in accordance with prevailing laws and regulations and corporate governance practices. This protection aims to foster a culture of reporting and ensure the safety and confidentiality of whistleblowers throughout the report handling process.

All reports received through the WBS are kept confidential, including the whistleblower's identity, unless disclosure of identity is required in legal proceedings in accordance with applicable regulations. To maintain this confidentiality, whistleblowers are urged to:

- Refrain from including personal identifying information or details that could reveal the whistleblower's identity if they choose to remain anonymous.
- Refrain from providing information that would allow others to trace the whistleblower's identity.
- Keep the username, password, and report registration number confidential.

To protect whistleblowers, the Company grants the following rights:

- Guarantee of confidentiality regarding the whistleblower's identity.
- The opportunity to provide testimony without pressure or intimidation.
- Protection from detrimental personnel administrative actions and a guarantee of employment rights.
- Access to legal counsel as needed.
- Protection of the rights of witnesses and reporters in accordance with applicable laws and regulations.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan pelanggaran baik yang disampaikan melalui saluran WBS yang tersedia maupun disampaikan langsung kepada Perseroan melalui saluran lainnya.

As of the end of 2025, the Company had not received any reports of violations, whether submitted through the available WBS channels or submitted directly to the Company through other channels.

No	Whistleblowing	Jumlah Laporan Total Reports
1	Laporan Diterima Reports Received	0
2	Laporan Diproses Reports Processed	0
3	Pemeriksaan Investigation	0
4	Putusan Decision	0

PLNSC Bersih
PLNSC Clean

PLNSC Bersih merupakan perwujudan komitmen Perseroan dalam mendukung Pemerintah terkait program anti korupsi dengan mencegah adanya aktivitas yang mengandung unsur-unsur penyimpangan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PJB. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, bersih, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Pedoman Program PLNSC Bersih melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 017.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor: 004.K/DK-PLNSC/2020 Tentang Pedoman PLSNC Bersih PT Prima Layanan Suku Cadang.

PLNSC Bersih embodies the Company's commitment to support the Government's anti-corruption program by preventing activities involving corruption, collusion, and nepotism (KKN) within PJB. The Company is committed to always conducting its business activities with honesty, integrity, and transparency. This commitment is realized through the establishment of the PLNSC Bersih Program Guidelines via Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 017.K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 004.K/DK-PLNSC/2020 Regarding the PLNSC Bersih Guidelines of PT Prima Layanan Suku Cadang.

Ruang lingkup PLNSC Bersih mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, serta kegiatan penunjang lainnya. Seluruh insan PLNSC dan Pemangku Kepentingan terkait wajib menerapkan PLNSC Bersih secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan internal yang berlaku.

The scope of Clean PLNSC covers the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees, and other supporting activities. All PLNSC personnel and relevant stakeholders are required to implement Clean PLNSC consistently and sustainably, guided by applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and internal regulations.

Prinsip-Prinsip PLNSC Bersih

Prinsip PLNSC Bersih terdiri dari 4 (empat) pilar utama adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu membangun dukungan dan rasa kepemilikan bersama, meliputi:
   a. Komitmen integritas internal Perseroan;
   b. Collective Action yang merupakan komitmen bersama (Perseroan, Pemangku Kepentingan, dan Publik);

Principles of PLNSC Bersih

The principles of PLNSC Bersih consist of the following 4 (four) main pillars:

1. Participation, which involves building support and a sense of shared ownership, including:
   a. The Company's internal commitment to integrity;
   b. Collective Action, which is a shared commitment (between the Company, stakeholders, and the public);

c. *Multistakeholder* Forum.
2. Integritas yaitu membangun manusia dan budaya, meliputi:
   a. Kepatuhan terhadap *Code of Conduct*.
   b. Peningkatan integritas layanan pelanggan;
   c. Penanganan benturan kepentingan.
3. Transparansi yaitu membangun sistem yang terbuka, meliputi:
   a. Responsif terhadap permintaan layanan informasi publik;
   b. Kemudahan permintaan informasi publik;
   c. Peningkatan keterbukaan informasi public
4. Akuntabilitas yaitu menciptakan mekanisme pertanggungjawaban, meliputi:
   a. Complaint Handling Mechanism yang responsif;
   b. Opini audit yang sangat baik;
   c. Whistleblowing System dan Pengelolaan Gratifikasi yang kredibel.

c. Multistakeholder Forum.
2. Integrity, which involves building people and culture, including:
   a. Compliance with the Code of Conduct;
   b. Enhancing the integrity of customer service;
   c. Managing conflicts of interest.
3. Transparency, which involves building an open system, including:
   a. Responsiveness to requests for public information;
   b. Ease of requesting public information;
   c. Enhancing public information transparency.
4. Accountability, which involves creating accountability mechanisms, including:
   a. A responsive Complaint Handling Mechanism;
   b. An excellent audit opinion;
   c. A credible Whistleblowing System and Gratuity Management.

Kegiatan Sosialisasi PLNSC Bersih

Perseroan telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PLNSC Bersih pada tanggal 28 Desember 2020 secara virtual dengan memberikan informasi prinsi-prinsip serta penegakan PLNSC Bersih di seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Insan Perseroan.

PLNSC Bersih Awareness Campaign

The Company held a virtual PLNSC Bersih awareness campaign on December 28, 2020, to provide information on the principles and enforcement of PLNSC Bersih across all of the Company's business and operational activities. The campaign was attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company employees.

Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control

Sebagai wujud komitmen dalam menegakkan etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan telah menetapkan pedoman pelaporan dan pengendalian gratifikasi melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 019.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor: 006.K/DK-PLNSC/2020 tentang Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Pedoman tersebut mengatur jenis, penerimaan, pemberian, dan pengelolaan gratifikasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih, sehat, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

As a demonstration of its commitment to upholding ethics and the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Company has established guidelines for reporting and controlling gratifications through Joint Resolution of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 019. K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 006.K/DK-PLNSC/2020 regarding the Reporting and Control of Gratuities within PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. These guidelines regulate the types, receipt, giving, and management of gratuities as part of efforts to achieve clean, sound corporate governance that is free from practices of corruption, collusion, and nepotism.

Tujuan Pengendalian Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, maksud dan tujuan Pengendalian Gratifikasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Objectives of Gratification Control

In accordance with the Gratification Control Guidelines, the purpose and objectives of the Company's Gratification Control are as follows:

1. Pedoman bagi Insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih dan sehat dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Memberikan pemahaman, arahan, dan acuan bagi seluruh Insan PLNSC yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip GCG;
3. Mendorong terlaksananya etika bisnis yang baik dan mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan;
4. Melindungi Insan Perseroan dari masalah hukum di kemudian hari terkait gratifikasi;
5. Membentuk lingkungan Perseroan yang sadar dan paham dalam menangani atau mengendalikan segala bentuk gratifikasi;
6. Membantu Perseroan untuk mencapai visi dan misinya melalui penciptaan lingkungan bisnis yang sehat.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi mengatur secara komprehensif jenis, penerimaan, pemberian, perlakuan, dan pengelolaan gratifikasi di lingkungan Perseroan, termasuk mekanisme pelaporan yang mewajibkan setiap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dilaporkan oleh Insan Perseroan kepada admin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai dokumen pendukung paling lambat 8 (delapan) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

Sosialisasi Gratifikasi

Sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya integritas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PLNSC secara berkala menyelenggarakan sosialisasi mengenai kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan di seluruh area operasional Perseroan.

Pelaporan Gratifikasi

Sampai dengan berakhirnya tahun buku 2025, Admin UPG telah menerima laporan perlakuan gratifikasi antara lain pemberian, penolakan, dan penerimaan gratifikasi sebagai berikut:

1. To serve as a guideline for Company personnel in taking a firm stance against gratification to achieve clean and sound corporate management free from all forms of corruption, collusion, and nepotism (KKN);
2. To provide understanding, guidance, and reference for all PLNSC personnel regarding the receipt, giving, and solicitation of gratuities within the Company in accordance with the principles of GCG;
3. To promote good business ethics and prevent conflicts of interest and fraud;
4. To protect Company personnel from future legal issues related to gratuities;
5. To foster a corporate environment that is aware of and understands how to handle or control all forms of gratuities;
6. To assist the Company in achieving its vision and mission by creating a healthy business environment.

The Gratification Control Guidelines comprehensively regulate the types, acceptance, giving, handling, and management of gratuities within the Company, including a reporting mechanism that requires all receipts, refusals, and giving of gratuities to be reported by Company personnel to the Gratuity Control Unit (UPG) administrator, accompanied by supporting documents, no later than 8 (eight) business days from the date of receipt.

Socialization of Gratification Policies

As part of efforts to strengthen a culture of integrity and the implementation of good corporate governance, PLNSC periodically conducts socialization sessions on anti-corruption policies and gratification control for all members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees across the Company's operational areas.

Gratification Reporting

As of the end of the 2025 fiscal year, the UPG Administrator has received reports on the handling of gratifications, including the offering, refusal, and acceptance of gratifications, as follows:

No	Perlakuan Gratifikasi Gratification	Jumlah Laporan Total Reports	Keterangan Remarks
1	Pemberian Gratifikasi I Giving Gratification	-	-
2	Penolakan Gratifikasi I Refusing Gratification	-	-
3	Penerimaan Gratifikasi I Receiving Gratification	6	-

Perkara Penting & Sanksi Administrasi

Significant Cases & Administrative Sanctions

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berkomitmen untuk meminimalisasi dan mengantisipasi setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum melalui penerapan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku, prosedur internal, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen tersebut diterapkan secara konsisten guna melindungi kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, serta para pemangku kepentingan.

In conducting its business activities, the Company is committed to minimize and anticipate any actions that could potentially lead to litigation by adhering to laws and regulations, applicable norms, internal procedures, and good corporate governance practices. This commitment is consistently applied to protect the interests of the Company, the Board of Commissioners, the Board of Directors, employees, and stakeholders.

Penerapan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan prosedur internal diyakini tidak hanya mendukung efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Melalui implementasi yang konsisten, Perseroan berupaya memitigasi risiko sengketa hukum, sanksi administratif dari regulator, serta potensi penurunan kepercayaan investor, pelanggan, dan mitra usaha.

Adherence to legal provisions and internal procedures is believed to not only support operational effectiveness but also strengthen the Company's reputation and the trust of its stakeholders. Through consistent implementation, the Company seeks to mitigate the risk of legal disputes, administrative sanctions from regulators, and a potential decline in the trust of investors, customers, and business partners.

Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang sedang menjabat.

Legal Cases Involving the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2025, there were no legal cases involving current members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.

Sanksi Administratif

Pada tahun 2025, tidak terdapat sanksi administrasi yang diberikan kepada Perseroan dari otoritas maupun pemegang saham.

Administrative Sanctions

In 2025, no administrative sanctions were imposed on the Company by authorities or shareholders.

Pengaruh terhadap Kondisi Perseroan

Sehubungan dengan tidak adanya perkara hukum yang dihadapi Perseroan pada tahun 2025, tidak terdapat risiko hukum yang berdampak terhadap operasional Perseroan sehingga tidak diperlukan langkah mitigasi khusus terkait perkara hukum.

Impact on the Company's Condition

With no legal cases involving the Company in 2025, there are no legal risks impacting the Company's operations; therefore, no specific mitigation measures related to legal matters are required.

Akses Informasi Perusahaan

Company Information Access

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik elektronik maupun cetak, untuk memastikan penyampaian informasi kepada publik dilakukan secara akurat, kredibel, dan berintegritas.

The Corporate Secretary is responsible for coordinating the management of communication media, both electronic and printed, to ensure that information is communicated to the public accurately, credibly, and with integrity.

Kebijakan Pengelolaan Informasi Perusahaan

Perseroan memiliki Kebijakan Komunikasi Perusahaan yang mengatur tata kelola komunikasi eksternal, termasuk peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan organ terkait dalam pengelolaan serta penyampaian informasi kepada publik. Kebijakan ini menjadi pedoman untuk memastikan komunikasi perusahaan dilakukan secara terkoordinasi, konsisten, dan akuntabel.

Corporate Information Management Policy

The Company has a Corporate Communications Policy that governs external communications, including the roles and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and related bodies in managing and disseminating information to the public. This policy serves as a guideline to ensure that corporate communications are conducted in a coordinated, consistent, and accountable manner.

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan juga menerapkan Kebijakan Transparansi Informasi Publik yang mengatur klasifikasi, pengungkapan, dan pengamanan informasi, data, serta dokumen perusahaan. Kebijakan tersebut mendukung keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan kepada pemegang saham, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan informasi.

As part of its implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Company also enforces a Public Information Transparency Policy that governs the classification, disclosure, and security of corporate information, data, and documents. This policy supports transparency in decision-making processes and the disclosure of relevant material information to shareholders, investors, creditors, and other stakeholders, while upholding the principles of transparency, accountability, and information protection.

Website Korporat

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi, Perseroan mengelola situs web korporat di www.plnsc.co.id yang dapat diakses publik sebagai sarana bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan. Melalui situs web tersebut, Perseroan menyajikan berbagai informasi, antara lain profil perusahaan, produk dan layanan, program tanggung jawab sosial, laporan perusahaan, berita dan perkembangan terkini, serta informasi kontak yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan Perseroan dan unit kerja terkait.

Corporate Website

As part of its commitment to information transparency, the Company maintains a corporate website at www.plnsc.co.id, which is publicly accessible as a platform for stakeholders to obtain information about the Company. Through this website, the Company provides various information, including its corporate profile, products and services, corporate social responsibility programs, corporate reports, news and the latest developments, as well as contact information that can be used to communicate with the Company and relevant business units.

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun setiap tahun sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat informasi mengenai profil Perseroan, ikhtisar kinerja keuangan dan operasional, penerapan tata kelola perusahaan, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, media massa, serta masyarakat.

Forum Komunikasi Internal

Perseroan menyelenggarakan forum komunikasi internal secara berkala sebagai sarana komunikasi antara manajemen dan pegawai, baik di tingkat korporasi maupun unit kerja, melalui kegiatan seperti *family gathering*, pertemuan bulanan, dan *morning briefing*.

Selain memanfaatkan berbagai saluran komunikasi internal, Perseroan juga menggunakan media eksternal sebagai sarana penyampaian informasi dan data perusahaan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Sejalan dengan komitmen tersebut, Perseroan secara rutin menyampaikan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan yang terlebih dahulu disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Selain media komunikasi, Perseroan memiliki kebijakan pengungkapan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Board Manual PLN Suku Cadang berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 016.K/020/DIR-PLNSC/2020 dan Nomor 003.K/DKPLNSC/2020 tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaporan kepemilikan saham, termasuk milik keluarga, pada Perseroan maupun perusahaan lain beserta setiap perubahannya kepada Sekretaris Perusahaan dalam Daftar Khusus paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Sepanjang periode Laporan Terintegrasi ini, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham Perseroan maupun perusahaan lain yang terkait.

Annual Report

The Annual Report is prepared annually as a form of the Company's accountability and commitment to transparency toward its stakeholders. This report contains information regarding the Company's profile, an overview of financial and operational performance, the implementation of corporate governance, and the execution of Social and Environmental Responsibility (SER) programs, and is distributed to shareholders, regulators, the media, and the public.

Internal Communication Forums

The Company holds regular internal communication forums as a means of communication between management and employees, both at the corporate level and within business units, through activities such as family gatherings, monthly meetings, and morning briefings.

In addition to the utilization various internal communication channels, the Company also uses external media as a means of conveying corporate information and data to the public in a transparent and accountable manner. In line with this commitment, the Company routinely provides relevant information to the Board of Commissioners and Shareholders through Monthly, Quarterly, and Annual Management Reports, which are first submitted to the Board of Commissioners before being presented to Shareholders.

Information on Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors

In addition to communication channels, the Company has a policy on the disclosure of share ownership by the Board of Directors and the Board of Commissioners, which is regulated in the PLN Spare Parts Board Manual based on Joint Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 016. K/020/DIR-PLNSC/2020 and No. 003.K/DKPLNSC/2020 regarding the Work Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners. These provisions require the reporting of share ownership, including ownership by the family members, in the Company or other companies, along with any changes thereto, to the Corporate Secretary in a Special Register no later than 3 (three) business days after the change occurs. Throughout the period covered by this Integrated Report, the Board of Directors and the Board of Commissioners did not hold any shares in the Company or any other related companies.

Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goods and Services

Perseroan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Direksi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Nomr: 001.P/010/DIR-PLNSC/2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. Pedoman ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan seluruh proses pengadaan yang menggunakan anggaran Perseroan, baik untuk Pengadaan *Core* maupun Pengadaan *Non-Core.* Dalam pelaksanaannya, Perseroan menerapkan praktik pengadaan yang baik (*good procurement practice*) dengan berlandaskan prinsip *business judgement rule*, sehingga setiap keputusan pengadaan dilakukan secara profesional, berdasarkan informasi yang memadai, mengutamakan kepentingan terbaik Perseroan, serta menghindari benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [GRI 414-1]

Prinsip Pengadaan

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa, Perseroan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien, yaitu memperoleh hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya secara wajar dan bertanggung jawab.
2. Efektif, yaitu memenuhi kebutuhan sesuai sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Kompetitif, yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat di antara penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan.
4. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan informasi yang jelas dan dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Adil dan Wajar, yaitu memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh penyedia barang dan/atau jasa tanpa diskriminasi.
6. Akuntabel, yaitu seluruh proses dan hasil pengadaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa

Implementasi pengadaan barang dan/atau jasa di Perseroan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik kebutuhan pengadaan, baik untuk Pengadaan Core maupun Pengadaan Non-Core. Pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai,

The Company has established procurement guidelines for goods and services pursuant to the Board of Directors of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang Regulation No. 001.P/010/DIR-PLNSC/2024 concerning the Procurement Guidelines for Goods and Services of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang. These guidelines serve as the reference for the implementation of all procurement processes financed by the Company's budget, covering both Core Procurement and Non-Core Procurement. In implementing its procurement activities, the Company adopts good procurement practices based on the business judgment rule principle, therefore all procurement decisions are made professionally, based on adequate information, in the best interests of the Company, and with due regard to avoiding conflicts of interest, abuse of authority, and actions that are not in accordance with the prevailing regulations. [GRI 414-1]

Procurement Principles

In carrying out the procurement of goods and/or services, the Company adheres to the following principles:

1. Efficiency, by achieving optimal results through the reasonable and responsible use of resources.
2. Effectiveness, by fulfilling requirements in accordance with the intended objectives and delivering the greatest possible benefits.
3. Competitiveness, by fostering fair competition among qualified suppliers of goods and/or services.
4. Transparency, by conducting procurement in an open manner with clear and accessible information in accordance with the prevailing regulations.
5. Fairness and Equity, by providing equal treatment to all suppliers of goods and/or services without discrimination.
6. Accountability, by ensuring that all procurement processes and outcomes are accountable in accordance with the prevailing regulations.

Procurement of Goods and Services Implementation

The implementation of goods and/or services procurement within the Company is carried out in accordance with the characteristics of the procurement requirements, covering both Core Procurement and Non-Core Procurement. The selection of the procurement method is determined

kompleksitas, tingkat risiko, serta kondisi pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Dalam implementasinya, Perseroan mengelola basis data penyedia barang dan/atau jasa sebagai dasar pelaksanaan proses pengadaan serta melakukan evaluasi kinerja penyedia secara berkala untuk mendukung pembinaan dan pemutakhiran data penyedia. Perseroan juga memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) apabila memungkinkan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan. Setiap proses pengadaan didukung dengan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau dasar penetapan harga sesuai ketentuan yang berlaku serta dituangkan dalam dokumen yang mengikat para pihak, seperti kontrak, surat pesanan, atau surat perintah kerja.

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan yang baik, Perseroan menerapkan etika pengadaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. Penerapan etika pengadaan bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari benturan kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas proses pengadaan, seluruh pihak internal yang terlibat dalam pengadaan maupun calon penyedia barang dan/atau jasa diwajibkan menandatangani Pakta Integritas. Perseroan juga menerapkan mekanisme reward dan punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan bantuan hukum kepada pengguna, pejabat yang berwenang, pelaksana pengadaan, maupun pihak lain yang telah melaksanakan proses pengadaan sesuai prosedur apabila menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Perseroan turut menerapkan prinsip kesetaraan dan keterbukaan dalam proses pengadaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk berpartisipasi sebagai mitra usaha Perseroan. Ketentuan ini mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat sekaligus memastikan proses pengadaan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

by considering the procurement value, complexity, risk level, and procurement conditions in accordance with the provisions set out in the Procurement Guidelines for Goods and/or Services.

In its implementation, the Company maintains a database of goods and/or service providers as the basis for conducting procurement processes and periodically evaluates supplier performance to support supplier development and the updating of supplier data. The Company also utilizes an electronic procurement (e-procurement) system, where applicable, to improve the efficiency, transparency, and accountability of the procurement process. Each procurement process is supported by the preparation of an Owner's Estimate (HPS) or other pricing basis in accordance with the prevailing regulations and is documented in binding agreements between the parties, such as contracts, purchase orders, or work orders.

Procurement Governance

To establish good procurement governance, the Company implements procurement ethics that must be complied with by all parties involved in the procurement of goods and/or services. The implementation of these procurement ethics is intended to ensure that all procurement processes are conducted professionally, objectively, transparently, and free from conflicts of interest.

As part of its efforts to maintain the integrity of the procurement process, all internal parties involved in procurement, as well as prospective suppliers of goods and/or services, are required to sign an Integrity Pact. The Company also implements a reward and punishment mechanism in accordance with the prevailing regulations and provides legal assistance to users, authorized officials, procurement personnel, and other parties who have carried out procurement processes in accordance with the established procedures should they encounter legal issues in the course of performing their duties.

The Company also applies the principles of equal opportunity and transparency throughout the procurement process by providing equal opportunities to all prospective suppliers of goods and/or services that meet the applicable requirements, criteria, and provisions to participate as the Company's business partners. This approach supports fair business competition while ensuring that the procurement process is conducted fairly, transparently, and accountably.

Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practices

Perseroan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sekitar dan lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan praktik *bad governance* menjadi salah satu fokus Perseroan melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna meminimalkan potensi dampak negatif serta mendukung keberlanjutan usaha.

The Company recognizes that its business activities are inextricably linked to direct and indirect interactions with the surrounding community and the environment. Therefore, preventing bad governance practices is one of the Company's priorities through the implementation of sound corporate governance principles to minimize potential negative impacts and support business sustainability.

Laporan atas Aktivitas yang Mencemari Lingkungan

Di tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasionalnya. Capaian ini sejalan dengan komitmen Perseroan dalam menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab, yang pelaksanaannya dilaporkan kepada instansi lingkungan hidup terkait, serta diwujudkan melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang mendukung pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Reports on Activities That Cause Environmental Pollution

In 2025, the Company received no reports regarding environmental pollution caused by its operational activities. This achievement aligns with the Company's commitment to responsible environmental management, the implementation of which is reported to the relevant environmental agencies and realized through various Environmental and Social Responsibility (CSR) programs that support community development and environmental conservation as part of efforts to create sustainable value for stakeholders.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PLNSC berkomitmen untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di bidang perpajakan. Perseroan secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan melalui pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup pajak penghasilan, pajak badan, dan kewajiban perpajakan lainnya.

Disclosure of Tax Compliance

PLNSC is committed to consistently comply with prevailing laws and regulations, including those related to taxation. The Company consistently fulfills its tax obligations through timely tax payments and reporting in accordance with applicable regulations, covering income tax, corporate tax, and other tax obligations.

Kasus Terkait dengan Hubungan Industrial

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat kasus hubungan industrial yang melibatkan buruh maupun karyawan. Selain itu, Perseroan juga tidak menghadapi praktik *bad governance* lainnya, yang tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta pemenuhan kewajiban pelaporan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Cases Related to Industrial Relations

Throughout 2025, there were no industrial relations cases involving workers or employees. Furthermore, the Company did not face any other instances of bad governance, as evidenced by its compliance with the requirements for the presentation of the Annual Report and Financial Statements in accordance with applicable regulations and Financial Accounting Standards (SAK), as well as its fulfillment of reporting obligations regarding the State Officials' Asset Disclosure Report (LHKPN), gratuities, and conflicts of interest.



Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report

07

Strategi dan Nilai Keberlanjutan

Sustainability Strategy and Values [POJK A.1] [GRI 222] [GRI 223]



PLNSC berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan sektor ketenagalistrikan nasional melalui penguatan rantai pasok yang terintegrasi, efisien, adaptif, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Komitmen tersebut sejalan dengan arah transformasi Perseroan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam pengelolaan bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sebagai landasan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan telah memutakhirkan visi, misi, dan tata nilai sesuai dengan Keputusan Direksi PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang di Luar Rapat Direksi (Sirkuler) Nomor 002.S/DIR/PLNSC/2024 tanggal 11 November 2024. Visi Perseroan, yaitu “Menjadi Pilihan Utama Solusi *Supply Chain* yang Inovatif dan Berkelanjutan untuk Ketenagalistrikan dan Utilitas di Indonesia”, menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai inisiatif strategis yang mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab serta penerapan prinsip *good corporate practices*.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Perseroan menerapkan pendekatan *triple bottom line* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (*profit, planet, people*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan negara.

PLNSC is committed to support the sustainability of the national electricity sector through the strengthening of an integrated, efficient, adaptive, and value-driven supply chain that creates long-term value. This commitment is aligned with the Company’s transformation direction, which integrates sustainability principles into its business management, Human Resources development, and the implementation of its Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) program.

As the foundation for conducting a sustainable business, the Company has updated its vision, mission, and corporate values in accordance with the Circular Resolution of the Board of Directors of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang No. 002.S/DIR/PLNSC/2024 dated November 11, 2024. The Company’s vision, “To Become the Preferred Provider of Innovative and Sustainable Supply Chain Solutions for the Power and Utilities Sector in Indonesia,” serves as the guideline for implementing various strategic initiatives that support responsible business practices and the application of good corporate practices.

In realizing sustainable development, the Company adopts the triple bottom line approach, encompassing the economic, environmental, and social dimensions (profit, planet, and people). This approach is intended to ensure that the Company’s business activities not only create added value for shareholders but also deliver sustainable benefits to all stakeholders, including employees, customers, suppliers, communities, and the state.

Pelaksanaan program keberlanjutan diarahkan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional serta target *Net Zero Emission* PLN Group. Dalam implementasinya, Perseroan menjalankan program TJSL melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk unsur pemerintahan, komunitas, dan masyarakat.

The implementation of the Company's sustainability programs is directed toward creating long-term value for shareholders and stakeholders while supporting the national energy transition agenda and the Net Zero Emission target of the PLN Group. In its implementation, the Company carries out its CSR program through collaboration with various internal and external stakeholders, including government institutions, communities, and the public.

Sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan, Perseroan memfokuskan pelaksanaan program dan inisiatif pada beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan Hidup
   Perseroan mendukung upaya pelestarian lingkungan dan transisi energi melalui berbagai kegiatan yang sejalan dengan target netral karbon nasional serta komitmen keberlanjutan PLN Group.

2. Tanggung Jawab terhadap Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
   Perseroan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan program TJSL yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sosial.
3. Tanggung Jawab terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
   Perseroan menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten serta membangun hubungan industrial yang harmonis guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja.
4. Tanggung Jawab terhadap Pelanggan
   Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan melalui penyediaan solusi rantai pasok yang andal serta pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan yang melibatkan pihak independen sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

As a manifestation of its commitment to sustainability, the Company focuses its programs and initiatives on the following key aspects:

1. Environmental Responsibility
   The Company supports environmental conservation efforts and the energy transition through various initiatives that are aligned with the national carbon neutrality target and the sustainability commitments of the PLN Group.
2. Social and Community Development Responsibility
   The Company strives to create benefits for the community through the implementation of CSR programs that are oriented toward community needs while supporting capacity building and social welfare enhancement.

3. Responsibility for Employment, Occupational Health, and Safety
   The Company consistently implements Occupational Health and Safety (OHS) standards and fosters harmonious industrial relations to create a safe, healthy, and productive working environment for all employees.

4. Customer Responsibility
   The Company continuously enhances service quality and customer satisfaction through the provision of reliable supply chain solutions and the implementation of Customer Satisfaction Surveys conducted by an independent party as part of its continuous improvement efforts.

Melalui penerapan prinsip keberlanjutan yang terintegrasi dengan strategi bisnis, PLNSC berupaya memperkuat daya saing perusahaan sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Through the implementation of sustainability principles integrated into its business strategy, PLNSC strives to strengthen the Company's competitiveness while making a positive contribution to sustainable economic, social, and environmental development.

Landasan Pelaksanaan
Basis for Implementation

Kebijakan pelaksanaan program TJSL PLNSC berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum utama yang menjadi acuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
   a. Pasal 2 ayat (1) huruf e, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   b. Pasal 88 ayat (1), BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Bab V Pasal 74, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sebagai entitas BUMN yang bergerak dalam pengelolaan rantai pasok ketenagalistrikan, PLNSC memandang pemenuhan kewajiban TJSL bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik. Kedua regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas bagi PLNSC untuk merancang dan mengimplementasikan program TJSL secara konsisten, terstruktur, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.

The implementation of PLNSC's CSR program is based on the prevailing laws and regulations. The primary legal references adopted by the Company are as follows:

1. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs)
   a. Article 2 paragraph (1) point e stipulates that one of the purposes and objectives of establishing SOEs is to actively provide guidance and assistance to small-scale entrepreneurs, cooperatives, and the community.
   b. Article 88 paragraph (1) stipulates that SOEs may allocate a portion of their net profit for the development of small businesses/cooperatives and the surrounding communities.
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Chapter V, Article 74, stipulates that companies conducting business activities in and/or related to natural resources are required to implement Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR).

As an SOE engaged in the management of the electricity supply chain, PLNSC views the fulfillment of its CSR obligations not merely as regulatory compliance, but as an integral part of good corporate governance. These regulations provide a clear legal framework for PLNSC to design and implement its CSR programs in a consistent, structured, and impactful manner for the community and the surrounding environment.

Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Support for the Sustainable Development Goals (SDGs) [GRI 224]

PLNSC menerapkan pertumbuhan berkelanjutan melalui pilar-pilar keberlanjutan yang dirancang secara strategis, selaras dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perseroan mengadaptasi TPB yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan operasional sebagai bagian dari strategi dan nilai keberlanjutan Perseroan. Selama tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk berkontribusi, antara lain:

PLNSC implements sustainable growth through strategically designed sustainability pillars that are aligned with the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The Company adopts the SDGs that are directly related to its business activities and operations as part of its sustainability strategy and values. Throughout 2025, the Company implemented various initiatives to contribute to the achievement of the SDGs, including the following:

Pilar Utama Key Pillars	**Fokus Implementasi** Implementation Focus	**Strategi PLNSC** PLNSC Strategy
SDG 3 Good Health & Well-Being	Mitigasi dampak kesehatan akibat proyek, serta perluasan akses terhadap layanan dan fasilitas kesehatan dasar. Mitigation of health impacts due to the project, as well as expanding access to basic health services and facilities.	PLNSC menyelenggarakan donor darah dan Satunan Yatim & Dhuafa kepada masyarakat Sekitar. Upaya ini bertujuan membangun hubungan positif dengan komunitas sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan. PLNSC organizes blood drives and donations to the surrounding community for orphans and the underprivileged. These efforts aim to build positive relationships with the community while supporting the Company's business sustainability.
SDG 4 Quality Education	Memperluas akses pendidikan informal, meningkatkan keterampilan, dan membuka peluang kerja bagi generasi muda. Expanding access to informal education, improving skills, and opening up job opportunities for the younger generation.	PLNSC menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa dan pelajar di sekitar Head Office. Perseroan bersama Sekolah Alam Indonesia untuk mendukung kegiatan kunjungan belajar dan bakti sosial. PLNSC organizes internship programs for university students and pupils near its Head Office. The Company collaborates with Sekolah Alam Indonesia to support study visits and community service activities.
SDG 5 Gender Equality	Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan, soft skill, dan peluang kerja di sektor teknis maupun non-formal. Increasing women's access to training, soft skills, and job opportunities in both technical and non-formal sectors.	PLNSC mengimplementasikan pro-gram pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan tanpa me-mandang gender maupun Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. PLNSC implements employee training and competency development programs regardless of gender, ethnicity, religion, race, or intergroup affiliation.
SDG 7 Affordable and Clean Energy	Untuk menjamin akses energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan modern bagi semua. To ensure access to reliable, affordable, sustainable and modern energy for all.	Perseroan berupaya melakukan Percepatan Transisi Energi di Dalam Negeri menuju Net Zero Emission pada tahun 2060 dengan mempersiapkan seluruh lini khususnya dalam bisnis Pembangkit EBT. The Company is striving to accelerate the Domestic Energy Transition towards Net-Zero Emissions by 2060 by preparing all lines, especially in the New Renewable Energy Generation business.
SDG 8 Decent Work and Economic Growth	Meningkatkan kompetensi masyarakat lokal agar dapat berkontribusi dalam proyek, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang adaptif dan berkelanjutan. Improving the competency of local communities so they can contribute to projects and encouraging the growth of an adaptive and sustainable local economy.	Perseroan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi masyarakat sekitar Site Projects serta memberdayakan warga lokal sebagai karyawan Perseroan. The Company provides training and certification to communities around the Project Sites, empowering local residents to become Company employees.

Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan

Sustainability Culture Development Activities [F.1]

Perseroan berkomitmen untuk menginternalisasi budaya keberlanjutan (*sustainability culture*) ke dalam kegiatan operasional bisnis sehari-hari. Program internalisasi budaya perusahaan dilandasi oleh Budaya AKHLAK sebagai fondasi utama, yang diwujudkan melalui Program Budaya PLN 123, yaitu:

a. PLN 1 berfokus pada *Governance, Risk and Compliance Culture;*
b. PLN 2 menekankan *Collaboration and Performance Culture*; dan
c. PLN 3 bertujuan memperkuat *Service Culture*.

Dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan, PLNSC berpedoman pada pilar ESG (*Environmental, Social, and Governance*) sebagai kerangka keberlanjutan. Secara berkala, Perseroan melakukan analisis kebijakan, membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, serta menerapkan praktik berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial.

The Company is committed to internalizing a sustainability culture into its day-to-day business operations. The corporate culture internalization program is founded on the AKHLAK Core Values as its primary foundation and is implemented through the PLN 123 Culture Program, namely:

a. PLN 1 focuses on the Governance, Risk, and Compliance Culture;
b. PLN 2 emphasizes the Collaboration and Performance Culture; and
c. PLN 3 aims to strengthen the Service Culture.

In every aspect of its operations and decision-making processes, PLNSC is guided by the Environmental, Social, and Governance (ESG) pillars as its sustainability framework. On a regular basis, the Company conducts policy analyses, fosters harmonious relationships with stakeholders, and implements sustainable practices that are not only oriented toward profitability but also create long-term benefits for the environment and social well-being.

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement

PLNSC menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis dan keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan serta partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, Perseroan secara berkala melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan guna memahami kebutuhan, harapan, serta isu-isu yang relevan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Identifikasi dan Penentuan Pemangku Kepentingan

Proses identifikasi pemangku kepentingan dilakukan melalui pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan tingkat pengaruh (*influence*) terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan pendekatan keterlibatan yang sesuai bagi masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

PLNSC recognizes that the successful implementation of its business and sustainability strategies is highly influenced by the support and participation of its stakeholders. Therefore, the Company regularly identifies, maps, and manages stakeholder relationships to understand their needs, expectations, and issues relevant to the Company's business activities.

Stakeholder Identification and Determination

The stakeholder identification process is carried out by mapping stakeholders based on their level of interest and level of influence on the Company's business sustainability. The results of this mapping are then used to determine the appropriate engagement approach for each stakeholder group.



		KEPENTINGAN	
		RENDAH	**TINGGI**
PENGARUH	**TINGGI**	**KEEP SATISFIED (B)** Institusi: • Regulator (Kementrian ESDM, BKPM, dll)	***MANAGE CLOSELY* (A)** Institusi: • PLN • PLN NP • PLN IP • Komisaris • Karyawan • Mitra Pabrikan • Pelanggan
	RENDAH	**MONITOR (D)** Institusi: • LSM • Yayasan • Wartawan • Kompetitor	***KEEP INFORMED* (C)** Institusi: • Pemda • Building Manager (Recapital)

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Perseroan mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam empat kategori utama, yaitu *Manage Closely*, *Keep Satisfied*, *Keep Informed*, dan *Monitor*. Kelompok yang berada pada kuadran *Manage Closely* merupakan pemangku kepentingan utama yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh tinggi terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

Based on the mapping results, the Company classifies its stakeholders into four main categories: Manage Closely, Keep Satisfied, Keep Informed, and Monitor. Stakeholders in the Manage Closely quadrant are the Company's key stakeholders, as they have a high level of interest in and influence over the sustainability of the Company's business.

Tingkat Pengaruh Level of Influe	**Tingkat Kepentingan** Level of Interest	**Strategi Pelibatan** Engagement Strategy	**Kelompok Pemangku Kepentingan** Stakeholder Group
Tinggi High	Tinggi High	Managed Closely	• PT PLN (Persero) • PT PLN Nusantara Power • PT PLN Indonesia Power • Dewan Komisaris I Board of Commissioners • Karyawan I Employee • Mitra Pabrikan I Manufacturer Partners • Pelanggan I Customer
Tinggi High	Rendah Low	Keep Satisfied	Regulator
Rendah Low	Tinggi High	Keep Informed	• Pemerintah Daerah I Regional Governments • *Building Management*
Rendah Low	Rendah Low	Monitor	• LSM/*NGO* • Yayasan I Foundations • Wartawan I Journalists • Kompetitor I Competitors

Pendekatan dan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan

Setelah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, PLNSC menerapkan pendekatan pelibatan yang disesuaikan dengan karakteristik, peran, posisi, dan tingkat pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Pelaksanaan pelibatan dilakukan melalui komunikasi formal maupun informal, forum koordinasi, kegiatan bisnis, kegiatan internal perusahaan, serta program sosial kemasyarakatan.

Stakeholder Engagement Approach and Activities

Following the stakeholder mapping process, PLNSC implements engagement approaches tailored to the characteristics, roles, positions, and level of influence of each stakeholder group. Stakeholder engagement is carried out through both formal and informal communication, coordination forums, business activities, internal corporate activities, and community development programs.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company carried out various stakeholder engagement activities as follows:

Kelompok Pemangku Kepentingan Stakeholder Group	**Bentuk Pelibatan** Engagement Method	**Frekuensi** Frequency
Pemegang Saham dan PLN Group Shareholders and PLN Group	• RUPS • RKAP • Portfolio Leadership Forum • Rapat Koordinasi • Forum bisnis • Pameran PLN Group • Annual General Meeting of Shareholders • Annual Budget Plan • Portfolio Leadership Forum • Coordination Meeting • Business Forum • PLN Group Exhibition	Berkala sepanjang tahun Periodically throughout the year
Anak Perusahaan dan Afiliasi PLN Group PLN Group's Subsidiaries and Affiliations	• Rapat Koordinasi • Diskusi bisnis • Pameran • Pengembangan peluang usaha bersama • Coordination Meeting • Business Discussion • Exhibition • Development of Joint Business Opportunities	Berkala sepanjang tahun Periodically throughout the year
Pelanggan Customers	• Pameran industri • *Business meeting* • Penjajakan kerja sama • Survei kepuasan pelanggan • Industry exhibitions • Business meetings • Exploring partnerships • Customer satisfaction surveys	Berkala sepanjang tahun Periodically throughout the year
Mitra dan Pabrikan Partners and Manufacturers	• Penandatanganan kerja sama • *Business matching* • *Product knowledge sharing* • Kunjungan fasilitas • Pameran industri • Signing of partnership agreements • Business matching • Product knowledge sharing • Facility tours • Industry exhibitions	Berkala sepanjang tahun Periodically throughout the year

Kelompok Pemangku Kepentingan Stakeholder Group	**Bentuk Pelibatan** Engagement Method	**Frekuensi** Frequency
Karyawan Employee	• Rapat Kerja • *Knowledge sharing* • *Capacity building* • Workshop • Peringatan hari besar perusahaan • Work meetings • Knowledge sharing • Capacity building • Workshops • Company anniversary celebrations	Rutin sepanjang tahun Regular throughout the year
Regulator dan Pemerintah Regulators and Government	Koordinasi dan partisipasi dalam kegiatan sektor ketenagalistrikan Coordination and participation in electricity sector activities	Sesuai kebutuhan As required
Masyarakat dan Lembaga Sosial Community and Social Institutions	• Program TJSL • Bantuan sosial • Donor darah • Santunan • Bantuan kebencanaan • CSR programs • Social assistance • Blood donation • Compensation payments • Disaster relief	Berkala sepanjang tahun Periodically throughout the year

Selama tahun 2025, pelibatan pemangku kepentingan diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain RUPS RKAP Tahun Buku 2025, Rapat Kerja Semester I, Portfolio Leadership Forum, pameran Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025, Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025, Electric & Power Indonesia 2025, Electricity Connect 2025, penandatanganan kerja sama strategis dengan mitra usaha, kegiatan donor darah, program bantuan sosial, serta kegiatan *capacity building* bagi insan Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha, peningkatan kualitas layanan, penguatan rantai pasok ketenagalistrikan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Throughout 2025, stakeholder engagement was carried out through various activities, including the Annual General Meeting to discuss the 2025 Budget Plan, the First Semester Working Meeting, the Portfolio Leadership Forum, the Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 exhibition, the Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2025, Electric & Power Indonesia 2025, Electricity Connect 2025, the signing of strategic partnerships with business partners, blood donation drives, social assistance programs, and capacity-building activities for the Company's employees.

The Company believes that constructive and sustainable relationships with stakeholders are key factors in supporting business growth, improving service quality, strengthening the electricity supply chain, and creating long-term value for all stakeholders.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Lingkungan

Corporate Social Responsibility Environmental Aspects

Pemerintah bersama PLN dan mitra strategis terus memperkuat agenda transisi energi melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUKN) 2024–2060 yang menargetkan peningkatan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Perseroan terus memantau arah percepatan transisi energi nasional dan mempersiapkan kapabilitas bisnis untuk mengoptimalkan peluang di sektor pembangkit EBT serta solusi efisiensi energi. Komitmen ini mencerminkan upaya Perseroan dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PLNSC senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta standar ISO 14001:2018 tentang Sistem Manajemen Lingkungan.

The government, along with PLN and its strategic partners, continues to strengthen the energy transition agenda through the 2024–2060 General Electricity Plan (RUKN), which aims to increase the capacity of New and Renewable Energy (EBT) and achieve Net Zero Emissions by 2060. In line with these developments, the Company continues to monitor the direction of the national energy transition and prepare its business capabilities to optimize opportunities in the renewable energy generation sector and energy efficiency solutions. This commitment reflects the Company's efforts to support the development of sustainable electricity infrastructure while prioritizing environmental conservation.

In carrying out its operational activities, PLNSC consistently adheres to prevailing environmental laws and regulations, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management, and the ISO 14001:2018 standard on Environmental Management Systems.

Penggunaan Material Ramah Lingkungan [POJK 51-F.5]

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PLNSC berupaya meminimalkan dampak lingkungan melalui penerapan praktik operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perseroan menerapkan berbagai inisiatif *green office*, antara lain penggunaan lampu hemat energi (LED), penggunaan refrigeran R32 pada unit pendingin udara yang dikelola Perseroan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya kantor. [GRI 301]

Perseroan juga terus mendorong implementasi *paperless office* melalui digitalisasi proses administrasi dan pemanfaatan sistem informasi guna mengurangi penggunaan kertas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan melakukan pemantauan konsumsi kertas secara berkala yang disajikan pada tabel berikut. [GRI 301-1]

Use of Environmentally Friendly Materials [POJK 51-F.5]

In conducting its business activities, PLNSC strives to minimize its environmental impact by implementing more efficient and environmentally friendly operational practices. The Company has implemented various green office initiatives, including the use of energy-efficient (LED) lighting, the use of R32 refrigerant in air conditioning units managed by the Company, and the optimization of office resource usage. [GRI 301]

The Company also continues to promote the implementation of a paperless office through the digitization of administrative processes and the use of information systems to reduce paper consumption. As part of these efforts, the Company conducts periodic monitoring of paper consumption, as presented in the following table. [GRI 301-1]

Keterangan Description	2025	2024
Konsumsi Kertas (Rim) Paper Consumption (Rim)	**671**	597
Konsumsi Kertas (Rp) Paper Consumption (Rp)	**69.505.000**	44.106.000

Penggunaan Energi [POJK51-F.6] [GRI 302-1, 302-3]

Perseroan menggunakan sumber-sumber energi untuk melaksanakan kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Sumber energi utama yang digunakan adalah energi listrik. Pada tahun 2025, penggunaan energi listrik di Perseroan mencapai 148.768 kWh atau mengalami penurunan dibandingkan 156.898 kWh pada tahun 2024. Penurunan penggunaan energi listrik merupakan dampak dari inisiatif penghematan yang berhasil dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2025 di tengah peningkatan kinerja operasional.

Energy Consumption [POJK51-F.6] [GRI 302-1, 302-3]

The Company uses energy sources to carry out its business and operational activities. The primary energy source is electricity. In 2025, the Company's electricity usage reached 148,768 kWh, decreasing compared to 156,898 kWh in 2024. This decrease in electricity usage is the result of the Company's successful energy savings initiatives implemented during 2025, amidst the increasing operational performance.

Efisiensi Energi [POJK51-F.7][GRI 302-4]

Selama tahun 2025, Perseroan telah menerapkan inisiatif efisiensi energi antara lain melalui implementasi kebijakan *Green Office* serta penggunaan lampu LED yang lebih hemat energi.

Energy Efficiency [POJK51-F.7][GRI 302-4]

During 2025, the Company implemented energy efficiency initiatives, including the adoption of a Green Office policy and the use of more energy-efficient LED lighting.

Penggunaan Air [POJK51-F.8]

Perseroan menggunakan air dalam kegiatan sehari-hari dari sumber yang disuplai oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penggunaan air Perseroan dicatat oleh Pengelola Gedung (*Building Management*) sehingga intensitas penggunaan air tidak dapat ditampilkan dalam Laporan Terintegrasi ini.

Water Usage [POJK51-F.8]

The Company uses water for its daily operations from a source supplied by the Regional Water Supply Company (PDAM). The Company's water usage is recorded by Building Management; therefore, water intensity cannot be presented in this Integrated Report.

Emisi yang Dihasilkan [F.11]

Perseroan belum melakukan pengukuran terhadap jumlah emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan pada tahun 2025. Oleh karena itu, informasi mengenai besaran emisi yang dihasilkan belum dapat disajikan dalam laporan ini. [GRI 305-1]

Emissions Generated [F.11]

The Company has not yet measured the amount of emissions generated from its operational activities in 2025. Therefore, information regarding the volume of emissions generated cannot yet be presented in this report. [GRI 305-1]

Limbah dan Efluen [F.13] [GRI 306-1]

Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan limbah dan efluen sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kegiatan operasionalnya, PLNSC menghasilkan limbah padat berupa sampah perkantoran serta efluen yang berasal dari aktivitas perkantoran.

Waste and Effluent [F.13] [GRI 306-1]

The Company recognizes the importance of waste and effluent management as part of its efforts to preserve the environment. In its operations, PLNSC generates solid waste in the form of office trash, as well as effluent resulting from office activities.

Untuk meminimalkan dampak lingkungan, Perseroan menerapkan pengelolaan limbah melalui penyediaan fasilitas pemilahan dan pembuangan sampah yang memadai di lingkungan kerja. Selain itu, Perseroan bekerja sama dengan Pengelola Gedung dalam pengelolaan limbah B3 dan non-B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

To minimize environmental impact, the Company implements waste management by providing adequate waste sorting and disposal facilities in the workplace. In addition, the Company collaborates with the Building Manager in the management of hazardous and non-hazardous waste in accordance with prevailing regulations.

Pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali limbah dilakukan oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh Pengelola Gedung. Oleh karena itu, Perseroan belum melakukan pengukuran volume limbah dan efluen secara mandiri pada tahun 2025.

The transportation, treatment, and recycling of waste are carried out by service providers designated by the Building Manager. Therefore, the Company has not independently measured the volume of waste and effluent in 2025.

Insiden Tumpahan [F.15]

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya insiden tumpahan (*spill incident*) yang berdampak terhadap lingkungan. [GRI 306-3]

Spill Incidents [F.15]

Throughout 2025, the Company did not record any spill incidents that had an impact on the environment. [GRI 306-3]

Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup [F.16]

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan operasional maupun aktivitas perkantoran Perseroan.

Environmental Complaints [F.16]

In 2025, the Company did not receive any complaints regarding environmental impacts arising from its operational or office activities.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Ketenagakerjaan

Corporate Social Responsibility Occupational Aspects

PLNSC menempatkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan operasional perusahaan. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif melalui penerapan prinsip-prinsip K3 secara konsisten di seluruh unit kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan budaya K3 yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja. [GRI 103-1]

PLNSC prioritizes Occupational Health and Safety (OHS) as a key focus in its human resources management and operational activities. The Company is committed to create a safe, healthy, comfortable, and productive work environment through the consistent application of OSH principles across all work units. This commitment is realized through the implementation of OSH policies, procedures, and a culture aimed at minimizing the risk of workplace accidents and safeguarding the health and safety of all employees. [GRI 103-1]

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menerapkan ketentuan dan standar K3 yang berlaku serta mendorong partisipasi aktif seluruh insan perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja. Berbagai upaya pencegahan dan mitigasi risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang selamat dan kondusif. Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya kecelakaan kerja fatal. [GRI 403-8] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

In conducting its business activities, the Company complies with applicable OSH regulations and standards and encourages the active participation of all employees in fostering a culture of workplace safety. Various risk prevention and mitigation efforts are carried out on an ongoing basis to support the creation of a safe and conducive work environment. Throughout 2025, the Company recorded no fatal occupational accidents. [GRI 403-8] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Upaya pencegahan dan mitigasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan Perseroan meliputi:

1. Penerapan kebijakan K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
2. Penguatan implementasi standar K3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang K3;
5. Peningkatan pengujian, pelayanan teknis, dan penyediaan informasi di bidang K3;
6. Peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan SMK3 sesuai kebijakan K3 Perseroan;
7. Peningkatan analisis, pengkajian, dan pengembangan praktik K3; serta
8. Internalisasi budaya K3 kepada seluruh insan Perseroan. [GRI 403-7]

The Company's efforts to prevent and mitigate occupational safety and health risks include:

1. Implementation of OSH policies and the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS);
2. Strengthening the implementation of OSH standards in accordance with applicable laws and regulations;
3. Improvements in the health of the workforce;
4. Improvements in the quality and competence of human resources in the field of OSH;
5. Enhancements in testing, technical services, and the provision of information in the field of OSH;
6. Improving the quality and effectiveness of OSHMS implementation in accordance with the Company's OSH policies;
7. Enhancing the analysis, assessment, and development of OSH practices; and
8. Internalizing an OSH culture among all Company personnel. [GRI 403-7]

Pengelolaan Kesehatan Kerja
[GRI 403-6]

Untuk menjaga kesehatan pekerja serta mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, PLNSC menerapkan pengelolaan kesehatan kerja yang mencakup pemantauan dan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja sesuai dengan risiko dan kondisi lingkungan kerja. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Perseroan dalam membangun budaya kerja yang sehat, aman, dan produktif.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja
[GRI 403-6]

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, Perseroan terus memperkuat implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang terintegrasi dengan ISO 45001:2018. Penerapan standar tersebut menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan.

Melalui penerapan SMK3, Perseroan terus memperkuat budaya K3 dengan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pekerja dalam menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja serta mendukung pencapaian target *zero accident*. [GRI 403-2]

Penerapan prinsip dan prosedur K3 secara konsisten menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Pada tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya kecelakaan kerja pada seluruh unit operasional. [GRI 103-3] [GRI 401-1] [GRI 403-9]

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [F.18]

Perseroan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan yang adil bagi seluruh pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, usia, suku, agama, ras, golongan, maupun latar belakang lainnya. Prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karier, hingga pemberian remunerasi dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Occupational Health Management
[GRI 403-6]

To maintain employee health and prevent work-related illnesses, PLNSC implements an occupational health management system that includes health monitoring and checkups for employees based on risks and workplace conditions. These efforts are part of the Company's commitment to fostering a healthy, safe, and productive work culture.

Occupational Health and Safety
[GRI 403-6]

As part of its commitment in creating a safe and healthy work environment, the Company continues to strengthen the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) based on Government Regulation No. 50 of 2012, which is integrated with ISO 45001:2018. The application of these standards is part of the Company's management system for managing occupational safety and health risks in a structured, consistent, and sustainable manner.

Through the implementation of the OSHMS, the Company continues to strengthen its OSH culture by raising workers' awareness and discipline in following safe work procedures in accordance with applicable regulations. These efforts are undertaken to minimize the risk of workplace accidents and support the achievement of the zero-accident target. [GRI 403-2]

The consistent application of OSH principles and procedures is part of the Company's efforts to maintain occupational safety and health. In 2025, the Company recorded no workplace accidents across all operational units. [GRI 103-3] [GRI 401-1] [GRI 403-9]

Equal Employment Opportunity [F.18]

The Company upholds the principles of equal opportunity and fair treatment for all employees without discrimination based on gender, age, ethnicity, religion, race, social class, or any other background. These principles are consistently applied throughout all human resources management processes, ranging from recruitment, competency development, performance evaluation, career development, to compensation and the fulfillment of employee rights.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), Perseroan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak mencatat adanya insiden diskriminasi maupun pelanggaran hak-hak pekerja di seluruh unit operasional. [GRI 406-1]

Perseroan juga senantiasa mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif, saling menghormati, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja untuk berkembang sesuai kompetensi dan kinerjanya.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan komitmen tersebut, sepanjang tahun 2025 Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja anak maupun tenaga kerja paksa dalam seluruh kegiatan operasionalnya. [GRI 408-1] [GRI 409-1]

Membangun Lingkungan Kerja Inklusif [F.21]

PLNSC terus membangun lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, keberagaman, dan pengembangan potensi setiap individu. Perseroan meyakini bahwa keberagaman latar belakang, pengalaman, dan perspektif karyawan merupakan kekuatan yang dapat mendorong inovasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi. [GRI 405]

Dalam menjalankan pengelolaan Sumber Daya Manusia, Perseroan menerapkan prinsip saling menghormati, profesionalisme, dan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja. Pendekatan tersebut menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, memperkuat keterlibatan karyawan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. [GRI 406]

As part of its commitment to respect Human Rights, the Company ensures that all labor policies and practices are implemented in accordance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, the Company recorded no incidents of discrimination or violations of employee rights across all operational units. [GRI 406-1]

The Company also consistently promotes the creation of an inclusive and mutually respectful work environment that provides equal opportunities for all employees to grow based on their competencies and performance.

Child Labor and Forced Labor [F.19]

The Company is committed to implementing responsible labor practices and respecting human rights in accordance with applicable laws and regulations. In line with this commitment, throughout 2025, the Company did not employ child labor or forced labor in any of its operational activities. [GRI 408-1] [GRI 409-1]

Building an Inclusive Work Environment [F.21]

PLNSC continues to foster a work environment that supports collaboration, diversity, and the development of each individual's potential. The Company believes that the diversity of employees' backgrounds, experiences, and perspectives is a strength that can drive innovation and improve the quality of decision-making across all levels of the organization. [GRI 405]

In managing its human resources, the Company applies the principles of mutual respect, professionalism, and equal opportunity for all employees. This approach serves as the foundation for building harmonious labor relations, strengthening employee engagement, and supporting the creation of a productive and sustainable work environment. [GRI 406]

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility Community Aspects

PLNSC memandang keberadaan perusahaan tidak terlepas dari peran serta dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya menciptakan nilai yang berkelanjutan tidak hanya melalui pencapaian kinerja bisnis, tetapi juga melalui kontribusi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

PLNSC views the company's existence as inseparable from the participation and support of the community and its stakeholders. Therefore, the Company strives to create sustainable value not only through business performance but also through social contributions that benefit the community and the surrounding environment.

Melalui pelaksanaan program TJSL, Perseroan mendukung berbagai inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perseroan juga berupaya memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi bencana dan kondisi darurat lainnya.

Through the implementation of its Corporate Social Responsibility (CSR) programs, the Company supports various initiatives in the fields of education, health, humanitarian aid, and social welfare as part of its efforts to improve the quality of life for the community. The Company also strives to provide a swift and appropriate response to community needs, including during disasters and other emergency situations.

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang harmonis dengan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha sekaligus menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi seluruh pemangku kepentingan.

The Company believes that harmonious relationships with the community are a vital foundation for supporting business sustainability while creating shared value for all stakeholders.

Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar

Sebagai bagian dari PLN Group, PLNSC berperan dalam mendukung keandalan pasokan listrik nasional melalui penyediaan solusi rantai pasok, layanan operasi dan pemeliharaan (*Operation & Maintenance*), serta penyediaan suku cadang yang berkualitas dan andal bagi sektor ketenagalistrikan.

Melalui dukungan terhadap operasional pembangkit PLN Group dan *Independent Power Producer* (IPP), Perseroan turut berkontribusi dalam menjaga kontinuitas pasokan energi listrik yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi. Keandalan pasokan listrik tersebut mendukung berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan industri dan usaha.

Operational Impact on the Surrounding Community

As part of the PLN Group, PLNSC plays a role in supporting the reliability of the national electricity supply by providing supply chain solutions, operation and maintenance (O&M) services, and high-quality, reliable spare parts for the electricity sector.

By supporting the operations of PLN Group power plants and Independent Power Producers (IPPs), the Company contributes to maintaining the continuity of the electricity supply, which is a vital need for the community and economic activities. This reliable electricity supply supports various sectors, ranging from households and public services to industrial and business activities.

Selain memberikan kontribusi melalui kegiatan usaha, Perseroan juga berupaya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui pelaksanaan TJSL yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perseroan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Melalui pelibatan tenaga kerja lokal, Perseroan berupaya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif bagi keberlangsungan kegiatan usaha dan pembangunan yang berkelanjutan. Praktik ini juga menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan di wilayah kerja.

Perseroan meyakini bahwa pemberdayaan masyarakat dan hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha serta menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan difokuskan pada upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Program-program tersebut mencakup bidang kesehatan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Dalam RKAP Tahun 2025, Perseroan mengalokasikan anggaran TJSL sebesar Rp650.000.000 dengan realisasi pelaksanaan program mencapai Rp621.364.615 atau 95,59% hingga akhir tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Program-program TJSL yang direalisasikan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut.

In addition to contributing through its business activities, the Company also strives to create added value for the community through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs focused on education, health, humanitarian efforts, and social welfare. Through these various initiatives, the Company is committed to providing sustainable benefits to the community while supporting the achievement of sustainable development goals.

Local Workforce Engagement

By engaging the local workforce, the Company seeks to provide broader benefits to the community while fostering a social environment conducive to the continuity of business operations and sustainable development. This practice is also part of the Company's efforts to promote community empowerment by increasing community participation in operational activities carried out within its operational areas.

The Company believes that community empowerment and harmonious relationships with surrounding communities are key factors in supporting business sustainability and creating shared value for the community and stakeholders.

Corporate Social Responsibility Activities

The implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility (CSR) programs focuses on community empowerment and improving social welfare through various activities that benefit the community and stakeholders. These programs cover the fields of health, humanitarian aid, social welfare, and religious activities, all carried out in accordance with the needs and conditions of the community.

In the 2025 Annual Budget Plan (RKAP), the Company allocated a CSR budget of Rp650,000,000, with program implementation reaching Rp621,364,615, or 95.59%, by the end of 2025. This achievement reflects the Company's commitment to consistently fulfilling its social responsibilities and providing sustainable contributions to the community and the surrounding environment. The CSR programs implemented throughout 2025 are as follows.

No.	Kegiatan Activity
1	Program Magang Internship Program
2	Santunan Anak Yatim dan Dhuafa Donation for Orphans and Less Fortunate
3	Penyaluran Bantuan Ramadhan 2025 Distribution of Ramadan 2025
4	Penyaluran Hewan Qurban Idul Adha 2025 Distribution of Qurban Animals for Eid al-Adha 2025
5	Kegiatan Donor Darah Blood Donation Activities
6	Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Banjir Humanitarian Aid for Flood Victims
7	Dukungan Kegiatan Dharma Santi Hari Raya Nyepi 2025 Support for Dharma Santi Activities on Nyepi Day 2025
8	Program PLNSC Berbagi Bersama PLNSC Berbagi Bersama Program
9	Dukungan Program Rumah Sehat Support for Rumah Sehat Program
10	Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana di Sumatra Humanitarian Aid for Disaster Victims in Sumatra
11	Dukungan Perayaan Natal 2025 Support for 2025 Christmas Celebrations
12	Program Volunteer of the Year PMI PMI “Volunteer of the Year” Program

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan usaha perlu diiringi dengan kontribusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan program TJSL menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk menciptakan nilai bersama (*shared value*) bagi para pemangku kepentingan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

The Company believes that business success must be accompanied by contributions that benefit society and the environment. Therefore, the implementation of the TJSL program is part of the Company’s commitment to creating shared value for stakeholders while supporting sustainable development.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, komunitas, maupun masyarakat. Melalui sinergi tersebut, Perseroan berharap program TJSL yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

In implementing this program, the Company collaborates with various stakeholders, including government agencies, communities, and the general public. Through this synergy, the Company expects that the CSR programs conducted can provide broader and more sustainable benefits.

Pengaduan Masyarakat

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, PLNSC menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat menyampaikan saran, masukan, maupun pengaduan terkait aspek sosial, lingkungan, dan operasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Public Complaints

As part of its commitment to transparency, accountability, and good relations with stakeholders, PLNSC provides a complaint mechanism accessible to the public. Through this mechanism, the public can submit suggestions, feedback, or complaints regarding social, environmental, and operational aspects related to the Company’s business activities.

Setiap pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku guna memastikan penanganan yang tepat, objektif, dan bertanggung jawab. Kanal penyampaian pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

Every complaint received will be followed up in accordance with applicable procedures to ensure proper, objective, and responsible handling. The channels available to the public for submitting complaints are as follows:

Email

corsec@plnsc.co.id

Situs Web I Website

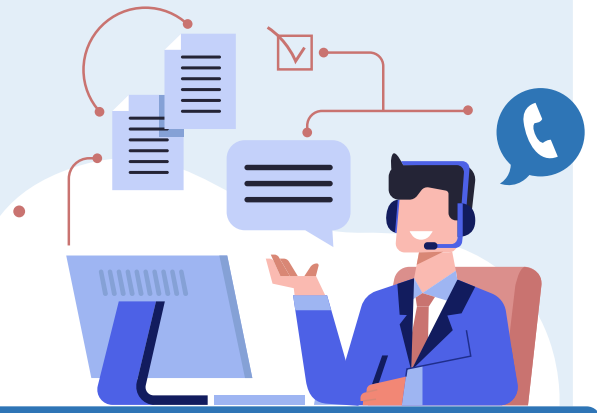
www.plnsc.co.id

Telepon I Phone

(021) 7246184 ext.123

Surat Tertulis I Written Letter

Jl. Aditiyawarman No.55 3, RT.3/RW.2, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160



Setiap pengaduan yang diterima akan dikelola dan ditindaklanjuti oleh Tim Legal dan Kepatuhan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila diperlukan, Perseroan dapat melakukan penelaahan atau investigasi lebih lanjut untuk memastikan proses penanganan dan penyelesaian dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.

Every complaint received will be managed and followed up by the Legal and Compliance Team in accordance with applicable procedures. If necessary, the Company may conduct further reviews or investigations to ensure that the handling and resolution process is carried out objectively, transparently, and effectively.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan dampak sosial maupun lingkungan atas kegiatan operasional Perseroan. Perseroan akan terus menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang harmonis dan mendukung keberlanjutan usaha.

Throughout 2025, the Company did not receive any complaints from the public regarding the social or environmental impacts of its operational activities. The Company will continue to maintain open communication with the public and stakeholders as part of its efforts to build harmonious relationships and support business sustainability.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Aspek Pelanggan

Corporate Social Responsibility Customer Aspects

Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, serta perlakuan yang setara kepada seluruh pelanggan tanpa diskriminasi. Keamanan dan keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga kepuasan pelanggan dan mendukung keberlanjutan usaha.

The Company is committed to provide quality, reliable, and customer-oriented services. In conducting its business activities, the Company upholds the principles of fairness, transparency, and equal treatment of all customers without discrimination. Security and safety are also top priorities in efforts to maintain customer satisfaction and support business sustainability.

Komitmen tersebut tercermin dalam penerapan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Etis yang mengatur penyediaan produk dan layanan sesuai standar mutu, penanganan keluhan pelanggan secara profesional, serta pelaksanaan praktik pemasaran yang bertanggung jawab. Selain itu, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015 untuk memastikan kualitas produk suku cadang dan layanan yang diberikan tetap konsisten, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam menjaga kepercayaan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

This commitment is reflected in the implementation of the Business Ethics Guidelines and Code of Ethical Conduct, which govern the provision of products and services in accordance with quality standards, the professional handling of customer complaints, and the implementation of responsible marketing practices. In addition, the Company implements a Quality Management System based on ISO 9001:2015 to ensure that the quality of spare parts and services provided remains consistent, reliable, and in line with customer needs. This certification is part of the Company's efforts to maintain customer trust and continuously improve service quality.

Evaluasi Keamanan Produk [GRI 416-1]

Perseroan senantiasa berupaya memastikan bahwa produk suku cadang dan layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas, keandalan, dan keamanan yang dipersyaratkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001:2015, pengendalian kualitas dalam proses pengadaan dan distribusi suku cadang, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja layanan guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

Product Safety Assessment [GRI 416-1]

The Company consistently strives to ensure that the spare parts and services it provides meet the required standards of quality, reliability, and safety. This commitment is realized through the implementation of an ISO 9001:2015-based Quality Management System, quality control in the procurement and distribution of spare parts, and continuous evaluation of service performance to ensure alignment with customer needs and expectations.

Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko, Perseroan melakukan verifikasi terhadap spesifikasi dan kualitas produk yang dipasok serta memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi dampak negatif terhadap keselamatan, keandalan operasional, maupun kepuasan pelanggan.

As part of its risk mitigation efforts, the Company verifies the specifications and quality of supplied products and ensures that the products and services provided comply with applicable regulations and standards. These measures are taken to minimize potential negative impacts on safety, operational reliability, and customer satisfaction.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menerima laporan maupun pengaduan terkait dampak negatif produk dan layanan terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan. Hasil tersebut mencerminkan upaya Perseroan dalam menjaga kualitas produk dan layanan secara konsisten serta memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap Perseroan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas produk dan layanan, Perseroan menerapkan proses pengendalian mutu dalam kegiatan pengadaan dan penyediaan suku cadang. Melalui penerapan proses tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa produk yang dipasok memenuhi spesifikasi dan standar yang dipersyaratkan.

Pada tahun 2025, tidak terdapat produk yang ditarik kembali (*product recall*) akibat masalah kualitas, keamanan, maupun ketidaksesuaian produk. [F.29]

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan [F.30]

Perseroan secara berkala menyelenggarakan Survei Kepuasan Pelanggan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan atas produk dan layanan yang diberikan, sekaligus memperoleh masukan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Survei ini juga menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan serta memperkuat hubungan yang saling menguntungkan dengan seluruh pelanggan.

Pada tahun 2025, Survei Kepuasan Pelanggan mencatat skor sebesar 85,66 meningkat dibandingkan skor tahun 2024 yang mencapai 85,64. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan Perseroan tetap berada pada tingkat yang baik dan mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjaga keandalan layanan, responsivitas, serta pemenuhan kebutuhan pelanggan

Throughout 2025, the Company received no reports or complaints regarding the negative impact of its products and services on customer health and safety. This outcome reflects the Company's efforts to consistently maintain the quality of its products and services and to strengthen customer trust in the Company.

Number of Products Recalled [F.29]

As part of its commitment to maintain product and service quality, the Company implements quality control processes in its procurement and spare parts supply activities. Through these processes, the Company strives to ensure that supplied products meet the required specifications and standards.

In 2025, there were no product recalled due to quality, safety, or product non-conformity issues. [F.29]

Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services [F.30]

The Company periodically conducts a Customer Satisfaction Survey as a means to measure customer satisfaction with the products and services provided, while also gathering feedback to serve as the basis for continuous service quality improvement. This survey is also part of the Company's efforts to understand customer needs and expectations and to strengthen mutually beneficial relationships with all customers.

In 2025, the Customer Satisfaction Survey recorded a score of 85,66, Incraesed compared to the 2024 score of 85.64. These results indicate that the Company's service quality continues to be at a high level and reflect ongoing efforts to maintain service reliability, responsiveness, and the fulfillment of customer needs.

Peningkatan Layanan Pelanggan

Perseroan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem manajemen mutu, peningkatan kompetensi personel, optimalisasi proses bisnis, serta evaluasi berkala terhadap kinerja layanan dan tingkat kepuasan pelanggan.

Sebagai penyedia solusi rantai pasok dan layanan pendukung sektor ketenagalistrikan, Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan yang andal, responsif, dan tepat waktu. Berbagai masukan yang diperoleh dari pelanggan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan proses kerja dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Melalui perbaikan yang berkesinambungan, Perseroan berupaya menjaga kepercayaan pelanggan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan seluruh pelanggan.

Customer Service Improvement

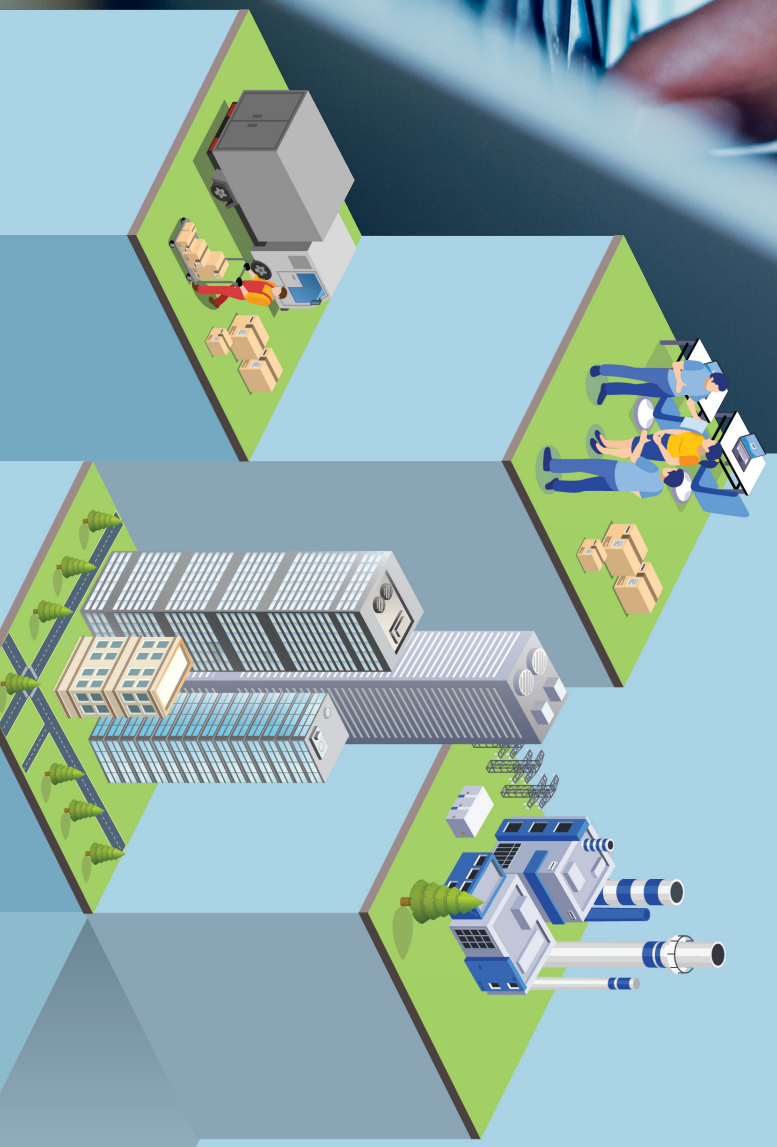
The Company continues to make various efforts to improve service quality to meet the ever-evolving needs and expectations of customers. These efforts are carried out through strengthening the quality management system, enhancing personnel competencies, optimizing business processes, and conducting periodic evaluations of service performance and customer satisfaction levels.

As a provider of supply chain solutions and support services for the electricity sector, the Company is committed to delivering reliable, responsive, and timely services. Feedback received from customers serves as the basis for evaluating and refining work processes and continuously improving service quality.

Through continuous improvement, the Company strives to maintain customer trust while strengthening long-term, mutually beneficial relationships with all customers.


+1.57
+0.85
+0.72
+0.44
+0.23
+0.14
+0.08





Laporan Keuangan

Financial Report

08

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2025/
31 DECEMBER 2025

PLN Suku Cadang

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini: *On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:*

Nama	Thommi Haposan	*Name*
Alamat Kantor	Recapital Building Lantai 3, Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160	*Office Address*
Alamat Domisili	Harapan Indah 2 Blok HM 7/28 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi	*Address of Domicile*
Telepon	08121050937	*Telephone*
Jabatan	Plt. Direktur Utama/Acting as *President Director*	*Position*
Nama	Andreas Arthur	*Name*
Alamat Kantor	Recapital Building Lantai 3, Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160	*Office Address*
Alamat Domisili	Jl. H Mugeni III Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur	*Address of Domicile*
Telepon	081317655550	*Telephone*
Jabatan	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan/ Acting as Business and *Finance Director*	*Position*

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

declare that:

1. *The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
   b. *The Company's financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *The Board of Directors is responsible for the Company's internal control system.*

The statement is made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta, 26 Juni/*June* 2026

METERAI TEMPEL 10000 6C0A0AQX067559839

Thommi Haposan	Andreas Arthur
Plt. Direktur Utama/	Plt. Direktur Bisnis dan Keuangan/
Acting as President Director	*Acting as Business and Finance Director*

Kantor Pusat
Recapital Building, 1st & 3rd floor
Jl. Adityawarman Kav. 55
South Jakarta 12160 - Indonesia

T (021) 7246184
I info@plnsc.co.id
E corsec@plnsc.co.id
W www.plnsc.co.id

Laporan/*Report* No. 01145/2.1457/AU.1/05/1789-3/1/VI/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901
F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
26 Juni/*June* 2026

Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1789

Prima Layanan Niaga Suku Cadang
01145/2 1457/AU 1/05/1789-3/1/VI/2026

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4	94,678	80,925	*Cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - bagian lancar	15	5,077	16,258	*Restricted cash and cash equivalents - current portion*
Piutang usaha	5	821,769	226,243	*Trade receivables*
Persediaan	6	104,351	165,967	*Inventories*
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	14a	83,804	83,484	*Prepaid taxes - current portion*
Biaya dibayar di muka dan uang muka	7	72,270	64,765	*Prepaid expenses and advances*
Jumlah aset lancar		**1,181,949**	**637,642**	***Total current asset***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lain-lain		267	74	*Other receivables*
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya - bagian tidak lancar	15	517	-	*Restricted cash and cash equivalents - non current portion*
Aset tetap		2,359	1,676	*Fixed assets*
Aset hak guna		4,295	3,024	*Right-of-use-assets*
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	14a	302,362	219,037	*Prepaid taxes - non current portion*
Aset pajak tangguhan	14d	2,446	1,595	*Deferred tax assets*
Aset tidak lancar lainnya		2,334	8,172	*Other non-current assets*
Jumlah aset tidak lancar		**314,580**	**233,578**	***Total non-current asset***
JUMLAH ASET		**1,496,529**	**871,220**	***TOTAL ASSETS***

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, except for par value and share data)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha	8	774,690	509,152	*Trade payables*
Utang lain-lain		1,494	1,306	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	9	59,189	15,209	*Accrued expenses*
Utang pajak				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	14b	7,477	-	*Corporate income taxes -*
- Pajak lain-lain	14b	862	1,757	*Other taxes -*
Liabilitas sewa - jangka pendek		2,040	1,989	*Lease liabilities - current portion*
Pinjaman dari pemegang saham	15	170,000	-	*Shareholder loan*
Liabilitas imbalan kerja - jangka pendek		12,224	6,948	*Employee benefit liabilities - short term*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**1,027,976**	**536,361**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas imbalan kerja - jangka panjang		132	103	*Employee benefit liabilities - long term*
Liabilitas sewa - jangka panjang		1,355	1,115	*Lease liabilities - non-current portion*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**1,487**	**1,218**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**1,029,463**	**537,579**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 600.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh sebesar 150.000 saham	10	150,000	150,000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share Authorised - 600,000 shares; Issued and fully paid 150,000 shares*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
- Dicadangkan	10	60,000	60,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		257,066	123,641	*Unappropriated -*
Jumlah ekuitas		**467,066**	**333,641**	***Total equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1,496,529**	**871,220**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
Pendapatan	11	1,977,357	1,687,699	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	12	(1,699,030)	(1,495,516)	*Cost of revenue*
Laba bruto		**278,327**	**192,183**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	13	(56,665)	(53,838)	*General and administrative expenses*
Penghasilan keuangan		276	773	*Finance income*
Beban keuangan		(14,216)	(20,455)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih		(29,937)	(17,375)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan		**177,785**	**101,288**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	14c	(44,369)	(35,193)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan		**133,416**	**66,095**	***Profit for the year***
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income for the year***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
- Pengukuran kembali imbalan pascakerja		12	72	*Remeasurements of post - employment benefit*
- Beban pajak terkait	14d	(3)	(16)	*Related income tax -*
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		9	56	*Other comprehensive income, net of tax*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**133,425**	**66,151**	***Total comprehensive income for the year***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah)

	Modal saham/ *Share capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
		Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum dicadangkan/ *Unappropriated*		
Saldo 1 Januari 2024	**150,000**	**60,000**	**57,490**	**267,490**	***Balance as at 1 January 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	66,095	66,095	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:					*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja, bersih setelah pajak	-	-	56	56	*Remeasurement of post-employment benefit, net of tax*
Saldo 31 Desember 2024	**150,000**	**60,000**	**123,641**	**333,641**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	133,416	133,416	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:					*Other comprehensive income:*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja, bersih setelah pajak	-	-	9	9	*Remeasurement of post-employment benefit, net of tax*
Saldo 31 Desember 2025	**150,000**	**60,000**	**257,066**	**467,066**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS **UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR** **PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025** (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)			***STATEMENT OF CASH FLOWS*** ***FOR THE YEAR ENDED*** ***31 DECEMBER 2025*** *(Expressed in millions of Rupiah)*
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	1,381,831	1,663,562	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(1,549,209)	(1,596,919)	*Cash paid to suppliers, employees and others*
Penerimaan bunga	276	773	*Interest received*
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai	50,727	-	*Receipts from Value-Added Tax restitution*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(37,562)	(35,422)	*Payments for corporate income tax*
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas operasi	**(153,937)**	**31,994**	***Net cash (used in)/generated from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penambahan aset tetap	(1,140)	(1,998)	*Acquisition of fixed assets*
Penarikan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	11,181	-	*Withdrawal of restricted cash and cash equivalents*
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(517)	(16,258)	*Placement of restricted cash and cash equivalents*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	**9,524**	**(18,256)**	***Net cash generated from/ (used in) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	270,000	150,000	*Receipt of shareholder loan*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(100,000)	(248,756)	*Repayment of shareholder loan*
Pembayaran bunga	(7,118)	(9,972)	*Repayment of interets*
Pembayaran liabilitas sewa	(4,716)	(2,697)	*Payment of lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**158,166**	**(111,425)**	***Net cash generated from/ (used in) financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**13,753**	**(97,687)**	***NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**80,925**	**178,615**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	-	(3)	*Effect of changes in foreign currency to cash and cash equivalent*
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**94,678**	**80,925**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 16 Juni 2017 dari Notaris Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0030040.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 18 Agustus 2023 dari Ni Putu Ayunita Waspuri, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama pemegang saham, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dikonfirmasi telah diterima melalui surat No. AHU-00001.AH.02.04.TAHUN 2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, perdagangan besar dan eceran terkait ketenagalistrikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis di bidang ketenagalistrikan, aktivitas pergudangan dan penunjang angkutan di bidang ketenagalistrikan.

Perusahaan berkedudukan di Recapital Building Lantai 3, Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160. Perusahaan beroperasi secara komersial pada tahun 2018.

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT PLN Nusantara Power, sedangkan entitas induk utama adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kedua entitas tersebut didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan mempunyai masing-masing 19 dan 19 orang karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (the "Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 5 dated 16 June 2017 of Notary Ni Putu Ayunita Waspuri, S.H., M.Kn in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decision Letter Number AHU-0030040.AH.01.01.Tahun 2017 dated 14 July 2017.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notarial Deed No. 14 dated 18 August 2023 of Ni Putu Ayunita Waspuri, SH., M.Kn. Notary in Jakarta, concerning the changes in the shareholder name, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and confirmed as received through letter No. AHU-00001.AH.02.04.TAHUN 2023 dated 18 August 2023.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage in electric power industry business, wholesale and retail related to electricity, professional, scientific and technical activities in the electricity sector, warehousing and transportation support activities in the electricity sector.

The Company is located in Recapital Building 3rd Floor, Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160. The Company commenced commercial operation in 2018.

The Company's immediate parent entity is PT PLN Nusantara Power, while its ultimate parent entity is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Both entities are incorporated and domiciled in Indonesia.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company had 19 and 19 employees, respectively (unaudited).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Susunan pengurus

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

b. Management

As at 31 December 2025 and 2024, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors was as follows:

2025		2024	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris utama	Tri Tjahjonoputro	Tri Tjahjonoputro	*President Commissioner*
Komisaris	Muhammad Ramadhansyah	Muhammad Ramadhansyah	*Commissioner*
Komisaris	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	Sapto Harjono Wahjoe Sedjati	*Commissioner*
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Muhammad Ramadhansyah	Muhammad Ramadhansyah	*Chairman*
Anggota	Made Pramudita	Made Pramudita	*Member*
Anggota	Weka Adhi Setiana	Weka Adhi Setiana	*Member*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Pelaksana Tugas Direktur Utama	Thommi Haposan	Thommi Haposan	*Acting President Director*
Pelaksana Tugas Direktur Enjiniring dan Layanan	Zeta Junisar Muda*)	Andy Adam	*Acting Engineering and Services Director*
Pelaksana Tugas Direktur Bisnis dan Keuangan	Andreas Arthur**)	Bahtiar Wibisana	*Acting Business and Finance Director*

*) Berdasarkan akta Notaris No.15 Tanggal 20 Februari 2025 dari Shahreza Annaz, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.
**) Berdasarkan akta Notaris No. 2 Tanggal 10 Maret 2025 dari Shahreza Annaz, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

*) *Based on the notarial deed No.15 dated 20 February 2025 of Shahreza Annaz, SH., M.Kn., Notary in Jakarta.*
**) *Based on the notarial deed No.2 dated 10 March 2025 of Shahreza Annaz, SH., M.Kn., Notary in Jakarta.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("FAS"), including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan revisi yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran"; dan
- PSAK No. 117: "Kontrak Asuransi"

Penerapan dari amendemen standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan;
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam; dan
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 119 dan Amendemen PSAK No. 119 "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***a. Basis of preparation of financial statements** (continued)*

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to SFAS and IFAS

The implementation of the following new standards, amendments and revision which are effective from 1 January 2025 did not result in changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for current or prior financial years:

- *Amendment of SFAS No. 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"; and*
- *SFAS No. 117 "Insurance Contracts"*

The adoption of these amended standards, which are effective beginning 1 January 2026 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material impact on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *Amendment to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" regarding classification and measurement of financial instruments;*
- *Amendment to SFAS No. 109, "Financial Instruments" and SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" regarding Contracts Referencing Nature-dependent Electricity; and*
- *Revision to SFAS No. 338 "Business Combinations of Entities Under Common Control".*

The new standard and amendments to accounting standards issued, but only effective for the financial year beginning 1 January 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- *SFAS No. 119 and amendments to SFAS No. 119 "Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures".*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini:

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan interpretasi pada laporan keuangan Perusahaan.

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan, diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs konversi yang digunakan Perusahaan untuk mata uang Dolar Amerika Serikat ("AS$") masing-masing adalah sebesar Rp16.720 dan Rp16.157.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***b. Changes to SFAS and IFAS** (continued)*

The adoption of the new standard is effective beginning 1 January 2027. Retrospective application is required, and the comparative information for the financial year ending 31 December 2026 will be restated in accordance with this standard:

- *SFAS No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".*

As at the date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Company's financial statements.

c. Foreign currency transactions

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency and presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions. As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such a date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

The conversion rates used by the Company as at 31 December 2025 and 2024 for United States Dollar ("US$") are Rp16,720 and Rp16,157, respectively.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah Indonesia, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

e. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:
- aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

d. Transactions with related parties

The Company has entered into transactions with certain related parties as defined under SFAS No. 224, "Related Party Disclosures".

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to the Government of the Republic of Indonesia, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

e. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Company classifies its financial assets into the following categories:
- *financial assets measured at amortised cost; and*
- *financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI").*

The classification depends on the Company's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest ("SPPI").

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang bukan termasuk dimiliki untuk diperdagangkan, tergantung apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

e. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment measured at FVOCI.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company had only financial assets measured at amortised cost.

Financial assets measured at amortised cost

Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent SPPI are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

iii. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE"). Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain, dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Penelaahan KKE termasuk asumsi mengenal risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri KKE-nya.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

h. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunannya

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas diklasifikasikan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar dan/atau aset tidak lancar yaitu "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya".

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

f. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses ("ECL"). To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition

The Company applies the "simplified approach" to measuring ECL which uses a lifetime ECL allowance or all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components. The ECL reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the ECL, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of ECL.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

h. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which cannot be used freely are classified and presented in the statements of financial position as current asset and/or noncurrent asset under "restricted cash and cash equivalents".

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas penjualan suku cadang dan jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha normal. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan keuangan.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika efek pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan cadangan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha pada laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi terhadap item baris yang sama.

Lihat Catatan 2f untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Perusahaan.

j. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode perpetual.

l. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for sales of spare parts and services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less. Receivables are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets in the financial statement.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less the loss allowance.

The impairment losses on receivables are presented as part of operating expenses in profit or loss. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the same line item.

See Note 2f for further information regarding the policy on the determination of the amount for loss allowance on the Company's receivables.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

k. Inventories

Inventories are stated at cost or net realisable value, whichever is lower. Cost is determined using perpetual method.

l. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life, for example goodwill, are not subject to amortisation but tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill* diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

m. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diterima dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

n. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

l. Impairment of non-financial assets *(continued)*

For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash generating unit).

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversal of impairment losses for assets other than goodwill is recognised if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

m. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

n. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Company will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Provisi (lanjutan)

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

o. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi, dengan selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

Pinjaman dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali di akhir periode pelaporan, Perusahaan memiliki hak untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan laporan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

***n. Provisions** (continued)*

The provision are measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liabilities. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as an interest expense.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received, and the amount of the receivable can be measured reliably.

o. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost, with any difference between the proceeds (net of transaction cost) and the redemption value recognised in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facilities will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be draw down, the fee is capitalised as a prepayment for financing costs and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, canceled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Borrowings are classified as current liabilities unless, at the end of the reporting period, the Company has a right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas, dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjualan material

Penjualan dari material beserta jasa instalasinya diakui pada setiap penjualan individu ketika kendali atas barang atau jasa tersebut telah beralih dan diterima oleh pelanggan. Pendapatan ini diakui pada titik tertentu.

Pendapatan atas jasa

Pendapatan jasa diakui ketika jasa telah diterima oleh pelanggan. Pendapatan ini diakui sepanjang waktu.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

r. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION** (continued)*

p. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, and incremental costs directly attributable to the issuance of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

q. Revenue and expense recognition

Revenue from sales of material

Sales of material including its installation services are recognised on each individual sale when control over the goods or services transferred and been accepted by the customers. This revenue is recognised at a point in time.

Revenue from services

Revenue from services are recognised when services have been received by the customer. This revenue is recognised over the time.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

r. Income tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (dan peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

r. Income tax *(continued)*

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using the tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and that are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Company has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or financial position of the Company as reported in future years.

3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING DAN ESTIMASI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi akuntansi yang penting

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama 12 bulan ke depan dipaparkan di bawah ini.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya.

Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan.

Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical accounting estimates and assumptions

The Company makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 12 months are addressed below.

Income taxes

The calculation of income tax expense for the Company requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). The resolution of tax positions taken by the Company, through negotiations with the relevant tax authorities, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome.

Where the outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognized only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits.

The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2025	2024	
Kas	-	39	*Cash on hand*
Kas di bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")*
Rupiah	85,311	79,810	*Rupiah*
AS$	72	68	*US$*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
Rupiah	5,818	614	*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")			*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")*
Rupiah	3,401	318	*Rupiah*
Pihak ketiga:			*Third party:*
PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank")			*PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank")*
Rupiah	76	76	*Rupiah*
Jumlah kas di bank	**94,678**	**80,886**	***Total cash in banks***
Jumlah	**94,678**	**80,925**	***Total***

Lihat Catatan 15 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 15 for information on the details of transactions and balances with related parties.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi	817,665	213,180	*Related parties*
Pihak ketiga	4,104	13,063	*Third parties*
Jumlah	**821,769**	**226,243**	***Total***

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of the trade receivables is as follows:

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	821,768	161,812	*Not yet due*
Lewat jatuh tempo:			*Past due:*
- 1 - 30 hari	-	21,259	*1 - 30 days* -
- 31 - 90 hari	-	29,256	*31 - 90 days* -
- 91 - 180 hari	-	7,966	*91 - 180 days* -
- 181 - 365 hari	-	4,870	*181 to 365 days* -
- Lebih dari 365 hari	1	1,080	*More than 365 days* -
Jumlah	**821,769**	**226,243**	***Total***

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *TRADE RECEIVABLES (continued)*

Berdasarkan penilaian penyisihan KKE, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan atas KKE tidak material, sehingga penyisihan atas KKE dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the assessment of allowance for ECL, the management of the Company is of the opinion that the provision for ECL on receivables is not material, therefore, a provision for ECL is considered not necessary as at 31 December 2025 and 2024.

Lihat Catatan 15 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 15 for information on the details of transactions and balances with related parties.

6. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

	2025	2024	
Suku cadang	104,351	165,967	*Spare parts*

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The management is of the opinion that there is no decline in value of inventories as at 31 December 2025 and 2024.

7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA / *PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	2025	2024	
Uang muka untuk pembelian suku cadang	71,650	64,259	*Advances for purchase of spare parts*
Lain-lain	620	506	*Others*
Jumlah	**72,270**	**64,765**	***Total***

8. UTANG USAHA / *TRADE PAYABLES*

	2025	2024	
Pihak ketiga	774,690	509,152	*Third parties*

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *ACCRUED EXPENSES*

	2025	2024	
Pemasok dan konsultan	52,091	15,209	*Suppliers and consultants*
Bunga atas pinjaman dari pemegang saham (Catatan 15)	7,098	-	*Interests of loan from shareholder (Note 15)*
Jumlah	**59,189**	**15,209**	***Total***

Lihat Catatan 15 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 15 for information on the details of transactions and balances with related parties.

10. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA / *CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS*

	2025 dan/*and* 2024			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah modal disetor/ *Total paid-up capital***	***Shareholders***
PT PLN Nusantara Power ("PLN NP")	76,500	51%	76,500	*PT PLN Nusantara Power ("PLN NP")*
PT PLN Indonesia Power ("PLN IP")	73,500	49%	73,500	*PT PLN Indonesia Power ("PLN IP")*
Jumlah	**150,000**	**100%**	**150,000**	***Total***

10. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah membentuk cadangan wajib dari saldo laba ditahan sebesar Rp60.000.

10. CAPITAL STOCK AND RETAINED EARNINGS *(continued)*

Pursuant to Limited Liability Company Law, the Company is required to establish a statutory reserve amounting to at least 20% of the Company's subscribed and paid-up capital.

As at 31 December 2025 and 2024, the Company has established a statutory reserve from retained earnings amounting to Rp60,000.

11. PENDAPATAN / ***11. REVENUE***

	2025	2024	
Penjualan material			*Sales of materials*
Pihak berelasi	1,850,047	1,436,584	*Related parties*
Pihak ketiga	47,513	194,993	*Third parties*
Jumlah pendapatan dari penjualan material	**1,897,560**	**1,631,577**	***Total revenue from sales of materials***
Pendapatan jasa			*Revenue from services*
Pihak berelasi	79,512	40,271	*Related parties*
Pihak ketiga	285	15,851	*Third parties*
Jumlah pendapatan jasa	**79,797**	**56,122**	***Total revenue from services***
Jumlah	**1,977,357**	**1,687,699**	***Total***

Lihat Catatan 15 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Refer to Note 15 for information on the details of transactions and balances with related parties.

12. BEBAN POKOK PENDAPATAN / ***12. COST OF REVENUE***

	2025	2024	
Pembelian suku cadang	1,480,812	1,344,268	*Purchase of spare parts*
Jasa profesional dan konsultasi	97,054	102,928	*Professional and consulting fees*
Biaya *forwarding*	80,327	33,607	*Forwarding cost*
Lain-lain	40,837	14,713	*Others*
Jumlah	**1,699,030**	**1,495,516**	***Total***

13. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *13. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	32,270	26,914	*Salaries and allowances*
Perbaikan dan pemeliharaan	12,995	10,058	*Repairs and maintenance*
Penyusutan	3,975	2,723	*Depreciation*
Lain-lain	7,425	14,143	*Others*
Jumlah	**56,665**	**53,838**	***Total***

14. PERPAJAKAN / *14. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak penghasilan badan ("PPh Badan"):			*Corporate income tax ("CIT"):*
- 2024	10,547	10,547	*2024 -*
- 2023	5,643	5,827	*2023 -*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	367,086	283,264	*Value-Added Taxes ("VAT")*
Lainnya	2,890	2,883	*Others*
Jumlah	**386,166**	**302,521**	***Total***
Dikurangi: bagian lancar	**(83,804)**	**(83,484)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**302,362**	**219,037**	***Non-current portion***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2025	2024	
PPh Badan	7,477	-	*CIT*
Lainnya	862	1,757	*Others*
Jumlah	**8,339**	**1,757**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	2025	2024	
Beban pajak kini	45,039	24,875	*Current tax expense*
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya	184	10,433	*Prior year tax adjustments*
Manfaat pajak tangguhan	(854)	(115)	*Deferred tax benefit*
Beban pajak penghasilan	**44,369**	**35,193**	***Income tax expense***

14. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***14. TAXATION*** *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expense*** *(continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis atas laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the income tax expense and the theoretical tax amount on profit before income tax is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak penghasilan	177,785	101,288	*Profit before income tax*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 22%	39,113	22,283	*Tax expenses at applicable tax rate at 22%*
Penghasilan keuangan yang telah dikenakan pajak final	(61)	(170)	*Finance income subject to final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	5,133	2,647	*Non-deductible expenses*
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya	184	10,433	*Prior year tax adjustments*
Beban pajak penghasilan	**44,369**	**35,193**	***Income tax expense***

Pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlahnya dapat disesuaikan saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when Annual Tax Return is filed to the Tax Office.

d. Pajak tangguhan / ***d. Deferred tax***

Perubahan aset pajak tangguhan Perusahaan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movements of the Company's deferred tax assets during the years ended 31 December 2025 and 2024 are as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
2025					***2025***
Beban imbalan karyawan lainnya	1,529	1,161	-	2,690	*Other short-term liabilities*
Imbalan pascakerja	22	9	(3)	28	*Post-employment benefits*
Aset hak-guna	(665)	(280)	-	(945)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	683	64	-	747	*Lease liabilities*
Aset tetap	26	(100)	-	(74)	*Fixed assets*
Jumlah	**1,595**	**854**	**(3)**	**2,446**	***Deferred tax assets***
2024					***2024***
Beban imbalan karyawan lainnya	1,392	137	-	1,529	*Other short-term liabilities*
Imbalan pascakerja	30	8	(16)	22	*Post-employment benefits*
Aset hak-guna	(431)	(234)	-	(665)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	488	195	-	683	*Lease liabilities*
Aset tetap	17	9	-	26	*Fixed assets*
Jumlah	**1,496**	**115**	**(16)**	**1,595**	***Deferred tax assets***

Manajemen berpendapat aset pajak tangguhan dapat dipulihkan sesuai dengan periode realisasi yang diekspektasikan.

Management believes that the deferred tax assets can be recovered within the expected realisation period.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Audit pajak

PPh Badan 2023

Pada tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ("SKPKPP") atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2023 sebesar Rp5.643, yang sebelumnya dilaporkan sebagai lebih bayar sebesar Rp5.827. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan belum menerima kas dari restitusi pajak tersebut.

PPN

Pada tanggal 23 September 2024, Perusahaan menerima SKPKPP atas pengembalian kelebihan pembayaran PPN untuk tahun pajak 2021-2022 sebesar Rp52.764, yang sebelumnya dilaporkan sebagai lebih bayar sebesar Rp55.072. Kas dari restitusi pajak tersebut sebesar Rp50.727, setelah dipotong dengan liabilitas pajak lainnya sebesar Rp2.037, telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 18 Februari 2025.

Pada tanggal 24 September 2025, Perusahaan menerima SKPKPP atas pengembalian kelebihan pembayaran PPN untuk periode pajak Maret 2023 sebesar Rp12.884, yang sebelumnya dilaporkan sebagai lebih bayar sebesar Rp12.898. Kas dari restitusi PPN tersebut sebesar Rp12.443, setelah dipotong dengan liabilitas pajak lainnya sebesar Rp441, telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 23 Oktober 2025.

Pada tanggal 25 November dan 23 Desember 2025, Perusahaan menerima SKPKPP atas pengembalian kelebihan pembayaran PPN untuk periode pajak Juni, September dan Desember 2023 sebesar Rp77.924, yang sebelumnya dilaporkan sebagai lebih bayar sebesar Rp78.161. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan belum menerima kas dari restitusi PPN tersebut.

f. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

***14. TAXATION** (continued)*

e. Tax audits

CIT 2023

On 24 December 2025, the Company received a Tax Overpayment Refund Decision Letter ("SKPKPP") concerning the refund of a tax overpayment for the 2023 fiscal year amounting to Rp5,643, which was previously reported as an overpayment amounting to Rp5,827. As of 31 December 2025, the Company had not received the cash from the tax restitution.

VAT

On 23 September 2024, the Company received a SKPKPP concerning the refund of a VAT overpayment for the 2021-2022 fiscal year amounting to Rp52,764, which was previously reported as an overpayment amounting to Rp55,072. Cash from the VAT refund amounting to Rp50,727, after offset with other tax liabilities amounting to Rp2,037, has been received by the Company on 18 February 2025.

On 23 September 2025, the Company received a SKPKPP concerning the refund of a VAT overpayment for the March 2023 fiscal period amounting to Rp12,884, which was previously reported as an overpayment amounting to Rp12,898. Cash from the VAT refund amounting to Rp12,443, after offset with other tax liabilities amounting to Rp441, has been received by the Company on 23 October 2025.

On 25 November and 23 December 2025, the Company received a SKPKPP concerning the refund of a VAT overpayment for the June, September and December 2023 fiscal period amounting to Rp77,924, which was previously reported as an overpayment amounting to Rp78,161. As of 31 December 2025, the Company had not received the cash from the VAT restitution.

f. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Company which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self-assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. **Aturan Model Pilar Dua *Organisation for Economic Co-operation and Development* ("OECD")**

Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") telah diundangkan di Indonesia, yurisdiksi dimana tempat Perusahaan didirikan, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Perusahaan berada dalam cakupan ketentuan model OECD Pilar Dua dan menerapkan pengecualian untuk pengakuan serta pengungkapan informasi terkait aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berhubungan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025.

Entitas induk utama ("UPE") dari Perusahaan berada dalam lingkup aturan model OECD Pilar Dua dan telah menerapkan pengecualian untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua mulai 1 Januari 2025. Undang-undang Pilar Dua telah diundangkan atau hampir diundangkan di beberapa yurisdiksi tempat UPE beroperasi. Undang-undang tersebut mulai berlaku untuk tahun keuangan Perusahaan yang berakhir setelah 31 Desember 2024. UPE tunduk pada undangundang yang telah diundangkan atau hampir diundangkan tersebut dan telah melakukan penilaian terhadap potensi eksposurnya terhadap pajak penghasilan Pilar Dua.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di seluruh yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan pajak tambahan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025.

14. TAXATION *(continued)*

g. Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two Model Rules

The Ministry of Finance ("MoF") Regulation No. PMK-136 Tahun 2024 ("PMK-136") was enacted in Indonesia, the jurisdiction in which the Company is incorporated, and will come into effect from 1 January 2025.

The Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and applied the exception to recognizing and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025.

The ultimate parent entity ("UPE") of the Company is within the scope of the OECD Pillar Two model rules and has applied the exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities relating to Pillar Two income taxes from 1 January 2025. Pillar Two legislation has been enacted or substantially enacted in certain jurisdictions in which the UPE operates. The legislation has become effective for the Company's financial year ended after 31 December 2024. The UPE is subject to the enacted or substantially enacted legislation and has conducted an assessment of its potential exposure to Pillar Two income taxes.

Based on the assessment, the effective tax rates in all jurisdictions in which the Company operates are above 15%. Therefore, there was no top-up tax required for the year ended 31 December 2025.

15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *15. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan berelasi / *Nature of related parties*

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: / *Below is the list of related parties with which the Company has transactions:*

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationships*	Sifat transaksi/ *Nature of transactions*
Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas dan kas dibatasi penggunannya/ *Placement of cash and cash equivalents and restricted cash and cash equivalents*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas/ *Placement of cash and cash equivalents*
PLN NP	Pemegang saham/ *Shareholder*	Piutang usaha, utang lain-lain, penyertaan modal, pendapatan, pinjaman dari pemegang saham, beban yang masih harus dibayar, dan beban keuangan/ *Trade receivables, other payables, paid in capital and revenue, shareholder loan, accrued expense, and finance cost*
PLN IP	Pemegang saham/ *Shareholder*	Piutang usaha, utang lain-lain, penyertaan modal dan pendapatan/ *Trade receivables, other payables, paid in capital and revenue*
PLN	Pemegang saham utama Perusahaan/ *Ultimate shareholder of the Company*	Piutang usaha dan pendapatan/ *Trade receivables and revenue*
PT PLN Nusantara Power Services ("PLN NPS")	Entitas dalam sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/ *Trade receivables and revenue*
PT PLN Nusantara Power Construction ("PLN NPC")	Entitas dalam sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan/ *Trade receivables and revenue*
PT Bahtera Adhiguna ("BAG")	Entitas dalam sepengendali/ *Entity under common control*	.Piutang usaha dan pendapatan/ *Trade receivables and revenue*
PT Haleyora Power ("Haleyora")	Entitas dalam sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang usaha dan pendapatan *Trade receivables and revenue*
PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan ("PUSHARLIS")	Pihak berelasi lainnya/ *Other related party*	Piutang usaha dan pendapatan *Trade receivables and revenue*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi / *Balances and transactions with related parties*

	2025	2024	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunannya			***Restricted cash and cash equivalents***
Mandiri	5,594	16,258	*Mandiri*
Piutang usaha			***Trade receivables***
PLN NP	427,530	140,991	*PLN NP*
PLN NPS	337,103	17,152	*PLN NPS*
PLN IP	48,338	43,930	*PLN IP*
PLN NPC	3,650	-	*PLN NPC*
PUSHARLIS	866	-	*PUSHARLIS*
BAG	178	-	*BAG*
PLN	-	5,726	*PLN*
Haleyora	-	5,381	*Haleyora*
Jumlah	**817,665**	**213,180**	***Total***
Utang lain-lain			***Other payables***
PLN IP	892	683	*PLN IP*
PLN NP	58	74	*PLN NP*
Jumlah	**950**	**757**	***Total***

15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

15. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(lanjutan)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Balances and transactions with related parties *(continued)*

	2025	2024	
Pinjaman dari pemegang saham			***Shareholder loan***
PLN NP	170,000	-	*PLN NP*
Beban yang masih harus dibayar			***Accrued expenses***
PLN NP	7,098	-	*PLN NP*
Pendapatan			***Revenues***
PLN NP	1,210,192	1,118,097	*PLN NP*
PLN NPS	425,345	35,120	*PLN NPS*
PLN IP	183,155	223,161	*PLN IP*
PLN PUSHARLIS	62,843	65,355	*PLN PUSHARLIS*
PLN	43,188	29,972	*PLN*
PLN NPC	3,650	-	*PLN NPC*
BAG	1,186	-	*BAG*
Haleyora	-	5,150	*Haleyora*
Jumlah	**1,929,559**	**1,476,855**	***Total***
Beban keuangan			***Finance costs***
PLN NP	7,098	9,875	*PLN NP*

Pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 1 Maret 2024, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PLN NP untuk kebutuhan operasional dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp150.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp150.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah membayar seluruh pinjaman dari fasilitas tersebut. Beban bunga untuk tahun 2024 sebesar Rp9.875.

Pada tanggal 30 April 2025, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PLN NP untuk kebutuhan operasional dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2026. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp270.000.

Selama tahun 2025, Perusahaan telah membayar pinjaman dari fasilitas tersebut sebesar Rp100.000.

Shareholder loan

On 1 March 2024, the Company obtained a loan from PLN NP for operational with a maximum facility of Rp150,000 with a fixed interest rate of 7.25% per annum. The loan will mature on 31 December 2024. The Company has made drawdowns amounting to Rp150,000.

On 31 December 2024, the Company fully repaid all loans from the facility. In 2024, the company recorded interest expenses amounting to Rp9,875.

On 30 April 2025, the Company obtained a loan from PLN NP for operational with a maximum facility of Rp350,000 with a fixed interest rate of 6.75% per annum. The loan will mature on 30 April 2026. The Company has made drawdowns amounting to Rp270,000.

During 2025, the Company has repaid loans from the said facility amounting to Rp100,000.

Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.867 dan Rp7.144 yang merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Key management compensation

Total remuneration of the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2025 and 2024 amounted to Rp6,867 and Rp7,144, respectively, which represent short-term employee benefits.

15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi manajemen kunci (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima kompensasi lain seperti rencana opsi saham manajemen.

15. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Key management compensation *(continued)*

The board of Commissioners and Directors do not receive any other compensation such as management stock options.

16. PERJANJIAN DAN PERIKATAN SIGNIFIKAN

Fasilitas bank

Perusahaan menggunakan fasilitas perbankan dalam bentuk *Non-Cash Loan* ("NCL") yang dimiliki oleh PLN untuk pembukaan *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN").

Pada tanggal 31 Desember 2025, PLN menyetujui penggunaan fasilitas NCL oleh Perusahaan di Mandiri dan BRI sebesar Rp460.092 (2024: Rp174.405).

16. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

Bank facilities

The Company utilised banking facilities in the form of Non-Cash Loans ("NCL") provided by PLN for opening Letters of Credit (L/C) and/or Domestic Documentary Credits ("SKBDN").

As at 31 December 2025, PLN approved the use of NCL facilities by the Company at Mandiri and BRI amounting to Rp460,092 (2024: Rp174,405).

17. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaanya, piutang usaha dan piutang lain-lain sebesar Rp922.308 sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2024: Rp323.500).

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dari pemegang saham dan liabilitas sewa sebesar Rp1.008.768 sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2024: Rp528.771).

17. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Company classified its cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, trade receivables and other receivables amounting to Rp922,308 as financial assets measured at amortised cost (2024: Rp323,500).

As at 31 December 2025, the Company classified its trade payables, other payables, accrued expenses, shareholder loan and lease liabilities amounting to Rp1,008,768 as financial liabilities measured at amortised cost (2024: Rp528,771).

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

I. Faktor risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

I. Financial risk factors

The objectives and policies of the Company's financial risk management are to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of their business, while managing their exposure to market risks (including foreign exchange risks and interest rate risks), credit risks and liquidity risks. The Company operates within defined policies approved by the Board of Directors.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

Dalam melaksanakan aktivitas manajemen risiko, Perusahaan telah memiliki panduan dalam bentuk Pedoman Umum Manajemen Risiko. Pedoman ini mengatur keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko keuangan.

Risiko keuangan utama Perusahaan adalah pada risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisasi pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar yang timbul dari transaksi dengan pelanggan maupun pemasok yang didenominasi dalam mata uang asing, sehingga Perusahaan terekspos terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Perusahaan untuk mengelola eksposur mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Pada tanggal 31 Desember 2025, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan variabel lain konstan, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi sebesar Rp5.004 (2024: Rp7.825), terutama diakibatkan kerugian/ keuntungan translasi kas dan setara kas dan utang usaha yang berdenominasi mata uang AS$.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Persusahaan terutama timbul dari pinjaman. Risiko tingkat suku bunga dari kas di bank dan kas dan setara kas yang dijaminkan dianggap tidak signifikan.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

I. Financial risk factors (continued)

In performing the risk management, the Company has established guidance in the form of a Risk Management General Manual. This manual provides guidance to manage the harmonisation between the business's operational function and financial risk management.

The main financial risks of the Company are market risks (including foreign exchange risks and interest rate risks) credit risks and liquidity risks. The management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial risks on the Company's financial performance.

The summary of the financial risk management policies is as follows:

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Company has foreign currency exposures arising from transactions with customers and suppliers which are denominated in foreign exchange, therefore the Company is exposed to exchange rate fluctuations.

The Company's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

As at 31 December 2025, if the Rupiah had weakened/strengthened by 10% against the US Dollar with all other variables held constant, post-tax profit for the year would have been lower or higher by Rp5,004 (2024: Rp7,825), mainly as a result of foreign exchange losses/gains on translation cash and cash equivalents and trade payables denominated in US$.

(ii) Interest rate risk

The Company's interest rate risk primarily arises from its borrowings. The interest rate risk from cash in banks and restricted cash and cash equivalents is not considered significant.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh pinjaman Perusahaan diterbitkan dengan tingkat bunga tetap, sehingga mengekspos Perusahaan dengan risiko nilai wajar suku bunga. Perusahaan tidak mempunyai pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, perubahan tingkat suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2025, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp922.308 (2024: Rp323.461). Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, kas yang dibatasi penggunannya, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Semua rekening bank, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan cadangan fasilitas pinjaman dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

***18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***I. Financial risk factors** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

***(ii) Interest rate risk** (continued)*

As at 31 December 2025 and 2024, all of the Company's borrowings were issued at fixed rates, and therefore, expose the Company to fair value interest rate risk. The Company does not account for any fixed rate borrowings at fair value through statement of profit or loss. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would not affect statement of profit or loss.

b. Credit risk

As at 31 December 2025, the total maximum exposure from credit risk was Rp922,308 (2024: Rp323,461). Credit risk arises from cash in banks, restricted cash, trade receivables and other receivables.

All of the cash in banks, restricted cash and cash equivalents are placed in reputable local banks.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, have an impairment loss assigned to them on an individual basis.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk that the Company will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Directors, who have built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Company's funding and liquidity management requirements. The Company manages its liquidity risk by maintaining adequate cash and reserve borrowing facilities by continuously monitoring the forecast and actual cash flows and by matching the maturity profiles of financial liabilities.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

I. Faktor risiko keuangan (lanjutan) / *I. Financial risk factors (continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan) / *c. Liquidity risk (continued)*

Tabel dibawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

	Sampai dengan 1 tahun/ *Up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
2025				***2025***
Utang usaha	774,690	-	774,690	*Trade payables*
Utang lain-lain	1,494	-	1,494	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	59,189	-	59,189	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	2,244	1,707	3,951	*Lease liabilities*
Jumlah	**837,617**	**1,707**	**839,324**	***Total***
2024				***2024***
Utang usaha	509,152	-	509,152	*Trade payables*
Utang lain-lain	1,306	-	1,306	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	15,209	-	15,209	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	1,989	1,787	3,776	*Lease liabilities*
Jumlah	**527,656**	**1,787**	**529,443**	***Total***

II. Manajemen risiko permodalan / *II. Capital risk management*

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of capital adequacy ratio. The Company's capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

The Board of Directors of the Company periodically reviews the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Perusahaan dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The Company aims to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Company's policy in seeking funding will always take into account the financial risks that may arise in the future.

III. Estimasi nilai wajar / *III. Fair value estimation*

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya diperkirakan sama dengan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Management is of the opinion that the carrying value of its financial assets and financial liabilities approximates the fair value of the financial assets and liabilities as at 31 December 2025 and 2024.

19. INFORMASI ARUS KAS / *19. CASH FLOW INFORMATION*

a. Transaksi non-kas terkait aktivitas investasi / *a. Non-cash transactions arising from investing activities*

	2025	2024	
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	4,790	3,356	*Acquisition of right of asset through lease liabilities*

b. Rekonsiliasi utang bersih / *b. Net debt reconciliation*

	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*		Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash transactions changes*			
	1 Januari/ *January* 2025	Arus kas/ *Cash flows*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	31 Desember/ *December* 2025	
Pinjaman dari pemegang saham	-	170,000	-	-	170,000	*Shareholder loan*
Liabilitas sewa	3,104	(4,716)	4,790	217	3,395	*Lease liabilities*

	Arus kas dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows from financing activities*		Perubahan transaksi non-kas/ *Non-cash transactions changes*			
	1 Januari/ *January* 2024	Arus kas/ *Cash flows*	Sewa baru/ *New leases*	Perubahan lainnya/ *Other changes*	31 Desember/ *December* 2024	
Pinjaman dari pemegang saham	98,756	(98,756)	-	-	-	*Shareholder loan*
Liabilitas sewa	2,215	(2,583)	3,356	116	3,104	*Lease liabilities*

20. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN / *20. EVENT AFTER REPORTING PERIOD*

Berdasarkan akta No. 09 tanggal 13 Maret 2026 oleh Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perusahaan melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris sehingga susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Based on deed No. 09 dated 13 March 2026, by Notary Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, the company has made changes to the composition of the Board of Commissioners, so that the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Pelaksana Tugas Komisaris Utama	Suparyanto	*Acting President Commissioner*
Pelaksana Tuas Komisaris	Hariyanto	*Acting Commissioner*
Pelaksana Tugas Komisaris	Abdan Hanif Satria Budiman	*Acting Commissioner*

21. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / *21. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS*

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2026.

The preparation and fair presentation of the financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 26 June 2026.

PT Prima Layanan Niaga (PLNSC)
Gedung Recapital Lt. 1 - 3
Jl. Adityawarman No.55 , RT.3/RW.2, Melawai,
Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.

T. +62 21-7246184
E. corsec@plnsc.co.id
W. www.plnsc.co.id

BUILD A **STRONG FOUNDATION**

MEMBANGUN **PONDASI** YANG KOKOH



2025

Laporan Terintegrasi
Integrated Report

Danantara Indonesia

PLN Suku Cadang

BUILD A STRONG FOUNDATION

MEMBANGUN **PONDASI** YANG KOKOH

Laporan Terintegrasi 2025
Integrated Report 2025